RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa dalam hal Rencana Kerja Pemerintah belum ditetapkan sampai dengan bulan Juni Tahun 2021, Gubernur dapat menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi paling lambat pada akhir bulan Juni Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas pokok melaksanakan perurmusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat isi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Teknokratik dan mengacu pada RKP.

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berisi program dan kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

RKPD merupakan:

1. Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Provinsi untuk periode Tahun 2022, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022; dan
2. Penjabaran dari RPJM Daerah Provinsi dan mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah Provinsi, prioritas pembangunan Daerah Provinsi, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui Musrenbang.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

(1) Maksud penetapan RKPD yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi;

b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022; dan

c. acuan bagi Pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2022.

(2) Tujuan penetapan RKPD adalah untuk:

a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah Provinsi;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan;

c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan

e. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efesien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB II
ISI DAN URAIAN RKPD
Pasal 4

(1) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan;

b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah Povinsi;

c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah Provinsi;

d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2022;

e. BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;

f. BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Provinsi Tahun 2022;

g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi; dan

h. BAB VIII Penutup.

(2) Isi dan uraian dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, sebagaimana bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 38

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 38 Tahun 2021 Nomor 38

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 38 Tahun 2021
Tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD Provinsi Jawa Barat 2022 merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Selanjutnya, dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 30 Juni 2021

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum I-8
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-13
1.4 Maksud dan Tujuan I-15
1.5 Sistematika I-16
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II-1**
2.1 Kondisi Umum Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-13
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-37
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-101
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai Tahun 2020 ..... II-114
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2020 ..... II-114
2.3 Kondisi Masa Pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat II-162
2.3.1 Kondisi Kesehatan Masa Pandemi COVID-19 ..... II-162
2.3.2 Kondisi Ekonomi Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 ..... II-163
2.3.3 Kondisi Sosial Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 ..... II-164
2.3.4 Kondisi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 ..... II-165
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah II-166
2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah II-166
2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II-166
2.5 Inovasi II-190
2.5.1 Inovasi Perencanaan Daerah II-191

2.5.2 Inovasi Pembangunan Daerah II-194

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020, Awal Tahun 2021 dan Prediksi Tahun 2022 .....III-3

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022 .....III-21

3.1.3 Strategi Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah III-26

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-26

3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-28

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-32

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-35

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-42

3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah III-46

3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) III-46

3.3.2 APBD Kabupaten/Kota III-46

3.3.3 Dana Masyarakat/Umat III-47

3.3.4 *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)) III-47

3.3.5 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) III-48

3.3.6 Hibah III-49

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022 .....IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-7

4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022 .....IV-7

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 .....IV-11

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022 .....IV-27

4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 .....IV-27

4.2.2 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-31

4.2.3 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.....IV-37
4.2.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.....IV-62
4.2.5 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022.....IV-118
4.3 Kebijakan Pembangunan.....IV-171
4.3.1 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang.....IV-174
4.3.2 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Ruang....IV-177
4.4 Kerja Sama Pembangunan Wilayah Perbatasan.....IV-180
4.4.1 Perbatasan Jawa Barat dan DKI Jakarta.....IV-180
4.4.2 Perbatasan Jawa Barat dan Banten.....IV-182
4.4.3 Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah.....IV-183
4.5 Pembangunan Rendah Karbon.....IV-184
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA ...V-1
5.1 Indikator Makro Kabupaten/Kota.....V-1
5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....V-1
5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).....V-4
5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....V-7
5.1.4 Persentase Penduduk Miskin.....V-10
5.1.5 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten dan Kota.....V-14
5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota.....V-18
5.2.1 Kebijakan Pembangunan Berbasis Wilayah Pengembangan.....V-18
5.2.2 Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Berbasis Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi.....V-27
5.3 Sinergitas Pembangunan Daerah.....V-47
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022 .....VI-1
6.1 Rencana Alternatif Pendanaan Pembangunan Tahun 2022 ....VI-1
6.1.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2022.....VI-1
6.2 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2022.....VI-7
6.2.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.....VI-29

6.2.2 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) VI-34

6.3 Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 .....VI-37

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH . VII-1

7.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU)..... VII-3

7.2 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci (IKK) VII-4

7.2.1 Indikator Kinerja Kunci Tingkat Daerah (*Impact*). VII-5

7.2.2 Indikator Kinerja Kunci Tingkat Hasil (*Outcome)* VII-21

BAB VIII P E N U T U P..... VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 ..... II-1
Tabel 2.2 Ketersediaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat II-4
Tabel 2.3 Cekungan Air Tanah (CAT) di Wilayah Jawa Barat II-5
Tabel 2.4 Luar Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 ..... II-6
Tabel 2.5 Penduduk Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-11
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 ..... II-12
Tabel 2.7 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... II-13
Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2020 (Triliun Rupiah) II-15
Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Tahun 2019 -2020 (Triliun Rupiah) II-17
Tabel 2.10 Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Antar Provinsi II-17
Tabel 2.11 PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 (Juta Rupiah) II-20
Tabel 2.12 Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) Antar Provinsi di Pulau Jawa II-20
Tabel 2.13 Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2020 ..... II-22
Tabel 2.14 IPM beserta Komponennya Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-25
Tabel 2.15 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2020 (Tahun) II-25
Tabel 2.16 Capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2020 (Tahun) II-27
Tabel 2.17 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2020 (Tahun) II-28
Tabel 2.18 Capaian Umur Harapan Hidup Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2020 (Tahun) II-29
Tabel 2.19 Capaian Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2020 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) II-31
Tabel 2.20 Indikator Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-32
Tabel 2.21 Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa II-34
Tabel 2.22 Tingkat Pengangguran Terbuka Antar Provinsi di Pulau Jawa II-36
Tabel 2.23 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-38
Tabel 2.24 Indeks Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-39

Tabel 2.25 Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-43
Tabel 2.26 Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-45
Tabel 2.27 Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... II-47
Tabel 2.28 Indikator Kinerja Urusan Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-48
Tabel 2.29 Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-50
Tabel 2.30 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-52
Tabel 2.31 Indikator Kinerja Urusan Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-53
Tabel 2.32 Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... II-55
Tabel 2.33 Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-56
Tabel 2.34 Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-58
Tabel 2.35 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyakarat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020..... II-58
Tabel 2.36 Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-60
Tabel 2.37 Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-61
Tabel 2.38 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... II-64
Tabel 2.39 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-65
Tabel 2.40 Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-67
Tabel 2.41 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-68
Tabel 2.42 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-69
Tabel 2.43 Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-70
Tabel 2.44 Indikator Kinerja Urusan Persandian Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-71
Tabel 2.45 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-72
Tabel 2.46 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 ..... II-75
Tabel 2.47 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-77

Tabel 2.48 Indikator Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-78
Tabel 2.49 Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-80
Tabel 2.50 Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-81
Tabel 2.51 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-83
Tabel 2.52 Indikator Bidang Perindustrian Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-84
Tabel 2.53 Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-85
Tabel 2.54 Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017 ..... II-86
Tabel 2.55 Indikator Kinerja Urusan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-96
Tabel 2.56 Capaian Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... II-98
Tabel 2.57 Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-98
Tabel 2.58 Indikator Kinerja Pengawasan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-100
Tabel 2.59 Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-101
Tabel 2.60 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-103
Tabel 2.61 Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi di Indonesia Tahun 2020 ..... II-110
Tabel 2.62 Perbandingan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 ..... II-111
Tabel 2.63 Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020 ..... II-116
Tabel 2.64 Target *Outcome* Kinerja Program Tahun 2025 ..... II-202
Tabel 2.65 Penanganan Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum yang dilaksanakan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota II-203
Tabel 3.1 Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat Disandingkan dengan Nasional Tahun 2022-2023 ..... III-15
Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2022 ..... III-23
Tabel 3.3 Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2022 (Persen) III-24
Tabel 3.4 Proyeksi Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Tahun 2022 ..... III-25
Tabel 3.5 Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2022 ..... III-26
Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 ..... III-30

Tabel 3.7 Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 dan 2023.....III-31
Tabel 3.8 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2020.....III-39
Tabel 3.9 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021-2023 .....III-40
Tabel 3.10 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019-2020 .....III-43
Tabel 3.11 Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021-2023.....III-44
Tabel 4.1 Prioritas Pembangunan Daerah dan Arahan Program IV-4
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.....IV-22
Tabel 4.3 Agenda Untuk Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2022 .....IV-28
Tabel 4.4 Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 .....IV-38
Tabel 4.5 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 .....IV-54
Tabel 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan IV-63
Tabel 4.7 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis IV-65
Tabel 4.8 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-66
Tabel 4.9 Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Reformasi Sistem Kesehatan Daerah.....IV-81
Tabel 4.10 Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi.....IV-82
Tabel 4.11 Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan IV-86
Tabel 4.12 Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial IV-91
Tabel 4.13 Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan IV-92
Tabel 4.14 Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana IV-96
Tabel 4.15 Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah IV-97

Tabel 4.16 Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Gerakan Membangun Desa....IV-103
Tabel 4.17 Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara.....IV-104
Tabel 4.18 Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup IV-105
Tabel 4.19 Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata IV-110
Tabel 4.20 Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan IV-112
Tabel 4.21 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2022 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2022 .....IV-119
Tabel 4.22 Persandingan antara Sasaran Prioritas Nasional RKP .IV-120
Tabel 4.23 Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022 IV-122
Tabel 4.24 Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN.....IV-129
Tabel 4.25 Sandingan Program Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (*Mainstreaming*) Pembangunan Nasional Tahun 2022 .....IV-146
Tabel 4.26 Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Masing-Masing Kegiatan Prioritas IV-155
Tabel 5.1 Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota.....V-2
Tabel 5.2 Penetapan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022.....V-4
Tabel 5.3 Kategori Capaian LPE Kabupaten/Kota.....V-5
Tabel 5.4 Penetapan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022.....V-7
Tabel 5.5 Kategori Capaian TPT Kabupaten/Kota.....V-8
Tabel 5.6 Penetapan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022 .....V-10
Tabel 5.7 Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota.....V-11
Tabel 5.8 Penetapan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota.....V-13
Tabel 5.9 Kategori Capaian Persentase Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota.....V-14

Tabel 5.10 Tabel Pengeluaran per Kapita V-17
Tabel 5.11 Penetapan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022 .....V-17
Tabel 5.12 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Barat V-20
Tabel 5.13 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan V-48
Tabel 5.14 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan V-49
Tabel 5.15 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....V-51
Tabel 5.16 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman V-52
Tabel 5.17 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.....V-53
Tabel 5.18 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Sosial V-54
Tabel 5.19 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Tenaga Kerja.....V-56
Tabel 5.20 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak V-57
Tabel 5.21 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pangan V-58
Tabel 5.22 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanahan.....V-58
Tabel 5.23 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Lingkungan Hidup.....V-59
Tabel 5.24 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil V-60
Tabel 5.25 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....V-61
Tabel 5.26 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....V-61
Tabel 5.27 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Komunikasi dan Informatika V-62
Tabel 5.28 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah V-65
Tabel 5.29 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal V-66
Tabel 5.30 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kepemudaan dan Olahraga.....V-66
Tabel 5.31 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kebudayaan V-67
Tabel 5.32 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Statistik.....V-68
Tabel 5.33 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Persandian V-69

Tabel 5.34 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perpustakaan V-69
Tabel 5.35 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kearsipan V-70
Tabel 5.36 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kelautan dan Perikanan V-70
Tabel 5.37 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pariwisata V-71
Tabel 5.38 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanian V-72
Tabel 5.39 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kehutanan V-72
Tabel 5.40 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral V-73
Tabel 5.41 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perdagangan V-73
Tabel 5.42 Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Perindustrian V-74
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Provinsi yang Didanai oleh APBN untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022 VI-2
Tabel 6.2 Pagu Anggaran Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Tahun 2022 untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022 ..... VI-6
Tabel 6.3 Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Kegiatan Prioritas Nasional dalam RPJMN serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2022 ..... VI-8
Tabel 6.4 Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan VI-29
Tabel 6.5 Rekapitulasi Alokasi Anggaran Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ..... VI-31
Tabel 6.6 Proyek Strategis dengan Skema KPBU Tahun 2022 ..... VI-35
Tabel 6.7 Prospek Proyek KPBU VI-37
Tabel 6.8 Alokasi Anggaran Rencana Pendanaan Pelaksaan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022 ..... VI-39
Tabel 7.1 Proyeksi Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ..... VII-2
Tabel 7.2 Proyeksi Indikator Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ..... VII-2
Tabel 7.3 Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ..... VII-3
Tabel 7.4 Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak/*Impact* Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022 ..... VII-6
Tabel 7.5 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/*Outcome* Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022 ..... VII-22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ..... I-8
Gambar 1.2 Alur Proses Penyusunan Substansi Perencanaan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ..... I-8
Gambar 1.3 Hubungan RKPD Tahun 2022 Terhadap Dokumen Lain I-14
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat II-2
Gambar 2.2 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Jawa Barat II-9
Gambar 2.3 Komposisi Penduduk menurut Generasi II-10
Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2018-2020 (Persen) ... II-14
Gambar 2.5 Lapangan Usaha dengan Peranan Terbesar Tahun 2020 (Persen) II-15
Gambar 2.6 Pola Spasial Peranan Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat (Persen) II-18
Gambar 2.7 Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) Provinsi Jawa Barat dengan PDB Per Kapita (ADHK) Tahun 2018-2020 (Juta Rupiah) II-20
Gambar 2.8 Indeks Gini Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ... II-22
Gambar 2.9 Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-24
Gambar 2.10 Tren Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhannya Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-24
Gambar 2.11 Tren Harapan Lama Sekolah dan Pertumbuhannya Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-26
Gambar 2.12 Tren Rata-Rata Lama Sekolah dan Pertumbuhannya Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-27
Gambar 2.13 Tren Umur Harapan Hidup Saat Lahir dan Pertumbuhannya Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-29
Gambar 2.14 Tren Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan dan Pertumbuhannya Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 (Rp Ribu dan Persen) II-30
Gambar 2.15 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 ..... II-32
Gambar 2.16 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2020 ..... II-33
Gambar 2.17 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 ..... II-35
Gambar 2.18 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2015-2019 ..... II-37
Gambar 2.19 Informasi APBD Provinsi Jawa Barat secara *Online* II-97

Gambar 2.20 Pengeluaran per Kapita Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 ..... II-102
Gambar 2.21 Rata-Rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 ..... II-104
Gambar 2.22 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 ..... II-105
Gambar 2.23 Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020 ..... II-106
Gambar 2.24 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020 ..... II-108
Gambar 2.25 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat II-109
Gambar 2.26 Aplikasi Warna Jabar II-192
Gambar 2.27 Penggunaan E-ASB di Provinsi Jawa Barat II-193
Gambar 2.28 Aplikasi Pikobar II-195
Gambar 2.29 *Command Centre* II-197
Gambar 2.30 Model Kerangka Pikir Gerbang Desa II-198
Gambar 2.31 Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) II-198
Gambar 2.32 Gerakan Membangun Desa Jawa Barat II-199
Gambar 2.33 *Creative Center* II-200
Gambar 2.34 BIJB Kertajati II-200
Gambar 2.35 Fokus Penanganan DAS Citarum II-204
Gambar 2.36 Citarum Harum Juara II-204
Gambar 2.37 *One Pesantren One Product (*OPOP) dan Pesantren Juara II-205
Gambar 2.38 Masagi II-206
Gambar 2.39 Kolecer dan Candil II-206
Gambar 2.40 Layad Rawat II-207
Gambar 2.41 Kredit Mesra II-208
Gambar 2.42 Jabar Saber *Hoaks* II-209
Gambar 2.43 Sambara II-210
Gambar 2.44 Jabar *Quick Response* II-210
Gambar 2.45 Petani Milenial II-211
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran Triwulan I-2020 ..... III-5
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan I-2021 ..... III-6
Gambar 3.3 Perkembangan Nilai Ekspor Migas dan Non Migas Tahun 2010-2021 (Juta USD) III-8
Gambar 3.4 Perkembangan Nilai Impor Migas dan Non Migas Tahun 2020-2021 ..... III-9
Gambar 3.5 Perkembangan Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Provinsi Jawa Barat III-10
Gambar 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat Februari 2020 – Februari 2021 (Persen) III-11
Gambar 3.7 Perkembangan Indeks Gini Maret 2015 – September 2020 ..... III-13
Gambar 3.8 Fluktuasi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Maret 2015 – September 2020 ..... III-15

Gambar 3.9 Perkembangan TPK Hotel Bintang dan Non Bintang di Provinsi Jawa Barat Mei 2020 - Mei 2021 ..... III-17
Gambar 3.10 Perkembangan Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Provinsi Jawa Barat Melalui Pintu Masuk Bandara Husein Sastranegara dan Pelabuhan Muarajati Januari 2020 - Januari 2021 ..... III-18
Gambar 3.11 Persentase Pekerja/Buruh yang Dirumahkan Dampak COVID-19 Per Sektor Usaha (%) III-19
Gambar 3.12 Persentase Pekerja/Buruh yang Di_PHK Dampak COVID-19 Per Sektor Usaha (%) III-20
Gambar 3.13 Kolaborasi Pendanaan Pembangunan III-28
Gambar 4.1 Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 ..... IV-7
Gambar 4.2 Peta Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ..... IV-118
Gambar 4.3 Wilayah Pengembangan di Jawa Barat..... IV-171
Gambar 4.4 Keterkaitan Fungsional Antar Wilayah Pengembangan IV-174
Gambar 4.5 Perubahan Peta Rencana Struktur Ruang..... IV-177
Gambar 4.6 Perubahan Peta Rencana Pola Ruang IV-178
Gambar 4.7 Perubahan Peta Kawasan Strategis Provinsi..... IV-180
Gambar 4.8 Peta Administrasi Perbatasan Jawa Barat – DKI Jakarta IV-181
Gambar 4.9 Peta Administrasi Perbatasan Jawa Barat – Banten IV-182
Gambar 4.10 Peta Administrasi Perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah IV-183
Gambar 4.11 Profil Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Barat.. IV-187
Gambar 4.12 Kontribusi Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Barat IV-188
Gambar 5.1 Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020 ..... V-3
Gambar 5.2 Analisis Kuadran Capaian LPE dan Rata-Rata LPE Kabupaten/Kota..... V-6
Gambar 5.3 Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Perubahan TPT Kabupaten/Kota..... V-9
Gambar 5.4 Analisis Kuadran Capaian dan Laju Penurunan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota V-12
Gambar 5.5 Analisis Kuadran Pengeluaran Kabupaten/Kota V-16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional.

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Sesuai dengan amanat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyusun RPJPD Tahun 2005-2025 periode 20 (dua puluh) tahunan, RPJMD Tahun 2018-2023 untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan RKPD untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

RKPD Provinsi Jawa Barat adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Secara umum, dokumen RKPD Tahun 2022 mempunyai nilai penting, antara lain: merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023; acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022; landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022; dan menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2022, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat masih dihadapkan pada tantangan penanganan pandemi COVID-19. Seperti diketahui bersama bahwa penyebaran pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia yang sampai saat ini masih terdapat indikasi penyebaran pandemi COVID-19 yang belum menurun, bahkan ada di beberapa negara timbul varian baru, seperti varian B.1.1.7 asal Inggris, varian mutasi ganda B.1.617 asal India, dan varian B.1.351 asal Afrika Selatan. Diprediksi tahun 2022 pandemi COVID-19 ini masih ada di Indonesia dan diperkirakan akan terkendali pada tahun 2022, apabila vaksin telah tersedia dan sudah terdistribusi kepada seluruh masyarakat Indonesia, maka hal tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai terlepas dari tekanan pandemi COVID-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini, upaya penanganan pandemi COVID-19 dilakukan secara komprehensif melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi, rekonstruksi dampak pandemi COVID-19, serta pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial. Hal tersebut diimplementasikan dengan menyesuaikan prioritas pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2022 menjadi: 1) Reformasi sistem kesehatan daerah; 2) Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi; 3) Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan; 4) Reformasi sistem perlindungan sosial; 5) Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan; 6) Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana; 7) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah; 8) Gerakan membangun desa; 9) Pendidikan agama dan tempat ibadah juara; 10) Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 11) Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

Dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, beberapa asumsi yang digunakan dalam pembangunan daerah, secara umum dapat disampaikan antara lain:

1. Masyarakat diharapkan dapat hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 seiring dengan adanya vaksin;
2. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli dan sebagainya;
3. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal tetapi memerlukan dukungan stimulus modal; dan
4. Aktifitas industri manufaktur, investasi, dan pariwisata mulai bergerak (kapasitas produksi dan tenaga kerja) terkait penerapan protokol kesehatan pada lini produksi.

Adapun yang bersifat khusus diantaranya adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pertumbuhan mobilitas penduduk, sehingga dalam melakukan prediksi pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan data pergerakan. Selain itu, kondisi inflasi yang mencerminkan daya beli masyarakat sejalan dengan rendahnya konsumsi rumah tangga;
2. Asumsi ekonomi makro ditentukan oleh asumsi makro Indonesia dan makro dunia;
3. Proyeksi PDRB Lapangan Usaha sektor industri mempertimbangkan *Manufactures Unit Value* (MUV) *Index*;
4. Proyeksi PDRB Lapangan Usaha Sektor pertanian, secara historis pada Q4 mengalami kontraksi secara *q-to-q* artinya ada pengaruh musiman pada Q4 dimana Jawa Barat masih berada pada fase tanam, di sisi lain prediksi BMKG terkait adanya *La Nina* pada akhir tahun 2020 – awal tahun 2021 juga diperkirakan memengaruhi produksi hasil pertanian; dan
5. Asumsi proyeksi lainnya menggunakan kecenderungan data triwulanan/menggunakan aritmatika, atau metode *Cobb-douglass*, kemudian disesuaikan dengan data realisasi terkini.

Dalam menjalankan proses penyusunan beberapa metode pelaksanaan dilakukan sebagai bagian dari perwujudan pendekatan-pendekatan di atas yaitu:

1. Kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan *pentahelix* – ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, and Media*). *Academic* meliputi unsur perguruan tinggi dan peneliti yang berperan sebagai konseptor. Seperti melakukan

identifikasi potensi daerah dan keterampilan sumber daya manusia yang mendukung peningkatan potensi pembangunan daerah. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori terbaru dan relevan dalam perencanaan pembangunan daerah. *Business* meliputi unsur pengusaha/swasta yang berperan sebagai *enabler*. Sektor swasta merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sektor Swasta dapat berperan sebagai *enabler* menghadirkan infrastruktur teknologi dan modal. Dengan adanya perubahan ke era digital maka dapat membantu pengembangan pembangunan daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. *Community* meliputi unsur masyarakat yang berperan sebagai akselerator dan penerima manfaat. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, seluruh lapisan masyarakat dilibatkan, tidak terkecuali kaum wanita, anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas. Dalam hal ini komunitas juga berperan sebagai akselerator seiring dengan modal sosial yang dimiliki untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran. Komunitas juga bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat dalam keseluruhan proses dan memperlancar adopsi proses ekonomi. Selain itu, komunitas juga memiliki peran untuk mempromosikan produk atau layanan yang dimiliki oleh suatu wilayah. *Government* atau pemerintah berperan sebagai regulator yang memiliki peran dalam menetapkan kebijakan dan peraturan serta melakukan pengawasan. Dalam hal ini melibatkan semua jenis kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, undang-undang, pengembangan dan pengetahuan, kebijakan inovasi publik, dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan publik-swasta. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengoordinasikan para pemangku kepentingan yang berkontribusi pada pengembangan potensi suatu wilayah. *Media* bertindak sebagai *expander*, media berperan dalam mendukung publikasi dan promosi serta membuat *brand image*. Dalam menjalankan perannya ini, media juga berfungsi sebagai

perantara diseminasi informasi di antara pemangku kepentingan dan konsep *pentahelix*.

2. Kolaborasi pendanaan pembangunan dari APBD kabupaten/kota; PHLN; Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP); swadaya masyarakat; serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan (PKBL);
3. Penerapan *dynamic government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Pendekatan spasial dan a-spasial melalui 6 (enam) wilayah pengembangan;
5. Sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam:
   a. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
   b. Sistem Monitoring Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (Sismontepra); dan
   c. Satu Data Pembangunan Jawa Barat.
6. Digitalisasi sistem perencanaan meliputi:
   a. Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan Pemerintah Pusat Pusat (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah / SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 14 ayat (3), bahwa Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis *e-planning*.
   b. Warga Merencana Jawa Barat (Warna Jabar) merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan menjadi salah satu sarana bagi seluruh warga Jawa Barat untuk dapat ikut berperan serta dalam proses perumusan kebijakan dalam penyusunan rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan. Selanjutnya hasil masukan seluruh warga Jawa Barat dari aplikasi ini akan dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam perumusan kebijakan pembangunan baik jangka panjang, menengah maupun rencana tahunan.

c. Usulan Desa

Bantuan keuangan Desa dapat langsung diusulkan oleh Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui menu aplikasi sipd.kemendagri.go.id. Terdapat 3 (tiga) menu pada halaman utama yaitu *Dashboard*, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Profil Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pendekatan dan metode perencanaan tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka proses penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu diawali dengan *Kick Off Meeting,* Forum Konsultasi Publik yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, Forum Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan, Forum Bidang Perencana Bappeda, Musrenbang Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Bidang Perencana, Pra-Musrenbang dan diakhiri dengan Musrenbang Provinsi.

Pasca pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional dilanjutkan dengan penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2022 untuk penajaman dan penetapan daftar rencana program/kegiatan prioritas Provinsi Jawa Barat. Setelah rancangan akhir RKPD Tahun 2022 tersusun, dilanjutkan dengan proses penetapan RKPD Tahun 2022 melalui Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 pada minggu ke-IV bulan Juni 2021.

Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

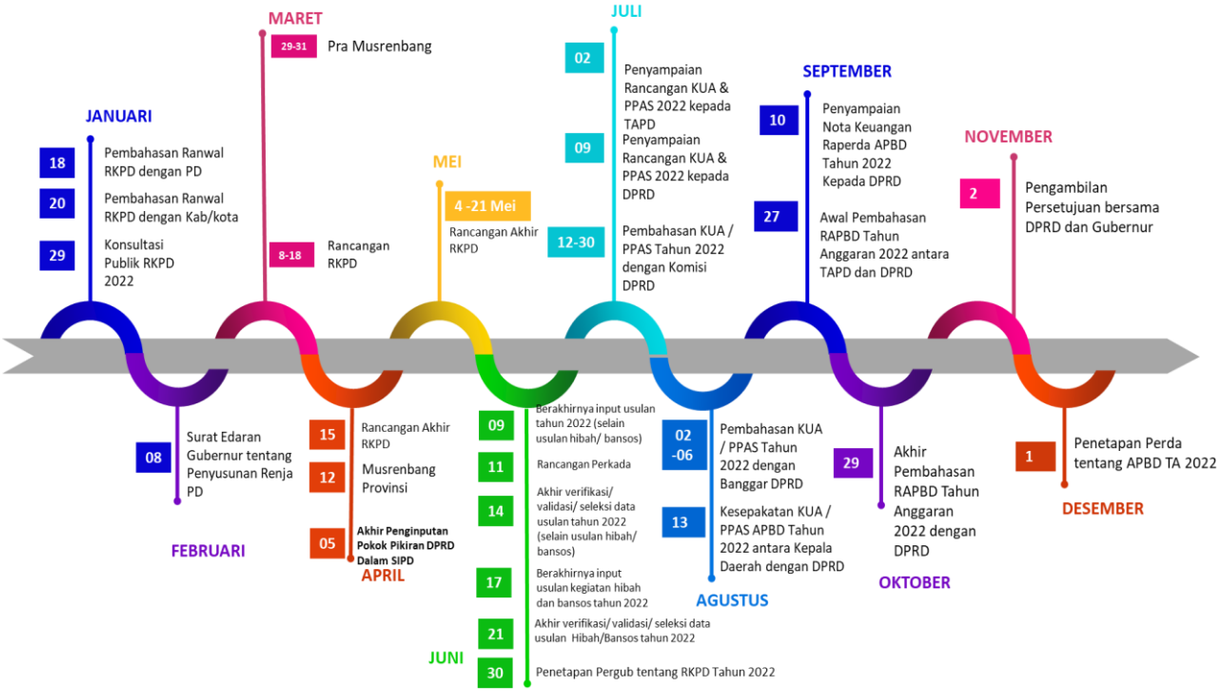

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021

Gambar 1.2
Alur Proses Penyusunan Substansi Perencanaan
RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

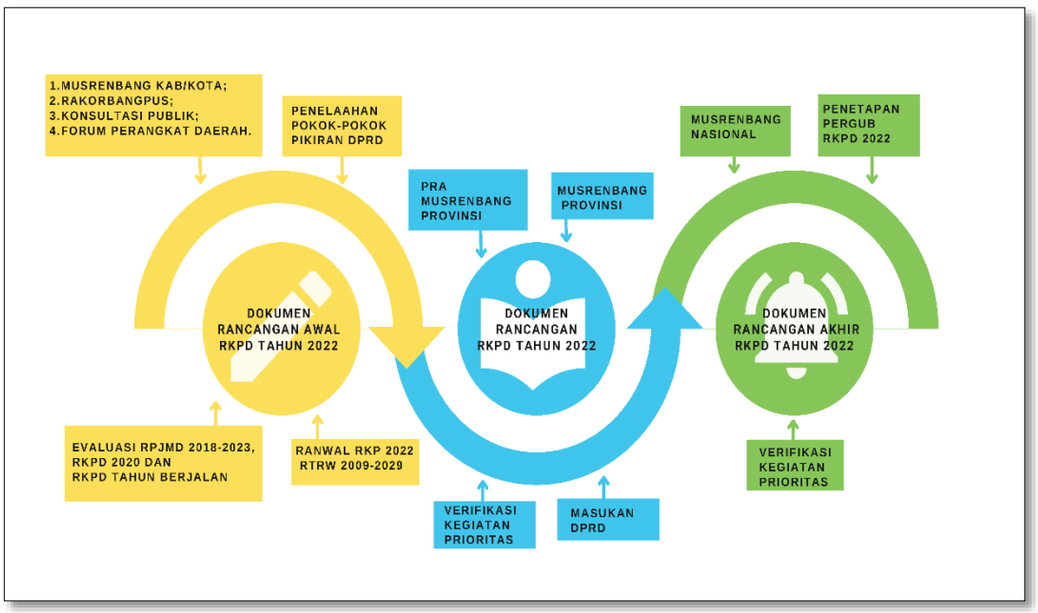

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 326);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM 7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Operasional Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, Nomor 22 Seri E)
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 seri E);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 239);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023; dan
38. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.443/Kep.189-Huham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Barat.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 (dua puluh) tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun. Sedangkan berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.

Sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP); dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.3
Hubungan RKPD Tahun 2022 Terhadap Dokumen Lain

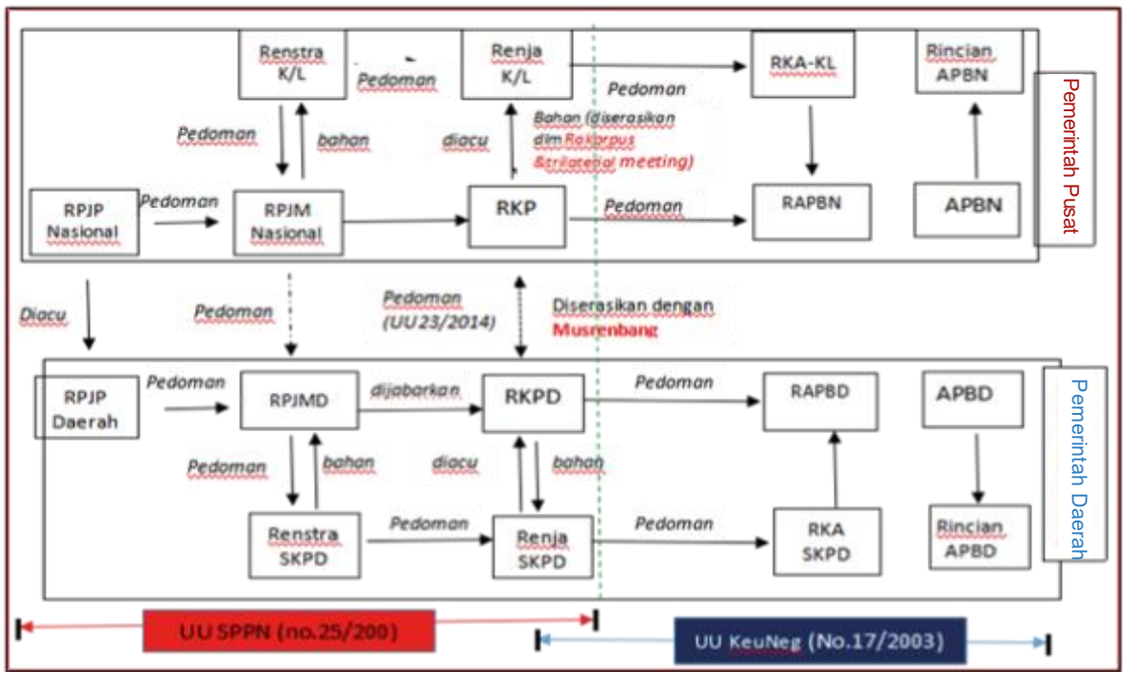

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas RPJMN dan RPJMD merupakan 2 (dua) dokumen perencanaan yang saling berhubungan dan bersinergi. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat (3). RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selain itu juga memuat program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan RPJMD Tahun 2018-2023; tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2022; dan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029. RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Program dan kegiatan RKPD Tahun 2022, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, dengan tujuan:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan tahun 2022;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas; dan
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika

Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

1.2. Dasar Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam menyusun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan antara RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

1.5. Sistematika

Memuat sistematika RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan gambaran umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum/publik, dan aspek daya saing daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2020

Menjelaskan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

2.3. Kondisi Masa Pandemi Covid-19 Di Jawa Barat

Menjelaskan kondisi Kesehatan, kondisi ekonomi, kondisi sosial dan kondisi pelaksanaan anggaran pada masa pandemi COVID-19.

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menjelaskan permasalahan utama terkait aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah yang memerlukan solusi dan akselerasi pembangunan yang lebih komprehensif pada Tahun 2022.

2.5 Inovasi

Menjelaskan inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi tahun 2022, proyeksi, dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2022.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2022 serta pendanaan pembangunan lainnya.

3.3. Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Menjelaskan sumber - sumber pendanaan pembangunan non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 sebagai penjabaran Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Menjelaskan telaahan terhadap prioritas pembangunan nasional, perumusan isu strategis, prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan serta tema pembangunan Jawa Barat Tahun 2022

4.3. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Menjelaskan telaahan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Barat berdasarkan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

4.4. Kerja Sama Pembangunan Wilayah Perbatasan

Menjelaskan mengenai pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan yang menjangkau daerah terpencil dan daerah perbatasan.

4.5. Pembangunan Rendah Karbon

Komitmen pemerintah dalam pembangunan rendah karbon sebagai upaya antisipasi dampak perubahan iklim.

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1. Indikator Makro Kabupaten/Kota

Menjelaskan mengenai Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi pertimbangan dalam menetapkan target sasaran makro pembangunan daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022.

5.2. Arahan Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Berdasarkan Kebijakan Kewilayahan dalam RTRW

Menjelaskan mengenai kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.

5.3. Sinergitas Pembangunan Daerah

Menjelaskan keterkaitan dari indikator kinerja urusan baik di level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota seperti yang telah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022.

BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Rencana Alternatif Pendanaan Pembangunan Tahun 2022

Menjelaskan rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBN Tahun 2022, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, dan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Rencana program dan kegiatan tersebut disusun dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah.

6.2. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2022

Menjelaskan keterkaitan antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2022 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun 2020 dan capaian kinerja tahun 2022 yang direncanakan dalam RPJMD, dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional tahun 2022.

6.3 Rencana Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022

Menjelaskan rencana program dan kegiatan tahun 2022 yang dilakukan untuk pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditingkat Provinsi.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menjelaskan indikator keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

7.2. Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Menjelaskan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2022.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Tahun 2022.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Provinsi Jawa Barat terletak antara 5^{0}50' – 7^{0}50' Lintang Selatan dan 104^{0}48' – 108^{0}48' Bujur Timur. Provinsi Jawa Barat memiliki garis pantai sepanjang 724,85 km (Sumber: Dokumen Materi Teknik Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029). Berdasarkan kewenangan pengelolaan laut 0 – 12 mil, luas wilayah laut Provinsi Jawa Barat adalah 15.528,90 ha, dan memiliki jumlah pulau-pulau kecil 30 pulau. Luas wilayah Provinsi Jawa Barat sebesar 35.377,76 km^2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Banten
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia

Secara administratif, Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 27 kabupaten/kota, yang meliputi 18 (delapan belas) kabupaten dan 9 (sembilan) kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa, dengan rincian pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Km^2)	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Kabupaten Bogor	2.710,62	40	19	416
2	Kabupaten Sukabumi	4.145,70	47	5	381
3	Kabupaten Cianjur	3.840,16	32	6	354
4	Kabupaten Bandung	1.767,96	31	10	270
5	Kabupaten Garut	3.074,07	42	21	421
6	Kabupaten Tasikmalaya	2.551,19	39	-	351
7	Kabupaten Ciamis	1.414,71	27	7	258

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Km²)	Kecamatan	Kelurahan	Desa
8	Kabupaten Kuningan	1.110,56	32	15	361
9	Kabupaten Cirebon	984,52	40	12	412
10	Kabupaten Majalengka	1.204,24	26	13	330
11	Kabupaten Sumedang	1.518,33	26	7	270
12	Kabupaten Indramayu	2.040,11	31	8	309
13	Kabupaten Subang	1.893,95	30	8	245
14	Kabupaten Purwakarta	825,74	17	9	183
15	Kabupaten Karawang	1.652,20	30	12	297
16	Kabupaten Bekasi	1.224,88	23	7	180
17	Kabupaten Bandung Barat	1.305,77	16	-	165
18	Kabupaten Pangandaran	1.010,00	10	-	93
19	Kota Bogor	118,50	6	68	-
20	Kota Sukabumi	48,25	7	33	-
21	Kota Bandung	167,67	30	151	-
22	Kota Cirebon	37,36	5	22	-
23	Kota Bekasi	206,61	12	56	-
24	Kota Depok	200,29	11	63	-
25	Kota Cimahi	39,27	3	15	-
26	Kota Tasikmalaya	171,61	10	69	-
27	Kota Banjar	113,49	4	9	16
Jawa Barat		**35.377,76**	**627**	**645**	**5.312**

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017

Gambaran mengenai wilayah administratif disajikan dalam bentuk Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat seperti pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Barat

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Berdasarkan karakteristik topografi, Provinsi Jawa Barat terdiri atas wilayah pegunungan curam di selatan, wilayah lereng bukit yang landai di tengah, wilayah dataran luas di utara, dan wilayah aliran sungai. Wilayah pegunungan curam (9,5 persen) terletak di bagian selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, dan wilayah lereng bukit yang landai (36,48 persen) terletak di bagian tengah dengan ketinggian 10-1.500 mdpl, serta wilayah daratan landai (54,02 persen) terletak di bagian utara dengan ketinggian 0-10 mdpl.

Kondisi fisik dasar Pesisir Utara Jawa Barat yang terdiri atas dataran pantai dan rawa *alluvial* pantai dengan kemiringan lereng 0–5 persen, merupakan daerah yang bertopografi landai, perairan dangkal, memiliki substrat lumpur, berpasir dan berawa, pola arus yang dipengaruhi arus Laut Jawa, serta bervegetasi *mangrove* dan terumbu karang. Topografi wilayah Pantai Selatan Jawa Barat merupakan pegunungan dan perbukitan terjal, perairan dalam dengan banyak batu karang dan pantai berpasir, pola arus laut yang kuat yang dipengaruhi keberadaan Samudera Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan kondisi hidrologi, Provinsi Jawa Barat memiliki potensi sumber daya air permukaan (sungai induk dan anak sungainya) yang cukup besar, dengan mencapai rata-rata 48.023,78 juta m^3/tahun dalam kondisi normal. Secara kewilayahan, potensi sumber daya air Provinsi Jawa Barat terdistribusi pada 6 (enam) Wilayah Sungai (WS) yang meliputi WS Ciliwung-Cisadane, WS Citarum, WS Cimanuk-Cisanggarung, WS Citanduy, WS Cisadea-Cibareno, dan WS Ciwulan-Cilaki.

Pada tahun 2018, angka ketersediaan sumber daya air berdasarkan debit 90 tahunan (Q90) adalah sebesar 43.773,02 juta m^3/tahun, berdasarkan debit 80 tahunan (Q80) adalah sebesar 37.095,82 juta m^3/tahun, dan berdasarkan debit 50 tahunan (Q50) adalah sebesar 34.013,40 juta m^3/tahun. Berdasarkan rentang waktu siklus sumber daya air yang semakin pendek menunjukkan bahwa ketersediaan air permukaan semakin menurun.

Tabel 2.2
Ketersediaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat

No	Wilayah Sungai	Luas (km^2)	Potensi SDA (Juta m^3/thn)	Ketersediaan Air Permukaan (Juta m^3/thn)		
				Q90	Q80	Q50
1	Ciliwung	3.675,40	5.538,62	9.990,35	9.011,32	7.802,52
2	Cisadea-Cibareno	6.693,60	10.987,47	7.586,62	5.789,65	5.618,55
3	Citarum	11.436,90	12.924,43	10.724,80	7.606,45	7.243,98
4	Cimanuk-Cisanggarung	7.157,50	7.878,07	7.111,68	5.854,20	5.851,24
5	Citanduy	2.682,00	3.542,59	3.079,13	2.613,87	2.482,36
6	Ciwulan-Cilaki	5.415,00	7.152,60	5.280,45	6.220,33	5.014,76
Total		37.060.40	48.023,78	43.773,02	37.095,82	34.013,40

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Tahun 2018

Ketersediaan sumber daya air juga sangat bergantung pada pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) berupa wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya. DAS berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Jumlah DAS yang ada di Jawa Barat sebanyak 41 DAS, yang terdiri dari 21 DAS bermuara ke Laut Jawa, dan 20 (dua puluh) DAS bermuara ke Samudera Hindia.

Sungai-sungai yang bermuara ke Pantai Utara, diantaranya Sungai Cimanuk, Cipunagara, Citarum, Kali Bekasi, Pagadungan, Cilamaya, Ciasem, Kali Beji, Cipanas, Cimanggis, Ciwaringin, Kali Bunder, Bangkaderes, dan Cisanggarung. Sungai-sungai yang bermuara ke Pantai Selatan diantaranya Sungai Citepus, Cimandiri, Cikaso, Cibuni, Cisokan, Cisadea, Ciujung, Cipandak, Cilaki, Cikandang, Cipalebuh, Cikaengan, Cisanggiri, Cipatujah, Ciwulan, Cimedang, Cijulang, dan Citanduy.

Secara hidrogeologi, wilayah Jawa Barat memiliki 27 Cekungan Air Tanah (CAT) yang tersebar ke seluruh wilayah yang mencakup 8 (delapan) CAT lokal, 15 (lima belas) CAT lintas kabupaten/kota, dan 4 (empat) CAT lintas provinsi. Masing-masing CAT memiliki luasan area tertentu dalam km^2, juga potensi air tanah tertentu yang dinyatakan dalam potensi debit air tanah (juta m^3/tahun). Potensi air tanah dalam masing-masing CAT tersimpan dalam lapisan satuan batuan tertentu yang dinamakan akuifer, yang berdasarkan sifatnya, akuifer dibedakan atas akuifer bebas (Q1) dan akuifer tertekan (Q2).

Setiap CAT memiliki sifat atau karakteristik yang mencakup luasan area, potensi air tanah pada akuifer bebas, dan potensi air tanah pada akuifer tertekan. Dalam rangka memelihara keberadaan dan keberlanjutan potensi air tanah, mencakup keadaan, sifat dan fungsi air tanah, pada masing-masing CAT perlu adanya upaya konservasi air tanah di seluruh wilayah Jawa Barat. Sifat atau karakteristik setiap CAT disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Cekungan Air Tanah (CAT) di Wilayah Jawa Barat

No	CAT	Luas (km^2)	Q_1 (jt m^3/thn)	Q_2 (jt m^3/thn)
1	Bogor	1.311	1.019	37
2	Sukabumi	868	759	34
3	Cianjur	467	451	16
4	Jampang Kulon	384	276	-
5	Bekasi-Karawang	3,641	1,43	6
6	Pamanukan	1,514	429	3
7	Ciater	566	413	30
8	Lembang	169	164	16
9	Batujajar	85	66	1
10	Bandung	1.716	369	117
11	Campaka	621	595	28
12	Banjarsari	60	550	30
13	Tasikmalaya	1.219	978	69
14	Garut	886	621	87
15	Sadawangi – Selaawi	514	415	30
16	Sumedang	483	519	28
17	Sukamantri	151	98	13
18	Ciamis	581	448	14
19	Kawali	291	224	7
20	Kuningan	507	445	21
21	Jatiwangi	686	554	5
22	Indramayu	1.282	362	46
23	Cirebon	1.659	638	4
Jumlah		**20.206**	**11.826**	**642**

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Tahun 2017

Penggunaan lahan di Provinsi Jawa Barat dapat teridentifikasi melalui interpretasi peta citra satelit yang dibedakan dalam klasifikasi tutupan lahan. Berdasarkan kajian tahun 2018, tutupan lahan Provinsi Jawa Barat terdiri dari klasifikasi hutan, perkebunan, areal terbangun, sawah, ladang/tegalan, rawa/tambak, belukar/semak, dan sungai/waduk/badan air. Sesuai perhitungan *Geographic Information System* (GIS), dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun telah terjadi penurunan luas lahan perkebunan, sawah,

dan belukar. Hasil akhir tutupan lahan tahun 2018 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.4
Luar Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

No	Klasifikasi Tutupan Lahan	Luas Tutupan Lahan (Ha)
		2018
1	Hutan (Primer/ Sekunder)	695.658,90
2	Kebun Perkebunan/Kebun Campuran)	553.380,60
3	Areal Terbangun (Permukiman/Industri/ Gedung)	483.668,00
4	Sawah (Irigasi/ Tadah Hujan)	1.075.704,20
5	Ladang/ Tegalan	532.309,80
6	Rawa/ Tambak/ Empang	78.100,70
7	Belukar/Semak/ Rumput/ Tanah Berbatu	240,511.4
8	Sungai/ Waduk/ Situ/ Badan Air	47.494,50
9	Tanah Kosong	1.941,00

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2018

Provinsi Jawa Barat memiliki beragam potensi pengembangan wilayah yang keunggulannya perlu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat serta perlu diantisipasi perkembangannya sehingga tidak berdampak buruk bagi sosial dan lingkungan di masa yang akan datang. Potensi tersebut didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan pengembangan Provinsi Jawa Barat dimasa yang akan datang serta fakta aktual dengan adanya keunggulan konektivitas wilayah berupa infrastruktur strategis yang sudah terbangun di Provinsi Jawa Barat sehingga berpotensi menjadi magnet investasi yang perlu diantisipasi perkembangannya. Pusat-pusat kegiatan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baik yang berkarakter perkotaan dan perdesaan di wilayah Jawa Barat bagian Utara, Tengah dan Selatan, memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda sehingga perlu ditangani dengan skenario pengembangan yang berbeda, sebagai berikut:

a. Wilayah utara dengan potensi fisik dominan berupa dataran, secara eksisting merupakan lahan pertanian yang luas, dan lokasi infrastruktur strategis diantaranya konektivitas Jalan Tol Cipali, Tol Cisumdawu, Stasiun Kereta Api dan Kereta Api Cepat-Semi Cepat, serta *outlet* simpul transportasi nasional maupun internasional seperti Pelabuhan Patimban di Subang, Pelabuhan Cirebon, serta Bandara Kertajati di Majalengka.

b. Wilayah Tengah dengan potensi fisik bergelombang dan datar didominasi kawasan perkotaan yang memiliki resiko rawan bencana, dan sebagian lainnya merupakan kawasan yang perlu dilindungi dan memiliki potensi destinasi pariwisata. Hal ini mengarahkan potensi pengembangan wilayah yang mengoptimalisasikan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, menerapkan mitigasi bencana, pemenuhan pelayanan publik, aktivitas ekonomi yang berkelanjutan seperti jasa, pariwisata, dan kerjasama pengelolaan kawasan perkotaan.

c. Wilayah Selatan dengan potensi fisik yang bergelombang hingga curam dan resiko rawan bencana tinggi, perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan yang mengedepankan optimalisasi aktivitas ekonomi berbasis agribisnis, agroindustri, industri kelautan dan pariwisata terpadu, yang mengoptimalkan sumber daya lahan, pesisir dan kelautan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Konsep pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Selatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Selatan. Peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan di wilayah selatan perlu diprioritaskan untuk pemenuhan sarana prasarana minimal agar pelayanan publik terjangkau dan memiliki akses yang tinggi. Walaupun tidak dibangun seperti di wilayah utara dan tengah, wilayah selatan tetap maju dan sejahtera dan tetap menjaga daya dukung lingkungannya. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengusulkan beberapa rencana infrastruktur lintas selatan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengurangi ketimpangan wilayah.

Karakteristik geologi yang bersifat kompleks menjadikan sebagian wilayah Jawa Barat memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dari ancaman bencana alam. Provinsi Jawa Barat secara geologi terletak di sebelah utara lajur pertemuan 2 (dua) lempeng aktif yang saling bertumbukan. Kedua lempeng tektonik yang saling bertumbukan tersebut adalah Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Eropa-Asia. Kondisi ini menyebabkan wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang memiliki potensi penyebab bencana alam yang cukup tinggi. Sumber-sumber potensi penyebab

bencana alam di Provinsi Jawa Barat yang perlu diwaspadai adalah 7 (tujuh) gunung api aktif yaitu Gunung Papandayan, Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Ciremai, Gunung Guntur, dan Gunung Galunggung. Selain itu, yang perlu diwaspadai adalah 5 (lima) sesar aktif yaitu Sesar Lembang, Cicalengka, Jati, Gunung Geulis, dan Ujungberung–Cileunyi serta aktivitas lempeng tektonik di Selatan Jawa Barat.

Gunung-gunung di Jawa Barat yang tergolong pada gunung api tipe A adalah Ciremai (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon), Galunggung (Kabupaten dan Kota Tasikmalaya), Guntur (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut), Papandayan (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut). Adapun gunung api tipe B adalah Gunung Talagabodas, Gunung Wayang Windu, Gunung Gede (Kabupaten Cianjur, Kabupaten, dan Kota Sukabumi), Gunung Patuha (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur), dan Gunung Salak (Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten Sukabumi).

Wilayah Jawa Barat terletak pada jalur *circum pacific* dan mediteran, sehingga sebagian besar wilayahnya termasuk daerah labil yang ditandai dengan masih banyaknya gunung berapi yang masih aktif bekerja sehingga memiliki resiko gempa bumi. Bahaya lingkungan beraspek geologi yang sering terjadi di Provinsi Jawa Barat antara lain masalah kegempaan, letusan gunung api dan aliran lahar, longsor (gerakan tanah), perubahan garis pantai, dan erosi tebing sungai.

Menurut hasil studi terbaru dari beberapa lembaga penelitian, terdapat kondisi yang menyatakan bahwa Sesar Lembang telah aktif. Sesar Lembang adalah patahan sepanjang 29 km yang melewati beberapa kabupaten mulai dari Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Aktifnya Sesar Lembang menurut penelitian *paleoseismologi* menunjukkan bahwa pada 500-2000 tahun yang lalu, Sesar Lembang menghasilkan gempa dengan Magnitudo 6,6-6,8. Jika menurut periodesasi, gempa dapat terjadi dalam periode 100 (seratus) tahun lagi. Selain itu, lebih dari 2/3 wilayah di Jawa Barat dikategorikan berpotensi rawan bencana gerakan tanah, dengan proporsi: 1) 25,9 persen sangat rendah; 2) 25,5 persen rendah; 3) 40,4 persen menengah; dan 4) 7,3 persen tinggi.

Sumber penyebab bencana lainnya adalah tingginya intensitas curah hujan yang memicu gerakan tanah terutama di wilayah Jawa Barat bagian selatan, banjir di wilayah Pantai Utara dan Cekungan Bandung. Selain itu, wilayah Jawa Barat bagian selatan secara geologis memiliki kerentanan terhadap bencana tsunami.

Kawasan rawan bencana banjir di Jawa Barat terkonsentrasi di Pesisir Pantai Utara Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Cirebon (DAS Cimanuk dan Cipunagara), Cekungan Bandung (DAS Citarum), dan Kabupaten Ciamis (DAS Citanduy). Rawan bencana tsunami, terutama terjadi di Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Tasikmalaya. Tsunami umumnya disebabkan oleh gempa bumi dasar laut, berdasarkan peta kawasan rawan bencana tsunami terdapat 3 (tiga) tingkat kerawanan yakni rendah (26,5 persen), menengah (34,5 persen), dan tinggi (40 persen). Lebih lanjut peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Jawa Barat akan ditampilkan pada gambar berikut.

Gambar 2.2
Peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Jawa Barat

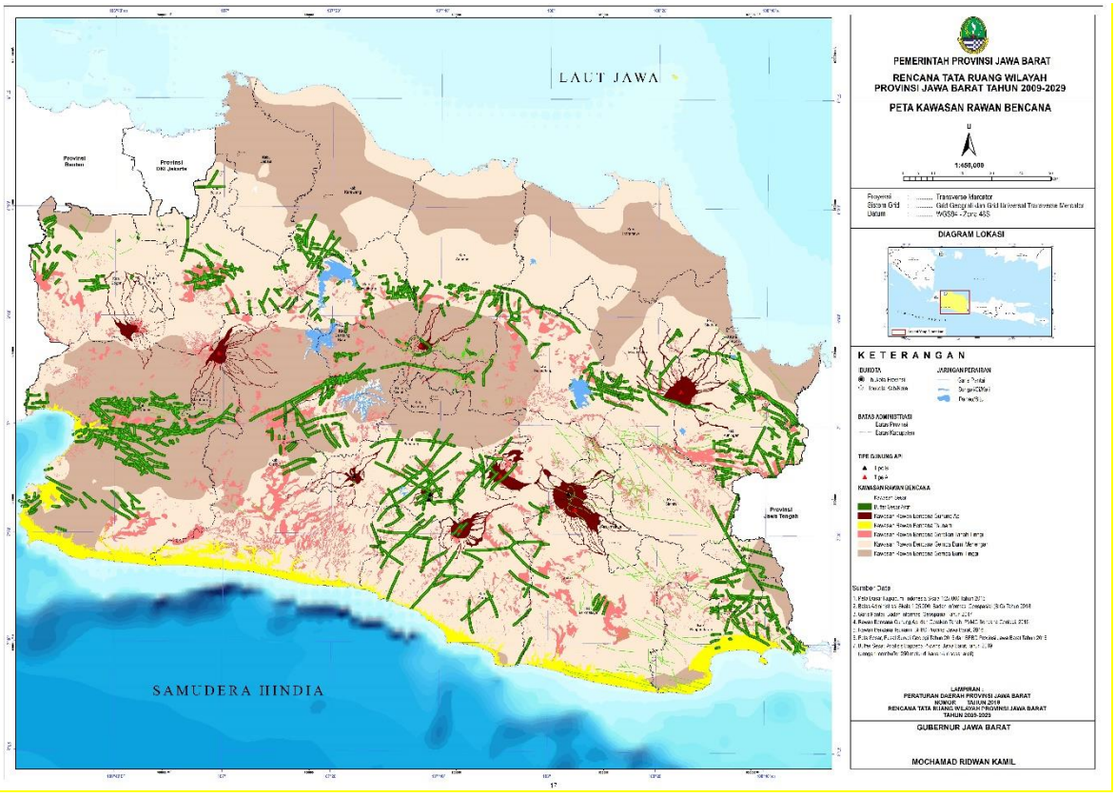

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Tahun 2009-2029

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 48,27 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun, jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat mengalami penambahan sekitar 5,2 juta jiwa atau rata-rata bertambah sebanyak 0,44 juta setiap tahun ekuivalen dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,11 persen per tahun. Dari 48,27 juta penduduk sebesar 91,7 persen atau sekitar 44,28 juta jiwa penduduk berdomisili sesuai KK/KTP. Sementara sisanya 8,3 persen atau sekitar 3,99 juta jiwa penduduk berdomisili tidak sesuai KK/KTP.

Struktur penduduk memperlihatkan bahwa penduduk Provinsi Jawa Barat didominasi oleh penduduk usia produktif. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Provinsi Jawa Barat didominasi oleh generasi Z dan milenial dengan proporsi generasi Z sebanyak 27,88 persen (13,37 juta jiwa) dan generasi milenial sebanyak 26,07 persen (12,5 juta jiwa) dari total populasi.

Gambar 2.3
Komposisi Penduduk menurut Generasi

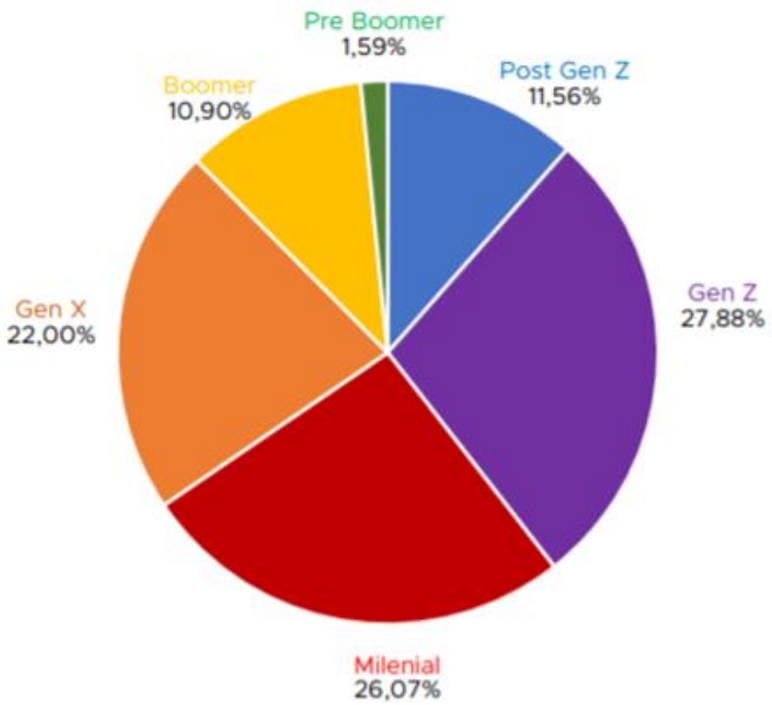

Sumber: William H. Frey, Analysis of Census Bureau Population Estimates (25 June, 2020)

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Perbedaan yang tajam antara kelompok umur tersebut mencerminkan bahwa Provinsi Jawa Barat masih berada dalam masa bonus demografi karena sebesar 70,68 persen penduduknya berada di dalam rentang usia produktif. Namun disisi lain, seiring dengan peningkatan umur harapan hidup, persentase penduduk usia lanjut (60 tahun ke atas) juga mengalami peningkatan dari 7,04 persen pada tahun 2010 menjadi 9,00 persen di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Jawa Barat akan memasuki era *ageing population* dimana persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai 10 persen atau lebih dari total populasi penduduk.

Tabel 2.5
Penduduk Jawa Barat Tahun 2018-2020

No	Indikator Kependudukan	Satuan	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	48.683.861	49.316.712	48.274.162
	- Laki-Laki	Jiwa	24.652.609	24.962.701	24.508.885
	- Perempuan	Jiwa	24.031.252	24.354.011	23.765.277
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,34	1,3	1,11
3	Kepadatan Penduduk	Jiwa/km^2	1.376	1.358	1.365

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Berdasarkan jenis kelamin tercatat jumlah penduduk laki-laki sebanyak 24,508 juta orang (50,77 persen), sementara jumlah penduduk perempuan sebanyak 23,765 juta orang (49,23 persen). Dengan demikian

rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Jawa Barat sebesar 103, yang artinya terdapat 103 laki-laki per 100 perempuan pada tahun 2020. Rasio jenis kelamin di level kabupaten/kota secara umum selaras dengan level provinsi, yaitu penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kabupaten/kota dengan rasio jenis kelamin tertinggi adalah Kabupaten Bogor 105,8 dan yang terendah adalah Kabupaten Ciamis 100,3.

Dengan luas daratan wilayah Provinsi Jawa Barat sebesar 35,38 ribu kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.365 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil SP2010 yang mencapai 1.217 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Provinsi Jawa Barat tersebar di 27 wilayah administrasi kabupaten/kota. Jumlah penduduk paling besar di Kabupaten Bogor mencapai 5,43 juta orang atau 11,24 persen dari total populasi penduduk Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk terbesar kedua terdapat di Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk sebanyak 3,62 juta orang (7,51 persen). Sementara jumlah penduduk paling kecil di Kota Cirebon dan Kota Banjar dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 333,3 ribu orang atau 0,69 persen dan 200,97 ribu orang atau 0,42 persen.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Bogor	2.789.738	2.637.330	5.427.068
2	Sukabumi	1.385.515	1.339.935	2.725.450
3	Cianjur	1.271.458	1.206.102	2.477.560
4	Bandung	1.848.018	1.775.772	3.623.790
5	Garut	1.324.971	1.260.636	2.585.607
6	Tasikmalaya	946.090	919.113	1.865.203
7	Ciamis	615.525	613.544	1.229.069
8	Kuningan	592.009	575.677	1.167.686
9	Cirebon	1.151.925	1.118.696	2.270.621
10	Majalengka	656.386	649.090	1.305.476
11	Sumedang	581.991	570.516	1.152.507
12	Indramayu	922.619	911.815	1.834.434
13	Subang	800.133	795.187	1.595.320
14	Purwakarta	506.830	491.039	997.869
15	Karawang	1.236.052	1.203.033	2.439.085
16	Bekasi	1.581.056	1.531.961	3.113.017
17	Bandung Barat	913.085	875.251	1.788.336
18	Pangandaran	212.213	211.454	423.667
19	Kota Bogor	529.236	513.834	1.043.070
20	Kota Sukabumi	174.385	171.940	346.325
21	Kota Bandung	1.231.116	1.213.044	2.444.160
22	Kota Cirebon	167.333	165.970	333.303

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
23	Kota Bekasi	1.281.692	1.261.984	2.543.676
24	Kota Depok	1.038.056	1.018.279	2.056.335
25	Kota Cimahi	286.825	281.575	568.400
26	Kota Tasikmalaya	363.740	352.415	716.155
27	Kota Banjar	100.888	100.085	200.973
Jawa Barat		**24.508.885**	**23.765.277**	**48.274.162**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2021

Tabel 2.7
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2020

Tahun	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Jiwa	Laju Pertumbuhan penduduk (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	24,962,701	24,354,011	49,316,712	1.30
2020	24,508,885	23,765,277	48,274,162	1.11

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2021

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB

Kinerja ekonomi Provinsi Jawa Barat pada triwulan I-2021 terkontraksi sebesar 0,83 persen lebih dalam dibanding nasional sebesar 0,74 persen. Kinerja ekonomi pada triwulan I-2021 menunjukkan arah perbaikan dibanding triwulan IV-2020 meskipun belum masuk zona pertumbuhan positif. Pada triwulan I-2021 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp535,89 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai Rp368,28 triliun. Berdasarkan sumber laju pertumbuhan secara *year-on-year* dari sisi lapangan usaha, lapangan usaha industri pengolahan memberikan andil penurunan terbesar sebesar -2,00 persen, sedangkan sari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan andil penurunan terbesar sebesar -1,22 persen.

Secara umum, perekonomian Provinsi Jawa Barat belum pulih pasca setahun dilanda pandemi COVID-19. Struktur PDRB ADHB menurut lapangan usaha masih didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 41,36 persen diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 14,41 persen. Adapun dari sisi pengeluaran, aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen

pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang memberikan kontribusi lebih dari separuh PDRB sebesar 66,40 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 25,21 persen.

Kinerja ekonomi pada triwulan I-2021 menunjukkan arah perbaikan terutama dari sisi lapangan usaha dan komponen pengeluaran yang memberikan andil terbesar dalam perekonomian Provinsi Jawa Barat, hal ini memberikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi selama tahun 2021 akan lebih baik dibanding tahun 2020. Ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,44 persen lebih dalam dibanding pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terkontraksi sebesar 2,07 persen. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi pada triwulan I-2020 dan hal ini menyebabkan penurunan aktivitas produksi pada beberapa lapangan usaha. Kontraksi tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 18,38 persen, diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,94 persen, dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,62 persen.

Gambar 2.4
Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2018-2020 (Persen)

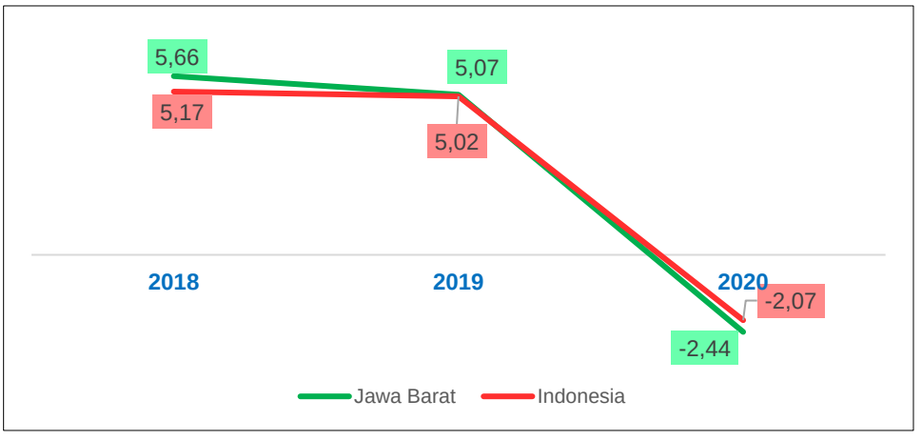

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021

Namun demikian beberapa lapangan usaha mampu tumbuh positif disaat pandemi COVID-19 yaitu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 34,64 persen, diikuti Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh sebesar 10,80 persen, Jasa Pendidikan

tumbuh sebesar 6,69 persen, dan lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan Perikanan yang mampu tumbuh positif sebesar 2,29 persen. Struktur perekonomian Provinsi Jawa Barat tahun 2020 masih didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 41,19 persen, diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 14,55 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,20 persen, dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,20 persen.

Gambar 2.5
Lapangan Usaha dengan Peranan Terbesar Tahun 2020 (Persen)

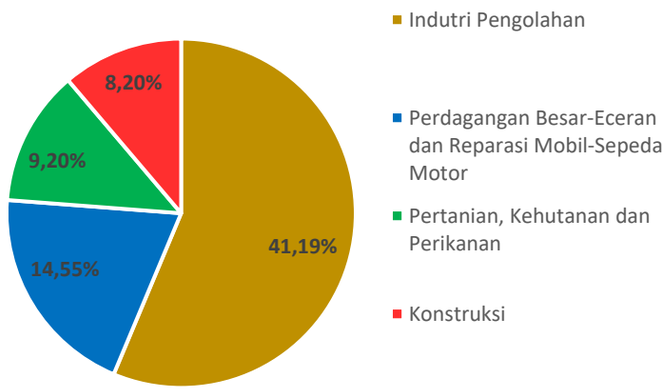

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2021

Perekonomian Provinsi Jawa Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2020 mencapai Rp2.008,04 triliun sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai Rp1.455,24 triliun yang memperlihatkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai refleksi capaian yang diperoleh dalam pembangunan.

Tabel 2.8
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019-2020 (Triliun Rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	2019	2020	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	186,44	192,12	104,6	106,99
B. Pertambangan dan Penggalian	26,45	23,16	24,79	23,77
C. Industri Pengolahan	884,12	860,07	641,35	614,29
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10,97	10,07	5,37	4,96

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	2019	2020	2019	2020
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,94	2,16	1,17	1,30
F. Konstruksi	181,32	171,26	126,63	119,07
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	323,63	303,86	232,87	214,37
H. Transportasi dan Pergudangan	117,22	109,15	71,06	68,10
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	61,14	60,85	40,93	38,63
J. Informasi dan Komunikasi	60,94	82,06	63,86	85,98
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	57,51	58,46	36,51	36,93
L. *Real Estate*	22,96	23,56	19,34	19,72
M,N. Jasa Perusahaan	9,97	8,40	6,86	5,60
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	49,06	46,03	28,70	26,72
P. Jasa Pendidikan	68,08	75,57	42,16	44,98
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,68	12,21	12,45	11,78
R,S,T,U Jasa Lainnya	45,61	45,05	32,91	32,05
PDRB	**2.124,04**	**2.008,04**	**1.491,58**	**1.455,24**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Pada sisi pengeluaran, penurunan kinerja terjadi pada seluruh komponen. Komponen dengan penurunan tertinggi yaitu Perubahan Inventori sebesar -62,35 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar -8,34 persen, Ekspor Barang dan Jasa sebesar -6,55 persen, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar -3,78 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar -2,89 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar -0,48 persen. Adapun komponen Impor Barang dan Jasa yang berlaku sebagai pengurang pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar -17,07 persen.

Struktur ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2020 menurut pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 66,04 persen; diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 23,66 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,68 persen. Sementara komponen pengeluaran lainnya memiliki kontribusi relatif kecil.

Tabel 2.9
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran
Tahun 2019 -2020 (Triliun Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	2019	2020	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.387,76	1.378,90	920,74	894,11
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	13,63	13,38	9,33	9,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	117,45	118,69	72,25	71,90
Pembentukan Modal Tetap Bruto	535,72	493,96	366,80	336,23
Perubahan Inventori	73,29	27,71	43,65	16,43
Ekspor Barang dan Jasa	943,71	915,06	591,69	552,91
Impor Barang dan Jasa	947,52	859,66	512,91	425,36
PDRB	**2.124,04**	**2.008,04**	**1.491,58**	**1.455,24**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Dalam konstelasi regional Jawa, semua provinsi di Pulau Jawa mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020. Provinsi Banten mengalami kontraksi paling dalam sebesar 3,38 persen dibanding pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat lebih baik dibanding dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Pulau Jawa hanya berada dibawah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.10
Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Antar Provinsi
di Pulau Jawa Tahun 2019-2020 (Persen)

Provinsi	2019	2020	Rata-rata 2020
DKI Jakarta	5,89	-2,36	-2,69
Jawa Tengah	5,41	-2,65	
Jawa Timur	5,52	-2,39	
DI Yogyakarta	6,60	-2,69	
Banten	5,53	-3,38	
Jawa Barat	**5,07**	**-2,44**	**--**
Indonesia	5,02	-2,07	--

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2021

Struktur perekonomian Provinsi Jawa Barat secara spasial masih didominasi oleh kelompok kabupaten/kota dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat sebesar 51,06 persen yaitu Kabupaten

Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kota Bandung. Sementara 23,93 persen disumbang oleh 6 (enam) kabupaten/kota yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Indramayu. Adapun 17 (tujuh belas) kabupaten/kota lainnya menyumbang sebesar 26,01 persen terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.6
Pola Spasial Peranan Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat (Persen)

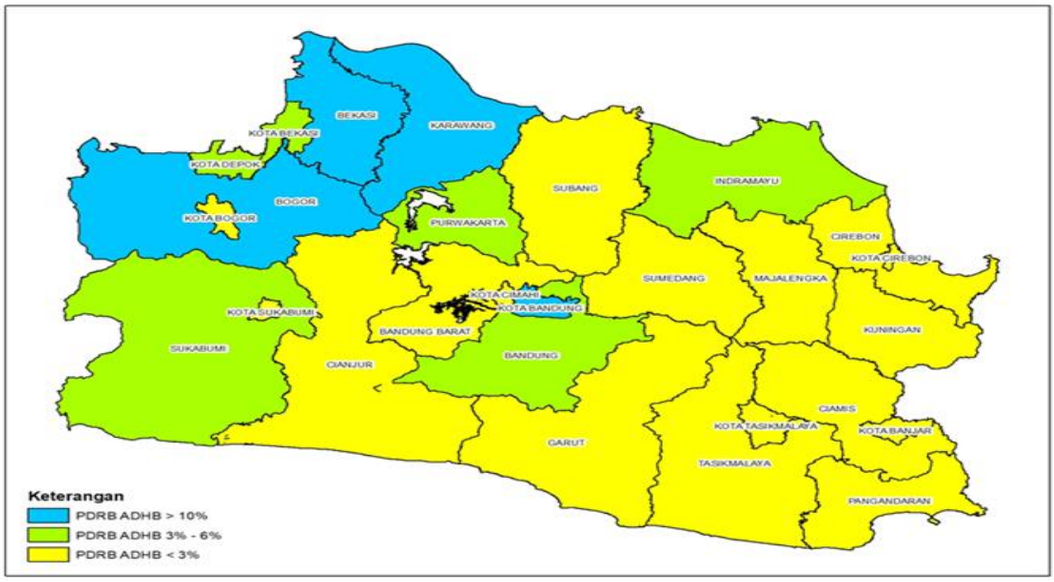

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat. 2021

Level kontraksi pertumbuhan yang bervariasi antardaerah kabupaten/kota dirasakan sebagai dampak dari pandemi COVID-19, oleh karena itu sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020. Namun demikian, masih terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan positif yaitu Kabupaten Kuningan tumbuh sebesar 0,09 persen, Kabupaten Majalengka tumbuh sebesar 0,86 persen, dan Kota Banjar tumbuh sebesar 1,04 persen.

Tabel 2.17
Pertumbuhan PDRB Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2019-2020 (Persen)

No	Kabupaten/Kota	2019	2020
1	Bogor	5,85	-1,77
2	Sukabumi	5,81	-1,08
3	Cianjur	5,67	-0,78
4	Bandung	6,13	-1,87
5	Garut	5,02	-1,26
6	Tasikmalaya	5,43	-0,98
7	Ciamis	5,38	-0,14
8	Kuningan	6,59	0,09
9	Cirebon	4,68	-1,08
10	Majalengka	7,71	0,86
11	Sumedang	6,33	-1,12
12	Indramayu	3,20	-1,58
13	Subang	4,41	-1,27
14	Purwakarta	4,38	-2,05
15	Karawang	4,08	-3,59
16	Bekasi	3,94	-3,30
17	Bandung Barat	5,05	-2,41
18	Pangandaran	5,94	-0,05
19	Kota Bogor	6,05	-0,53
20	Kota Sukabumi	5,49	-1,48
21	Kota Bandung	6,79	-2,28
22	Kota Cirebon	6,29	-0,99
23	Kota Bekasi	5,41	-2,55
24	Kota Depok	6,74	-1,92
25	Kota Cimahi	7,85	-2,26
26	Kota Tasikmalaya	5,97	-2,01
27	Kota Banjar	5,03	1,04
Jawa Barat		**5,07**	**-2,44**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021

2.1.2.2 PDRB Per Kapita

Kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan pendapatan per kapita baik nasional (PDB per Kapita) maupun Provinsi Jawa Barat (PDRB per Kapita) mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. PDB per Kapita (ADHK) turun sebesar Rp5,50 juta sedangkan PDRB per Kapita (ADHK) Provinsi Jawa Barat turun sebesar Rp1,10 juta. PDRB per Kapita Provinsi Jawa Barat lebih kecil dari PDB per Kapita, ini berarti rata-rata pendapatan per kapita penduduk secara nasional lebih tinggi dibanding rata-rata pendapatan per kapita penduduk Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.11
PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020 (Juta Rupiah)

PDRB per Kapita	2018	2019	2020
PDRB per Kapita (ADHB)	40,27	43,07	41,81
PDRB per Kapita (ADHK)	29,16	30,24	29,14

Sumber: BPS , Tahun 2021

Gambar 2.7
Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) Provinsi Jawa Barat dengan PDB Per Kapita (ADHK) Tahun 2018-2020 (Juta Rupiah)

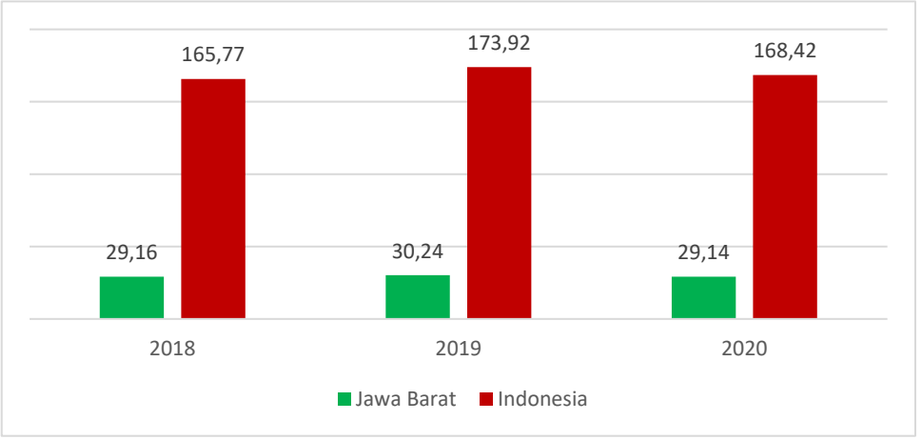

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2021

Dalam konstelasi nasional, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan PDRB per Kapita tertinggi di Indonesia. Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, PDRB per Kapita Provinsi Jawa Barat lebih besar dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta. Mengacu pada klasifikasi pendapatan *World* Bank, rata-rata pendapatan per kapita penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 termasuk dalam kategori *lower middle income* dimana pendapatan per kapita antara USD1.026 – USD3.955.

Tabel 2.12
Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) Antar Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2019-2020 (Juta Rupiah)

Provinsi	2019	2020	Rata-rata 2020
DKI Jakarta	269,07	260,44	--
Jawa Tengah	39,24	38,60	44,60
Jawa Timur	59,26	56,55	

Provinsi	2019	2020	Rata-rata 2020
DI Yogyakarta	36,80	35,65	
Banten	51,44	47,60	
Jawa Barat	**43,07**	**41,81**	**--**
Indonesia	59,10	56,90	--

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2020

PDRB per kapita Jawa Barat tahun 2020 jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa berada di posisi keempat dengan capaian 41,81 Juta Rupiah. Selain itu, PDRB per kapita Jawa Barat pada tahun 2020 lebih rendah dari Nasional yang mencapai 56,90 Juta Rupiah, dan lebih rendah dari rata-rata PDRB per kapita provinsi di Pulau Jawa yang mencapai 44,60 Juta Rupiah.

2.1.2.3 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Selama periode Tahun 2015-2020, tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat yang diukur dengan *indeks gini* menunjukkan angka yang berfluktuasi. Tingkat ketimpangan pendapatan termasuk dalam kategori ketimpangan sedang, hanya di perdesaan termasuk kategori ketimpangan rendah. Pada Maret 2020, angka *indeks gini* di perkotaan + perdesaan menunjukan penurunan dibandingkan Maret 2015. Tercatat pada Maret 2015, angka *indeks gini* di perkotaan sebesar 0,433 menurun menjadi 0,412 pada Maret 2020. Namun tidak demikian dengan perdesaan, dimana angka indeks gini justru mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2015, dari 0,316 menjadi 0,325 pada Maret 2020.

Gambar 2.8
Indeks Gini Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

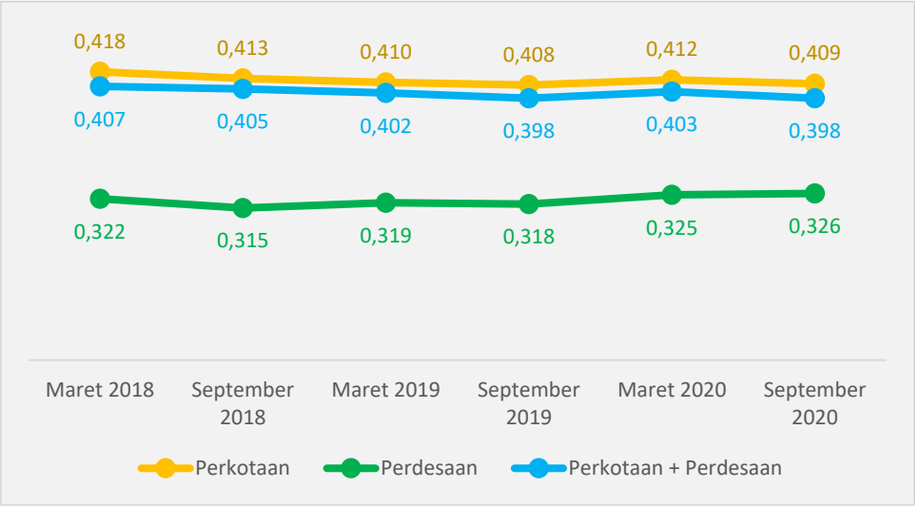

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Jika dibandingkan dengan nasional, *indeks gini* Provinsi Jawa Barat memiliki angka lebih tinggi. Dari gambar 2.8 terlihat bahwa *Indeks gini* Provinsi Jawa Barat tahun 2020 adalah sebesar 0, 398 yang lebih tinggi dari *indeks gini* Nasional pada tahun 2020 sebesar 0,385. Bila dibandingkan dengan provinsi lain se-Indonesia, maka posisi *indeks gini* Jawa Barat pada Maret 2020 berada pada posisi tertinggi kedua setelah DI Yogyakarta dari 34 provinsi. Kondisi ini menunjukan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat cukup besar dibandingkan daerah lain dan membutuhkan berbagai kebijakan untuk mengejar pemerataan.

Tabel 2.13
Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2019-2020

Provinsi	2019		2020	
	Maret	Sept	Maret	Sept
DKI Jakarta	0,399	0,400	0,390	0,391
Jawa Barat	0,403	0,398	0,400	0,398
Jawa Tengah	0,362	0,359	0,360	0,358
DI Yogyakarta	0,434	0,437	0,420	0,420
Jawa Timur	0,366	0,364	0,370	0,384
Banten	0,363	0,365	0,370	0,361
Indonesia	**0,381**	**0,385**	**0,380**	**0,380**

Sumber: BPS RI, Tahun 2021

Perkembangan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat pada September 2020 menunjukkan penurunan dibanding Maret 2020 yang berarti tingkat kesenjangan pengeluaran penduduk mengalami perbaikan**.** Namun demikian, jika dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, angka indeks gini Provinsi Jawa Barat berada di atas 4 (empat) provinsi lain kecuali DI Yogyakarta dan diatas rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dibanding provinsi lain (Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur dan DKI Jakarta) dan rata-rata nasional.

2.1.2.4 Indeks Williamson

Pemerataan pembangunan daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Indeks williamson merupakan salah satu alat ukur ketimpangan antarwilayah dengan pendekatan PDRB per Kapita. Indeks Williamson pada periode Tahun 2018-2019 menunjukkan tren menurun dari 0,673 pada tahun 2018 menjadi 0,665 pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan ketimpangan antarwilayah selama periode tahun tersebut semakin mengecil.

Pada tahun 2020, indeks williamson menunjukkan kenaikan dibanding tahun 2019, hal ini mengindikasikan tingkat ketimpangan antarwilayah di Provinsi Jawa Barat semakin melebar dalam 1 (satu) tahun terakhir. Pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap melemahnya kinerja perekonomian di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menyebabkan tingkat ketimpangan antarwilayah semakin melebar. Hal ini akibat terkontraksinya pertumbuhan ekonomi di sebagian besar kabupaten/kota yang disebabkan penurunan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), sementara disisi lain penduduk terus bertambah dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 1,11 persen. Penurunan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tersebut berimplikasi pada turunnya nilai PDRB per Kapita di semua kabupaten/kota.

Gambar 2.9
Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

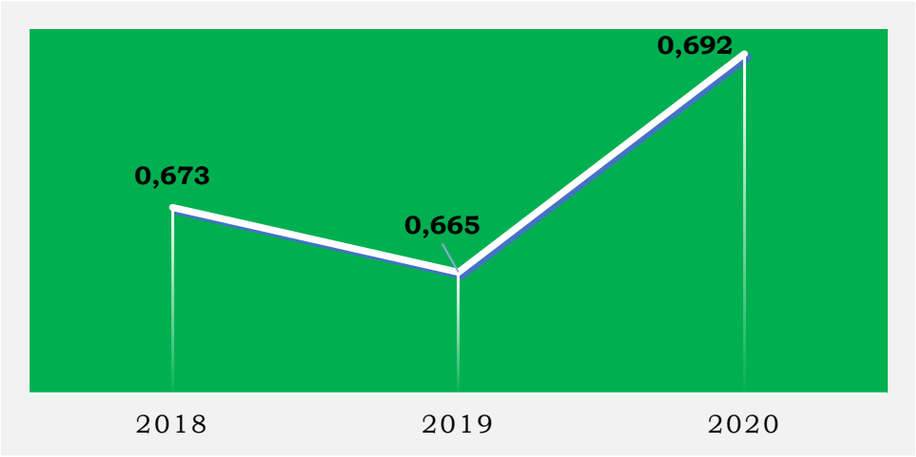

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

2.1.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat terus memperlihatkan perkembangan yang positif. Selama periode 3 (tiga) tahun terakhir, IPM Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan hingga pada tahun 2020 mencapai 72,09 poin. Pertumbuhan IPM tertinggi terjadi pada periode 2018-2019 yang tumbuh sebesar 1,02 persen. Pandemi COVID-19 telah berimbas pada pertumbuhan IPM di tahun 2020 yang mana pertumbuhan IPM menurun dibanding tahun 2019 sehingga IPM hanya mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin

Gambar 2.10
Tren Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhannya
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

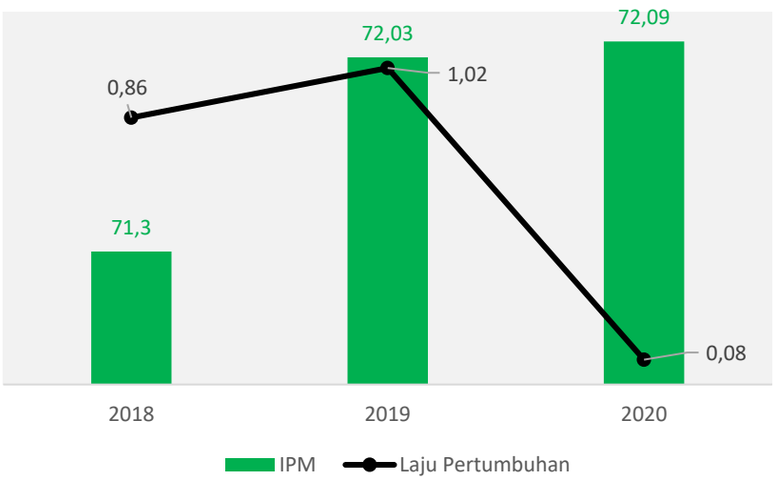

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Tabel 2.14
IPM beserta Komponennya Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Usia Harapan Hidup	Tahun	72,66	72,85	73,04
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,45	12,48	12,50
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,15	8,37	8,55
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah	10.790	11.152	10 .845
Indeks Pembangunan Manusia	**Indeks**	**71,30**	**72,03**	**72,09**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, IPM Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat ke-4 di bawah DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Banten. Capain IPM tahun 2020 lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 71,94 poin. Hal ini menunjukkan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat yang direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak lebih baik dibanding capaian rata-rata nasional.

Tabel 2.15
Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2020 (Tahun)

Provinsi	2019	2020	Rata-rata IPM 2020
DKI Jakarta	80,76	80,77	**75,35**
Jawa Barat	**72,03**	**72,09**	
Jawa Tengah	71,73	71,87	
DI Yogyakarta	79,99	79,97	
Jawa Timur	71,50	71,71	
Banten	72,44	72,45	
Indonesia	**71,92**	**71,94**	--

Sumber: BPS, 2021

Dimensi pengetahuan/pendidikan pada IPM dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2018-2020, HLS di Provinsi Jawa Barat telah

meningkat sebesar 0,05 tahun, sementara RLS meningkat sebesar 0,40 tahun.

HLS menunjukkan peningkatan tahun bersekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 (tujuh) tahun di masa mendatang. Pada tahun 2020, HLS di Provinsi Jawa Barat telah mencapai 12,50 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 (tujuh) tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau hingga menempuh jenjang Diploma I.

Gambar 2.11
Tren Harapan Lama Sekolah dan Pertumbuhannya
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

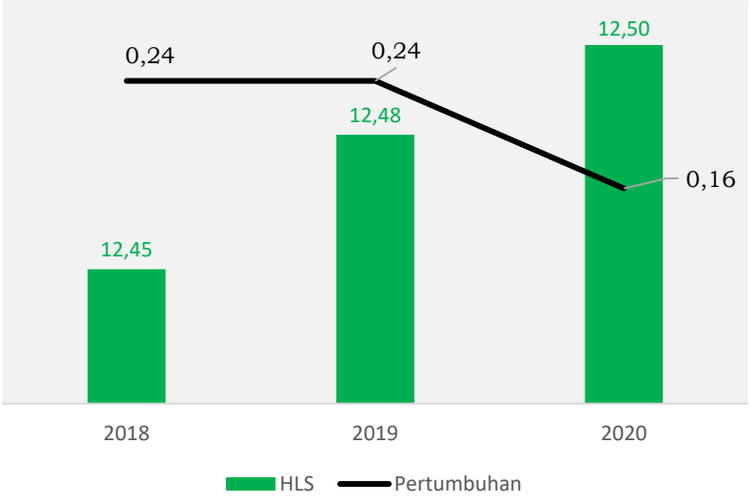

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Dalam skala regional Pulau Jawa, HLS Provinsi Jawa Barat merupakan yang terendah dibanding 5 (lima) provinsi lainnya. DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan capaian HLS tertinggi mencapai 15,59 tahun diikuti oleh Provinsi Jawa Timur mencapai 13,19 tahun. Angka HLS ini menunjukkan rata-rata peluang anak usia 7 (tujuh) tahun ke atas yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah lebih lama dibanding penduduk usia 7 (tujuh) tahun ke atas yang berdomisili di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.16
Capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2019-2020 (Tahun)

Provinsi	2019	2020	Rata-rata HLS 2020
DKI Jakarta	12,97	12,98	**13,47**
Jawa Barat	**12,48**	**12,50**	
Jawa Tengah	12,68	12,70	
DI Yogyakarta	15,58	15,59	
Jawa Timur	13,16	13,19	
Banten	12,88	12,89	
Indonesia	**12,95**	**12,98**	**--**

Sumber: BPS. 2021

Sementara RLS penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari 8,15 tahun pada tahun 2018 menjadi 8,55 tahun di tahun 2020 . Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat yang lebih baik. Pada tahun 2020, secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 8,55 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (atau setara SMP kelas 2).

Gambar 2.12
Tren Rata-Rata Lama Sekolah dan Pertumbuhannya
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

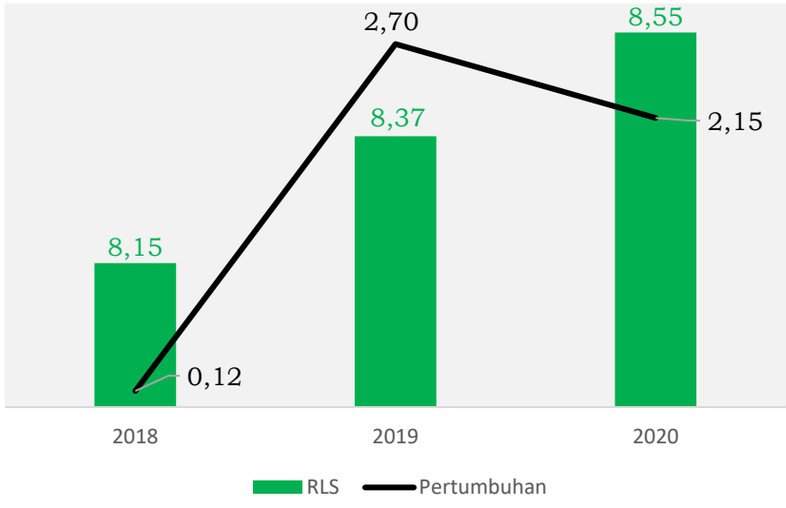

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Rata-rata Lama Sekolah yang merupakan komponen pembentuk indeks pendidikan menunjukkan peningkatan di tahun 2020 meskipun dilanda pandemi COVID-19. Semua provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan RLS, Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan RLS paling tinggi sebesar 0,19 tahun. Capaian RLS Provinsi Jawa Barat masih lebih rendah dibanding rata-rata provinsi namun sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata nasional dan Provinsi Jawa Tengah serta Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan rata-rata lama pendidikan yang ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Jawa Barat lebih lama dibanding rata-rata nasional dan 2 (dua) provinsi lainnya.

Tabel 2.17
Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2019-2020 (Tahun)

Provinsi	2019	2020	Rata-rata Provinsi 2020
DKI Jakarta	11,06	11,13	**9,00**
Jawa Barat	**8,37**	**8,55**	
Jawa Tengah	7,53	7,69	
DI Yogyakarta	9,38	9,55	
Jawa Timur	7,59	7,78	
Banten	8,74	8,89	
Indonesia	**8,34**	**8,48**	-

Sumber: BPS. 2021

Salah satu indikasi meningkatnya derajat kesehatan suatu wilayah adalah rata-rata umur harapan hidup yang lebih lama. Peningkatan derajat kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat melalui desentralisasi layanan kesehatan. Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, aksesibilitas, SDM kesehatan hingga kualitas pelayanan kesehatan.

Selama periode Tahun 2018-2020, Provinsi Jawa Barat telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir sebesar 0,38 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,26 persen per tahun. Pada tahun 2018, UHH saat lahir di Provinsi Jawa Barat sebesar 72,66 tahun dan pada tahun 2020

meningkat menjadi 73,04 tahun. Peningkatan UHH saat lahir mengindikasikan kemajuan pembangunan bidang kesehatan.

Gambar 2.13
Tren Umur Harapan Hidup Saat Lahir dan Pertumbuhannya
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

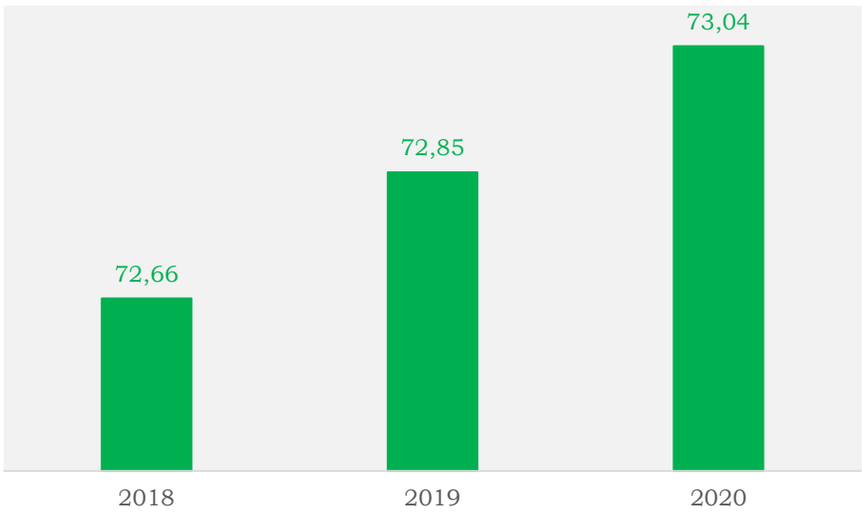

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Dalam skala regional Pulau Jawa, pada tahun 2020 capaian UHH secara rata-rata sudah diatas 70 tahun kecuali Provinsi Banten yang masih dibawah 70 tahun (69,96 tahun). Umur Harapan Hidup masyarakat di Provinsi Jawa Barat lebih lama dibanding rata-rata nasional sebesar 71,47 tahun dan rata-rata capaian provinsi di Pulau Jawa sebesar 72,71 tahun. Namun demikian, capaian UHH Provinsi Jawa Barat masih dibawah Provinsi DI Yogyakarta (74,99 tahun) dan Provinsi Jawa Tengah (74,37 tahun).

Tabel 2.18
Capaian Umur Harapan Hidup Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2019-2020 (Tahun)

Provinsi	2019	2020	Rata-rata Provinsi 2020
DKI Jakarta	72,79	72,91	**72,71**
Jawa Barat	**72,85**	**73,04**	
Jawa Tengah	74,23	74,37	
DI Yogyakarta	74,92	74,99	
Jawa Timur	71,18	71,30	

Provinsi	2019	2020	Rata-rata Provinsi 2020
Banten	69,84	69,96	
Indonesia	**71,34**	**71,47**	-

Sumber: BPS. 2021

Dimensi lainnya dari IPM adalah standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan. Kurun waktu Tahun 2018-2019 pengeluaran per kapita masyarakat meningkat sebesar Rp362.000 dari tahun 2018 sebesar Rp10.790.000 menjadi tahun 2019 sebesar Rp11.152.000. Pandemi COVID-19 telah berimbas pada pengeluaran per kapita tahun 2020 sebesar Rp10.845.000 yang mengalami penurunan menjadi sebesar Rp307.000 dibanding tahun 2019. Penurunan pengeluaran per kapita mengindikasikan penurunan daya beli masyarakat secara umum.

Gambar 2.14
Tren Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan dan Pertumbuhannya Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 (Rp Ribu dan Persen)

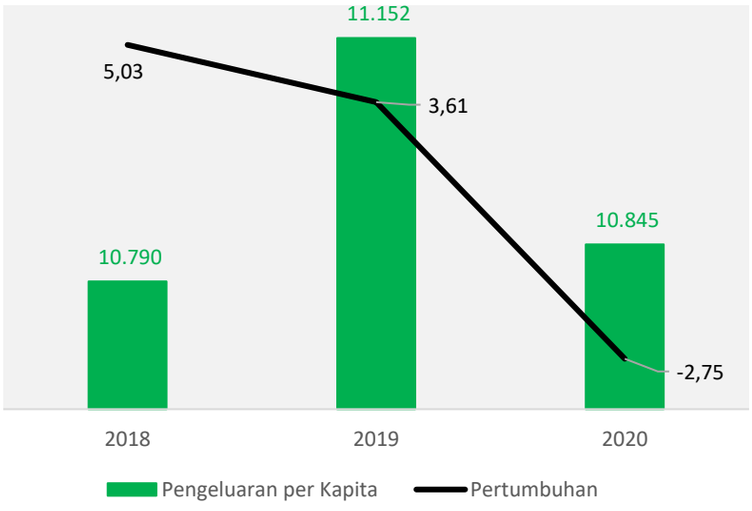

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Pengeluaran per Kapita Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa relatif lebih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk, dimana Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia sebesar 48,27 juta jiwa. Meskipun terdampak pandemi COVID-19, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan pengeluaran per kapita terbesar mencapai Rp18.227.000

di tahun 2020. Secara nasional, pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Barat lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang mencapai Rp11.013.000 per orang per tahun.

Tabel 2.19
Capaian Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2020 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

Provinsi	2019	2020	Rata-rata Provinsi 2020
DKI Jakarta	18.527	18.227	11.871 (diluar DKI Jakarta)
Jawa Barat	**11.152**	**10.845**	
Jawa Tengah	11.102	10.930	
D I Yogyakarta	14.394	14.015	
Jawa Timur	11.739	11.601	
Banten	12.267	11.964	
Indonesia	**11.299**	**11.013**	-

Sumber: BPS. 2021

2.1.2.6 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan sering sekali menjadi penghambat laju pembangunan manusia, misalnya penduduk miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga berpengaruh buruk bagi hidupnya. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan perlu aksi yang mencakup berbagai dimensi yang berkaitan. Persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dibanding kondisi Maret 2019 – Maret 2020 dari 6,91 persen menjadi 7,88 persen. Hal ini berarti jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat bertambah sebesar ±530 ribu jiwa.

Gambar 2.15
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

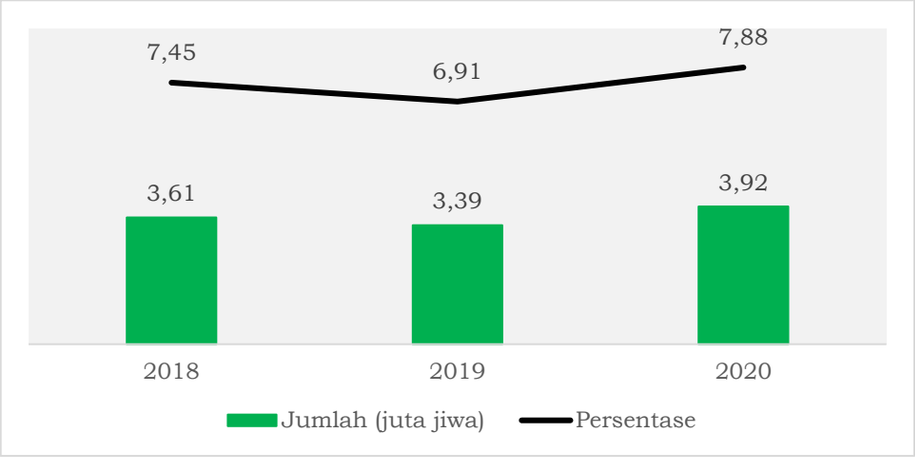

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Berdasarkan tabel di bawah indeks kedalaman kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Barat sebesar 1,28 persen pada tahun 2016, dan terendah sebesar 1,06 persen di tahun 2019, dan meningkat lagi pada tahun 2020 menjadi 1,13 persen. Penurunan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Tabel 2.20
Indikator Kemiskinan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

No	Indikator	Indikator Kemiskinan		
		2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	3,54	3,38	3,92
2	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	371.376	391.009	410.988
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,25	6,82	7,9 – 7,3
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	1,13	1,06	1,13
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,27	0,24	0,23

Sumber: BPS RI, Tahun 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Berdasarkan tabel di atas, Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi sebesar 0,27 persen di tahun 2018, dan terendah sebesar 0,23 persen di tahun 2020. Kondisi keparahan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,23 persen pada tahun 2020 yang berarti turun dari tahun sebelumnya, memiliki makna bahwa sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat semakin rendah.

Dari gambar di bawah dapat dilihat bahwa pada periode Tahun 2018-2020 terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Walaupun kondisi tersebut juga menunjukkan terjadi perlambatan penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dari target yang telah ditetapkan akibat dari kondisi makro ekonomi nasional. Informasi lain yang diperoleh dari gambar tersebut, yaitu persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 1,76 persen.

Gambar 2.16
Persentase Penduduk Miskin
di Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2018-2020

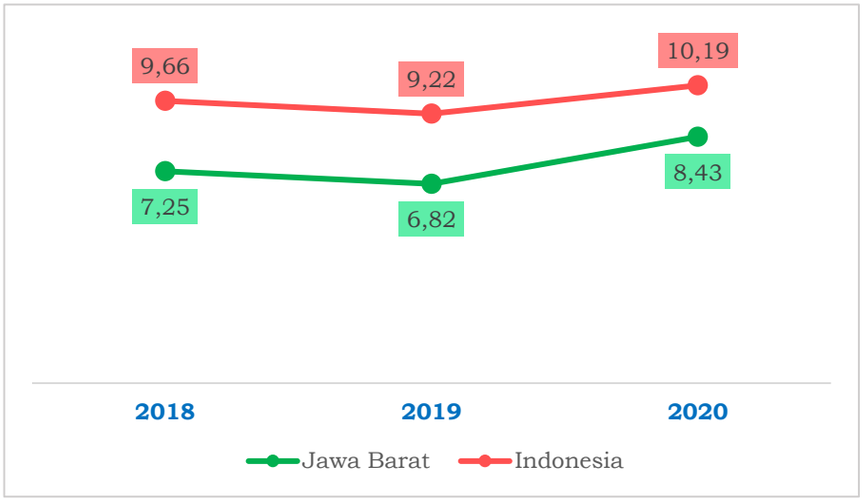

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2021

Tabel 2.21
Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2019-2020 Kondisi September (Persen)

Provinsi	2019	2020	Rata-rata 2020
DKI Jakarta	3,42	4,69	9,48
Jawa Tengah	10,58	11,84	
Jawa Timur	10,20	11,46	
DI Yogyakarta	11,44	12,80	
Banten	4,94	6,63	
Jawa Barat	**6,82**	**8,43**	--
Indonesia	9,22	10,19	--

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2020

Persentase penduduk miskin Jawa Barat tahun 2020 berada di posisi keempat di antara provinsi di Pulau Jawa dengan capaian 8,43 persen. Selain itu, persentase penduduk miskin Jawa Barat pada tahun 2020 lebih rendah dari Nasional yang mencapai 10,19 persen, dan lebih rendah dari rata-rata persentase penduduk miskin provinsi di Pulau Jawa yang mencapai 9,48 persen.

2.1.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang lebih kompleks dibandingkan provinsi lain. Selama periode Tahun 2016-2019, kondisi TPT di Provinsi Jawa Barat turun sebesar 0,85 persen, dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 2,42 persen.

Pada Agustus 2020, TPT di Provinsi Jawa Barat mencapai 10,46 persen. Pada tahun 2020 jumlah pengangur adalah sebesar 2,53 juta meningkat sebesar 35,2 persen dibanding tahun 2016. Dibandingkan dengan TPT nasional, maka TPT Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu berada pada posisi lebih tinggi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.17
Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Tingkat pengangguran terbuka kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 menunjukkan angka yang bervariasi. Pada tahun 2020 beberapa kabupaten/kota dengan TPT lebih rendah dibandingkan nasional yaitu Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, dan kota Banjar. Selanjutnya kabupaten/kota dengan TPT lebih rendah dari provinsi dan lebih tinggi dari nasional yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kota Depok. Kabupaten/kota dengan TPT di atas provinsi yaitu Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.22
Tingkat Pengangguran Terbuka Antar Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2019-2020 (Persen)

Provinsi	2019	2020	Rata-rata 2020
DKI Jakarta	6,54	10,95	7,70
Jawa Tengah	4,44	6,48	
Jawa Timur	3,82	5,84	
DI Yogyakarta	3,18	4,57	
Banten	8,11	10,64	
Jawa Barat	**8,04**	**10,46**	--
Indonesia	5,23	7,07	--

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2020

Tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat tahun 2020 termasuk dalam 3 (tiga) provinsi tertinggi di Pulau Jawa, bersama dengan Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat pada tahun 2020 lebih tinggi dari Nasional yang mencapai 7,07 persen, dan lebih tinggi dari rata-rata tingkat pengangguran terbuka provinsi di Pulau Jawa yang mencapai 7,70 persen.

2.1.2.8 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dalam mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender dapat digunakan beberapa indikator, diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau *gap* pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia perempuan dan laki-laki. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa IPG Jawa Barat selama periode 2015 sampai 2019 menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun kecuali tahun 2017 yang sempat turun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, IPG Jawa Barat berada di nilai 89,19 meningkat menjadi 89,26 pada tahun 2019. Kecendrungan peningkatan juga terjadi pada IDG yang diawali dengan nilai 69,02 pada tahun 2015 dan menjadi 69,48 pada tahun 2019.

Gambar 2.18
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2015-2019

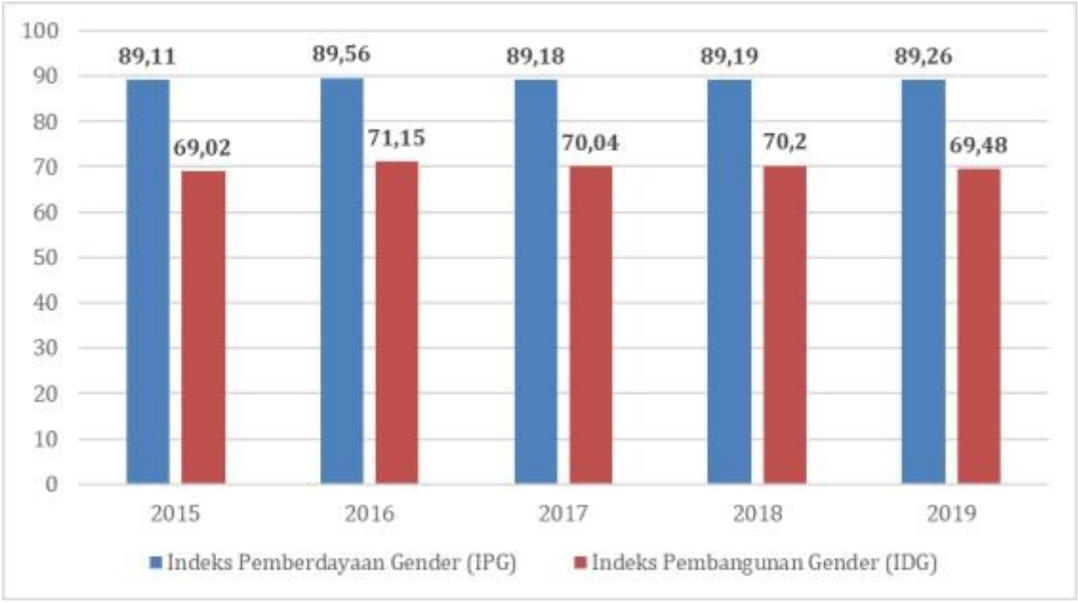

Sumber: BPS RI, Tahun 2020

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1 Pendidikan

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat pada RPJMD periode Tahun 2018-2023 adalah bidang Pendidikan. Ukuran keberhasilan program-program pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dari ketercapaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Terdapat 19 (sembilan belas) kecamatan yang tidak mempunyai sekolah (SMA/SMK) Negeri maupun Swasta dari total kecamatan di Provinsi Jawa Barat sebanyak 627 kecamatan. Kabupaten yang memiliki jumlah kecamatan yang didalamnya tidak terdapat sekolah (SMA/SMK) Negeri maupun Swasta adalah Kabupaten Kuningan dengan jumlah kecamatan yang tidak memiliki sekolah (SMA/SMK) Negeri maupun Swasta sebanyak 8 (delapan) kecamatan.

Indikator kinerja urusan pendidikan cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Beberapa

indikator yang mengalami peningkatan diantaranya Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/Paket C, Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Paket C, Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA), Angka Kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA), SMA/SMK Sederajat Akreditasi A, Kualifikasi S2 Guru SMA dan Kualifikasi Guru SMK. Indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
APK SD/MI	103,35	104,45	104,46
APK SMP/MTs	99,27	99,37	99,61
APK SMA/SMK/MA	75,31	77,82	90,94
APM SD/MI	94,36	94,42	96,75
APM SMP/MTs	76,65	78,17	76,73
APM SMA/SMK/MA	57,33	57,53	66,77
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun	67,17	67,29	67,29
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/Paket C	75,31	77,82	90,94
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Paket C	57,33	57,53	66,77
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas	20	19	19
Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	0,28	0,3	SMA: 0,22 SMK: 0,38
Angka Kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	98,56	98,78	SMA: 99,27 SMK: 98,29
Persentase Angka Melanjutkan dari jenjang SMA/MA/SMK ke Perguruan Tinggi	40,57	N/A	N/A
SMA/SMK Sederajat Akreditasi A	43,23	43,64	SMA: 56,07 SMK: 33,28
Kualifiaksi S2 Guru SMA	13,31	13,7	13.74
Kualifiaksi S2 Guru SMK	6,83	6,69	7.60
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/MA/SMK	659	194	RKB: 93 RPS: 135
Nilai Rerata Uji Kompetensi GTK SMA/MA/SMK/SLB	N/A	58,97	58,97
Indeks Kepuasan Pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	N/A	3,20	3.22

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2020

Lakip Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, diolah

2.1.3.1.2 Kesehatan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas

layanan dan cakupan akses pelayanan kesehatan. Keberhasilan program-program pembangunan di bidang kesehatan dapat diukur dari indikator Indeks Kesehatan, Rasio Kematian Bayi, dan Jumlah Kasus Kematian Ibu. Rasio Kematian Bayi menunjukkan tren yang positif, dimana Rasio Kematian Bayi pada tahun 2020 menjadi 3,18 persen dari 3,26 persen pada tahun 2019 dan Jumlah Kasus Kematian Ibu turun menjadi 684 kasus pada tahun 2019.

Indikator yang mengalami penurunan pada Tahun 2018-2020 adalah Rasio Kematian Bayi, dan Jumlah Kasus Kematian Ibu. Sedangkan indikator yang mengalami kecenderungan peningkatan pada Tahun 2018-2020 adalah Rasio Puskesmas/ per satuan penduduk, Persentase penduduk menggunakan jamban sehat, Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi, Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi, Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan, dan Prevalensi Hipertensi. Indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Indeks Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Indeks Kesehatan	Indeks	81,02	-	-
Rasio Kematian Bayi	Persen	3,4	3,26	3,18
Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	700	684	-
Rasio Posyandu per Satuan Balita	Rasio	82,85	-	-
Rasio Puskesmas/ per satuan penduduk	Rasio	44.746	45.328	45.687
Persentase Rumah tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	61,8	60,4	59,25
Persentase Desa Siaga Aktif	Persen	99	99,9	N/A
Persentase penduduk menggunakan jamban sehat	Persen	69,78	72,39	82,49
Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	Persen	94,18	96,71	94,9
Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar	Persen	38,64	66,64	N/A
Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi	Puskesmas	772	1028	1083
Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi	Rumah Sakit	229	320	376
Jumlah RS mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar	Rumah Sakit	98	-	-

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Persentase ketersediaan obat esensial di instalasi farmasi kabupaten/kota	Persen	94,18	94,33	92,12
Persentase penduduk dengan jaminan kesehatan	Persen	83,17	84,46	85,51
Persentase Keberhasilan Pengobatan TB (*Treatment Success Rate*)	Persen	87	67	73,16
Persentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI >90%	Persen	91,9	93,8	44,8
Prevalensi Hipertensi	Persen	34,5	39,6	39,6
Persentase Kabupaten/Kota dengan 100% Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa	Persen	100	100	100
Rasio Kematian Ibu	Per 100.000 KH	-	-	85,77
Prevalensi Stunting	persen	-	-	26,21

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2020
Lakip Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, diolah

Keterangan:

-) Data tidak ada

**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

Sejak awal tahun 2020 yang lalu telah terjadi pandemi COVID-19, yang mengakibatkan adanya perubahan sistem tatanan kehidupan, baik ditingkat global, nasional maupun ditingkat daerah. Dalam upaya menangani penyebaran pandemi COVID-19 yang lebih luas kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai upaya pencegahan. Penanganan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 dilakukan secara komprehensif, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

1. Upaya Promotif

Upaya promotif dilakukan mulai dari sosialisasi, publikasi dan edukasi kepada masyarakat, yaitu mengedukasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari agar menerapkan protokol kesehatan, serta menerapkan Polah Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Upaya promotif juga dilakukan melalui penyebaran dan penempelan *leaflet* tentang pandemi COVID-19, serta menggalang peningkatan partisipasi masyarakat dan seluruh sektor untuk membantu penanganan pandemi COVID-19, sosialisasi melalui media-media informasi, baik radio, tv, media masa dan

memanfaatkan media informasi seperti *facebook*, *instagram* serta penyuluhan kesehatan oleh tenaga kesehatan.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif, yang telah dilakukan meliputi:

a) penyelidikan epidemiologi, pemantauan dan pendataan kepada seluruh kriteria kasus beserta kontak eratnya;
b) melakukan analisa terhadap peningkatan kasus, pemetaan persebaran kasus, dan kejadian transmisi lokal (pelacakan klaster);
c) menerapkan PSBB di daerah zona merah, yakni memberlakukan dan mengawasi pelaksanaan *social distancing*, seperti meliburkan anak sekolah dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari rumah, memberlakukan bekerja dari rumah secara bergantian/ *Work From Home* (WFH), membatasi kegiatan di tempat umum dan membatasi kegiatan yang mengumpulkan massa;
d) melaksanakan pemeriksaan *rapid test* bagi masyarakat, dan
e) membuat Alat Pelindung Diri (APD)/ masker secara mandiri dan membagikannya kepada masyarakat, membagikan *hand sanitaizer*, pengadaan sarana cuci tangan di tempat umum, dan penyemprotan disinfektan.

3. Upaya Kuratif

Upaya kuratif dilakukan melalui:

a) menyiapkan tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan Rumah Sakit untuk melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar pandemi COVID-19, pelayanan kesehatan baik bagi masyarakat yang dengan gejala maupun yang tanpa gejala (OTG),
b) menyediakan obat-obatan untuk menangani kasus pandemi COVID-19 dan penyediaan/pemenuhan alat-alat kesehatan untuk penanganan pasien COVID-19 dan menyediakan sarana rujukan yang aman untuk pasien COVID-19.

4. Upaya Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif dilakukan melalui pemantauan kepada pasien COVID-19 yang telah sembuh. Untuk mengetahui perkembangan kesehatannya dan agar tetap melakukan *social distancing*. Upaya-upaya penangan pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat tidak hanya oleh sektor kesehatan saja, tetapi melibatkan lintas sektor lainnya. Semua perangkat daerah dilingkungan pemerintahan berperan dalam penanganan dan penyebaran pandemi COVID-19 minimal di lingkungan tempat kerjanya. Disamping sektor pemerintah, peran sektor swasta/dunia usaha, sektor pendidikan perguruan tinggi, media masa serta komunitas/masyarakat juga dilibatkan. Banyak sektor-sektor tersebut berperan dalam penggalangan dana untuk membantu pengadaan alat pelindung diri (masker) bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, dan pengadaan alat kesehatan untuk Rumah Sakit.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan bidang urusan pekerjaan umum di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari capaian beberapa indikator, antara lain Tingkat Kemantapan Jalan, Kondisi Baik Jaringan Irigasi, Cakupan Pelayanan Air Minum dan lain-lain. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur terutama yang terkait dengan infrastruktur pelayanan dasar.

Sistem jaringan jalan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi dan jaringan jalan kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 250/KPTS/M/2015 Tanggal 31 April 2015, panjang jaringan jalan nasional adalah 1.789,200 km dan panjang jaringan jalan provinsi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1086-Rek Tanggal 4 November 2016 adalah 2.360,580 km. Adapun berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1350-Rek/2016 tanggal 23 Desember 2016 panjang jaringan jalan kabupaten/kota adalah 43.570,184 km. Tingkat kemantapan jaringan jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 sebesar 90,18 persen menjadi

91,9 persen di tahun 2019, kemudian mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 81,54 persen.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi baik jaringan irigasi, yang menjadi kewenangan provinsi. Karena jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi berperan penting dalam mendukung produktivitas lahan pertanian. Program rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dalam upaya meningkatkan kondisi jaringan irigasi, tetapi karena keterbatasan anggaran terjadi penurunan kondisi jaringan irigasi dalam keadaan baik dari 74,01 persen di tahun 2018 menjadi 69,53 persen di tahun 2019, dan menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 52,05 persen.

Infrastruktur yang terkait dengan penyediaan air minum merupakan salah satu infrastruktur pelayanan dasar yang terus dibangun. Cakupan pelayanan air minum terus meningkat, dimana terjadi kenaikan pada tahun 2018 sebesar 76,85 persen menjadi 78,78 persen pada tahun 2019, dan terus meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 79,59 persen. Indikator lain yang terkait dengan pelayanan persampahan yakni cakupan pelayanan persampahan. Cakupan pelayanan persampahan juga meningkat pada tahun 2018 sebesar 67,87 menjadi sebesar 69,01 persen di tahun 2019, dan terus meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 69,69 persen. Indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Kondisi Baik dan Sedang	Persen	90,18	91,9	81,54
Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi	Persen	74,01	69,53	52,05
Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	76,85	78,78	79,59
Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen	67,87	69,01	69,69
Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persen	70,74	72,44	73,31
Cakupan Akses Infrastruktur Dasar Permukiman	Persen	72	74,57	75,36
Persentase rekomendasi teknis pengajuan SIPPA yang diselesaikan tepat waktu	Persen	N/A	N/A	N/A

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Sumber Daya Air	Tahapan	N/A	N/A	N/A
Persentase pengelola Sumber Daya Air dan irigasi yang mengikuti diklat	Persen	N/A	N/A	N/A
Bertambahnya kapasitas tampung situ-situ di WS. Kewenangan Provinsi	m3	N/A	N/A	N/A
Persentase infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi yang terkena bencana alam yang berhasil direhabilitasi	Persen	N/A	N/A	N/A
Akurasi data dalam Sistem Informasi Sumber Daya Air	Persen	N/A	N/A	N/A
Persentase Data Sumber Daya Air yang dilayani	Persen	N/A	N/A	N/A
Bertambahnya luas sawah yang terlayani Jaringan Irigasi kewenangan Provinsi	Ha	88,31	N/A	N/A
Persentase ketersediaan air terhadap kebutuhan air baku	Persen	55,5	N/A	N/A
Persentase luas tanam di sawah yang terairi terhadap total luas tanam keseluruhan di Daerah Irigasi kewenangan Provinsi	Persen	250	N/A	N/A
Persentase jaringan irigasi kewenangan provinsi yang berkinerja baik	Persen	74,01	N/A	N/A
Persentase kerusakan infrastruktur SDA dan irigasi yang dapat ditangani	Persen	100	N/A	N/A
Persentase Luasan Genangan Permukiman yang Tertangani	Persen	N/A	29,2	36,93
Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	Persen	N/A	0,29	0,2
Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	Persen	N/A	52,2	53,58
Tingkat implementasi rekomendasi yang dihasilkan oleh kelembagaan Sumber Daya Air	Persen	N/A	50	50
Persentase Titik Terdampak Banjir dan Kekeringan yang terkendali	Persen	N/A	8	8

Sumber: Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat; Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat; Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. 2020

Keterangan: N/A pada tahun 2018-2020 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

Khusus pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui jenis pelayanan:

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dengan indikator jumlah warga yang memperoleh kebutuhan air minum curah

lintas kabupaten/kota, pencapaiannya tahun 2020 mencapai 50 persen. Pemenuhan SPM ini dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan indikator Cakupan Pelayanan Air Minum dimana capaiannya adalah 79,59 persen.

2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota dengan indikator jumlah warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota, pencapaiannya pada tahun 2020 sebesar 0 (nol) persen. Capaian tersebut sebagai konsekuensi logis dari belum dimilikinya SPAL Domestik Regional yang dikelola Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Pemenuhan SPM ini dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan indikator Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik dimana capaiannya pada tahun 2020 adalah 73,31 persen.

2.1.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan bidang urusan perumahan dan kawasan pemukiman di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dari capaian indikator rasio permukiman layak yang terus meningkat dari tahun 2018 sebesar 0,9948 poin menjadi 0,9952 poin pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 capaianya sama dengan tahun 2019 yaitu sebesar 0,9952 poin, karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran di tahun 2020. Indikator Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan mengalami tren yang fluktuatif cenderung menurun pada tahun 2018 sebesar 80,95 persen menjadi 79,59 persen pada tahun 2019 dan kembali meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 86,6 persen. Indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Permukiman
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Cakupan Rumah Layak Huni	Persen	98,46	98,72	99,19
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	53.373	60.800	56.004

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan	Persen	80,95	79,59	86,6
Rasio Permukiman Layak	Poin	0,9948	0,9952	0,9952
Tingkat kualitas kawasan permukiman	Persen	-	6,39	12,79

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2020

Keterangan: - indikator ini sudah tidak digunakan lagi di tahun 2020

Khusus Pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui jenis pelayanan :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dengan indikator jumlah warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, pencapaian pada tahun 2020 mencapai 100 persen.

   Pemenuhan SPM ini dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dengan indikator Persentase Hunian Rumah Untuk Pendukungan Pelaksanaan Program Pemerintah Dan Pasca Bencana yang ditangani dimana capaian pada tahun 2020 adalah 100 persen.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi dengan indikator jumlah warga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, pencapaiannya sebesar 100 persen. Pemenuhan SPM ini dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dengan indikator Persentase Hunian Rumah Untuk Pendukungan Pelaksanaan Program Pemerintah Dan Pasca Bencana yang ditangani dimana capaian pada tahun 2020 adalah 100 persen.

2.1.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram,

terbit dan aman. Capaian di bidang urusan ini dapat diketahui dari berbagai indikator, diantaranya adalah pada tahun 2019 Tingkat Pengarustamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sektor Pembangunan mencapai 85 persen, Tingkat Pengurangan Korban Jiwa Akibat Bencana Alam mencapai 80 persen, Tingkat Penanganan Keadaan Darurat Bencana mencapai 90 persen, dan Tingkat Pemulihan Pasca Bencana 80 persen.

Tabel 2.27
Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Tingkat Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sektor Pembangunan	Persen	85,00	N/A
Tingkat Pengurangan Korban Jiwa Akibat Bencana Alam	Persen	80,00	N/A
Tingkat Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab/Kota	27	N/A
Tingkat Pemulihan Pasca Bencana	Persen	80,00	N/A
Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Persen	78,00	N/A
Meningkatnya Nilai Indeks Kapasitas Kab/Kota di Jawa Barat	Persen	N/A	N/A
Terpulihnya kehidupan dan Penghidupan	Persen	N/A	N/A
Meningkatnya pelayanan kedaruratan dan logistik untuk Kab/Kota di Jawa Barat	Persen	N/A	N/A
Laju Penegakan Perda dan Perkada	persen	N/A	4,05
Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	persen	N/A	68,25
Persentase anggota linmas untuk perlindungan masyarakat	persen	N/A	59,19
Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten	poin	N/A	68,25
Indeks Kerentanan Bencana	poin	N/A	0,45

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, 2020
Keterangan: N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

2.1.3.1.6 Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Permasalahan PPKS terbanyak di Provinsi Jawa Barat yaitu fakir miskin, penyandang cacat, dan lanjut usia terlantar. Data PPKS di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 7.032.533 orang menjadi sebesar 5.872.900 orang pada tahun 2019.

Jumlah PPKS yang mendapat bantuan menurun dari tahun 2018 sebesar 2.443 orang menjadi sebesar 1.646 orang pada tahun 2019 dan Capaian Jumlah Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar 3.052 unit. Persentase PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial mengalami penurunan pada tahun 2018 sebear 9,5 persen menjadi sebesar 1,96 persen pada tahun 2020. Persentase sumber dana bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 3,4 persen menjadi sebesar 0,85 persen pada tahun 2020, dan persentase peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 6,3 persen menjadi sebesar 0,59 persen pada tahun 2019, dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 0 (nol) persen.

Disisi lain, indikator yang menunjukkan peningkatan adalah indikator persentase yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya pada tahun 2018 sebesar 1,48 persen menjadi sebesar 72,44 persen pada tahun 2019, persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar pada tahun 2018 sebesar 1,26 persen menjadi sebesar 53,81 persen pada tahun 2019, persentase PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun 2018 11,3 persen menjadi sebesar 45,49 persen pada tahun 2019, dan persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya pada tahun 2018 sebesar -2,33 persen menjadi sebesar 17,28 persen pada tahun 2019. Untuk indikator lainnya dalam urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28
Indikator Kinerja Urusan Sosial Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Jumlah PPKS	Orang	7.032.533	5.872.900	N/A
Jumlah PSKS	Orang	64.165	68.133	N/A
Jumlah PPKS yang Mendapat Bantuan	Orang	2.443	1.646	N/A
Jumlah Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti	unit	3.052	3.052	N/A

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Jompo dan Panti Rehabilitasi				
Persentase yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya	Persen	1,48	72,44	N/A
Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar	Persen	1,26	53,81	N/A
Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya	Persen	6,44	6,42	N/A
Persentase PSKS perorangan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	11,3	45,49	N/A
Persentase PSKS kelembagaan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	9,5	1,96	N/A
Persentase sumber dana bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	3,4	0,85	N/A
Persentase peningkatan pihak yang berperan aktif dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	Persen	6,3	0,59	N/A
Persentase warga KAT yang meningkat kualitas hidupnya	Persen	-2,33	17,28	N/A
Persentase keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat produktivitas sosial ekonominya	Persen	1,26	53,81	39,45
persentase PMKS yang Terlayani Kesejahteraan Sosialnya	Persen	N/A	N/A	63,26
Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yg berpartisipasi dalam penanganan PMKS	persen	N/A	N/A	56,45

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Keterangan:

** Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.1.3.1.7 Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Faktor-faktor produksi tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan secara optimal tanpa adanya tenaga kerja. Beberapa indikator dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Selama periode Tahun 2018-2020 terdapat beberapa indikator yang menunjukkan kecenderungan

meningkat yaitu jumlah angkatan kerja pada tahun 2018 sebesar 22.628.122 orang menjadi sebesar 23,81 juta jiwa orang dan pada capaian tahun 2020 menjadi sebesar 24,21 juta jiwa orang , rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2018 sebesar 91,83 persen menjadi sebesar 92,02 persen pada tahun 2019, dan tingkat kesempatan kerja pada tahun 2018 sebesar 91,83 persen menjadi sebesar 92,02 persen pada tahun 2020. Selain itu, masih terdapat indikator lain yang menunjukkan belum optimalnya kinerja ketenagakerjaan pada tahun 2020 karena mengalami penurunan yaitu tingkat pengangguran terbuka yang semakin tinggi dari tahun 2018 sebesar 8,17 persen menjadi sebesar 7,99 persen, dan capaian tahun 2020 menjadi sebesar 10,46 persen. Untuk indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	22.628.122	23,81 (Juta Jiwa)	24,21 (Juta Jiwa)
Rasio penduduk yang bekerja	Persen	91,83	92,02	91,06
Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	91,83	92,02	91,06
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	62,92	65,07	64,83
Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	8,17	7,99	10,46
Pencari Kerja yang Sudah Ditempatkan	persen	N/A	35,57	N/A
Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Persen	1	0,17	0,18
Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	0,38	0,25	0,08
Persentase Serapan Tenaga Kerja	Persen	54,24	35,57	64,92
Jumlah wirausaha baru	Orang	620	N/A	N/A
Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Persen	86,97	N/A	N/A
Persentase fasilitasi penyelesaian kasus Calon Tenaga Kerja Migran dan Tenaga Kerja Migran	Persen	66.11	N/A	N/A
Persentase kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	11,08	N/A	N/A
Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	Persen	N/A	18,08	2,55
Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	Persen	N/A	19,2	20,25

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Persentase Pencari Kerja Yang Bersertifikat	Persen	N/A	N/A	0,36
Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja	Persen	N/A	N/A	33,14
Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja dengan Perusahaan	Persen	N/A	N/A	2,55
Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	Persen	N/A	N/A	20,25
Persentase realisasi MoU yang dilaksanakan	Persen	N/A	N/A	0,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, 2020

Keterangan :

* Sumber Berita Resmi Statistik BPS, Agustus 2020

** Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

N/A pada tahun 2018-2020 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

2.1.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan strategi untuk meningkatkan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran mengenai peran perempuan diwujudkan dalam program-program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dapat menjadi indikator untuk mengetahui peran aktif perempuan, sedangkan untuk pembangunan di bidang anak dapat diukur melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Tingkat keterwakilan perempuan di legislatif Provinsi Jawa Barat untuk suatu periode dapat diketahui setiap 5 (lima) tahun sekali mengikuti pemilihan umum yang diadakan dalam jangka waktu tersebut. Pada periode 2014-2019 anggota parlemen perempuan di Provinsi Jawa Barat adalah 22 persen dari keseluruhan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 100 orang. Pada Pemilu periode 2019-2024, meski jumlah perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat meningkat menjadi 24 orang, terdapat pula peningkatan jumlah laki-laki yang signifikan menjadi 96 orang sehingga secara keseluruhan, persentase perempuan di legislatif menurun dari tahun 2018 sebesar 22 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2019, dan capaian tahun 2020 menjadi sebesar 20 persen. Hal ini akan berlangsung demikian hingga akhir masa jabatan pada tahun 2024.

Pada aspek pemenuhan hak anak, hingga tahun 2018 terdapat 19 (sembilan belas) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan meningkat menjadi sebesar 23 kabupaten/kota pada tahun 2019. Untuk indikator kinerja lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	42,37	46,45	46,79
Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak	Kab/Kota	19	23	23
Persentase kabupaten/kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Persen	N/A	N/A	85,18
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	42,37	46,45	46,79
Perkembangan Perolehan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Nasional	Jumlah Kabupaten/ Kota	19	23	N/A
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100	100
Persentase Kabupaten/Kota mendapat Penghargaan KLA Tingkat Nasional	Persen	70,37	85,18	85,18
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Persen	100	100	100
Persentase perempuan di legislatif	Persen	22	20	20
Cakupan Pemahaman Pengarusutamaan Gender	Persen	**) IPG 89,18 **) IDG 70,04 **) Jumlah APE Kabupaten/ Kota 24	88,89	44
Persentase keberhasilan penanganan kasus KED terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100	100
Persentase kabupaten/kota yang mendapat input peningkatan kualitas hidup perempuan di Jawa Barat	Persen	**) 265 Desa /Kel P2WKSS Aktif **) Jumlah Kel PP melalui Program Pekka 379	100	45
Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate*)	Persen	2,49	2,52	2,55

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Keterangan:

* Data Sementara

** Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.1.3.1.9 Pangan

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat dicerminkan dari besaran skor PPH (pola pangan harapan), skor PPH memiliki nilai maksimal 100, yang berarti memiliki tingkat keberagaman yang optimal. Skor PPH adalah indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan Jawa Barat. Selain hal tersebut, skor PPH digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Kelompok padi-padian terutama beras mendominasi perkembangan pola konsumsi pangan selama periode 2016 – 2020 sedangkan kontribusi ubi, sayur dan buah masih rendah. Indikator terkait ketahanan pangan adalah konsumsi energi. Terdapat Penurunan konsumsi dari 2,218 kkal/kap/hari pada tahun 2018 menjadi sebesar 2,199 kkal/kap/hari pada tahun 2019 menjadi sebesar 2,150 kkal/kap/hari pada tahun 2020 (WPNPG 2012) dan terdapat penurunan pada konsumsi protein pada tahun 2018 sebesar 64,8 gr/kap/hari menjadi sebesar 62,9 gr/kap/hari pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 64,9 gr/kap/hari pada tahun 2020 (WNPG 2012). Data indikator keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Indikator Kinerja Urusan Pangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Regulasi Ketahanan Pangan	Ada/Tidak Ada	ada	Ada	Ada**
Ketersediaan Pangan Utama	Kg /Jiwa / tahun	149,61	110,45	110,45**
Konsumsi Beras per Kapita	Kg / kapita / tahun	82,4	79,4	79,40**
Produksi Komoditas Peternakan:				
a. Daging	Ton	1.057.078	1.059.719	1.021.699*
b. Telur	Ton	234.223	296.945	609.741*
c. Susu	Ton	324.817	300.337	293.490*
Jumlah Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Peternakan	Unit	195	502	502**
Peningkatan Mutu Produk Peternakan:				

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
a. Daging	Persen	90,02	58	58**
b. Telur	Persen	97,41	80	80**
c. Susu	Persen	86,64	80	80**
Jumlah Populasi ternak:				
a. Sapi Potong	Ekor	406.241	N/A	N/A
b. Sapi Perah	Ekor	119.349	N/A	N/A
c. Kerbau	Ekor	103.734	N/A	N/A
d. Domba	Ekor	11.608.559	N/A	N/A
e. Kambing	Ekor	1.274.548	N/A	N/A
f. Ayam Ras Petelur	Ekor	15.717.734	N/A	N/A
g. Ayam Ras Pedaging	Ekor	125.088.799	N/A	N/A
h. Ayam Buras	Ekor	26.712.982	N/A	N/A
i. Itik	Ekor	12.062.171	N/A	N/A
Persentase Produk Peternakan yang sesuai SNI:				
a. Daging	Ton	90,02	58	58**
b. Telur	Ton	97,41	80	80**
c. Susu	Ton	86,64	80	80**
Jumlah Kawasan Usaha Peternakan	Kawasan	5	5	5**
Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosa:				
a. *Anthrax*	Kasus/ tahun	0	0	0**
b. AI	Kasus/ tahun	29	26	26**
c. *Brucellosis*	Prevalensi	1,79	1,74	1,74**
d. Rabies	Kasus/ tahun	3	1	1**
Persentase Kapasitas Kompetensi SDM Aparatur dan Masyarakat Bidang Ketahanan Pangan (%)	Persen	100	51,85	51,85**
Jumlah Kelompok yang Meningkatkan Usahanya	Kelompok	43	Tidak dilanjutkan (direvisi(	Tidak dilanjutkan (direvisi)
Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan	Poin	85,9	90,4	92,9
Jumlah Cadangan Pangan Pokok Pemerintah	Ton	792,24	831,78	831,78**
Ketersediaan Informasi, Harga dan Akses pangan	Persen	100	100	100,00**
Persentase Desa Rawan Pangan yang Tertangani	Persen	47	90,4	90,40**
Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat	Kelompok	0	Tidak dilanjutkan (direvisi)	Tidak dilanjutkan (direvisi)
Persentase Capaian Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Persen	100	100	100**
Persentase Intervensi Lokasi Potensi Rawan Pangan	Persen	47	90,4	90,40**
Jumlah Pelaku Usaha yang Bisa Mengakses Pasar Regional dan Nasional	Orang	Tidak dilanjutkan (direvisi)	Tidak dilanjutkan (direvisi)	Tidak dilanjutkan (direvisi)
Jumlah Sarana Pemasaran Peternakan di Kabupaten/Kota yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal SOP	Unit	Tidak dilanjutkan (direvisi)	Tidak dilanjutkan (direvisi)	Tidak dilanjutkan (direvisi)
Persentase Tingkat Konsumsi Pangan	Persen	Tidak dilanjutkan (direvisi)	Tidak dilanjutkan (direvisi)	Tidak dilanjutkan (direvisi)

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Energi	kkal/Kap/hr)	2,218	2,199	2,150
Protein	gr/Kap/hr	64,8	62,9	64,9
Konsumsi (hewani/ daging, telur, susu)	gr/Kap/hr	70,58	73,08	73,08**
Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Konsumsi	Poin	85,2	84,8	85,2**
Persentase Sampel Komoditi Pangan Segar yang Tersertifikat	Persen	100	56,31	56,31**
Persentase Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan yang sesuai SNI	Persen	84	98,46	65,21
Nilai Tukar Usaha Peternakan	Poin	127,09	125,01	94,44

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

N/A pada tahun 2018-2020 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

2.1.3.1.10 Pertanahan

Urusan pemerintahan bidang pertanahan menjadi kewenangan urusan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, dengan indikator Persentase Tertib Tata Kelola Pertanahan Melalui Pemenuhan Urusan Wajib Sesuai Konkuren yang mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 19,59 persen menjadi sebesar 48,48 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.32
Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Persentase Tertib Tata Kelola Pertanahan Melalui Pemenuhan Urusan Wajib Sesuai Konkuren	Persen	19,59	48,48

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2021

2.1.3.1.11 Lingkungan Hidup

Mengacu pada prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pelaksanaan pembangunan perlu mempertimbangkan 3 (tiga) pilar, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar lingkungan secara seimbang agar dapat berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup ditujukan agar dampak kerusakan lingkungan yang timbul karena pembangunan masih dapat ditoleransi serta memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup juga diupayakan tetap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal (*economy feasible*), serta tetap dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan mendukung kesejahteraan oleh masyarakat.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dapat direpresentasikan oleh beberapa indikator utama. Pada tahun 2018, Persentase Tutupan Lahan yang Berfungsi Lindung terhadap Luas Wilayah mencapai 40,96 persen, Pencapaian Status Mutu Sungai dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang mencapai sebesar 89,96 persen, dan Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca mencapai 12,91 persen.

Selama periode Tahun 2019-2020, indikator utama yang mengalami peningkatan yaitu Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2019 sebesar 3,85 persen menjadi sebesar 3,87 persen pada tahun 2020, Persentase Peningkatan Desa Berbudaya Lingkungan pada tahun 2019, Persentase Peningkatan Kemitraan Lingkungan pada tahun 2019 sebesar 28,8 persen menjadi sebear 40 persen pada tahun 2020, dan Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Operasional TPPAS regional pada tahun 2019 sebesar 0,78 persen menjadi sebear 0,8 persen pada tahun 2020. Adapun indikator lainnya serta capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Persentase Tutupan Lahan yang Berfungsi Lindung terhadap Luas Wilayah	Persen	40,96	N/A	N/A
Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	12,91	N/A	N/A
Pencapaian Status Mutu Sungai dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang	Persen	89,96	N/A	N/A
Indeks Kualitas Air	Poin	39.87	42,73	42,84
Indeks Kualitas Udara	Poin	72.73	79,4	79,58
Jumlah lokasi Program kampung Iklim (PROKLIM)	Kampung iklim	313	N/A	N/A
Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Taman	13	N/A	N/A
Jumlah Pedoman Pengelolaan Kawasan Lindung dan Non Lindung dalam Pelaksanaan Pembangunan	Kawasan	8	N/A	N/A
Jumlah Contoh Uji yang Terlayani di Laboratorium	Uji sampel	2876	N/A	N/A
Jumlah Kabupaten/Kota yang terlayani Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional	Kab/kota	4	N/A	N/A
Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	N/A	3,85	3,87
Peningkatan jumlah dokumen rencana kebijakan strategis yang	Persen	N/A	16,67	54,16

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
dievaluasi dampak dan risikonya melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis				
Peningkatan Dokumen Lingkungan yang Dinilai dan Diawasi Implementasinya	Persen	N/A	47	89,16
Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter COD	Persen	N/A	91,38	136,32
Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SOX	Persen	N/A	87,34	107,9
Persentase Peningkatan Desa Berbudaya Lingkungan	Persen	N/A	78,63	81,84
Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persen	N/A	94,23	110,74
Persentase Peningkatan Kemitraan Lingkungan	Persen	N/A	28,8	40
Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi dan Mitigasi GRK Kabupaten/Kota	Persen	N/A	18,52	60
Persentase Peningkatan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Pelaku Usaha dan/kegiatan dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Persen	N/A	73,5	76,33
Persentase Peningkatan Sampah yang Terolah di TPA/TPST Regional	Persen	N/A	55,79	53,78
Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Operasional TPPAS regional	Persen	N/A	0,78	0,8

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. 2021

N/A pada tahun 2018 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

2.1.3.1.12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Ketersediaan basis data kependudukan skala kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 berada dalam kategori “ada” dan tetap pada kategori tersebut sampai pada tahun 2019 dan tahun 2020. Indikator Akurasi Data Kependudukan berada di angka 96,83 persen pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar 80,53 pada tahun 2019. Adapun indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik	Persen	97,07	96,79	96,79**
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada
Akurasi Data Kependudukan	Persen	96,83	80,53	81,37*
Tingkat Pemanfaatan Data Kependudukan	Perangkat Daerah	15,00	16,00	23

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, 2020

Keterangan:

* Data Sementara

** Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.1.3.1.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, Persentase Desa Mandiri dari tahun 2019 sebesar 1,58 persen meningkat menjadi 5,08 persen pada tahun 2020. Untuk mengukur keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat dan desa digunakan indikator yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyakarat dan Desa
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Terlibat dalam Kegiatan TMMD, BSMSS, dan BBGRM	Persen	100	100
Persentase Lembaga Lembaga Budaya dan Keswadayaan Masyarakat	Persen	100	N/A
Persentase Posyandu Mandiri	Persen	27,06	N/A

Indikator	Satuan	2019	2020
Identifikasi Potensi Kawasan Perdesaan di Perbatasan	Kabupaten	6	N/A
Jumlah Kerjasama Pengembangan Potensi Kawasan Perdesaan di Perbatasan	Kabupaten	2	N/A
Jumlah Desa yang sudah Menerapkan SISKEUDES	Desa	90	N/A
Persentase anggaran APB-Desa di atas 30% untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persen	100	N/A
Jumlah desa yang sudah memiliki rencana tata ruang wilayah desa	Dokumen	40	N/A
Persentase Kader Terlatih dalam Kelembagaan Desa	Persen	73,26	N/A
Jumlah dan jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) di Jawa Barat	Buah	27	N/A
Persentase Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Persen	70	N/A
Persentase Kerjasama Pengembangan Kapasitas Produksi Desa, dan Akses Pemasaran Potensi Desa	Persen	30	N/A
Persentase Kader Terlatih dalam Kelembagaan Desa	Persen	79,74	N/A
Persentase Desa Mandiri	Persen	1,58	5,08
Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan TMMD/BBGRM/BSMSS	Jumlah	TMMD 12 Kab, BBGRM 1 & BSMSS 24 Kab/Kota di wilayah Kodam III Siliwangi	MMD 12 Kab, BBGRM 1 & BSMSS 24 Kab/Kota di wilayah Kodam III Siliwangi
Jumlah KPD	KPD	653,00	440
Persentase BUMDesa aktif	Persen	69,55	92,05
Jenis Inovasi dan TTG yang dihasilkan dari 27 Kabupaten/Kota	Jenis	9,00	25

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Keterangan :

** Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.1.3.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi).

Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal itu ditunjukan dari laju pertumbuhan penduduk selama 3 (tiga) tahun terakhir yang berangsur menurun dari

tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 1,34 persen menjadi sebesar 1,30 persen pada tahun 2019 dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi sebear 1,11 persen. Total *Fertility Rate* mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 2,49 persen menjadi sebesar 2,52 persen pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 2,55 persen. Sementara Cakupan Peserta KB Aktif meningkat dari 6.245.099 orang pada tahun 2018 menjadi sebesar 7.126.366 orang pada tahun 2019.

Tabel 2.36
Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Menurunnya jumlah keluarga Pra sejahtera	Keluarga	N/A	1.157.346	N/A
Cakupan KB Pria	Persen	N/A	2,46	N/A
Persentase Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 Tahun	Persen	N/A	59,52	N/A
Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,34	1,30	1,11
Total *Fertility Rate*	Anak	2,49	2,52	2,55
Cakupan Peserta KB Aktif	Orang	6.245.099	7.126.366	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Keterangan :

** Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.1.3.1.15 Perhubungan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan melingkupi 3 (tiga) bidang pelayanan, yaitu: perhubungan darat, perhubungan laut, dan perkeretaapian. Kinerja penyelenggaraan perhubungan darat dapat dilihat dari indikator tingkat ketersediaan sarana, prasarana perhubungan darat dan fasilitas perlengkapan jalan, kinerja perhubungan laut dan ASDP, serta bidang perkeretaapian dapat terlihat dari tingkat pelayanan transportasi kereta api perkotaan di Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beberapa perubahan pada urusan pemerintah daerah, salah satunya pada urusan penerbangan yang tidak lagi menjadi urusan provinsi, sehingga dalam perencanaan ke depan perlu ditindaklanjuti dari segi arah kebijakan hingga penentuan kinerja urusan perhubungan di Provinsi Jawa Barat.

Indikator kinerja tahun 2018 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2018-2019 mengalami beberapa kali perubahan hal tersebut membuat Indikator pada bidang Perhubungan berbeda pada setiap tahunnya ada indikator yang berakhir pada tahun 2018 tidak lagi digunakan sebagai indikator kinerja pada bidang perhubungan, adapun yang hanya digunakan pada tahun 2019 dan beberapa indikator yang digunakan mulai pada tahun 2020.

Jumlah Terminal Tipe B berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 550.22/Kep.119-Dishub/2016 tentang Terminal Penumpang Tipe B di Daerah Provinsi Jawa Barat terdapat 14 (empat belas) terminal Tipe B dan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional bahwa di Jawa Barat terdapat 6 (enam) pelabuhan yang berlokasi di Cirebon (Pelabuhan Cirebon), Indramayu (Pelabuhan Indramayu/Losarang), Pangandaran (Pelabuhan Bojongsalawe), Subang (Pelabuhan Pamanukan/Blanakan dan Patimban) dan Sukabumi (Palabuhanratu). Indikator Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

Tabel 2.37
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020
1	Jumlah Terminal	Unit	14	N/A	N/A
2	Jumlah Pelabuhan Laut	Unit	6	N/A	N/A

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020
3	Prosentase Jaringan Trayek yang terevaluasi di Jawa Barat	persen	22,66	N/A	N/A
4	Prosentase Keikutsertaan Kab/Kota dalam WTN	persen	70,37	N/A	N/A
5	Prosentase Kepemilikan armada angkutan umum AKDP perseorangan menjadi berbadan hukum	persen	83,13	N/A	N/A
6	Prosentase Ketersediaan Terminal Tipe B yang memenuhi standar	persen	56,93	N/A	N/A
7	Prosentase Angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang kartu pengawasan	persen	50,4	N/A	N/A
8	Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (Penyusunan Dokumen Perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan Pengembangan Bandara Nusawiru)	persen	58,71	N/A	N/A
9	Prosentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen Perencanaan Laut dan ASDP, Pembebasan Lahan Pelabuhan Laut Pengumpan Regional di Pelabuhan Ratu, Pengembangan Laut dan ASDP)	Persen	83,05	N/A	N/A
10	Prosentase penyediaan prasarana kereta api di Jawa Barat (dokumen perencanaan, pembebasan lahan, sosialisasi)	Persen	91,8	N/A	N/A
11	Prosentase Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di Jalan Provinsi	persen	28,67	N/A	N/A
12	Jumlah Penumpang Angkutan Umum (Darat, Laut dan ASDP, Kereta Api dan Udara)	Penumpang	N/A	260.039.637	Tidak ada
13	Persentase angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang kartu pengawasan	Persen	N/A	57,33	Tidak ada
14	Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat, Laut & ASDP, Kereta Api, dan Udara	Persen	N/A	73,61	Tidak ada
15	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, PJU, guardrill dll) pada ruas jalan provinsi	Persen	N/A	33,85	Tidak ada
16	Tingkat Ketersediaan Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Persen	N/A	52,53	52,62
17	Tingkat Ketersediaan Prasarana Perhubungan Udara	Persen	N/A	58,01	58,07

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020
18	Tingkat Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP	Persen	N/A	36,16	38,35
19	Tingkat Ketersediaan Jaringan Transportasi Massal Berbasis Rel	Persen	N/A	20,4	30,51

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Keterangan: Tahun 2019 merupakan masa transisi, yaitu ketika penyusunan RKPD 2019 dan indikator 2019 tersebut sesuai dengan Renja dan RKPD 2019

N/A pada tahun 2018 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

2.1.3.1.16 Komunikasi dan Informatika

Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik merupakan bentuk komitmen yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan dan akses informasi. Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sendiri dilaksanakan sejak tahun 2010 melalui Keputusan Gubernur Nomor 489/Kep.487-Diskominfo/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

PPID Provinsi Jawa Barat disamping melakukan pelaporan dan layanan informasi publik berdasarkan permohonan, juga memberikan layanan informasi dengan menyampaikan/mengumumkan informasi publik secara berkala terkait program, kegiatan, hingga capaian pembangunan melalui berbagai kanal informasi dan komunikasi yang dimiliki. Beberapa kanal yang digunakan yaitu *website* (dengan situs www.jabarprov.go.id, www.humas.jabarprov.go.id, www.ppid.jabarprov.go.id, dan *website* masing-masing Perangkat Daerah), media sosial (www.instagram.com/humas_jabar, www.twitter.com/humasjabar, www.twitter.com/ppidprovjabar), dan media sosial masing-masing Perangkat Daerah, majalah (Majalah Gedung Sate, Warta Bappeda, Info SDA, dan lain sebagainya), media luar ruang hingga distribusi informasi/ berita *(press release)* kepada media massa.

Dalam hal terkait laporan implementasi keterbukaan informasi publik dan penganugerahaan keterbukaan informasi badan publik tahun

2018, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berhasil meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan diserahkan secara langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Jusuf Kalla, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat pada Hari Senin, 5 November 2018. Capaian yang diperoleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai sebesar 90,40 persen pada tahun 2019 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 98,15 persen dengan predikat sebagai Badan Publik dengan kualifikasi Informatif yang merupakan capaian tertinggi nasional untuk kategori pemerintah provinsi bersama Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Laju kinerja pembangunan daerah yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika dapat ditinjau dari ketersediaan *website* milik pemerintah daerah yang berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah memiliki *website* resmi yang dapat diakses pada alamat https://www.jabarprov.go.id/. Tidak hanya *website*, media penyebarluasan informasi juga memanfaatkan media sosial diantaranya *facebook, twitter, instagram* dan *youtube*. Indikator secara keseluruhan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	2019	2020
Keberadaan *Website* Milik Pemerintah Daerah	Ada/tidak	Ada	Ada
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,00	3,58
Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi di Daerah	Persen	93,00	90,00
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	90,40	98,15
Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	*Score*	571	610
Tingkat kematangan pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persen	77,99	80,46

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

2.1.3.1.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kinerja pembangunan daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama periode Tahun 2018-2020 memperlihatkan tren positif. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya persentase koperasi aktif dari tahun 2018 sebesar 43,19 persen menjadi sebesar 46,82 persen pada tahun 2019, dan menjadi sebesar 58,90 persen pada tahun 2020. Jumlah Koperasi Aktif tercatat sebanyak 11.021 koperasi pada tahun 2018 menjadi sebesar 12.631 koperasi pada tahun 2019. Indikator kinerja pada bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada periode tahun 2018-2020 mengalami beberapa perubahan menyesuaikan dengan kondisi perencanaan pembangunan disetiap tahunnya, sehingga ada beberapa indikator yang berakhir pada masa transisi perubahan RPJMD periode 2013-2018 ke RPJMD 2018-2023 pada tahun 2018, ada pula indikator yang hanya dilaksanakan pada tahun 2019 serta ada indikator yang baru dilaksanakan pada tahun 2020. Secara lebih lengkap untuk indikator yang lain dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Persentase Koperasi Aktif	Persen	43,19	46,82	58,90
Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha	Usaha	16.655	N/A	N/A
Jumlah Pencetakan Wirausaha Baru	Orang	10.260	N/A	N/A
Jumlah Koperasi Aktif	Koperasi	11.021	12.631	12.631**
Jumlah UMKM yang Telah Memiliki Legalitas Usaha	Umkm	612	N/A	N/A
Persentase Peningkatan Omzet UKM	Persen	16,44	N/A	N/A
Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi	Persen	5	N/A	N/A
Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi Koperasi (Kop) /Persentase Kredit yang Diserap oleh Koperasi	Persen	6,4	N/A	N/A
Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi UMKM (UMKM) / Persentase Kredit yang Diserap oleh UMKM	Persen	20,1	N/A	N/A
Jumlah Wirausaha Baru	Unit	9.300,00	N/A	N/A

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Persentase Wirausaha Baru yang menjadi Pelaku Usaha	Unit	75	N/A	N/A
Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	Persen	N/A	29,84	27,97
Pertumbuhan Akses Modal KUK	Persen	N/A	24,61	24,61**
Pertumbuhan Jumlah Rasio Wirausaha	Persen	N/A	1,5	1,5**
Tingkat kepatuhan koperasi	Persen	N/A	-	15,17
Laju pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	N/A	-	-6,24
Laju pertumbuhan omzet UMKM binaan	Persen	N/A	-	8,25
Jumlah usaha pemula	Unit	N/A	-	1.300
Persentase pertumbuhan SDM koperasi	Koperasi	N/A	-	0

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, 2020

Keterangan:

Indikator RPJMD Tahun 2018-2023

-) indikator baru di tahun 2020

**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

N/A pada tahun 2018 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

2.1.3.1.18 Penanaman Modal

Investasi menjadi salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan *output* dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengingat peran investasi yang begitu penting maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Beberapa capaian indikator mengalami penurunan, Jumlah Total Investasi pada tahun 2018 sebesar Rp162,8 triliun menjadi sebesar Rp137,5 triliun pada tahun 2019 dan menjadi sebesar Rp120,4 triliun pada tahun 2020. Penyerapan Tenaga Kerja pada tahun 2018 sebesar 242.151 orang menjadi sebesar 130.704 orang pada tahun 2019 dan menjadi sebesar 113.426 orang pada tahun 2020. Selain itu, terdapat indikator yang mengalami pertumbuhan pada periode Tahun 2018-2020, yaitu Indeks

Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perijinan) pada tahun 2018 sebesar 79,56 poin menjadi sebesar 81,62 poin pada tahun 2019 dan menjadi sebesar 85,36 poin pada tahun 2020. Secara lebih lengkap untuk indikator yang lain dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perijinan)	Poin	79,56	81,62	85,36
Jumlah Total Proyek	Buah	39.749	15.370	20.020
a. PMA	Buah	7.893	10.455	11.031
b. PMDN	Buah	31.865	4.915	8.989
Jumlah Total Investasi	Rp. Triliun	162,8	137,5	120,4
a. PMA	Rp. Triliun	74,69	88,21	51,40
b. PMDN	Rp. Triliun	88,19	49,28	51,40
Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	242.151	130.704	113.426
a. PMA	Orang	70.709	94.644	85.928
b. PMDN	Orang	171.442	36.06	27.498

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

2.1.3.1.19 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Pada tahun 2018 Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda di angka 46,70 dan pada tahun 2019 hingga 2020 tetap stabil tanpa mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO) sebesar 52 persen dan mengalami penurunan menjadi 47,30 pada tahun 2020, berbeda dengan Indeks Pembangunan Pemuda yang tetap pada angka 50,00 persen di tahun 2019 hingga 2020. Untuk indikator lainnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Indeks	46,7	46,7	46,70**
Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	50	52	47,3
Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Nasional dan Internasional	Orang	302	342	N/A
Indeks Pembangunan Pemuda	persen	46,17	50	50
Prestasi Olahraga Jawa Barat dalam Event Nasional	Peringkat	1	1	N/A
Peringkat Jawa Barat pada *Multievent* Berkebutuhan PEPARPENAS Khusus Nasional	Peringkat	0	5	N/A
Peringkat Jawa Barat pada *Multievent* Nasional POPNAS	Peringkat	0	1	N/A
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Tingkat Kebugaran Masyarakat	Persen	63,5	N/A	N/A
Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	Persen	110	110	100
Jumlah pemuda Jawa Barat yang berwirausaha	Orang	2.460	1.082.664	IKK dalam penyusunan
Jumlah Pemuda Jawa Barat yang dibina untuk prestasi Nasional	Orang	9	19	5

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Keterangan :

* Data Sementara

** Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

2.1.3.1.20 Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kekayaan budaya yang dimiliki Provinsi Jawa Barat yang harus terus digali dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Persentase seni dan budaya yang dilestarikan menjadi salah satu indikator yang menunjukan kemajuan kebudayaan.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, persentase seni dan budaya yang dilestarikan pada tahun 2019

mencapai 58,21 persen lalu mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 menjadi 37,69 persen, dan Persentase seni budaya dan destinasi wisata yang dipromosikan sebesar 77,77 persen namun turut mengalami penurunan pada tahun 2020 yang mencapai angka 52,38 persen. Terdapat indikator yang juga mengalami peningkatan seperti Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan pada tahun 2019 sebesar 30 jumlah menjadi sebesar 44 jumlah pada tahun 2020. Adapun untuk indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Unit	12	13	12
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Jumlah	N/A	30	44
Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah	Jumlah Pembinaan	3	16	0
Pengusulan HKI	Usulan/ Rekomendasi Per Tahun	1	1	0
Pelestarian Seni Tradisi	Jumlah Pembinaan	3	9	1
Jumlah Event/Festival/Pasanggiri/ Lomba/Sayembara Karya Seni	Event Per Tahun	7	7	155
Pengusulan HAKI/Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	Jumlah Usulan	16	13	32
Pelestarian seni tradisi, kontemporer dan perfilman	Jenis	4	9	0
Persentase seni budaya dan destinasi wisata yang dipromosikan	Persen	N/A	77,77	52,38
Persentase seni dan budaya yang dilestarikan	Persen	N/A	58,21	37,69
Persentase Benda Koleksi Museum Sri Baduga yang dilestarikan	Persen	N/A	26,46 (800 koleksi museum)	9,93(300 koleksi museum)

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021
N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

2.1.3.1.21 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data berperan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama pada penyusunan perencanaan pembangunan

daerah. Karena hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Buku Provinsi Dalam Angka dan Buku PDRB Provinsi di Provinsi Jawa Barat mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berada dalam kategori "ada", yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Buku Provinsi Dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB Provinsi	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

2.1.3.1.22 Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko diantaranya penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi penting. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan *penetration test*, pada tahun 2018 terhitung sudah 10 (sepuluh) aplikasi yang dilakukan *penetration test* dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 22 aplikasi.

Tabel 2.44
Indikator Kinerja Urusan Persandian Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Persentase aplikasi di Pemda yang telah dilakukan *penetration test*	Aplikasi	10	22	N/A
Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Score	I s.d II	II+ s.d III	610

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, 2020

Keterangan:

** Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.1.3.1.23 Perpustakaan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, melalui pelayanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Layanan yang diberikan kepada pemustaka antara lain inovasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi misalnya membaca dengan menggunakan *handphone*, yaitu CANDIL (Maca Dina *Digital Library*) memperbanyak buku digital, ekstentifikasi melalui mobil perpustakaan keliling, motor perpustakaan keliling, meningkatkan kegemaran membaca masyarakat antara lain safari/*road show* kegemaran membaca, serta melalui pengembangan KOLECER (Kotak Literasi Cerdas), perlombaan, pengangkatan duta baca, iklan layanan masyarakat di berbagai media, kerja sama dengan berbagai PT, dan kolaborasi dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang transportasi yaitu PT. Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) melalui kegiatan Makan Jengkol (Mari Kita Antar Jemput Buku dengan Kolaborasi), bantuan buku kepada komunitas, pondok pesantren, memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat antara lain pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di berbagai lapisan masyarakat dan komunitas di desa.

Perkembangan literasi untuk membangun kualitas manusia sangat bergantung pada kegemaran membaca masyarakat. Berdasarkan kajian indeks membaca masyarakat di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan

dari tahun 2019 sebesar 68,5 poin menjadi sebesar 61,49 poin pada tahun 2020. Untuk indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45
Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	596.229	676.609	69.256
Tingkat Kepuasan Pemustaka	Persen	90	87	87**
Koleksi Buku yang Tersedia Di Perpustakaan Umum	Eksemplar	N/A	536.373	563.236
Indeks Membaca Masyarakat	Poin	N/A	68,5	61,49
Jumlah Pembinaan Lembaga Perpustakaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan	Unit	N/A	54	100
	Orang	N/A	82	270
Persentase Bahan Perpustakaan yang Dipreservasi	Persen	N/A	2,5	2,5
Persentase Bahan Perpustakaan yang Dialihmediakan	Persen	N/A	1,81	1,81
Tingkat Ketersediaan Fasilitas Membaca	Poin	N/A	62,76	52,33
Tingkat Kebiasaan Membaca Masyarakat	Poin	N/A	67,68	63,54
Tingkat Pemanfaatan Bahan Bacaan	Poin	N/A	74,39	68,61
Laju Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Persen	N/A	2,2	2,25
Persentase Karya Cetak, Karya Rekam dan Hasil Khazanah Budaya Jawa Barat yang Disimpan Sesuai dengan Peraturan	Persen	N/A	2,87	50,5
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Poin	N/A	0,3178	N/A
Persentase Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Lingkup Provinsi yang Memiliki Sertifikat	Persen	N/A	17,31	3
Persentase Koleksi buku yang Dibaca	Persen	N/A	1,65	1,21
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Perpustakaan	Poin	N/A	82,75	80,53

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Keterangan:

* Data Sementara

** Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

N/A pada tahun 2018 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

2.1.3.1.24 Kearsipan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan urusan kearsipan berusaha untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan sehingga

arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Arsip-arsip yang tercipta tersebut, apabila memiliki nilai guna kesejarahan maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat wajib untuk menyelamatkan dan mengamankan arsip-arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Beberapa upaya yang dilakukan yaitu pembinaan kearsipan melalui *workshop*, bimbingan teknis, pengawasan internal kearsipan, pengelolaan arsip melalui pengintensifan kegiatan penyusutan arsip pada perangkat daerah, inovasi pengelolaan arsip berbasis TIK, peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip melalui penelusuran arsip-arsip tokoh-tokoh skala Provinsi Jawa Barat, alih media arsip, serta digitalisasi arsip, penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan, digabung, serta penyelamatan arsip pasca bencana.

Ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sangat bergantung pada standar pengelolaan arsip secara baku yang telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Capaian kinerja pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 11 persen menjadi sebesar 28,95 persen di tahun 2020, artinya terdapat 11 (sebelas) perangkat daerah yang telah memenuhi pengelolaan arsip secara baku di tahun 2020. Dalam rangka penyelamatan arsip, capaian mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 16,9 persen menjadi sebesar 3 persen ditahun 2020, sehingga masih perlu dilakukan optimalisasi untuk penyelamatan arsip.

Berdasarkan capaian pengelolaan arsip secara baku, maupun penyelamatan arsip terdapat beberapa variabel yang mendukung. Sejak tahun 2019, Jumlah Khasanah Arsip Diselamatkan tidak lagi digunakan sebagai indikator, sedangkan sebagian besar dari indikator kinerja yang digunakan pada urusan kearsipan Provinsi Jawa Barat merupakan indikator yang baru digunakan sejak tahun 2019 sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.58
Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Persentase Jumlah Arsip yang Digitalisasi/ Dialih- Mediakan	Persen	100	100	100

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Jumlah Arsip yang di Preservasi	Lembar	120	275	375
Jumlah Khasanah Arsip Diselamatkan	Khasanah	8	N/A	N/A
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	Persen	N/A	11	28,95
Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kegiatan	N/A	3	6
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Tertib	Persen	N/A	11	11
Persentase Penyusutan Arsip	Persen	N/A	12	4
Persentase Simpul SIKN yang Terintegrasi Se-Jawa Barat	Persen	N/A	4	4
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Kearsipan	Poin	N/A	50	N/A
Tingkat Penyelamatan Arsip Statis	Persen	N/A	16,9	3
Tingkat Pelestarian Arsip Statis	Persen	N/A	17,1	66

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Keterangan :

** Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

N/A pada tahun 2018 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

2.1.3.2 Layanan Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Penyelenggaraan urusan pilihan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya kedepan menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sub sektor perikanan di Provinsi Jawa Barat. Peranan sub sektor perikanan terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan yang cenderung menggambarkan kondisi makro dari perekonomian. Namun demikian, peranan terhadap perekonomian perlu dilihat juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku yang terlibat dalam sub sektor perikanan.

Ukuran kesejahteraan pelaku sub sektor perikanan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tingkat kesejahteraan yang cukup baik. Hal ini tercermin dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 106,55 persen menjadi sebesar 109,49 persen pada tahun 2019. Nilai Tukar Usaha Pertanian Sub Sektor Perikanan juga mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 122,95 poin menjadi sebesar 126,71 poin pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 104,76 poin. Adapun indikator yang lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.46
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Nilai Tukar Usaha Pertanian Sub Sektor Perikanan	Poin	122,95	126,71	104,76
Produksi Perikanan Tangkap	Ton/ Tahun	263.846,66	249.745,87	225.759,86
Produksi Perikanan Budidaya	Ton/ Tahun	1.174.357,65	1.268.509,71	1.163.695,40
Nilai Tukar Nelayan	Poin	116,48	119,88	119,88**
Konsumsi Ikan per Kapita	Kg/kap/ tahun	29,64	35,81	36,20
Peningkatan Produksi Perikanan yang Memenuhi Standar Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Pangan	Persen	96,06	99	99**
Peningkatan Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan Secara Akuntabel	Persen	100	100	100**
Jumlah Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola	Kawasan	1	2	2**
Jumlah Benih Ikan yang ditebar di Perairan Daratan	Ekor	37.500.000	29.060.500	29.060.500**
Jumlah Plasma Nutfah yang dilestarikan	Jenis	5	5	5
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	96,44	105,71	105,71**
Kontribusi terhadap Pemenuhan Benih Ikan Mas Nasional	Persen	19,47	59,1	59,1**
Kontribusi terhadap Pemenuhan Benih Ikan Nila Nasional	Persen	27,82	39,75	39,75**
Kontribusi terhadap Pemenuhan Benih Ikan Patin Nasional	Persen	24,53	49,36	49,36**
Kontribusi terhadap Pemenuhan Benih Ikan Lele Nasional	Persen	42,19	30,29	30,29**
Persentase Permintaan Benih Ikan Gurame	Persen	5,62	58,63	58,63**
NTP Sub Sektor Perikanan	Poin	106,55	109,49	109,49**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Produksi Perikanan	Ton	1.438.204,31	1.518.215,58	1389455,26
Peningkatan Konsumsi Ikan Jawa Barat	Persen	3,51	2,95	1,1
Produksi Garam	Ton	N/A	445.727,64	41.342,98
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	N/A	102,35	102,35**
Peningkatan Produksi Non Konsumsi	Persen	N/A	20,39	20,39**
Persentase Peningkatan Produksi Olahan	Persen	N/A	-43,15	- 43,15**
Persentase Peningkatan Produksi Garam	Persen	N/A	-6,69	-6,69**
Persentase Peningkatan Jumlah Ekspor Hasil Perikanan	Persen	N/A	14,9	14,9**
Persentase Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola	Persen	N/A	14,03	19,04
Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang undangan	Persen	N/A	51,18	51,85

Sumber:- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

- Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Tahun 2020

Keterangan :

** Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

N/A pada tahun 2018 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

2.1.3.2.2 Pariwisata

Sektor pariwisata Provinsi Jawa Barat memiliki peranan yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha wisata yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Melalui *multiplier effect*-nya, pariwisata dapat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata.

Sejalan dengan hal tersebut, RPJMD Tahun 2018 – 2023 telah menjadikan akselerasi pertumbuhan pariwisata sebagai salah satu strategi dari akselerasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Geliat sektor pariwisata di Provinsi Jawa Barat selama periode 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke objek wisata

dan jumlah wisatawan mancanegara. Jumlah Wisatawan Mancanegara mengalami penunuruan di tahun 2018 sebanyak 2.597.445 orang menjadi sebesar 3.645.433 orang pada tahun 2019 dan mengalami penurunan sampai tahun 2020 menjadi sebesar 31.610 orang. Jumlah Wisatawan Domestik juga sempat mengalami peningkatan dimana di tahun 2018 sebanyak 63.298.608 orang menjadi sebesar 64.610.832 orang dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 35.513.885 orang. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan sosial berskala besar, sehingga terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	2.597.445	3.645.433	31.610
Jumlah Wisatawan Domestik	Orang	63.298.608	64.610.832	35.513.885
Jumlah Event Pariwisata	Event Per Tahun	5	3	8
Jumlah Event Promosi Pariwisata	Event Per Tahun	5	5	25

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

2.1.3.2.3 Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Selain itu, pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan daerah, diantaranya: penyerap tenaga kerja, penyumbang PDRB, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Pertanian di Provinsi Jawa Barat secara umum memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas. Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dapat diketahui dari berbagai indikator sektoral, salah satunya adalah produksi padi sawah dan produktivitas padi sawah.

Indikator Persentase Peningkatan Produksi Rata-rata Komoditas Strategis Perkebunan (%), Persentase Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan terhadap Luas Jawa Barat (%) , Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%), Persentase Peningkatan Jumlah Penerapan Sistem Jaminan Mutu Sesuai SNI (%), dan Persentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%) sejak tahun 2019 sudah tidak lagi digunakan sebagai indikator. Sedangkan Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan, Pertumbuhan Subsektor Tanaman Hortikultura, Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura, Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Persentase Peningkatan Produktivitas Rata- rata Komoditas Strategis Perkebunan (%), dan Presentase Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan Utama Perkebunan baru digunakan sebagai indikator sejak tahun 2019. Capaian data indikator di tahun 2020, yaitu Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan, Pertumbuhan Subsektor Tanaman Hortikultura, Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura baru akan muncul pada triwulan II-2021 sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.48
Indikator Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Produksi Padi Sawah	Ton	11.073.462	9.084.957	9,22* (Ribu Ton)
Luas Tanam Padi Sawah	Hektar	1.967.260	1.903.360	1,61* (Ribu Hektar)
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	8,67	8,77	9,20*
Nilai Tukar Petani	Poin	110,9	112,36	101,41
Peningkatan Ketersediaan Benih Unggul Komoditas Perkebunan	Persen	2,64	2,7	1,58
Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan	Persen	-1,05	-1,2	1
Persentase Peningkatan Produksi Rata-rata Komoditas Strategis Perkebunan (%)	Persen	2,36	N/A	N/A
Persentase Peningkatan Produktivitas Rata- rata Komoditas Strategis Perkebunan (%)	Persen	2,37	4,71	2,19
Persentase Luas Minimum Eksisting Lahan Perkebunan terhadap Luas Jawa Barat (%)	Persen	13,02	N/A	N/A

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)	Persen	1,0058	N/A	N/A
Persentase Peningkatan Jumlah Penerapan Sistem Jaminan Mutu Sesuai SNI (%)	Persen	2,57	N/A	N/A
Persentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (%)	Persen	2,48	N/A	N/A
Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan	Persen	N/A	-17,91	-17,91**
Pertumbuhan Subsektor Tanaman Hortikultura	Persen	N/A	-12,55	-12,55**
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	N/A	-7,13	-7,13**
Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	Persen	N/A	3,96	3,96**
Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ton	N/A	13.393.076	13.759.620
Persentase Peningkatan Produktivitas Rata- rata Komoditas Strategis Perkebunan (%)	Persen	N/A	4,71	2,19
Presentase Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan Utama Perkebunan	Persen	N/A	1	1

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, 2020 ; Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, 2020.

Keterangan :

* Data Sementara

** Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

N/A pada tahun 2018 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

2.1.3.2.4 Kehutanan

Sektor kehutanan memiliki peran penting dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan luas lahan kritis. Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menahan laju deforestasi dan memperbaiki kondisi hutan yang terdegradasi dengan mencanangkan dan menggalakkan program Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon (GTTP). Melalui program Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon ditargetkan sampai dengan tahun 2023 dapat menanam 50 (lima puluh) juta pohon di lahan-lahan kritis yang tersebar di kabupaten/kota. Selain program yang berkenaan dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, program peningkatan peran sektor kehutanan menjadi prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023. Peningkatan peran sektor kehutanan

dilakukan dengan cara memacu produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu. Peningkatan hasil hutan kayu diarahkan pada hutan rakyat dan hasil hutan bukan kayu melalui peningkatan dan pengembangan sentra budidaya lebah madu, pemanfaatan jasa kawasan hutan lindung dan hutan konservasi sebagai objek wisata.

Kebanyakan indikator yang sebelumnya masih digunakan pada tahun 2018, kini sudah tidak lagi digunakan sebagai indikator pada tahun 2019. Selain itu ada pula data yang baru digunakan sebagai indikator mulai tahun 2019. Berikut ini indikator yang dapat menggambarkan pembangunan di sektor kehutanan selama periode Tahun 2018-2020, sebagaimana ditunjukan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.49
Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Persentase Tutupan Lahan yang berfungsi lindung terhadap luas wilayah	Persen	18,73	N/A	N/A
Jumlah lokasi kawasan hutan yang siap ditata batas (lokasi)	Lokasi	5	N/A	N/A
Persentase penurunan gangguan keamanan hutan (%)	Persen	46,18	N/A	N/A
Persentase Peningkatan jumlah tumbuhan dan satwa liar yang ditangkarkan (%)	Persen	5	N/A	N/A
Persentase bertambahnya produksi hasil hutan kayu (%)	Persen	-28	N/A	N/A
Persentase bertambahnya produksi hasil hutan bukan kayu (%)	Persen	12	N/A	N/A
Persentase bertambahnya produksi olahan hasil hutan kayu dan bukan kayu (%)	Persen	-24,49	N/A	N/A
Persentase peningkatan penerimaan jasa wisata alam (%)	Persen	10,18	-5,75	0
Jumlah unit hutan rakyat yang dikelola secara lestari	Unit	6	N/A	N/A
Persentase tutupan hutan	Persen	N/A	33,67	45,43
Tingkat kerusakan hutan	Persen	N/A	0	0,78
Persentase peningkatan habitat dan populasi Tumbuhan dan Satwa liar yang ditangkarkan	Persen	N/A	5	0
Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persen	N/A	108,15	12,45
Produksi Hasil Hutan	Persen	N/A	108,15	12,45

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2021

N/A pada tahun 2018 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

2.1.3.2.5 Energi Dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan dan tantangan pengelolaan energi dan sumber daya mineral semakin kompleks pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam periode RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 terdapat 5 (lima) isu strategis yang mengemuka dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral, salah satunya adalah usaha pertambangan yang tertib administrasi dan teknis. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan usaha pertambangan yang tertib secara administrasi dan teknis melalui strategi yang dilakukan yakni meningkatkan pengelolaan pengusahaan sumber daya pertambangan, melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaku usaha pertambangan dan inventarisasi data dan pengembangan usaha pertambangan.

Beberapa capaian indikator pada bidang energi dan sumber daya mineral, yaitu capaian Rasio elektrifikasi dari Tahun 2018-2020 mempunyai nilai capaian yang tetap sebesar 99,99 persen. Persentase Luas Usaha Pertambangan yang Melaksanakan *Good Mining Practice* pada tahun 2018 sebesar 71,31 persen, sementara pada tahun 2020 kewenangan pertambangan beralih ke Pemerintah Pusat. Sedangkan Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Energi mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 1,07 persen menjadi sebesar 1,84 persen pada tahun 2019 dan capaian pada tahun 2020 sebesar 1,84 persen. Berikut ini merupakan indikator kinerja bidang energi dan sumber daya mineral dalam kurun watu Tahun 2018-2020, sebagaimana ditunjukan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.50
Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Rasio Elektrifikasi	Rasio	99,99	99,99	99,99
Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Energi	Persen	1,07	1,84	1,84
Jumlah pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan	SBM	254.979,65	254.986,65	N/A
Persentase luas Usaha Pertambangan yang Melaksanakan *Good Mining Practice*	Persen	71,31	N/A	N/A

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Persentase luas zona aman pada cekungan air tanah	Persen	65,75	N/A	N/A
Tersedianya prasarana air bersih bagi masyarakat bersumber dari air tanah dalam di wilayah rawan air	Titik	19	N/A	N/A
Jumlah pendapatan di bidang energi dan sumber daya mineral	Rupiah	2.820.042.158.107,00	N/A	N/A
Persentase Usaha Pertambangan yang Tertib Administrasi dan Teknis	Persen	N/A	40,87	46,65
Persentase Peningkatan Muka Air Tanah	Persen	N/A	5,22	5,46
Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh	N/A	1302	1146,6
Jumlah Instalasi Tenaga Listrik yang Laik Operasi	Unit	N/A	916	999

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, 2021

N/A pada tahun 2018 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

2.1.3.2.6 Perdagangan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan diantaranya terkait dengan peningkatan dan pengembangan ekspor. Kinerja sektor perdagangan dapat dilihat dari nilai ekspor nonmigas dan kontribusinya terhadap total ekspor nonmigas Indonesia pada tahun tertentu. Pada Tahun 2018-2020 mengalami perlambatan rata-rata sebesar 6,27 persen per tahun. Selain itu, Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting terhadap total nilai ekspor nonmigas secara nasional dengan kontribusi rata-rata mencapai 17,43 persen. Hal ini menempatkan Provinsi Jawa Barat sebagai penyumbang ekspor barang nonmigas terbesar di Indonesia.

Dalam kinerja bidang perdagangan di tahun 2020, capaian indikator Nilai ekspor bersih perdagangan, Penurunan nilai impor Jawa Barat, dan Peningkatan cakupan pengawasan Barang Beredar baru akan muncul pada triwulan II-2021. Indikator Volume Ekspor Non Migas Jawa Barat, Laju Nilai Impor Jawa Barat, dan Laju Nilai Impor Non Migas Jawa Barat baru ada sejak tahun 2019. Sedangkan indikator Laju pertumbuhan ekspor, Volume ekspor dan Peningkatan nilai ekspor non migas Jawa Barat per tahun tidak digunakan lagi sebagai indikator sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.51
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat	Juta US$	30.120,50	29.709,05	26.388,27
Kontribusi Ekspor Non Migas	Persen	18,5	99,237	99,237
Laju Pertumbuhan Ekspor	Persen	3,99	N/A	N/A
Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	U$ Juta	18,976	19,679	19,679**
Indeks Harga Konsumen (IHK) Bahan Makanan	Poin	146,771	4,18	3,76
Volume Ekspor	Ribu Ton	7.495,86	N/A	N/A
Nilai Ekspor Jawa Barat	Juta USD	30.125,78	29937,46	26591,08
Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas Jawa Barat per Tahun	Persen	3,99	N/A	N/A
Peningkatan Jumlah Eksportir Jawa Barat per Tahun	eksportir	211	254	285
Penurunan Nilai Impor Jawa Barat	Persen	3	10	10**
Terkendalinya Inflasi Jawa Barat	Persen	3,54	3,21	2,18
Peningkatan Cakupan Pengawasan Barang Beredar	Persen	100	100	100**
Laju Pertumbuhan Ekspor Non Migas	Persen	3,99	-1,38	-11,18
Volume Ekspor Non Migas Jawa Barat	Ribu Ton	N/A	7.393,30	7.609,42
Laju Nilai Impor Jawa Barat	Persen	N/A	-12,84	-21,29
Laju Nilai Impor Non Migas Jawa Barat	Persen	N/A	-10,1	-20,51

Sumber:

https://statistik.kemendag.go.id. 2020

Lakip Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Jawa Barat 2019

** Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

N/A pada tahun 2018 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

2.1.3.2.7 Perindustrian

Sektor industri merupakan sektor yang berperan penting bagi perekonomian Provinsi Jawa Barat. Sektor industri khususnya pengolahan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap *input* atau bahan dasar yang diolah. Selama 5 (lima) tahun terakhir, sektor industri menjadi penopang perekonomian Provinsi Jawa Barat dengan pangsa pasar di atas 40 persen. Kinerja sektor industri

pengolahan dapat dilihat dari peranan dan laju pertumbuhannya terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Capaian indikator yang dilaksanakan pada tahun 2020, yaitu peningkatan jumlah wirausaha baru, peningkatan nilai produksi IKM, Peningkatan Jumlah SDM IKM yang Bersertifikat dan Peningkatan nilai produksi industri baru akan muncul pada triwulan II-2021 sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah.

Tabel 2.52
Indikator Bidang Perindustrian Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	Persen	42,23	41,6	41,19
Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Persen	5,32	4,04	-4,22
Jumlah Unit usaha Industri	Unit Usaha	210.809	214.560	214.851
Peningkatan Jumlah wirausaha baru	Orang	13.303	15.182	15.182**
Pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat	Triliun upiah	51,87	71,91	71,91**
Peningkatan Nilai Produksi IKM	Persen	0,34	9,92	9,92**
Peningkatan Jumlah SDM IKM yang bersertifikat	Orang	3.095	3.365	3.365**
Peningkatan nilai produksi industri	Persen	7,43	9,88	9,88**

Sumber:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2020

Lakip Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Jawa Barat 2019

** Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.1.3.2.8 Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pemerataan serta persebaran penduduk. Perpindahan memberikan kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah atau mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi meliputi program perencanaan kawasan transmigrasi, program pembangunan kawasan transmigrasi, dan program pengembangan kawasan transmigrasi.

Dalam upaya mempersiapkan transmigran agar mampu mengembangkan berbagai program kegiatan produktif di lahan transmigrasi, maka para calon transmigran memerlukan beberapa

pelatihan guna membekali dirinya dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasi yang kuat dalam menjalankan program transmigrasi di daerah penempatan nantinya. Selama periode Tahun 2018-2020, telah dilakukan pelatihan calon transmigran sebagaimana data di bawah ini.

Tabel 2.53
Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Jumlah keluarga calon transmigran yang telah dilatih	KK	63,00	N/A	N/A
Jumlah Perjanjian Kerjasama	Perjanjian	N/A	13	N/A
Persentase Perjanjian Kerjasama Bidang Ketransmigrasian Yang Direalisasikan	Persen	N/A	N/A	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

N/A pada tahun 2018 mencerminkan penggunaan indikator baru dalam perubahan RPJMD

N/A pada tahun 2019-2020 mencerminkan indikator tersebut diubah dalam perubahan RPJMD

2.1.3.3 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.1.3.3.1 Sekretariat Daerah

1) Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 sampai dengan 2019 adalah A. Prestasi ini menunjukkan bahwa kinerja

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat semakin baik, akuntabel dan program yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran.

2) Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada pemerintah setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Capaian LPPD Jawa Barat selama periode 2015 sampai dengan 2017 mengalami peningkat dengan status sangat tinggi.

Tabel 2.54
Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017

Uraian	2015	2016	2017
Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Peringkat 2/ Skor: 3,1760 /Status: sangat tinggi	Peringkat 2 / Skor: 3,2496/Status: sangat tinggi	Peringkat 2 / Skor: 3,2842/Status: sangat tinggi

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

3) Level Kematangan/Maturitas Pengandaan Barang dan Jasa (PBJ)

Tingkat Maturitas Unint Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) adalah gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi.

Dalam penjabarannya, Level Maturitas dibagi menjadi 4 (empat) Domain (Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi) yang dibagi lagi kedalam 9 (sembilan) Variabel (Manajemen Risiko, Manajemen Kinerja, Manajemen Penyedia dan Manajemen Pengadaan, Pengorganisasian Kelembagaan, Tupoksi Kelembagaan, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM, dan Sistem Informasi). Realisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap Level Kematangan/Maturitas PBJ mencapai tingkat kematangan pada level 3 (tiga) proaktif. Adapun yang menjadi faktor pendorong tercapainya target diatas antara lain:

(a) Terbentuknya kelembagaan UKPBJ melalui terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2019 yang memiliki tugas, fungsi serta organisasi kelembagaan yang jelas dan terdokumentasi sesuai peraturan perundangan.

(b) Terselenggaranya layanan pengadaan secara elektronik (SIRUP, *e-Tendering*, *e-Purchasing*, SIKAP) secara terpadu.

(c) Terselenggaranya proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak.

4) Penggunaan *E-Procurement*

Pada akhir bulan Agustus 2007 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terpilih sebagai salah satu Pusat LPSE Regional yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kerjasama Implementasi Sistem Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang ditandatangani kedua

belah pihak pada tanggal 28 September 2007. Gubernur Jawa Barat sebelumnya sangat mendukung implementasi LPSE di Provinsi Jawa Barat. Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi dengan Kegiatan *Grand Launching* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); Ikrar Bersama 18 (delapan belas) Institusi mengenai Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK); Revitalisasi Manajemen Pemerintahan; Pencanangan Peningkatan Disiplin Pegawai; Pencanangan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; serta Uji Coba Penerapan Tunjangan Berbasis Kinerja dan pembentukan *Desk* Akuntabilitas. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan mutu pelayanan publik.

Pengadaan barang dan jasa secara nasional diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengalami perubahan dengan Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Secara nasional pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung. Dengan terbitnya peraturan presiden terkait pengadaan barang dan jasa tersebut, setiap kepala intansi pemerintah harus membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dengan kepala UKPBJ sebagai jabatan struktural dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik dan Keputusan Gubernur No 027/Kep.405-Dalbang/2018 tentang Pengelola Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pengelolaan pengadaan barang /jasa;
2. Pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik;
3. Pembinaan SDM dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;

4. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Kedudukan struktur organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Barat (Biro Pengadaan Barang Jasa) berada pada Sekretariat Daerah di bawah Asisten Daerah II yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Pengadaan Barang Jasa, Bagian Pembinaan dan Advokasi serta Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan kepada penyedia, UKPBJ, Auditor dan Intansi. Pelayanan kepada penyedia telah dilakukan sebanyak 38.681 penyedia. Paket lelang yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2008-2018 sebanyak 23.119 paket lelang. Jumlah paket lelang terbanyak terjadi pada tahun 2011 sebanyak 5.500 paket lelang dan jumlah paket lelang terendah pada tahun 2008 sebanyak 3 (tiga) paket lelang.

Penghargaan yang pernah diraih oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam bidang pengadaan barang dan jasa yaitu sebagai juara umum nasional LPSE dari LKPP pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 semester I kembali mendapat penghargaan sebagai LPSE dengan pagu terbanyak. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga mendapat penghargaan di bidang layanan publik, salah satunya dalam bidang layanan pengadaan secara elektronik. Demikian pula KPK memberikan apresiasi terhadap implementasi LPSE pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan prestasi tersebut, LPSE Provinsi Jawa Barat menjadi tempat untuk studi banding dari berbagai instansi baik Pusat maupun daerah dari seluruh Indonesia.

5) Persentase Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD NonLembaga Keuangan dan investasi Daerah yang ditindaklanjuti.

Indeks Reformasi Birokrasi sebagai Sasaran IKU Gubernur Jawa Barat, dijabarkan dalam IKU Kepala Biro BUMD dan Investasi dalam

bentuk persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi, supervisi, pembinaan, pengendalian dalam aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Investasi Daerah yang ditindaklanjuti.

Persentase Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Investasi daerah yang ditindaklanjuti adalah tingkat penyelesaian bahan perumusan kebijakan umum, hasil koordinasi, monitoring dan fasilitasi administratif aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Investasi Daerah. Kondisi tersebut akan dicapai/dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD, dan isu-isu strategis serta disesuaikan dengan tujuan yang telah dirumuskan.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Biro BUMD dan Investasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi, dan efektivitas. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja sasaran dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur, kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran atas pencapaian Indikator Kinerja Utama Biro BUMD dan Investasi periode Januari sampai dengan Desember 2019 yaitu Persentase Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Investasi daerah yang ditindaklanjuti, terealisasikan 90 persen sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dapat dinyatakan **Memuaskan**.

6) Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang ditindaklanjuti.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data

kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi, dan efektivitas. Pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan dapat dilihat berdasarkan persentase tingkat capaian yang menunjukan besar sasaran kegiatan yang ingin dicapai pada tahun 2019 sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang terukur dari nilai persentase tingkat capaian.

Pengukuran untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang perumusan Bahan Kebijakan Umum Lingkup Perekonomian yang ditindaklanjuti.

7) Indeks Kualitas Layanan Umum, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah lingkup Sekretariat Daerah.

Hasil survei indeks kepuasan pelayanan Biro umum tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan responden/sample sebanyak 550 orang meliputi pegawai lingkup Sekretariat Daerah dan BPKAD dengan menilai 20 (dua puluh) unsur pelayanan menghasilkan IKM dengan kualifikasi nilai (Baik). Hal ini didukung pula antara lain dengan terselenggaranya berbagai kegiatan sehingga proses administrasi dapat berjalan dengan lancar serta pelayanan dapat terlaksana optimal dari 3 (tiga) aspek pelayanan yaitu aspek layanan umum dan kepegawaian, aspek adminsitrasi keuangan, serta aspek pengelolaan barang milik daerah lingkup Sekretariat Daerah.

Selanjutnya, pencapaian target Biro Umum didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Daerah.

2.1.3.3.2 Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur

pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih dan selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran rencana tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jawa Barat telah tersedia atau ada, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat telah tersedia atau ada. RPJMD Provinsi Jawa Bara Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

3) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah, ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut: (a) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013; (b) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014; (c) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015; (d) Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016; (e) Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017; (f) Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018; (g) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, (h) Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, dan (i) Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

4) Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Persentase keselarasan penjabaran program RPJMD kedalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD mencapai persentase sebesar 100 persen, sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 99 persen. Hal ini disebabkan adanya Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat yang diikuti dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 99,22 persen. Selanjutnya pada tahun 2019 keselarasan program RPJMD yang

dijabarkan ke dalam RKPD mencapai 100 persen. Adapun untuk tahun 2020 keselarasan program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD sebesar 98,43 persen.

5) Penerapan *E-Planning*

Sejak beberapa tahun terakhir Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menggunakan sistem informasi berbasis *online* dalam proses perencanaan di Provinsi Jawa Barat. Sistem ini memuat perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Pada tahun 2012, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mulai menggunakan sistem informasi yang dinamakan *RKPD Online* 2101, dan pada tahun 2019 sistem ini mengalami pengembangan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan dinamakan "Si Rampak Sekar", singkatan dari Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Terintegrasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Sistem ini merupakan salah satu media agar proses perencanaan pembangunan dapat selaras, sinkron, sinergis, dan terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. Sistem ini digunakan untuk proses perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2020-2021.

Seiring dengan pemberlakuan Si Rampak Sekar, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat memberlakukan penggunaan satu sistem perencanaan penganggaran di tingkat nasional yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sebuah sistem aplikasi elektronik yang terdiri dari sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya antara lain untuk data dan informasi pembangunan, merupakan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, dengan tujuan: 1) menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat; 2) menghasilkan layanan informasi berbasis elektronik; serta 3) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

2.1.3.3.3 Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Selanjutnya, rancangan Perda yang telah disetujui diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi bersama dengan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi perda dan peraturan gubernur. Namun bila menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, maka gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Barat dan Pergub tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Tabel 2.55
Indikator Kinerja Urusan Keuangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	predikat	WTP	WTP	WTP
Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat waktu/ Tidak	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu
Jumlah penetapan petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan daerah	Buah	N/A	3	N/A
Tingkat Akuntabilitas Penggunaan Anggaran	Persen	N/A	100	N/A
Persentase aset yang diamankan secara fisik dan legal	Persen	N/A	40	N/A
Tingkat pemanfaatan dan pendayagunaan asset daerah.	Persen	N/A	85	N/A
Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Pendapatan Daerah)	Skor	N/A	84,6	N/A

Sumber: www.sakip.jabarprov.go.id dan Lakip Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

Keterangan:

** Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

Transparansi Informasi APBD dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government*). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Dalam upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Guna mendorong keterbukaan informasi publik yang terkait pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyediakan informasi APBD hingga ke level kegiatan yang dapat diakses secara *online* oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat luas melalui

website di alamat https://jabarprov.go.id/ pada menu Transparansi Anggaran.

Gambar 2.19
Informasi APBD Provinsi Jawa Barat secara *Online*

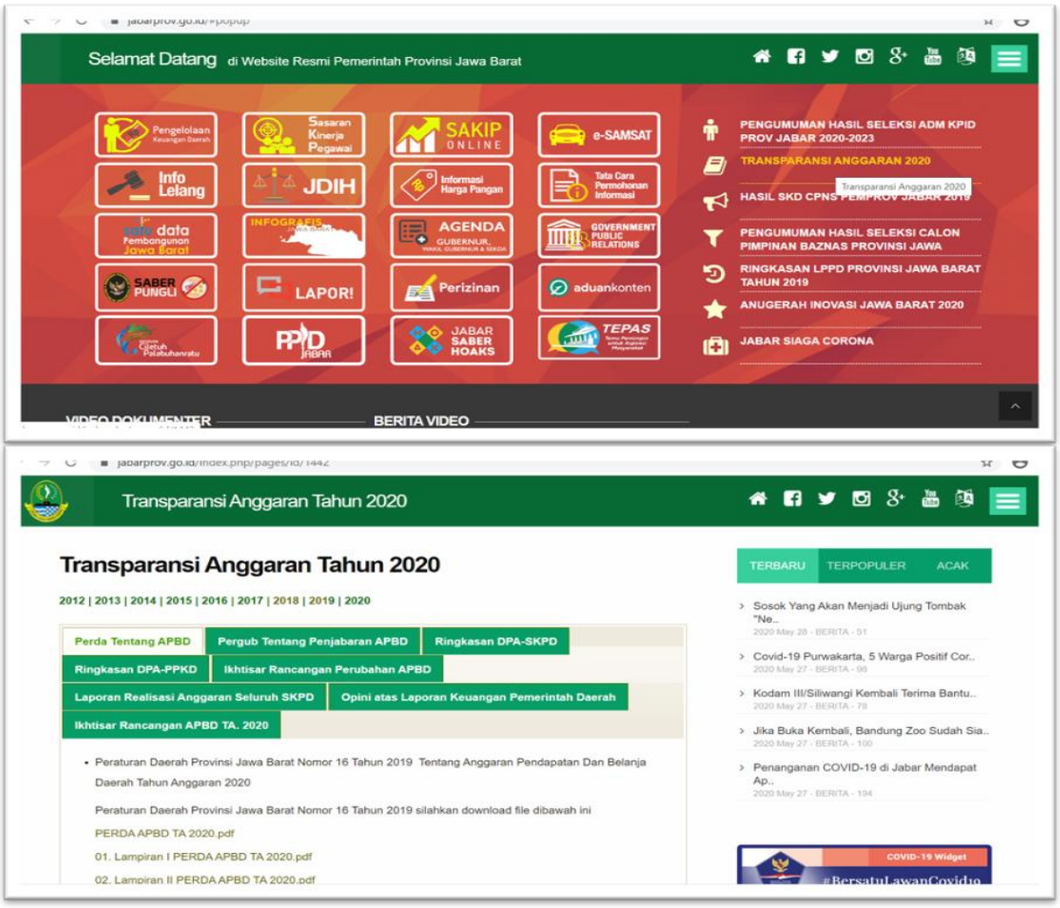

Sumber : https://jabarprov.go.id/

2.1.3.3.4 Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

No	Uraian	2019	2020
1	Persentase tingkat pelanggaran disiplin pegawai	0,05	0,05**
2	Persentase pegawai yang mendapat nilai SKP >76%	87,89	87,89**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Keterangan :

** Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

*dilengkapi data dari tahun 2016-2020

2.1.3.3.5 Penelitian dan Pengembangan

Indikator kinerja fungsi penelitian dan pengembangan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 umumnya menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 persentase rekomendasi kebijakan daerah yang dihasilkan, persentase hasil kelitbangan yang diterapkan, dan persentase inovasi daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan kekayaan intelektual mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 37,1 persen menjadi sebesar 20,8 persen pada tahun 2020. Sedangka untuk capaian indikator kinerja lainnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.57
Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Uraian	Satuan	2018	2019	2020
Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	90	N/A*	N/A*
Persentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Persen	67	N/A*	N/A*
Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat	Jumlah	62	N/A*	N/A*
Persentase hasil riset dan IPTEK yang diterapkan	Persen	60	N/A*	N/A*
Persentase hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan	Persen	80	N/A*	N/A*
Persentase Kerja sama Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK yang diimplementasikan	Persen	100	N/A*	N/A*
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Berbasis IPTEK	Jumlah	N/A**	4	5
Jumlah Hasil Penelitian yang Diterapkan dalam Pembangunan Jawa Barat	Jumlah	N/A**	10	11

Uraian	Satuan	2018	2019	2020
Jumlah Karya IPTEK yang Didaftarkan untuk Mendapat Kekayaan Intelektual (KI)	Jumlah	N/A**	20	26
Jumlah Inovasi yang Ditindaklanjuti menjadi SIDa	Jumlah	N/A**	15	15**
Persentase rekomendasi kebijakan daerah yang dihasilkan	Persen	N/A**	20	12,5
Persentase hasil kelitbangan yang diterapkan	Persen	N/A**	20	10,5
Persentase inovasi daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan kekayaan intelektual	Persen	N/A**	37,1	20,8
Persentase kajian kelitbangan yang didiseminasikan kepada perangkat daerah atau stakeholder lainnya	Persen	N/A**	16,7	17,14
Persentase kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti	Persen	N/A**	20	20
Persentase dokumen perencanaan, peningkatan kualitas aparatur, sarana prasarana dan dokumen pengelolaan keuangan	Persen	N/A**	100	100

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2020

Keterangan :

** Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

2.1.3.3.6 Unsur Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Tindak lanjut temuan terdiri dari: jumlah temuan (R), tindak lanjut yang selesai (S), tindak lanjut dalam proses (DP), dan belum ditindaklanjuti (B).

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa Persentase Tindak Lanjut Temuan terhadap Kabupaten/kota yang selesai pada tahun 2018 sebesar 56 persen meningkat menjadi sebesar 61,60 persen pada tahun 2019, dalam proses 25,21 persen di tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 26,16 persen pada tahun 2019, dan belum ditindaklanjuti ditahun 2018 sebesar 18,79 persen menjadi sebesar 12,24 persen pada tahun 2020. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2018-2020 adalah “A”. Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 adalah “WTP”. Adapun untuk indikator lainnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.58
Indikator Kinerja Pengawasan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020
1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Terhadap Kabupaten/kota				
	% S (tindak lanjut yang selesai)	persen	56,00	61,6	N/A
	% DP (tindak lanjut dalam proses)	persen	25,21	26,16	N/A
	% B (belum ditindaklanjuti)	persen	18,79	12,24	N/A
2.	Persentase Tindak Lanjut Temuan terhadap PD				N/A
	% S	persen	81,9	51,46	N/A
	% DP	persen	17,59	22,33	N/A
	% B	persen	19,52	26,21	N/A
3.	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK				N/A
	% TS	persen	65,91	66,07	N/A
	% TB	persen	27,9	27,11	N/A
	% BT	persen	6,19	5,16	N/A
4.	Hasil Penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di Tingkat Nasional	Poin	3,497	3,259	N/A
5.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	Peringkat	A	A	A
6.	Opini BPK-RI terhadap LKPD Provinsi Jawa Barat	Opini	WTP	WTP	WTP
7.	Persentase Penyelesaian tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Persen	66,4	94	N/A
8.	Persentase Penyelesaian TLHP Hasil Pemeriksaan Inspektorat terhadap PD Provinsi	Persen	83,96	83	N/A
9.	Persentase Nilai Indikator RAD-PPK	Persen	87	92	91,80
10.	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Persen	76	100	N/A
11.	Tingkat kapabilitas APIP Tingkat kapabilitas	Level	Level 3	Level 3	Level 3
12.	Persentase penurunan jumlah temuan inspektorat terhadap pelanggaran sistem pengendalian intern PD Provinsi	Persen	10	10	N/A
13.	Persentase PD yang nilai evaluasi LKIP adalah B ke atas	Persen	100	100	N/A
14.	Persentase penyelesaian TLHP kasus pengaduan masyarakat	Persen	76	77	N/A
15.	Jumlah auditor dan P2UPD bersertifikasi	Orang	75	80	N/A
16.	Jumlah auditor dan P2UPD yang telah mengikuti sertifikasi penjenjangan auditor madya	Orang	35	36	N/A
17.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Level	N/A	III	III

Sumber: Inspektorat, Tahun 2020

2.1.3.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Provinsi Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2020

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020
1.	Jumlah Ormas Terdaftar	Unit	N/A	N/A	N/A
2.	Jumlah Ormas Aktif	Unit	700	N/A	N/A
3.	Persentase Ormas Aktif	Persen	N/A	N/A	N/A
4.	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	Persen	N/A	70,78	0,0111 (estimasi Anggaran)
5.	Tingkat Bina Politik dan Demokratisasi	Persen	N/A	70,78	0,00099 (estimasi Anggaran)

Sumber: Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2020

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Salah satu aspek penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah adalah daya saing daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah memiliki beberapa aspek yang terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Jawa Barat menunjukkan peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini tercermin dari standar hidup yang makin membaik yang direpresentasikan oleh capaian indikator pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita disesuaikan penduduk Provinsi Jawa Barat meningkat sebesar Rp810.000 selama periode Tahun 2016-2020.

Gambar 2.20
Pengeluaran per Kapita Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020
(Ribu Rupiah)

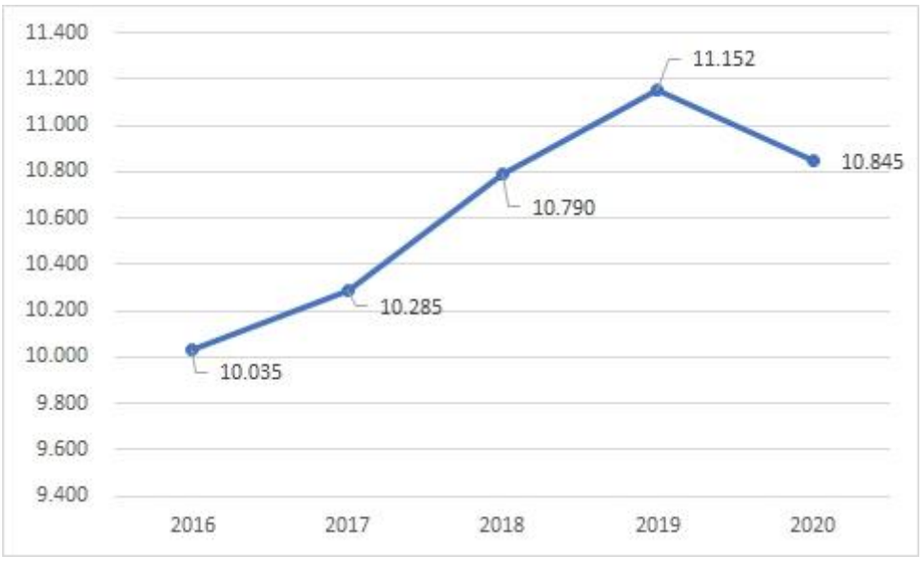

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

2.1.4.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga memiliki peranan terbesar penggunaan produksi barang dan jasa di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga.

Rata-rata konsumsi per rumah tangga per tahun menggambarkan besaran dana yang dihabiskan oleh setiap rumah tangga untuk membiayai konsumsi anggota rumah tangga baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb) selama periode Tahun 2018-2020. Meningkatnya nilai konsumsi per rumah tangga sejalan dengan semakin bervariasinya jenis barang dan volume yang dikonsumsi terutama konsumsi nonmakanan. Kenaikan konsumsi per rumah tangga ini bisa disebabkan oleh peningkatan jumlah anggota rumah tangga, atau peningkatan kualitas komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut yang sangat berkorelasi dengan peningkatan daya beli masyarakat.

Rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan pertumbuhan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Dengan demikian, konsumsi rata-rata per kapita selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya,

pertumbuhan ini terjadi baik ADHB maupun ADHK 2010. Kondisi ini memberi gambaran bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Provinsi Jawa Barat meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per kapita secara nominal adalah sebesar 26,26 juta rupiah pada tahun 2018 meningkat sebesar 28,14 juta rupiah pada tahun 2019, kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 27,61 juta rupiah. Adapun untuk indikator lainnya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.60
Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Total Konsumsi Rumah Tangga:			
a. ADHB (Miliar Rp)	1.278,28	1.387,76	1.378,9
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	878,99	920,74	894,11
Rata-Rata Konsumsi Per Kapita/tahun:			
a. ADHB (Ribu Rp)	26,26	28,14	27,61
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	18,06	18,67	17,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

2.1.4.3 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang dapat mengukur kemampuan daya beli petani sebagai salah satu pelaku utama di sektor pertanian. Secara konsep, NTP mengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Selama periode Tahun 2016-2020, rata-rata NTP Provinsi Jawa Barat menunjukkan angka yang berfluktuasi. Pada tahun 2018 rata-rata capaian NTP sebesar 109 persen dan meningkat di tahun 2019 dengan rata-rata NTP sebesar 110,68 persen, dan menurun di tahun 2019 dengan rata-rata NTP sebesar100,19 persen.

Secara umum, rata-rata NTP menunjukkan angka diatas 100 (>100). Hal ini berarti petani di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika tingkat rata-rata harga yang diterima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar. Atau dengan kata lain, produk pertanian di Provinsi

Jawa Barat memiliki daya tukar yang lebih tinggi daripada biaya produksi dan barang/jasa yang dikonsumsi petani secara umum.

Gambar 2.21
Rata-Rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Harga-harga komoditas pertanian sangat dipengaruhi faktor musiman, harga meningkat apabila jumlah produksi sedang mengalami penurunan seperti pada musim kemarau dan musim angin barat yang mengakibatkan produksi ikan menurun, sehingga menyebabkan fluktuatifnya NTP. Sebaliknya harga akan menurun apabila persediaan komoditas di sentra-sentra pertanian melimpah karena musim panen. Hal ini mengakibatkan *take home pay* petani tidak tetap untuk jumlah produksi yang diasumsikan sama (*ceteris paribus*) seperti produksi pada tahun dasar 2012.

2.1.4.4 Angka Kriminalitas

Salah satu aspek penting daya saing daerah yaitu stabilitas keamanan. Daerah dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang lebih baik akan memiliki daya saing ekonomi yang lebih tinggi. Pada umumnya untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial faktor keamanan menjadi prasyarat bagi dunia usaha dan masyarakat. Berdasarkan data 3 (tiga)

tahun terakhir (Tahun 2016-2018), jumlah kejahatan yang dilaporkan yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat menunjukkan angka yang cenderung turun. Pada tahun 2016 jumlah kejahatan yang dilaporkan mencapai 27.850 kasus, sementara itu pada tahun 2018 berkurang menjadi 16.256 kasus. (update data 2020).

2.1.4.5 Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menggambarkan peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. TKK Provinsi Jawa Barat selama periode Tahun 2015-2019 cenderung meningkat meskipun menunjukkan angka yang berfluktuasi. Pada tahun 2015, TKK mencapai 91,26 persen meningkat menjadi 92,02 persen di tahun 2019. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja sejalan dengan upaya meningkatkan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Gambar 2.22
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020 (Diolah)

2.1.4.6 Rasio Ketergantungan

Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadapi dinamika permasalahan kependudukan yang lebih kompleks dibanding provinsi lain. Rasio ketergantungan (*defendency ratio*) adalah salah satu indikator kependudukan yang menggambarkan perubahan struktur populasi penduduk. Tingginya rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Adapun rasio ketergantungan yang rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan di Provinsi Jawa Barat cenderung menurun dalam periode Tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, rasio ketergantungan sebesar 47,3 persen menurun menjadi 46,57 persen di tahun 2020. Hal ini berarti pada tahun 2020, setiap 100 orang penduduk usia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 47 orang penduduk yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Gambar 2.23
Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

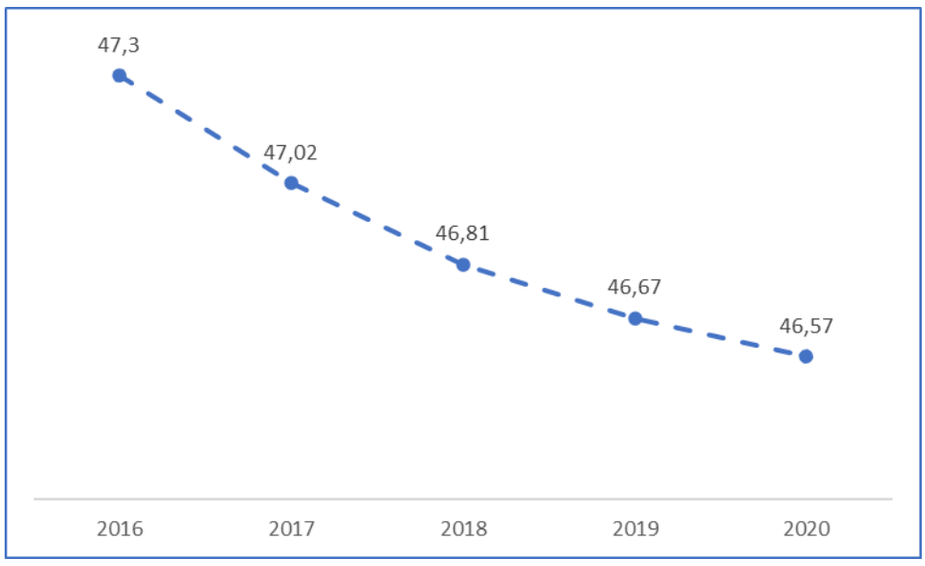

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

2.1.4.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan instrumen keberhasilan pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH telah mengalami pengembangan, sesuai dengan surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.318/PPKL/SPT/ REN.O/12/2020 pada tanggal 4 Desember 2020, IKLH provinsi terdiri atas 4 (empat) komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Rumus perhitungan IKLH disesuaikan dari (0,30 x IKA) + (0,30 X IKU) + (0,40 X IKTL), menjadi rumus yang baru = (0,340 X IKA) + (0,428 X IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 X IKAL).

Selama periode Tahun 2015-2019, IKLH Provinsi Jawa Barat menunjukkan angka berfluktuasi yang disebabkan adanya perubahan metode perhitungan dari Kementerian LHK. Capaian IKLH Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 2.24 dimana pada tahun 2019 sebesar 52,12 dengan perhitungan yang berlaku tahun 2019 yaitu dengan 3 (tiga) komponen. Capaian IKLH Tahun 2020 adalah 61,59 dimana nilai tersebut dihitung berdasarkan 4 (empat) komponen yaitu IKA, IKU, IKAL, dan IKL. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menggalakkan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan diantaranya program penanganan DAS Prioritas di Provinsi Jawa Barat yaitu DAS Citarum, DAS Cilamaya serta Sub DAS Cileungsi dan Sub DAS Cikeas.

Gambar 2.24
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2020

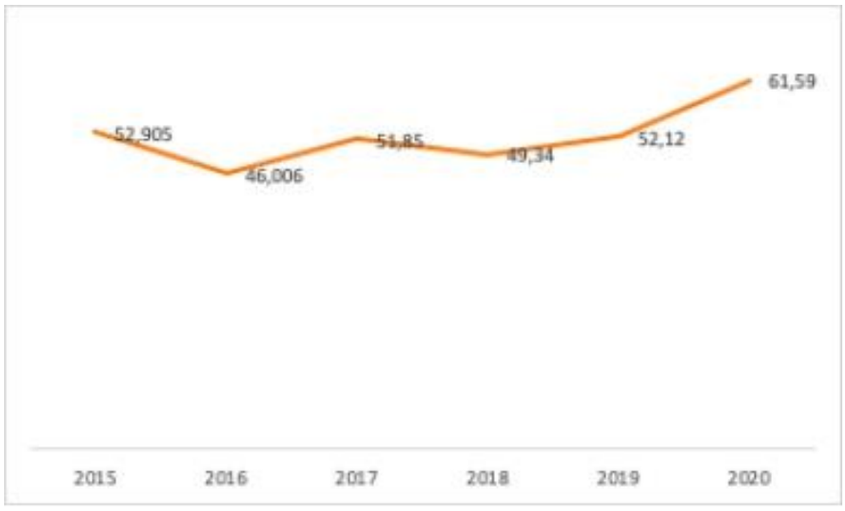

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

2.1.4.8 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang telah dan terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan *good governance* menuju *clean governance*. Langkah awalnya adalah melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai oleh organisasi yang sangat gemuk dan berjenjang, adanya tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundang-undangan, rendahnya produktivitas kerja pegawai, ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang seharusnya tergambar dalam *Machinery of Government* (MoG) yakni *interconnected between structural and process*, belum semuanya memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) yang jelas dan terukur, serta penempatan sumber daya manusia aparatur yang tidak *The Right Man In The Right Place*.

Penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, dengan mengutamakan nilai 4E yakni efektivitas, efisiensi, *equity* (rasa adil), serta ekonomis (hemat dan optimal). Tujuan penataan yaitu untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkarakter, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Pengukuran penerapan reformasi birokrasi menggunakan indeks reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu Tahun 2017-2020 mempunyai predikat BB.

2.1.4.9 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah. Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variabel, dan 28 indikator demokrasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan penguatan aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Barat.

Hasil survei BPS Provinsi Jawa Barat, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Tahun 2013 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi. Posisi tertinggi terjadi pada Tahun 2015 yaitu 73,04. Pada tahun berikutnya sempat turun ke 66,82, Kembali meningkat pada Tahun 2017 dan 2018 ke angka 68,78 dan 73,91 dan menurun Kembali di tahun 2019 menjadi 69,09. Tingkat demokrasi di Jawa Barat secara umum masih dalam katagori sedang.

Gambar 2.25
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015-2019

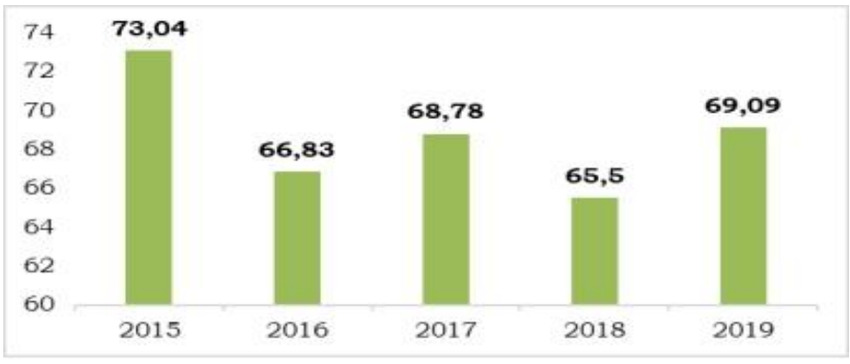

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

2.1.4.10 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta berkerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari definisi tersebut, alat ukur Indeks kerukunan umat beragama terdiri dari 3 (tiga) indikator utama, yaitu (1) Toleransi, (2) Kesetaraan, dan (3) Kerjasama. Indek Kerukunan Umat Beragama dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan persoalan kerukunan umat beragama yang dapat menangkal intoleransi dan radikalisme.

Dari hasil survei Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI, Indek Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Barat dari awal tahun 2015 berada pada angka 72,6. Tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 9 (sembilan) Poin menjadi 63,39, dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 68,5. Posisi di tahun 2019 ini masuk dalam kategori rukun.

2.1.4.11 Indeks Risiko Bencana Daerah (IRBI)

Indikator Risiko Bencana Daerah (IRBI) merupakan indikator di dalam mengukur risiko bencana. IRBI dilakukan dengan menghitung indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Proses menghitung IRBI dilakukan dengan menggunakan kalkulasi secara spasial sehingga dapat menghasilkan peta risiko dan nilai grid yang dapat dipergunakan dalam menyusun penjelasan peta risiko.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2019, Provinsi Jawa Barat dikategorikan sebagai daerah dengan IRBI yang Tinggi. Kondisi ini menuntut pemerintahan daerah dan masyarakat Provinsi Jawa Barat untuk dapat melakukan tindakan kesiapsiagaan, maupun bersiap pada saat terjadi bencana dan pasca bencana.

Tabel 2.61
Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi di Indonesia Tahun 2020

No	Provinsi	Skor	Kelas Rasio
1.	Sulawesi Barat	166.49	TINGGI
2.	Bengkulu	162.00	TINGGI

No	Provinsi	Skor	Kelas Rasio
3.	Kepulauan Bangka Belitung	161.54	TINGGI
4.	Maluku	160.35	TINGGI
5.	Sulawesi Selatan	159.49	TINGGI
6.	Sulawesi Tenggara	157.72	TINGGI
7.	Banten	154.87	TINGGI
8.	Kalimantan Timur	154.02	TINGGI
9.	Kalimantan Utara	153.62	TINGGI
10.	Aceh	153.58	TINGGI
11.	Sumatera Barat	149.53	TINGGI
12.	Riau	147.27	TINGGI
13.	Lampung	146.78	TINGGI
14.	Jawa Barat	145.81	TINGGI
15.	Maluku Utara	145.63	TINGGI
16.	Sumatera Utara	145.18	TINGGI
17.	Sulawesi Tengah	144.96	TINGGI
18.	Kalimantan Selatan	144.81	TINGGI
19.	Papua Barat	144.05	TINGGI
20.	Daerah Istimewa Yogyakarta	140.92	SEDANG
21.	Nusa Tenggara Timur	140.89	SEDANG
22.	Sulawesi Utara	139.47	SEDANG
23.	Sumatera Selatan	139.24	SEDANG
24.	Jambi	138.64	SEDANG
25.	Kalimantan Barat	138.49	SEDANG
26.	Jawa Timur	134.39	SEDANG
27.	Jawa Tengah	132.99	SEDANG
28.	Kalimantan Tengah	132.70	SEDANG
29.	Bali	129.43	SEDANG
30.	Nusa Tenggara Barat	128.05	SEDANG
31.	Gorontalo	126.64	SEDANG
32.	Papua	122.90	SEDANG
33.	Kepulauan Riau	116.40	SEDANG
34.	Dki Jakarta	64.02	SEDANG

Sumber: IRBI Tahun 2021, BNPB

Potret penurunan indeks risiko bencana di beberapa kabupaten/kota Jawa Barat yang rawan bencana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62
Perbandingan Penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	KELAS RISIKO 2020
1	Cianjur	250.00	226.48	207.13	207.13	215.08	TINGGI
2	Garut	238.00	208.63	208.63	208.63	205.52	TINGGI
3	Tasikmalaya	224.80	224.80	203.01	203.01	203.01	TINGGI
4	Sukabumi	231.20	213.22	190.75	190.75	190.75	TINGGI
5	Karawang	175.20	175.20	175.20	175.20	174.43	TINGGI

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	KELAS RISIKO 2020
6	Bandung	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	TINGGI
7	Kota Cirebon	183.60	183.18	172.76	172.76	172.76	TINGGI
8	Subang	175.20	175.20	175.20	175.20	171.91	TINGGI
9	Cirebon	181.20	181.20	170.79	160.63	160.63	TINGGI
10	Kota Banjar	152.80	152.80	152.80	152.80	152.80	TINGGI
11	Pangandaran	215.20	192.11	168.52	145.44	145.44	TINGGI
12	Majalengka	166.00	166.00	166.00	166.00	143.43	SEDANG
13	Sumedang	162.00	162.00	162.00	162.00	142.15	SEDANG
14	Ciamis	178.23	173.66	163.29	156.23	141.57	SEDANG
15	Purwakarta	138.00	138.00	138.00	138.00	137.31	SEDANG
16	Bogor	152.40	152.40	136.88	136.88	136.88	SEDANG
17	Indramayu	175.20	175.20	167.22	167.22	136.79	SEDANG
18	Bekasi	164.80	152.03	133.03	133.03	132.89	SEDANG
19	Kota Bekasi	131.60	131.60	131.60	131.60	131.60	SEDANG
20	Kuningan	154.00	154.00	154.00	154.00	131.13	SEDANG
21	Kota Bandung	125.99	122.32	122.32	122.32	122.32	SEDANG
22	Kota Tasikmalaya	119.20	119.20	119.20	119.20	119.20	SEDANG
23	Kota Sukabumi	114.40	114.40	114.40	114.40	114.40	SEDANG
24	Bandung Barat	119.97	119.97	115.01	110.22	110.22	SEDANG
25	Kota Cimahi	120.40	120.40	120.40	120.40	105.41	SEDANG
26	Kota Depok	95.10	89.63	89.63	89.63	89.63	SEDANG
27	Kota Bogor	87.45	82.35	75.75	75.75	75.75	SEDANG

Sumber: IRBI Tahun 2021, BNPB

2.1.4.12 Indeks Kebahagiaan

Indikator kebahagiaan merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kesejahteraan karena kebahagiaan merupakan refleksi dari tingkat kesejahteraan yang telah dicapai oleh setiap individu (Kapteyn, Smith dan Soest, 2010 dalam Indeks Kebahagiaan 2017, BPS). Indikator kebahagiaan akan menggambarkan tingkat kesejahteraan subjektif terkait beberapa aspek kehidupan yang dianggap esensial dan bermakna bagi sebagian besar penduduk dan masyarakat (Martin, 2012; OECD, 2011, 2013 dalam Indeks Kebahagiaan 2017, BPS).

Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2017 yang dihitung dengan menggunakan Metode 2014, lebih tinggi dibanding tahun 2014. Pada Metode 2014, Indeks Kebahagiaan diukur menggunakan 1 (satu) dimensi, yaitu Kepuasan Hidup, sedangkan pada Metode 2017 Indeks Kebahagiaan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi, yaitu: Kepuasan Hidup, Perasaan, dan Makna Hidup.

Indeks Kebahagiaan Provinsi Jawa Barat tahun 2014 sebesar 67,66 pada skala 0 sampai 100. Angka ini naik menjadi 69,58 pada tahun 2017. Kondisi kehidupan penduduk Jawa Barat dapat dikatakan cukup bahagia pada tahun 2019, karena sudah di atas 50 (lima puluh). Tahun 2018, BPS tidak mempublikasikan Indeks Kebahagiaan sehingga tidak diketahui capaian per provinsi. Selanjutnya, berdasarkan data tahun 2019 bila dibandingkan dengan nasional, Indeks Kebahagiaan Provinsi Jawa Barat masih berada di bawah Indeks Kebahagiaan nasional yaitu 69,58.

Keseluruhan capaian pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagaimana telah diuraikan pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing di bab ini, disajikan pada tabel di bawah. Sebagian dari realisasi kinerja tidak dapat disajikan setiap tahun sebab adanya perbedaan indikator kinerja untuk mengukur capaian pelaksanaan pembangunan dan urusan pemerintahan daerah pada RPJMD Tahun 2013-2018 dan RPJMD Tahun 2018-2023. Terdapat beberapa indikator kinerja yang dipakai di kedua periode RPJMD ini, namun ada juga yang hanya digunakan di periode 2013-2018 demikian pula sebaliknya. Selain itu, pada tahun 2017, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan perubahan RPJMD Tahun 2013-2018. Sebagian substansi RPJMD yang mengalami perubahan yaitu indikator kinerja sebagai alat ukur capaian pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

Tabel sebelumnya memuat capaian indikator kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing daerah. Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum indikator-indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat pada periode Tahun 2015-2019 menunjukkan kinerja yang baik. Walau pada umumnya berkinerja baik, namun indikator laju pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan gender perlu upaya yang lebih besar untuk dapat ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pada aspek daya saing daerah di periode yang sama menunjukkan capaian seluruh indikator semakin baik dari tahun ke tahun. Walaupun demikian masih diperlukan upaya dari seluruh pelaku pembangunan untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di

Provinsi Jawa Barat dan indeks kerukunan umat beragama yang cenderung menurun capaian pada tahun 2019.

Berdasarkan data dan informasi pembangunan daerah yang belum optimal pencapaiannya, maka perlu diidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian di atas, pembangunan Provinsi Jawa Barat harus terus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Terlebih dengan kondisi tahun 2020 dimana terjadi pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Pandemi COVID-19 telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional nonalam yang tidak saja melanda aspek kesehatan namun telah berdampak buruk pada sosial ekonomi serta sektor-sektor lainnya. Dampak negatif dari pandemi COVID-19 telah dibuktikan dengan memburuknya berbagai indikator makro baik negara-negara lain maupun Indonesia termasuk Provinsi Jawa Barat dan provinsi lainnya.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai Tahun 2020

Pada tahap penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, telah dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD. Hal ini dilaksanakan sejak tahapan persiapan sampai dengan penetapan RKPD. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa RKPD Jawa Barat telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD, serta menjadi pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2020

Pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian kinerja tahun 2020 dilakukan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut dapat memberikan informasi penting mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada triwulan IV Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2020, maka kelengkapan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 pada tingkat kegiatan di Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan pada APBD Tahun 2020 sebanyak 3.345 kegiatan. Jumlah program pada APBD Tahun 2020 adalah 773 Program. Hasil pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah pada tahun 2020, diperoleh informasi bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja adalah 91,21 persen dan capaian (penyerapan) anggaran kegiatan pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 adalah 89,16 persen. Berikut ini disajikan rincian rata-rata tingkat capaian kinerja anggaran kegiatan dalam Program Tahun 2019 seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.63

Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB**	**6.168.337.176.521**	**5,462,254,806,808**	**88.55**
1.01.01.	**DINAS PENDIDIKAN**	**3.414.529.232.944**	**3,040,405,650,758**	**89.04**
1.01.01.004.	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.065.357.647.960	763,037,193,071	71.62
1.01.01.006.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dinas Pendidikan	5.089.546.728	4,977,668,000	97.80
1.01.01.008.	Program Pengelolaan Sekolah Menengah Atas	1.024.353.163.542	995,239,235,556	97.16
1.01.01.010.	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	1.107.957.000	1,105,227,000	99.75
1.01.01.011.	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	693.700.000	684,700,000	98.70
1.01.01.012.	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	297.062.000	261,900,000	88.16
1.01.01.013.	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	1.201.382.600	1,171,825,494	97.54
1.01.01.014.	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	406.680.400	404,932,900	99.57
1.01.01.015.	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	510.853.750	510,166,733	99.87
1.01.01.016.	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	2.979.151.000	2,304,121,038	77.34
1.01.01.017.	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	2.438.780.750	2,435,101,105	99.85
1.01.01.018.	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	285.804.500	285,804,500	100.00
1.01.01.019.	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	386.246.000	384,016,500	99.42
1.01.01.020.	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	509.755.000	483,639,000	94.88
1.01.01.021.	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	740.771.000	740,511,000	99.96

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.01.01.022.	Program Pelayanan dan Pengawasan Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	640.818.000	575,490,201	89.81
1.01.01.023.	Program Pengelolaan Guru dan Tenaga Kependidikan	5.565.487.000	5,030,412,000	90.39
1.01.01.024.	Program Pengelolaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (Sekolah Inklusi)	45.137.942.051	51,466,876,733	114.02
1.01.01.025.	Program Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan	626.952.873.115	585,173,424,686	93.34
1.01.01.026.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	3.841.174.141	3,812,345,750	99.25
1.01.01.027.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	162.464.938	161,845,000	99.62
1.01.01.028.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	265.344.500	265,344,500	100.00
1.01.01.029.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	1.421.975.135	1,278,529,850	89.91
1.01.01.030.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	666.356.228	659,399,987	98.96
1.01.01.031.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	164.697.852	164,688,399	99.99
1.01.01.032.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	1.448.412.024	1,428,660,000	98.64
1.01.01.033.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	1.510.615.180	1,501,243,232	99.38
1.01.01.034.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	183.794.641	183,416,900	99.79
1.01.01.035.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	506.710.360	502,819,776	99.23
1.01.01.036.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	515.828.588	404,582,248	78.43
1.01.01.037.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	863.939.259	862,900,639	99.88
1.01.01.038.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	105.368.136	61,370,000	58.24
1.01.01.040.	Program digitalisasi pendidikan UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (UPTD Tikomdik)	4.348.488.268	4,138,314,440	95.17

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.01.01.041.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Pendidikan	38.550.366.378	37,777,621,685	98.00
1.01.01.042.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	35.043.480.710	34,954,020,085	99.74
1.01.01.043.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	21.511.137.150	19,530,131,449	90.79
1.01.01.044.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	77.388.002.200	76,796,975,953	99.24
1.01.01.045.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	72.775.329.800	72,520,931,619	99.65
1.01.01.046.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	31.530.603.936	31,526,373,112	99.99
1.01.01.047.	Program Dukungan Manajemen Perkan-toran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	52.858.670.116	52,670,237,237	99.64
1.01.01.048.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	42.368.853.647	42,275,834,252	99.78
1.01.01.049.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	39.571.642.898	39,426,960,861	99.63
1.01.01.050.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	48.853.677.860	48,477,552,760	99.23
1.01.01.051.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	50.127.975.939	49,926,636,705	99.60
1.01.01.052.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	39.813.091.214	39,746,773,644	99.83
1.01.01.053.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	31.337.508.240	31,315,613,440	99.93
1.01.01.054.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	32.138.101.210	31,762,281,718	98.83
1.02.01.	**DINAS KESEHATAN**	**1.235.708.244.862**	**1,007,582,259,062**	**81.54**
1.02.01.010.	Program Pelayanan Kesehatan	13.452.628.600	10,623,522,041	78.97
1.02.01.012.	Program Sumber Daya Kesehatan	56.839.153.785	47,535,904,156	83.63
1.02.01.019.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	3.989.765.849	3,391,053,550	84.99

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.02.01.020.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana UPTD Pelatihan Kesehatan	173.100.000	136,100,000	78.63
1.02.01.021.	Program Kesehatan Akibat Bencana Dan Kesehatan Akibat KLB Provinsi	424.849.220	398,208,400	93.73
1.02.01.022.	Program Kesehatan Masyarakat	979.780.750	965,088,750	98.50
1.02.01.023.	Program Manajemen Kesehatan	27.204.202.373	20,071,952,963	73.78
1.02.01.024.	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	1.076.232.487	1,043,572,231	96.97
1.02.01.025.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan	133.573.953.215	98,259,573,867	73.56
1.02.01.026.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Al Ihsan	341.953.621.724	303,327,838,515	88.70
1.02.01.027.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Jampangkulon	75.509.181.403	71,432,348,661	94.60
1.02.01.028.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA	61.539.650.098	31,730,729,794	51.56
1.02.01.029.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan Kerja	3.179.119.894	2,087,778,048	65.67
1.02.01.030.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pameungpeuk	41.201.635.452	32,967,801,788	80.02
1.02.01.031.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Paru	14.792.957.090	13,009,610,078	87.94
1.02.01.032.	Program Peningkatan Mutu Unit Pelatihan Kesehatan	752.398.350	350,048,250	46.52
1.02.01.033.	Program Dukungan Manajemen Perkan-toran Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat	20.823.913.044	14,737,342,954	70.77
1.02.01.034.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Rs Al- Ihsan UPT Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat	214.695.550	105,676,510	49.22
1.02.01.035.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Rs Jampangkulon UPT Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat	30.869.514.873	28,335,629,385	91.79
1.02.01.036.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Rs Jiwa UPT Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat	13.696.964.149	10,654,801,517	77.79
1.02.01.037.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Rs Kesehatan Kerja UPT Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat	17.568.263.592	13,463,861,663	76.64
1.02.01.038.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Rs Pameungpeuk UPT Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat	13.572.099.021	9,982,263,697	73.55
1.02.01.039.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Rs Paru UPT Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat	15.564.140.901	12,111,608,895	77.82

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.02.01.040.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Unit Laboratorium Kesehatan UPT Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat	5.773.309.790	4,506,430,793	78.06
1.02.01.041.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Unit Pelatihan Kesehatan UPT Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat	3.546.562.352	3,078,100,372	86.79
1.02.01.043.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Di Rs Pameungpeuk	71.659.559.103	54,084,907,369	75.47
1.02.01.044.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rs Al Ihsan	52.654.490.773	30,284,534,400	57.52
1.02.01.045.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rs Jampangkulon	84.655.132.627	65,671,774,964	77.58
1.02.01.046.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rs Jiwa	6.823.046.341	4,412,573,641	64.67
1.02.01.047.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rs Paru	13.554.635.450	12,272,912,827	90.54
1.02.01.048.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana RSUD Kesehatan Kerja	107.840.676.625	106,424,387,383	98.69
1.02.01.049.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Laboratorium Kesehatan	249.010.381	124,321,600	49.93
1.03.01.	**DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**	**431.400.903.256**	**400,968,511,222**	**92.95**
1.03.01.021.	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	22.004.449.428	19,513,511,939	88.68
1.03.01.022.	Program Penataan Ruang	4.941.579.153	3,809,134,508	77.08
1.03.01.024.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	2.147.441.740	1,953,995,550	90.99
1.03.01.046.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	12.758.461.161	8,238,068,706	64.57
1.03.01.048.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	1.777.792.317	1,701,651,059	95.72
1.03.01.049.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I	1.547.955.374	1,460,265,977	94.34
1.03.01.050.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II	2.525.555.251	2,108,216,962	83.48
1.03.01.051.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III	2.247.505.106	2,099,633,656	93.42
1.03.01.052.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV	1.895.894.558	1,747,859,465	92.19

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.03.01.053.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V	1.701.756.263	1,441,966,328	84.73
1.03.01.054.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI	1.547.932.885	1,239,722,878	80.09
1.03.01.064.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II	1.896.926.400	1,463,971,462	77.18
1.03.01.068.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III	69.936.163.998	69,068,169,654	98.76
1.03.01.069.	Program Pengawasan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan	14.852.133.490	12,969,632,828	87.33
1.03.01.085.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Laboratorium bahan Konstruksi	376.792.594	349,257,830	92.69
1.03.01.086.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I	177.368.811	169,821,900	95.75
1.03.01.087.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II	317.600.762	246,473,500	77.60
1.03.01.088.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan III	341.779.370	317,074,851	92.77
1.03.01.089.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV	324.226.706	309,875,850	95.57
1.03.01.090.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan V	250.967.982	238,253,118	94.93
1.03.01.091.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan VI	1.551.178.215	1,377,672,887	88.81
1.03.01.098.	Program Peningkatan, Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan I	47.387.917.579	44,129,281,253	93.12
1.03.01.099.	Program Peningkatan, Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan II	41.221.933.308	38,094,884,437	92.41
1.03.01.100.	Program Peningkatan, Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan III	57.485.532.634	55,539,839,767	96.62

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.03.01.101.	Program Peningkatan, Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan IV	43.104.339.924	42,637,657,773	98.92
1.03.01.102.	Program Peningkatan, Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan V	33.416.664.346	31,823,243,649	95.23
1.03.01.103.	Program Peningkatan, Pemeliharaan Berkala dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Wilayah Pelayanan VI	58.206.049.463	52,773,935,699	90.67
1.03.01.104.	Program Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan	5.457.004.438	4,145,437,736	75.97
1.03.02.	**DINAS SUMBER DAYA AIR**	**215.655.898.931**	**188,181,849,643**	**87.26**
1.03.02.028.	Program Pengendalian Daya Rusak Air	5.887.459.087	5,752,403,720	97.71
1.03.02.031.	Program Peningkatan Sarana dan Pra-sarana Aparatur Dinas Sumber Daya Air	315.345.469	310,615,500	98.50
1.03.02.034.	Program Pengelolaan Jaringan Irigasi WS. Cisadea-Cibareno	19.474.491.751	16,821,564,684	86.38
1.03.02.035.	Program air baku di WS. Ciliwung-Cisadane	268.565.436	267,843,000	99.73
1.03.02.036.	Program air baku di WS. Cimanuk-Cisanggarung	5.152.366	5,100,400	98.99
1.03.02.037.	Program air baku di WS. Cisadea-Cibareno	219.436.650	217,438,450	99.09
1.03.02.038.	Program air baku di WS. Citanduy	426.876.400	417,539,026	97.81
1.03.02.039.	Program air baku di WS. Citarum	324.229.261	315,651,768	97.35
1.03.02.040.	Program air baku di WS. Ciwulan-Cilaki	243.390.688	242,236,847	99.53
1.03.02.041.	Program Bina Konstruksi Irigasi	617.424.842	537,100,964	86.99
1.03.02.042.	Program Bina Konstruksi Sumber Daya Air	329.689.974	319,883,453	97.03
1.03.02.043.	Program Bina Manfaat Sumber Daya Air	452.534.292	445,971,873	98.55
1.03.02.044.	Program Bina Operasi dan pemeliharaan Irigasi	1.442.066.690	1,237,467,576	85.81
1.03.02.045.	Program Bina Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	510.520.126	500,739,410	98.08
1.03.02.047.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Sumber Daya Air	10.710.604.897	9,438,882,457	88.13
1.03.02.055.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane	2.530.414.759	2,357,460,987	93.17
1.03.02.056.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung	3.175.679.604	3,022,314,196	95.17
1.03.02.057.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno	1.172.865.346	1,155,256,712	98.50

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.03.02.058.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD PSDA WS. Citanduy	1.681.643.739	1,612,707,765	95.90
1.03.02.059.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD PSDA WS. Citarum	2.067.000.621	1,941,347,261	93.92
1.03.02.060.	Program Dukungan Manajemen Per-kantoran UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki	1.821.402.582	1,691,302,207	92.86
1.03.02.061.	Program hidrologi dan sistem data Sumber Daya Air	390.469.000	388,924,661	99.60
1.03.02.062.	Program Kelembagaan Sumber Daya Air	192.862.087	189,537,523	98.28
1.03.02.070.	Program Pengelolaan Jaringan Irigasi WS. Cimanuk-Cisanggarung	19.877.392.925	17,486,054,861	87.97
1.03.02.071.	Program Pengelolaan Jaringan Irigasi WS. Citanduy	15.439.110.418	15,292,511,924	99.05
1.03.02.072.	Program Pengelolaan Jaringan Irigasi WS. Citarum	42.971.456.374	42,351,879,201	98.56
1.03.02.073.	Program Pengelolaan Jaringan Irigasi WS. Ciwulan - Cilaki	9.628.201.924	9,560,699,935	99.30
1.03.02.074.	Program Pengelolaan Jaringan Irigasi WS.Ciliwung-Cisadane	27.362.741.696	12,161,333,885	44.44
1.03.02.075.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air di WS. Ciliwung-Cisadane	5.133.613.513	5,018,948,283	97.77
1.03.02.076.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air di WS. Cilwulan-Cilaki	7.396.452.827	7,372,768,351	99.68
1.03.02.077.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air di WS. Cimanuk-Cisanggarung	4.883.358.889	4,772,835,588	97.74
1.03.02.078.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air di WS. Cisadea-Cibareno	8.454.742.637	8,115,731,718	95.99
1.03.02.079.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air di WS. Citanduy	4.740.026.229	3,472,675,962	73.26
1.03.02.080.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air di WS. Citarum	6.264.260.358	5,435,917,539	86.78
1.03.02.081.	Program pengembangan air baku	179.891.110	140,673,160	78.20
1.03.02.082.	Program pengendalian daya rusak air pada WS. Cisadea-Cibareno	1.853.529.674	800,772,500	43.20
1.03.02.083.	Program pengendalian daya rusak air pada WS. Ciwulan-Cilaki	647.702.409	647,521,950	99.97
1.03.02.084.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Irigasi	236.840.000	210,461,500	88.86
1.03.02.092.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane	1.452.745.111	1,373,551,800	94.55
1.03.02.093.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung	478.385.461	470,246,872	98.30

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.03.02.094.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno	434.437.740	431,325,000	99.28
1.03.02.095.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD PSDA WS. Citanduy	755.105.080	743,014,750	98.40
1.03.02.096.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD PSDA WS. Citarum	542.307.064	517,749,000	95.47
1.03.02.097.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki	485.739.840	480,015,050	98.82
1.03.02.105.	Program Perencanaan Teknis Irigasi	1.276.514.477	1,248,352,433	97.79
1.03.02.106.	Program Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	901.217.508	887,517,941	98.48
1.04.01.	**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**	**129.538.844.247**	**118,553,650,378**	**91.52**
1.04.01.033.	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	12.573.119.055	11,091,376,536	88.21
1.04.01.036.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perumahan Dan Permukiman	965.551.753	936,012,600	96.94
1.04.01.038.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Perumahan dan Permukiman	13.616.912.010	13,055,446,049	95.88
1.04.01.039.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan	12.628.374.543	12,553,856,872	99.41
1.04.01.040.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	69.869.409.852	61,760,656,797	88.39
1.04.01.041.	Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan	18.796.519.862	18,105,401,831	96.32
1.04.01.042.	Program pengelolaan dan pelayanan perumahan	49.280.000	48,000,000	97.40
1.04.01.043.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan	409.380.400	393,564,000	96.14
1.04.01.072.	Program pertanahan	630.296.772	609,335,693	96.67
1.05.01.	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**7.073.486.117**	**6,418,936,061**	**90.75**
1.05.01.040.	Program Peningkatan Sarana dan Prasa-rana Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	56.273.140	47,725,000	84.81
1.05.01.058.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja	5.582.895.770	5,025,353,668	90.01
1.05.01.060.	Program pembinaan masyarakat dan aparatur	584.844.852	583,600,727	99.79
1.05.01.061.	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	438.880.000	376,426,458	85.77

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.05.01.062.	Program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	128.158.955	125,382,660	97.83
1.05.01.064.	Program Perlindungan Masyarakat	282.433.400	260,447,548	92.22
1.05.02.	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**13.359.076.606**	**12,420,505,151**	**92.97**
1.05.02.046.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	138.754.320	112,458,000	81.05
1.05.02.057.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.830.235.791	5,065,298,243	86.88
1.05.02.067.	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1.948.805.763	1,944,346,808	99.77
1.05.02.068.	Program Pemulihan Pasca Bencana	377.554.500	356,023,500	94.30
1.05.02.069.	Program Kedaruratan dan Logistik	5.063.726.232	4,942,378,600	97.60
1.05.03.	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**9.835.873.725**	**9,535,783,806**	**96.95**
1.05.03.050.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	524.576.776	515,885,375	98.34
1.05.03.052.	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	675.819.588	667,872,600	98.82
1.05.03.053.	Program Bina Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	822.966.800	771,625,500	93.76
1.05.03.054.	Program Bina Kewaspadaan Daerah	638.034.301	637,660,300	99.94
1.05.03.055.	Program Bina Politik Dalam Negeri	853.338.375	818,541,892	95.92
1.05.03.056.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.321.137.885	6,124,198,139	96.88
1.06.01.	**DINAS SOSIAL**	**70.351.207.579**	**67,683,714,214**	**96.21**
1.06.01.052.	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial	830.972.053	821,759,350	98.89
1.06.01.053.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.970.609.700	3,650,053,400	91.93
1.06.01.054.	Program Pemberdayaan Sosial	2.834.343.471	2,813,233,865	99.26
1.06.01.055.	Program Penanganan Fakir Miskin	618.667.489	616,104,717	99.59
1.06.01.057.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Sosial	3.497.495.840	3,444,461,050	98.48
1.06.01.059.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Sosial	7.085.979.811	6,834,047,505	96.44
1.06.01.060.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja	2.034.852.088	2,020,479,862	99.29
1.06.01.061.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya	2.243.980.244	2,195,680,663	97.85

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.06.01.062.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum	1.906.132.907	1,859,436,885	97.55
1.06.01.063.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	2.781.231.800	2,609,235,464	93.82
1.06.01.064.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan	3.760.989.366	3,672,310,416	97.64
1.06.01.065.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	2.039.644.165	1,998,347,027	97.98
1.06.01.066.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	1.323.571.707	1,212,472,269	91.61
1.06.01.067.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	874.142.977	844,784,540	96.64
1.06.01.068.	Program pelayanan Rehabilitasi sosial UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum	2.064.205.832	1,869,078,145	90.55
1.06.01.069.	Program Pemberdayaan Sosial UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	326.926.265	322,791,700	98.74
1.06.01.070.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja	740.897.488	738,295,500	99.65
1.06.01.072.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum	239.457.491	218,110,000	91.09
1.06.01.073.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	969.854.928	945,702,300	97.51
1.06.01.074.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan	408.737.716	404,992,603	99.08
1.06.01.075.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	998.777.248	995,705,000	99.69
1.06.01.077.	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja	3.849.971.730	3,794,116,200	98.55
1.06.01.078.	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya	2.555.058.966	2,229,978,480	87.28

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.06.01.079.	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus	8.846.979.754	8,259,700,943	93.36
1.06.01.080.	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental, Sensorik Netra, Rungu Wicara, Tubuh	2.672.393.953	2,515,626,150	94.13
1.06.01.081.	Program Rehabilitasi Sosial di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	2.078.797.500	2,026,699,500	97.49
1.06.01.082.	Program Rehabilitasi Sosial UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan	8.796.535.090	8,770,510,680	99.70
1.07.01.	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**27.248.924.278**	**25,148,708,574**	**92.29**
1.07.01.061.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	807.983.000	701,498,750	86.82
1.07.01.064.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	108.642.750	108,500,000	99.87
1.07.01.066.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	409.811.969	405,758,569	99.01
1.07.01.067.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I	200.170.000	199,896,000	99.86
1.07.01.068.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II	474.520.800	465,410,800	98.08
1.07.01.069.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III	183.511.200	183,390,500	99.93
1.07.01.070.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV	513.978.200	507,481,600	98.74
1.07.01.071.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V	197.740.000	197,457,750	99.86
1.07.01.072.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.051.857.598	8,052,475,709	88.96
1.07.01.073.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi, Kelas A	2.001.261.674	1,980,034,814	98.94
1.07.01.074.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri, Kelas A	1.534.866.620	1,445,809,058	94.20
1.07.01.075.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia, Kelas A	1.168.636.484	1,130,630,561	96.75
1.07.01.076.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, Kelas A	1.140.021.705	1,077,320,384	94.50
1.07.01.077.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, Kelas A	492.809.776	473,476,758	96.08
1.07.01.078.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor	941.144.322	927,894,589	98.59

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.07.01.079.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Bekasi dan Karawang, Kelas A	1.393.780.610	1,299,919,158	93.27
1.07.01.080.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Kelas A	923.215.259	844,388,079	91.46
1.07.01.081.	Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	2.746.370.750	2,269,069,005	82.62
1.07.01.082.	Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	617.643.200	594,478,572	96.25
1.07.01.083.	Program Pelatihan Kerja Kompetensi	147.724.979	147,444,042	99.81
1.07.01.084.	Program Pelatihan Kerja Mandiri	947.830.300	925,143,800	97.61
1.07.01.085.	Program Pelatihan Pekerja Migran	553.113.474	536,058,000	96.92
1.07.01.087.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Latihan Kerja Kompetensi, Kelas A	100.472.638	100,250,476	99.78
1.07.01.088.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Latihan Kerja Mandiri, Kelas A	9.050.000	6,000,000	66.30
1.07.01.089.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia	37.055.500	36,835,500	99.41
1.07.01.090.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon, Kelas A	150.902.528	148,034,528	98.10
1.07.01.091.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, Kelas A	32.002.600	30,917,000	96.61
1.07.01.092.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor	124.229.954	122,730,000	98.79
1.07.01.093.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Bekasi dan Karawang	32.002.600	32,002,600	100.00
1.07.01.094.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Kelas A	43.885.500	43,465,500	99.04
1.07.01.168.	Program Pengembangan Transmigrasi	162.688.288	154,936,472	95.24
1.08.01.	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**	**25.316.909.829**	**24,210,649,412**	**95.63**
1.08.01.068.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	82.100.000	79,920,000	97.34

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.08.01.070.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana	4.090.187.702	3,890,951,146	95.13
1.08.01.071.	Program Pemenuhan Hak Anak (Program Anak Juara)	640.956.800	613,802,000	95.76
1.08.01.072.	Program Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (Program Perempuan Juara)	4.570.136.275	3,748,210,300	82.02
1.08.01.075.	Program Perlindungan Perempuan dan Anak (Program Perempuan Juara dan Anak Juara)	614.372.100	591,259,240	96.24
1.08.01.092.	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.319.156.952	15,286,506,726	99.79
1.09.01.	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**	**39.637.071.052**	**37,770,826,663**	**95.29**
1.09.01.071.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	3.444.078.439	3,148,325,756	91.41
1.09.01.074.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	483.489.298	446,565,892	92.36
1.09.01.076.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi	960.233.612	932,534,954	97.12
1.09.01.082.	Program kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	359.206.445	350,275,563	97.51
1.09.01.083.	Program ketersediaan dan distribusi	1.727.920.604	1,663,154,511	96.25
1.09.01.084.	Program Konsumsi dan pengembangan sumber daya manusia	362.857.300	355,194,494	97.89
1.09.01.085.	Program pelatihan peternakan dan ketahanan pangan	164.009.775	156,098,850	95.18
1.09.01.086.	Program pelayanan rumah sakit hewan	445.518.477	444,585,797	99.79
1.09.01.087.	Program pengawasan mutu dan keamanan pangan	469.538.710	437,692,380	93.22
1.09.01.088.	Program pengembangan perbibitan ternak domba dan kambing	3.565.027.292	3,555,720,294	99.74
1.09.01.089.	Program pengembangan perbibitan ternak unggas	4.315.463.024	4,304,405,880	99.74
1.09.01.090.	Program pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak	414.993.350	389,038,300	93.75
1.09.01.091.	Program pengujian mutu dan keamanan pakan/bahan pakan	232.664.834	218,911,646	94.09
1.09.01.102.	Program penyidikan dan pengujian penyakit hewan dan produk hewan	319.697.850	319,574,022	99.96
1.09.01.103.	Program Perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan Sapi perah Bunikasih	1.723.108.120	1,720,820,662	99.87

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.09.01.104.	Program Perbibitan dan pengembangan inseminasi buatan ternak sapi potong	3.201.643.555	3,178,189,871	99.27
1.09.01.105.	Program Produksi Peternakan	366.839.296	318,333,764	86.78
1.09.01.106.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	24.400.000	24,400,000	100.00
1.09.01.191.	Program kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	173.575.699	173,509,612	99.96
1.09.01.195.	Program pengembangan ternak sapi perah dan hijauan pakan ternak	3.210.785.060	3,181,437,885	99.09
1.09.01.200.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	9.800.000	9,360,250	95.51
1.09.01.201.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang	3.961.400	3,961,400	100.00
1.09.01.202.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang	1.054.215.000	53,448,850	5.07
1.09.01.203.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang	42.255.080	41,900,450	99.16
1.09.01.206.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati	169.888.596	169,329,900	99.67
1.09.01.207.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	204.813.600	203,167,060	99.20
1.09.01.209.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Rumah Sakit Hewan	191.611.000	191,611,000	100.00
1.09.01.211.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Cikole Lembang	916.250.583	867,166,662	94.64
1.09.01.212.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang	2.490.128.430	2,470,550,476	99.21
1.09.01.213.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan Cikole Lembang	567.263.829	543,426,048	95.80

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.09.01.214.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis	1.078.587.575	1,068,344,926	99.05
1.09.01.216.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing Margawati	1.115.707.656	1,112,582,729	99.72
1.09.01.217.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.446.926.311	1,417,853,569	97.99
1.09.01.218.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih	2.714.840.149	2,659,524,446	97.96
1.09.01.219.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Rumah Sakit Hewan	1.665.771.103	1,639,828,764	98.44
1.11.01.	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**86.132.484.041**	**75,014,264,863**	**87.09**
1.11.01.074.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Lingkungan Hidup	6.600.960.440	5,225,054,526	79.16
1.11.01.076.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup	12.443.514.200	11,102,919,100	89.23
1.11.01.077.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional	31.919.109.081	29,445,300,416	92.25
1.11.01.078.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	4.082.402.006	3,881,592,777	95.08
1.11.01.079.	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	386.700.600	383,693,463	99.22
1.11.01.080.	Program Pelestarian Keanekaragaman Hayati	170.476.200	170,476,200	100.00
1.11.01.081.	Program Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Udara	574.085.400	564,923,475	98.40
1.11.01.082.	Program Pembinaan Evaluasi Dampak dan Risiko Kebijakan Strategis	2.211.617.875	2,207,926,070	99.83
1.11.01.083.	Program Pembinaan Konservasi Lingkungan untuk Masyarakat dan Mitra Lingkungan	1.071.893.787	1,070,573,659	99.88
1.11.01.084.	Program Pembinaan Pencegahan Dampak Lingkungan	109.119.200	109,119,200	100.00
1.11.01.086.	Program Peningkatan Penyelesaian Kasus Lingkungan	4.691.782.908	4,571,916,419	97.45
1.11.01.087.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional	52.500.000	52,500,000	100.00

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.11.01.088.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	750.034.406	739,876,300	98.65
1.11.01.089.	Program Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Sampah dan B3	5.468.565.687	5,316,725,111	97.22
1.11.01.090.	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah Regional	15.599.722.251	10,171,668,147	65.20
1.12.01.	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	**217.939.477.558**	**213,089,580,581**	**97.77**
1.12.01.076.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	527.336.000	508,768,614	96.48
1.12.01.080.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.255.412.099	3,101,079,382	95.26
1.12.01.081.	Program Pemanfaatan Data Kependudukan	5.761.000	5,761,000	100.00
1.12.01.082.	Program Penataan Data Kependudukan	172.187.600	169,281,060	98.31
1.12.01.083.	Program Peningkatan Layanan Dokumen Kependudukan	121.901.540	121,901,540	100.00
1.12.01.084.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	618.903.629	609,377,293	98.46
1.13.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	106.618.987.845	104,286,705,846	97.81
1.13.01.080.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	21.486.141.050	20,684,243,856	96.27
1.13.01.086.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	652.856.904	618,189,350	94.69
1.13.01.088.	Program Bina Aparatur dan Aset Pemerintah Desa	40.519.914.000	40,505,260,700	99.96
1.13.01.090.	Program Dukungan Managemen Perkantoran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.217.031.629	6,811,944,919	94.39
1.13.01.091.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Desa	33.649.505.122	32,712,423,499	97.22
1.13.01.092.	Program Pengembangan Potensi Desa	3.093.539.140	2,954,643,522	95.51
1.15.01.	**DINAS PERHUBUNGAN**	**66.678.232.472**	**63,254,120,287**	**94.86**
1.15.01.096.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perhubungan	2.265.228.858	2,087,688,640	92.16
1.15.01.098.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Perhubungan	10.607.090.003	9,160,856,326	86.37
1.15.01.099.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru	3.781.192.203	3,548,822,619	93.85

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.15.01.100.	Program Dukungan Manajemen Perkan-toran UPTD Pengelolaan Prasarana Per-hubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Kelas A	4.511.119.411	4,410,119,716	97.76
1.15.01.101.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I	6.981.812.796	6,838,821,628	97.95
1.15.01.102.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II	2.090.206.371	2,069,496,321	99.01
1.15.01.103.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah III	3.046.094.460	2,929,059,063	96.16
1.15.01.104.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah IV	3.846.077.652	3,701,392,182	96.24
1.15.01.105.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut, Kelas A	1.859.483.490	1,826,437,150	98.22
1.15.01.106.	Program Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I	1.367.420.007	1,280,310,100	93.63
1.15.01.107.	Program Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II	4.452.369.085	4,241,408,810	95.26
1.15.01.108.	Program Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah III	1.618.313.462	1,573,548,000	97.23
1.15.01.109.	Program Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah IV	513.560.925	505,563,600	98.44
1.15.01.110.	Program Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Massal Perkotaan Berbasis Rel dan Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	866.624.875	847,761,941	97.82
1.15.01.111.	Program Peningkatan Prasarana Bandara dan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Bandara Nusawiru	327.469.961	307,314,332	93.85
1.15.01.112.	Program Peningkatan Prasarana dan aksesilibitas Perhubungan Udara	301.567.010	231,509,009	76.77
1.15.01.113.	Program Peningkatan Prasarana dan Keselamatan Perhubungan ASDP	934.452.783	934,452,783	100.00

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.15.01.114.	Program Peningkatan Prasarana dan Keselamatan Perhubungan Laut	36.460.000	36,460,000	100.00
1.15.01.115.	Program Peningkatan Prasarana dan Keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP	355.993.510	352,229,520	98.94
1.15.01.116.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Nusawiru	47.195.000	46,750,000	99.06
1.15.01.117.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Kelas A	89.210.000	89,210,000	100.00
1.15.01.118.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I	59.195.000	58,680,000	99.13
1.15.01.119.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II	23.745.400	23,600,000	99.39
1.15.01.120.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah III	96.493.500	96,094,400	99.59
1.15.01.121.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah IV	30.429.000	30,429,000	100.00
1.15.01.122.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Pelabuhan Laut, Kelas A	32.195.000	32,195,000	100.00
1.15.01.123.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Darat	16.537.232.710	15,993,910,147	96.71
1.16.01.	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**57.861.795.856**	**56,417,347,426**	**97.50**
1.16.01.100.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.765.699.947	1,678,362,587	95.05
1.16.01.102.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Komunikasi dan Informatika	8.834.773.750	8,433,547,216	95.46
1.16.01.103.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Informasi Komunikasi Publik	6.117.174.368	6,065,740,553	99.16
1.16.01.104.	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	907.825.376	902,965,642	99.46
1.16.01.105.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	34.255.135.758	33,412,133,088	97.54

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.16.01.118.	Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah	4.607.231.884	4,586,789,722	99.56
1.16.01.118.	Program penyelenggaraan statistik sektoral	1.373.954.773	1,337,808,618	97.37
1.17.01.	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL**	**46.548.100.248**	**45,124,533,026**	**96.94**
1.17.01.104.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	66.257.272	61,600,000	92.97
1.17.01.106.	Program Dukungan Manajemen Per-kantoran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	5.552.826.147	5,042,894,557	90.82
1.17.01.107.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha, Kelas A.	2.021.342.829	1,968,961,390	97.41
1.17.01.108.	Program Pemberdayaan koperasi	568.565.600	548,335,700	96.44
1.17.01.109.	Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian dan wirausaha	33.601.321.250	32,825,756,290	97.69
1.17.01.110.	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	615.525.850	594,202,653	96.54
1.17.01.111.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha, Kelas A.	139.342.800	121,899,400	87.48
1.17.01.112.	Program Usaha Kecil	2.331.261.400	2,323,161,336	99.65
1.17.01.113.	Program Kelembagaan Koperasi	1.651.657.100	1,637,721,700	99.16
1.18.01.	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**18.201.937.883**	**17,633,552,439**	**96.88**
1.18.01.109.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.023.485.104	2,001,028,500	98.89
1.18.01.111.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.308.181.346	11,888,207,946	96.59
1.18.01.112.	Program Manajemen Data dan Informasi pena-naman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	604.887.783	601,762,425	99.48
1.18.01.113.	Program Pelayanan perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	539.820.600	531,495,409	98.46
1.18.01.114.	Program Pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial	679.569.400	679,479,903	99.99
1.18.01.115.	Program Penataan regulasi PMPTSP	17.306.050	14,917,250	86.20
1.18.01.116.	Program Pengembangan dan promosi penanaman modal	1.625.855.600	1,516,969,706	93.30

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.18.01.117.	Program Pengendalian dan Penanganan Permasalahan Perizinan	159.710.750	158,369,900	99.16
1.18.01.118.	Program Pengendalian penanaman modal	243.121.250	241,321,400	99.26
1.19.01.	**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**32.286.777.607**	**30,661,253,326**	**94.97**
1.19.01.112.	Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga	4.181.383.950	4,136,236,631	98.92
1.19.01.113.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, Dan Organisasi Olahraga	5.834.725.344	5,070,190,336	86.90
1.19.01.115.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemuda Dan Olahraga	422.351.971	412,110,009	97.58
1.19.01.117.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Pemuda dan Olahraga	12.933.032.569	12,314,033,483	95.21
1.19.01.118.	Program peningkatan Kesejahteraan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	111.040.500	103,300,250	93.03
1.19.01.119.	Program peningkatan Kesejahteraan, Sarana dan Prasarana Keolahragaan	6.554.769.590	6,482,154,000	98.89
1.19.01.120.	Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan	2.249.473.683	2,143,228,617	95.28
1.23.01.	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**23.032.697.430**	**22,179,109,916**	**96.29**
1.23.01.126.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.385.693.585	7,013,967,415	94.97
1.23.01.127.	Program Pembinaan Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca	1.731.104.132	1,656,795,857	95.71
1.23.01.128.	Program Pengelolaan dan pengembangan Arsip Dinamis	1.520.601.734	1,411,308,540	92.81
1.23.01.129.	Program Pengembangan Bahan Perpustakaan	4.092.085.134	3,918,760,257	95.76
1.23.01.130.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.490.856.493	4,388,660,693	97.72
1.23.01.131.	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	676.958.100	674,553,100	99.64
1.23.01.131.	Program Penyelamatan dan Pelestarian arsip Statis	872.160.354	863,450,529	99.00
1.23.01.132.	Program Peningkatan Pelayanan Kearsipan	355.940.600	352,157,300	98.94
1.23.01.132.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.907.297.298	1,899,456,225	99.59

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**359.545.541.301**	**344,281,409,670**	**95.75**
2.01.01.	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**39.418.091.603**	**35,050,619,779**	**88.92**
2.01.01.131.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan	66.191.550	64,981,000	98.17
2.01.01.133.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan	2.405.401.320	2,356,792,115	97.98
2.01.01.134.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara	1.704.104.656	1,636,031,215	96.01
2.01.01.135.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Kelautan dan Perikanan	3.485.010.809	3,299,616,108	94.68
2.01.01.136.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun	1.183.013.030	1,176,862,746	99.48
2.01.01.137.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem	1.133.754.171	1,114,879,725	98.34
2.01.01.138.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan	1.462.933.665	1,439,204,159	98.38
2.01.01.139.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara	1.049.512.625	1,042,027,633	99.29
2.01.01.140.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan	1.216.501.608	1,155,829,836	95.01
2.01.01.141.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan	1.454.391.677	1,267,649,614	87.16
2.01.01.142.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara	1.618.763.060	1,500,945,607	92.72
2.01.01.143.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	718.040.061	703,786,558	98.01
2.01.01.144.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan	989.698.137	983,985,300	99.42
2.01.01.145.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara	728.962.628	728,480,628	99.93
2.01.01.146.	Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	3.702.655.050	2,445,664,960	66.05

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2.01.01.147.	Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumber-daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan	2.829.191.263	2,792,629,200	98.71
2.01.01.148.	Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumber-daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara	3.598.982.000	3,508,327,550	97.48
2.01.01.149.	Program Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan	862.797.668	857,349,486	99.37
2.01.01.150.	Program Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara	752.897.947	731,726,700	97.19
2.01.01.151.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	255.396.700	214,633,900	84.04
2.01.01.152.	Program Peningkatan Mutu Produk Perikanan	654.559.425	646,732,349	98.80
2.01.01.153.	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	329.686.249	319,109,010	96.79
2.01.01.154.	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2.605.227.713	575,216,750	22.08
2.01.01.155.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan	10.500.000	10,500,000	100.00
2.01.01.156.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara	69.452.000	66,707,200	96.05
2.01.01.157.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pelabuhan Perikanan Cilauteureun	24.469.500	23,490,000	96.00
2.01.01.158.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem	170.230.122	156,785,159	92.10
2.01.01.159.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan	163.463.616	160,659,250	98.28
2.01.01.160.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara	327.783.343	325,719,500	99.37
2.01.01.161.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan	46.144.175	44,450,000	96.33
2.01.01.162.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan	47.195.000	47,192,000	99.99
2.01.01.163.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara	159.027.000	153,637,680	96.61
2.01.01.164.	Program Peningkatan Teknologi Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan	1.511.381.785	1,502,968,985	99.44
2.01.01.165.	Program Peningkatan Teknologi Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara	2.080.772.050	1,996,047,856	95.93

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2.02.01.	**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**	**65.020.158.134**	**63,876,482,161**	**98.24**
2.02.01.119.	Program Pengembangan Nilai Budaya	4.831.980.843	4,798,205,248	99.30
2.02.01.121.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Kelas A	1.802.564.646	1,658,317,264	92.00
2.02.01.122.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Kelas A	12.053.016.670	11,974,119,777	99.35
2.02.01.123.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	5.886.672.000	5,809,312,025	98.69
2.02.01.136.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.317.434.443	1,297,934,000	98.52
2.02.01.138.	Program Destinasi Pariwisata	7.288.512.950	6,898,305,975	94.65
2.02.01.139.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10.220.637.067	9,971,658,340	97.56
2.02.01.141.	Program Industri Pariwisata	8.136.000.532	8,038,468,793	98.80
2.02.01.142.	Program Pemasaran Pariwisata	13.483.338.983	13,430,160,739	99.61
2.03.01.	**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	**124.750.980.749**	**122,494,755,184**	**98.19**
2.03.01.140.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1.142.209.291	1,133,660,000	99.25
2.03.01.150.	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Hortikultura	2.253.571.640	2,252,770,020	99.96
2.03.01.151.	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan	1.071.618.543	1,063,879,264	99.28
2.03.01.152.	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura	1.501.133.896	1,407,360,936	93.75
2.03.01.153.	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan	789.636.555	730,915,911	92.56
2.03.01.155.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	8.425.430.624	8,008,269,658	95.05
2.03.01.156.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Benih Hortikultura	3.617.967.770	3,565,781,369	98.56
2.03.01.157.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Benih Kentang	2.182.509.428	2,117,638,889	97.03
2.03.01.158.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Benih Padi dan Palawija	2.069.785.567	2,049,771,459	99.03
2.03.01.159.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.787.480.825	1,786,338,821	99.94

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2.03.01.161.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.458.486.607	2,389,591,645	97.20
2.03.01.163.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian	2.202.824.366	1,950,852,173	88.56
2.03.01.165.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.901.327.600	2,747,716,240	94.71
2.03.01.166.	Program pelatihan Sumber Daya Manusia tanaman pangan dan hortikultura	921.425.680	920,806,680	99.93
2.03.01.168.	Program pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikulutura	570.248.092	568,059,110	99.62
2.03.01.169.	Program Pengembangan Perbenihan Kentang	1.018.893.100	1,018,576,200	99.97
2.03.01.172.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	446.398.400	445,903,244	99.89
2.03.01.178.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Benih Hortikultura	29.195.000	29,150,000	99.85
2.03.01.179.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Benih Kentang	139.245.000	136,095,000	97.74
2.03.01.181.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	899.222.570	898,763,000	99.95
2.03.01.183.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	70.424.000	69,818,000	99.14
2.03.01.184.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian	662.596.948	660,294,440	99.65
2.03.01.186.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	229.195.000	194,468,410	84.85
2.03.01.187.	Program Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura	68.921.880.856	67,941,421,173	98.58
2.03.01.188.	Program perlindungan tanaman pangan dan hortikultura	17.881.330.100	17,873,385,150	99.96
2.03.01.189.	Program prasarana dan sarana tanaman pangan dan hortikultura	556.943.291	533,468,392	95.79
2.03.02.	**DINAS PERKEBUNAN**	**38.182.487.792**	**34,253,036,814**	**89.71**
2.03.02.144.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perkebunan	1.949.216.209	1,743,636,150	89.45

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2.03.02.154.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Perkebunan	5.219.816.573	5,079,480,416	97.31
2.03.02.160.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	1.527.734.074	1,500,849,348	98.24
2.03.02.162.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan	1.487.673.609	1,480,662,526	99.53
2.03.02.164.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Perlindungan Perkebunan	1.694.918.901	1,669,498,844	98.50
2.03.02.167.	Program Pemberdayaan sumberdaya alam perkebunan	1.083.976.187	1,081,995,900	99.82
2.03.02.170.	Program Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan permodalan petani perkebunan	1.561.169.900	1,557,921,028	99.79
2.03.02.171.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan	1.683.579.200	1,670,454,100	99.22
2.03.02.173.	Program Peningkatan Pengendalian OPT perkebunan secara berkelanjutan	1.425.651.020	1,407,941,726	98.76
2.03.02.174.	Program Peningkatan penggunaan benih bersertifikat	659.941.800	659,321,800	99.91
2.03.02.175.	Program Peningkatan pengolahan dan pemasaran produk perkebunan	1.107.265.868	1,081,007,457	97.63
2.03.02.176.	Program Peningkatan produksi benih perkebunan secara berkelanjutan	13.530.207.555	13,518,702,555	99.91
2.03.02.177.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan	2.025.668.854	1,315,114,672	64.92
2.03.02.182.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	1.005.903.024	171,174,400	17.02
2.03.02.185.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Perlindungan Perkebunan	2.219.765.018	315,275,892	14.20
2.04.01.	**DINAS KEHUTANAN**	**38.937.666.388**	**37,607,800,525**	**96.58**
2.04.01.154.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Kehutanan	1.213.692.331	1,059,518,000	87.30
2.04.01.156.	Program Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim	8.276.000	8,276,000	100.00
2.04.01.157.	Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya	31.984.000	31,984,000	100.00
2.04.01.158.	Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I	9.158.000	9,158,000	100.00

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2.04.01.162.	Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX	2.000.000	2,000,000	100.00
2.04.01.163.	Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	2.162.000	2,162,000	100.00
2.04.01.167.	Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya TAHURA Ir. H. Djuanda	191.194.200	191,194,200	100.00
2.04.01.168.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I	1.895.036.097	1,857,179,020	98.00
2.04.01.169.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II	926.680.096	879,641,267	94.92
2.04.01.170.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III	1.124.096.103	1,089,541,888	96.93
2.04.01.171.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV	1.294.276.517	1,186,809,588	91.70
2.04.01.172.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX	1.059.964.772	1,054,470,849	99.48
2.04.01.173.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	784.564.845	769,398,250	98.07
2.04.01.174.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	726.850.050	716,891,669	98.63
2.04.01.175.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII	1.213.395.807	1,150,828,556	94.84
2.04.01.176.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII	926.949.148	911,843,224	98.37
2.04.01.177.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Kehutanan	5.074.422.330	4,656,812,174	91.77
2.04.01.178.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan	1.204.575.477	1,148,670,130	95.36
2.04.01.179.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	1.384.233.294	1,353,843,480	97.80
2.04.01.180.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Ir.H. Djuanda	4.743.290.182	4,646,742,868	97.96
2.04.01.181.	Program Pemanfaatan Jasa Lingkungan	58.888.000	58,888,000	100.00

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2.04.01.182.	Program Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Ir. H. Djuanda	81.885.600	66,879,750	81.67
2.04.01.183.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Daerah Aliran Sungai)	296.806.000	283,140,000	95.40
2.04.01.184.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Daerah Aliran Sungai) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I	615.023.000	615,023,000	100.00
2.04.01.185.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Daerah Aliran Sungai) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II	818.482.000	818,462,000	100.00
2.04.01.186.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Daerah Aliran Sungai) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III	170.378.440	170,365,000	99.99
2.04.01.187.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Daerah Aliran Sungai) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV	866.230.761	864,790,820	99.83
2.04.01.188.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Daerah Aliran Sungai) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX	459.350.542	459,350,500	100.00
2.04.01.189.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Daerah Aliran Sungai) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	1.870.578.616	1,846,175,590	98.70
2.04.01.190.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Daerah Aliran Sungai) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	447.871.000	447,748,000	99.97
2.04.01.191.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Daerah Aliran Sungai) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII	625.596.000	625,219,000	99.94
2.04.01.192.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Daerah Aliran Sungai) Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII	300.133.000	298,733,000	99.53
2.04.01.193.	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Hutan	568.121.750	563,509,500	99.19
2.04.01.194.	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan	91.252.500	91,192,400	99.93
2.04.01.195.	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I	172.902.875	168,182,750	97.27
2.04.01.196.	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II	111.065.000	110,775,200	99.74
2.04.01.197.	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III	400.000.000	397,168,660	99.29
2.04.01.198.	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV	165.488.000	156,816,000	94.76
2.04.01.201.	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	1.156.726.297	1,149,015,578	99.33

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2.04.01.202.	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII	399.762.726	398,117,500	99.59
2.04.01.203.	Program Peningkatan Produksi Hasil Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII	780.338.399	774,682,362	99.28
2.04.01.204.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I	208.744.852	199,322,500	95.49
2.04.01.205.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II	263.700.000	261,300,000	99.09
2.04.01.206.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III	343.067.330	340,996,078	99.40
2.04.01.207.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV	306.580.349	251,262,000	81.96
2.04.01.208.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX	260.535.590	257,802,000	98.95
2.04.01.209.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	284.118.907	281,114,000	98.94
2.04.01.210.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	193.500.000	188,875,000	97.61
2.04.01.211.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII	328.000.000	326,884,000	99.66
2.04.01.212.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII	302.795.000	299,679,500	98.97
2.04.01.213.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan	353.657.320	347,944,500	98.38
2.04.01.214.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	33.794.041	31,389,500	92.88
2.04.01.215.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Ir.H. Djuanda	131.980.913	90,177,910	68.33
2.04.01.216.	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	18.390.000	18,390,000	100.00
2.04.01.217.	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I	6.171.000	6,171,000	100.00

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2.04.01.222.	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	2.045.000	2,045,000	100.00
2.04.01.223.	Program Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	1.118.500	1,118,500	100.00
2.04.01.227.	Program Perlindungan Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I	2.390.000	2,390,000	100.00
2.04.01.232.	Program Perlindungan Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V	1.923.000	1,923,000	100.00
2.04.01.233.	Program Perlindungan Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI	3.053.000	3,053,000	100.00
2.04.01.237.	Program Perlindungan Hutan TAHURA Ir. H. Djuanda	813.231.450	810,152,250	99.62
2.04.01.238.	Program Prakondisi dan Penataan Batas Kawasan Hutan	17.381.000	17,379,000	99.99
2.04.01.239.	Program Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	787.807.381	777,232,014	98.66
2.05.01.	**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**24.304.113.416**	**23,091,273,565**	**95.01**
2.05.01.159.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	665.997.984	646,502,000	97.07
2.05.01.161.	Program Air Tanah	551.411.721	550,066,337	99.76
2.05.01.162.	Program Air Tanah Wilayah I Cianjur	13.144.600	13,144,600	100.00
2.05.01.163.	Program Air Tanah Wilayah II Bogor	143.512.600	143,010,600	99.65
2.05.01.164.	Program Air Tanah Wilayah III Purwakarta	45.547.950	45,539,000	99.98
2.05.01.165.	Program Air Tanah Wilayah IV Bandung	104.554.200	104,307,700	99.76
2.05.01.166.	Program Air Tanah Wilayah V Sumedang	84.326.200	83,898,200	99.49
2.05.01.167.	Program Air Tanah Wilayah VI Tasikmalaya	25.635.700	25,635,700	100.00
2.05.01.168.	Program Air Tanah Wilayah VII Cirebon	125.279.200	123,128,111	98.28
2.05.01.169.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	926.693.274	917,461,553	99.00
2.05.01.170.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	1.165.583.600	1,100,436,533	94.41
2.05.01.171.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	1.006.898.661	913,937,787	90.77
2.05.01.172.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	1.260.531.153	1,251,017,799	99.25

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2.05.01.173.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	859.550.339	830,835,630	96.66
2.05.01.174.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	1.026.379.759	1,007,683,302	98.18
2.05.01.175.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	808.434.586	776,163,161	96.01
2.05.01.176.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6.748.606.033	6,336,169,543	93.89
2.05.01.177.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Laboratorium ESDM	1.296.392.442	1,123,677,454	86.68
2.05.01.178.	Program Ketenagalistrikan	1.653.515.428	1,623,149,611	98.16
2.05.01.179.	Program Ketenagalistrikan Wilayah I Cianjur	274.983.250	274,841,062	99.95
2.05.01.180.	Program Ketenagalistrikan Wilayah II Bogor	69.327.600	69,230,600	99.86
2.05.01.181.	Program Ketenagalistrikan Wilayah III Purwakarta	152.512.200	152,286,896	99.85
2.05.01.182.	Program Ketenagalistrikan Wilayah IV Bandung	78.833.200	78,646,200	99.76
2.05.01.183.	Program Ketenagalistrikan Wilayah V Sumedang	93.217.700	92,053,533	98.75
2.05.01.184.	Program Ketenagalistrikan Wilayah VI Tasikmalaya	96.931.200	96,677,789	99.74
2.05.01.185.	Program Ketenagalistrikan Wilayah VII Cirebon	216.312.900	204,667,416	94.62
2.05.01.186.	Program Pelayanan dan Pengembangan Laboratorium ESDM Bidang Air Tanah	159.014.700	146,549,868	92.16
2.05.01.187.	Program Pelayanan dan Pengembangan Laboratorium ESDM bidang energi	82.049.200	62,054,500	75.63
2.05.01.188.	Program Pelayanan dan Pengembangan Laboratorium ESDM bidang tambang	160.240.000	151,164,564	94.34
2.05.01.189.	Program Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Wilayah I Cianjur	23.757.000	23,757,000	100.00
2.05.01.191.	Program Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Wilayah III Purwakarta	1.940.000	1,940,000	100.00
2.05.01.194.	Program Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Wilayah VI Tasikmalaya	4.654.000	4,654,000	100.00
2.05.01.195.	Program Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Wilayah VII Cirebon	4.821.178	4,821,178	100.00
2.05.01.196.	Program Pengembangan dan Konservasi Energi	458.691.484	444,303,792	96.86

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2.05.01.197.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur	1.628.790.000	1,625,231,400	99.78
2.05.01.198.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor	176.958.500	94,617,500	53.47
2.05.01.199.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah III Purwakarta	65.887.000	63,536,715	96.43
2.05.01.200.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung	29.195.000	-	0.00
2.05.01.201.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah V Sumedang	90.415.700	89,139,500	98.59
2.05.01.202.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah VI Tasikmalaya	11.434.115	11,403,115	99.73
2.05.01.203.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon	116.421.175	91,965,000	78.99
2.05.01.204.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Laboratorium ESDM	368.851.006	348,848,113	94.58
2.05.01.205.	Program Pertambangan	827.848.730	754,264,250	91.11
2.05.01.206.	Program Pertambangan Wilayah I Cianjur	76.011.440	70,701,611	93.01
2.05.01.207.	Program Pertambangan Wilayah II Bogor	99.283.600	99,202,200	99.92
2.05.01.208.	Program Pertambangan Wilayah III Purwakarta	64.341.200	64,212,896	99.80
2.05.01.209.	Program Pertambangan Wilayah IV Bandung	85.163.200	84,970,700	99.77
2.05.01.210.	Program Pertambangan Wilayah V Sumedang	97.993.200	97,971,533	99.98
2.05.01.211.	Program Pertambangan Wilayah VI Tasikmalaya	86.703.508	86,703,508	100.00
2.05.01.212.	Program Pertambangan Wilayah VII Cirebon	89.535.000	85,092,505	95.04
2.07.01.	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**28.932.043.219**	**27,907,441,642**	**96.46**
2.07.01.161.	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	355.211.901	354,921,328	99.92
2.07.01.165.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.819.929.401	1,645,881,567	90.44
2.07.01.167.	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Jawa Barat	560.899.003	560,573,065	99.94
2.07.01.168.	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	886.136.812	884,352,603	99.80
2.07.01.169.	Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro	158.680.000	148,841,000	93.80
2.07.01.170.	Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika	46.158.000	45,113,500	97.74

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2.07.01.171.	Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum Dalam Kemasan	150.972.000	148,653,000	98.46
2.07.01.172.	Program Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas	28.752.800	27,349,500	95.12
2.07.01.173.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Industri Logam	1.970.110.382	1,940,185,251	98.48
2.07.01.174.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	5.303.042.813	5,158,973,328	97.28
2.07.01.175.	Program Pembangunan Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka	1.712.523.546	1,670,110,090	97.52
2.07.01.176.	Program Pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika)	173.460.540	164,857,068	95.04
2.07.01.176.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor	18.750.000	18,750,000	100.00
2.07.01.177.	Program Pemberdayaan Industri Logam	31.849.000	31,420,100	98.65
2.07.01.177.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum dalam Kemasan Cirebon	247.400.000	246,615,000	99.68
2.07.01.178.	Program Pemberdayaan Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	1.157.398.412	1,116,576,933	96.47
2.07.01.179.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.879.418.151	8,534,546,964	96.12
2.07.01.182.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Logam dan Elektronika Karawang	1.725.668.774	1,655,484,892	95.93
2.07.01.183.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor	1.368.317.758	1,287,706,397	94.11
2.07.01.184.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Air Minum dalam Kemasan Cirebon	1.095.492.200	1,043,717,288	95.27
2.07.01.185.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung	1.086.043.850	1,066,993,968	98.25

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2.07.01.189.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Industri Logam	110.859.876	110,850,800	99.99
2.07.01.190.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	44.968.000	44,968,000	100.00
3.	**FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**924.940.862.056**	**847,390,295,715**	**91.62**
3.01.01.	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**42.971.840.968**	**37,537,124,429**	**87.35**
3.01.01.171.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.055.764.220	2,817,634,837	92.21
3.01.01.173.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19.198.981.053	17,147,689,707	89.32
3.01.01.174.	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.973.093.214	3,201,794,846	80.59
3.01.01.175.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	11.860.047.500	9,782,645,976	82.48
3.01.01.176.	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi	1.852.985.585	1,819,048,277	98.17
3.01.01.177.	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Fisik	1.785.556.899	1,568,417,593	87.84
3.01.01.178.	Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	1.245.412.497	1,199,893,193	96.35
3.02.01.	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**61.189.502.168**	**48,803,723,895**	**79.76**
3.02.01.175.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	12.372.305.976	10,883,307,690	87.97
3.02.01.182.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	28.184.292.064	22,305,352,967	79.14
3.02.01.219.	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	7.999.009.489	7,076,864,517	88.47
3.02.01.220.	Program Pengelolaan Aset Daerah	2.436.859.506	1,938,724,430	79.56
3.02.01.221.	Program Pengelolaan Pebendaharaan Daerah	341.087.700	329,651,580	96.65
3.02.01.224.	Program Pengelolaan Pengamanan dan Pemafaatan Aset Daerah	9.088.739.933	5,526,333,391	60.80
3.02.01.225.	Program Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	767.207.500	743,489,320	96.91
3.02.02.	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	**171.356.692.661**	**162,452,645,665**	**94.80**
3.02.02.179.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pendapatan Daerah	9.086.613.414	8,834,614,000	97.23
3.02.02.181.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Pendapatan Daerah	53.549.344.993	50,878,704,381	95.01

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
3.02.02.183.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	3.652.378.360	3,083,680,061	84.43
3.02.02.184.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	1.962.863.755	1,819,639,558	92.70
3.02.02.185.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	2.459.431.848	2,387,697,263	97.08
3.02.02.186.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	2.501.046.075	2,445,517,709	97.78
3.02.02.187.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	3.652.638.400	3,518,427,569	96.33
3.02.02.188.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	3.904.797.365	3,530,939,345	90.43
3.02.02.189.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	1.596.925.067	1,531,306,610	95.89
3.02.02.190.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	2.319.883.827	2,179,068,709	93.93
3.02.02.191.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	2.290.741.524	2,211,118,659	96.52
3.02.02.192.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	1.455.113.284	1,348,210,867	92.65
3.02.02.193.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	2.306.322.792	2,247,909,990	97.47
3.02.02.194.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	2.713.700.723	2,627,812,373	96.84
3.02.02.195.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	1.826.311.194	1,800,672,023	98.60

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
3.02.02.196.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	2.651.375.400	2,507,954,267	94.59
3.02.02.197.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	1.720.197.606	1,557,553,445	90.55
3.02.02.198.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	1.502.845.325	1,444,396,427	96.11
3.02.02.199.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	2.065.601.094	2,036,003,769	98.57
3.02.02.200.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	2.292.937.377	2,259,354,443	98.54
3.02.02.201.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	1.577.549.471	1,492,296,496	94.60
3.02.02.202.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	1.951.843.312	1,896,100,318	97.14
3.02.02.203.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	1.821.721.891	1,694,010,620	92.99
3.02.02.204.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	2.075.954.167	1,919,081,279	92.44
3.02.02.205.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	1.700.099.526	1,508,854,225	88.75
3.02.02.206.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	2.569.023.346	2,556,363,637	99.51
3.02.02.207.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	3.659.095.607	3,502,555,540	95.72

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
3.02.02.208.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	1.944.929.376	1,898,183,980	97.60
3.02.02.209.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	1.338.724.309	1,263,948,854	94.41
3.02.02.210.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	4.314.334.535	4,056,207,934	94.02
3.02.02.211.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	2.127.701.359	2,005,885,714	94.27
3.02.02.212.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	1.451.455.135	1,432,369,699	98.69
3.02.02.213.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	1.658.195.294	1,591,693,973	95.99
3.02.02.214.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	2.665.113.155	2,274,292,791	85.34
3.02.02.215.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	2.020.399.048	1,891,293,352	93.61
3.02.02.216.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	1.369.498.254	1,354,783,221	98.93
3.02.02.217.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	1.370.122.028	1,258,554,994	91.86
3.02.02.218.	Program Pembinaan dan Pengendalian Unit Kerja Bapenda	747.634.224	746,637,063	99.87
3.02.02.222.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah I	742.443.200	639,695,650	86.16
3.02.02.223.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah II	395.370.000	369,697,586	93.51
3.02.02.226.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	821.976.706	714,809,999	86.96
3.02.02.227.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	445.107.156	441,565,000	99.20
3.02.02.229.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	167.766.528	166,334,200	99.15

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
3.02.02.230.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	316.952.098	312,020,000	98.44
3.02.02.231.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	278.975.000	277,000,000	99.29
3.02.02.232.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	178.426.363	175,945,000	98.61
3.02.02.233.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	515.368.500	465,578,000	90.34
3.02.02.235.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	368.840.840	340,689,899	92.37
3.02.02.236.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	502.742.474	496,236,900	98.71
3.02.02.237.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	7.000.000	7,000,000	100.00
3.02.02.238.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	450.000	425,000	94.44
3.02.02.239.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	11.000.000	9,600,000	87.27
3.02.02.244.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	14.550.000	-	0.00
3.02.02.245.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	34.356.500	30,458,050	88.65

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
3.02.02.247.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	223.462.688	222,149,000	99.41
3.02.02.248.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	459.580.000	456,670,000	99.37
3.02.02.249.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	290.232.798	276,543,120	95.28
3.02.02.250.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	77.050.000	75,650,000	98.18
3.02.02.251.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	77.050.000	76,450,000	99.22
3.02.02.252.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	84.450.000	83,420,000	98.78
3.02.02.253.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	680.988.711	642,611,640	94.36
3.02.02.254.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	84.050.000	81,030,000	96.41
3.02.02.255.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	198.577.120	196,098,200	98.75
3.02.02.257.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	77.050.000	76,200,000	98.90
3.02.02.258.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	77.050.000	68,050,000	88.32
3.02.02.259.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	212.620.000	211,895,000	99.66
3.02.02.261.	Program Perencanaan Kinerja, Pengembangan Layanan, Regulasi dan Kerja Sama Pendapatan Daerah	1.555.470.098	1,405,395,790	90.35
3.02.02.262.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Data dan Aplikasi serta Infrastruktur Sistem Pendapatan Daerah	1.586.437.341	1,556,706,450	98.13

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
3.02.02.263.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat	393.440.000	362,646,100	92.17
3.02.02.264.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek	817.020.000	794,310,000	97.22
3.02.02.265.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung II Soreang	651.074.650	622,933,100	95.68
3.02.02.266.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bekasi	597.415.000	538,551,472	90.15
3.02.02.267.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor	397.124.000	392,489,500	98.83
3.02.02.268.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ciamis	440.169.000	432,579,000	98.28
3.02.02.269.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cianjur	504.995.000	484,042,500	95.85
3.02.02.270.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon I Sumber	450.484.000	440,774,000	97.84
3.02.02.271.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Cirebon II Ciledug	296.280.000	288,328,000	97.32
3.02.02.272.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Garut	632.076.000	608,054,000	96.20
3.02.02.273.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu I	681.410.000	653,346,500	95.88
3.02.02.274.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu II Haurgeulis	469.530.000	437,441,500	93.17
3.02.02.275.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang	1.003.744.800	976,790,000	97.31
3.02.02.276.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kuningan	354.150.000	283,446,200	80.04
3.02.02.277.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Majalengka	456.930.100	426,018,750	93.23
3.02.02.278.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Pangandaran	430.813.300	430,813,300	100.00
3.02.02.279.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta	797.120.000	722,034,500	90.58

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
3.02.02.280.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang	715.120.000	687,448,000	96.13
3.02.02.281.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi I Cibadak	667.218.132	638,635,750	95.72
3.02.02.282.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sukabumi II Pelabuhan Ratu	535.113.003	500,193,000	93.47
3.02.02.283.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang	612.468.000	592,072,200	96.67
3.02.02.284.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Tasikmalaya	396.560.000	298,870,000	75.37
3.02.02.285.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran	700.670.000	669,882,500	95.61
3.02.02.286.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung II Kawaluyaan	683.008.000	641,711,400	93.95
3.02.02.287.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta	1.749.908.000	1,714,129,400	97.96
3.02.02.288.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Banjar	255.291.000	242,041,000	94.81
3.02.02.289.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi	644.405.000	594,399,500	92.24
3.02.02.290.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bogor	389.810.000	378,750,600	97.16
3.02.02.291.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cimahi	383.211.250	377,143,250	98.42
3.02.02.292.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Cirebon	231.215.000	228,839,000	98.97
3.02.02.293.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok I	560.700.000	534,092,501	95.25
3.02.02.294.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere	537.710.000	454,196,000	84.47
3.02.02.295.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi	220.981.845	220,431,000	99.75
3.02.02.296.	Program Teknis Operasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Tasikmalaya	339.670.000	315,592,500	92.91

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
3.03.01.	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	**33.509.977.191**	**29,653,951,103**	**88.49**
3.03.01.187.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kepegawaian Daerah	1.952.250.524	1,781,130,140	91.23
3.03.01.191.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Kepegawaian Daerah	11.747.694.998	10,868,326,530	92.51
3.03.01.192.	Program Kesejahteraan Dan Disiplin	3.081.516.160	2,895,428,255	93.96
3.03.01.194.	Program Pengadaan Dan Mutasi	6.606.098.112	5,469,780,351	82.80
3.03.01.195.	Program Pengelolaan Sistem Kepegawaian	2.041.068.741	1,863,459,750	91.30
3.03.01.197.	Program Pengembangan Karir	8.081.348.656	6,775,826,077	83.85
3.03.02.	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**36.133.157.630**	**30,439,794,155**	**84.24**
3.03.02.183.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.339.044.876	2,170,673,435	92.80
3.03.02.190.	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26.372.328.003	21,266,302,798	80.64
3.03.02.196.	Program pengembangan Corporate University	1.296.437.626	1,218,510,508	93.99
3.03.02.198.	Program pengembangan kompetensi manajerial dan latsar CPNS	3.341.043.284	3,212,108,489	96.14
3.03.02.200.	Program pengembangan kompetensi teknis umum dan Fungsional	822.254.459	727,899,968	88.52
3.03.02.201.	Program pengembangan teknis substantif	1.151.525.500	1,036,857,607	90.04
3.03.02.202.	Program Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi	21.869.800	21,137,000	96.65
3.03.02.203.	Program Uji Kompetensi dan Sertifikasi Pengembangan Kompetensi	788.654.082	786,304,350	99.70
3.04.01.	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**6.192.989.508**	**5,943,271,425**	**95.97**
3.04.01.189.	Program Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK	1.506.101.708	1,482,859,463	98.46
3.04.01.190.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	75.210.640	73,329,820	97.50
3.04.01.191.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	87.443.737	86,703,150	99.15
3.04.01.193.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.892.857.857	2,748,022,218	94.99

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
3.04.01.194.	Program Kebijakan Pembangunan Berbasis Kajian dan Analisis	579.224.181	560,279,614	96.73
3.04.01.195.	Program Kerjasama dan Layanan IPTEK	426.621.120	390,469,179	91.53
3.04.01.196.	Program Penerapan Inovasi Berbasis IPTEK	625.530.265	601,607,981	96.18
3.05.03.	**SEKRETARIAT DAERAH**	**262.846.512.763**	**250,555,597,220**	**95.32**
3.05.03.199.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Daerah	19.895.267.858	17,687,831,800	88.90
3.05.03.226.	Program Kerja Sama Daerah	5.371.409.568	5,145,378,016	95.79
3.05.03.227.	Program Penataan Daerah	1.125.218.069	1,058,970,046	94.11
3.05.03.228.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian	248.445.030	247,337,923	99.55
3.05.03.229.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sarana perekonomian	215.677.840	213,941,765	99.20
3.05.03.230.	Program Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1.389.771.640	1,146,285,474	82.48
3.05.03.231.	Program Bantuan Hukum dan HAM	2.627.009.650	2,506,347,650	95.41
3.05.03.232.	Program BUMD Lembaga Keuangan.	464.335.060	410,789,460	88.47
3.05.03.233.	Program BUMD Non Lembaga Keuangan.	704.223.902	684,928,754	97.26
3.05.03.234.	Program Dokumentasi hukum, pembinaan, pengawasan produk hukum	2.753.595.450	2,694,132,282	97.84
3.05.03.236.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro BUMD dan Investasi	1.252.325.162	1,196,316,990	95.53
3.05.03.237.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	1.884.862.514	1,791,306,687	95.04
3.05.03.238.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.493.212.472	1,449,805,968	97.09
3.05.03.239.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Organisasi	1.822.931.665	1,772,758,075	97.25
3.05.03.240.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial	3.053.144.620	3,013,990,355	98.72
3.05.03.241.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Pemerintahan dan Kerjasama	1.539.905.275	1,435,402,034	93.21
3.05.03.242.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Pengadaan Barang/Jasa	1.825.618.154	1,647,590,247	90.25
3.05.03.243.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Perekonomian	1.203.877.956	1,173,511,505	97.48

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
3.05.03.244.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Biro Umum	149.545.765.441	144,473,685,150	96.61
3.05.03.247.	Program Investasi Daerah	570.996.657	533,405,120	93.42
3.05.03.250.	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	1.767.998.400	1,715,419,450	97.03
3.05.03.251.	Program Pelayanan Sosial	1.690.493.770	1,656,462,826	97.99
3.05.03.252.	Program Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	234.193.840	218,137,952	93.14
3.05.03.253.	Program Pembinaan, Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan	11.114.315.779	10,435,850,369	93.90
3.05.03.254.	Program Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial	1.374.348.937	1,339,594,024	97.47
3.05.03.255.	Program Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga	1.555.503.910	1,465,328,450	94.20
3.05.03.258.	Program Pengelolaan Informasi, Media dan Hubungan Antar Lembaga	11.321.888.700	10,744,393,098	94.90
3.05.03.259.	Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	434.947.720	389,799,834	89.62
3.05.03.260.	Program Pengelolaan Publikasi dan Dokumentasi	21.960.825.400	21,015,823,478	95.70
3.05.03.261.	Program Pengembangan Ketatalaksanaan	153.223.600	153,041,000	99.88
3.05.03.263.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	278.437.250	275,772,782	99.04
3.05.03.268.	Program Peningkatan Pelayanan Publik	508.550.000	508,092,000	99.91
3.05.03.270.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sumber daya alam	150.416.866	150,310,865	99.93
3.05.03.271.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahanan Daerah	463.546.350	422,851,334	91.22
3.05.03.272.	Program penyelenggaran keprotokolan di pemerintah daerah	8.604.220.933	7,657,541,275	89.00
3.05.03.273.	Program Perundang-Undangan Daerah Provinsi	1.741.578.875	1,647,028,239	94.57
3.05.03.284.	Program Optimalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah	504.428.450	476,434,943	94.45
3.05.04.	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**	**260.031.407.762**	**233,236,140,240**	**89.70**
3.05.04.278.	Program peningkatan peran dan fungsi legislasi serta pengawasan lembaga legislatif	6.150.375.640	4,017,339,527	65.32
3.05.04.280.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	19.914.399.577	17,133,241,282	86.03
3.05.04.281.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Sekretariat DPRD	59.401.019.457	54,162,702,073	91.18
3.05.04.282.	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian, Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja	9.593.194.638	8,686,377,218	90.55

KODE	Urusan, Organisasi dan Program	Pagu Anggaran (Rp.)		Tk. Capaian Anggaran (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
3.05.04.283.	Program hubungan kelembagaan, aspirasi, pengawasan dan anggaran	164.972.418.450	149,236,480,140	90.46
3.05.05.	**INSPEKTORAT**	**41.858.663.599**	**40,368,805,924**	**96.44**
3.05.05.245.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Inspektorat	8.247.776.695	7,981,021,124	96.77
3.05.05.262.	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Integritas	1.453.366.000	1,350,486,000	92.92
3.05.05.264.	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	554.767.000	542,133,000	97.72
3.05.05.265.	Program Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja	1.007.950.000	1,000,900,000	99.30
3.05.05.266.	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	8.722.372.750	8,444,350,000	96.81
3.05.05.267.	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	17.006.170.000	16,304,230,000	95.87
3.05.05.269.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat	4.866.261.154	4,745,685,800	97.52
3.05.10.	**BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA BARAT**	**8.850.117.806**	**8,399,241,659**	**94.91**
3.05.10.212.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Penghubung	838.029.315	791,668,194	94.47
3.05.10.235.	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Penghubung	6.355.410.491	5,990,803,558	94.26
3.05.10.246.	Program Fasilitasi Promosi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Potensi Pembangunan Jawa Barat	967.257.500	962,116,907	99.47
3.05.10.249.	Program Koordinasi Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitasi Keprotokolan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Barat	689.420.500	654,653,000	94.96
TOTAL		**7,346,204,592,033**	**6.549.639.806.347**	**89.16**

Sumber: Evaluasi RKPD Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

Pelaksanaan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 merupakan tahun ke-2 dalam periode RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dipengaruhi oleh kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah. Secara umum, evaluasi pelaksanaan program RKPD Tahun 2020 bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian berbagai program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode RPJMD Tahun 2018-2023.

Pelaksanaan program-program pembangunan daerah tahun 2022 merupakan upaya sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah periode RPJMD Tahun 2018-2023, yakni: 1) Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; 2) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; 3) Masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur; 4) Pertumbuhan ekonomi daerah yang mengalami perlambatan; 5) Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan 6) Masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2020 mengalami hambatan dan kendala imbas dari Kejadian Luar Biasa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia diawal tahun 2020. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak berjalan optimal seiring adanya kebijakan nasional mengenai *refocusing* dan realokasi APBN/APBD Tahun Anggaran 2020 dimana dukungan pendanaan pembangunan lebih difokuskan kepada upaya penanganan pandemi COVID-19. Akibatnya, program dan kegiatan yang tidak berjalan optimal tersebut mempengaruhi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2020.

Kinerja pembangunan daerah dapat diketahui dari hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah sebagai alat manajemen untuk mengetahui pencapaian kinerja terhadap apa yang telah direncanakan dalam RKPD Tahun 2020. Tolak ukur yang digunakan untuk melakukan evaluasi adalah 3 (tiga) komponen terukur dari RPJMD yang menjadi target pembangunan daerah meliputi 1) indikator makro; 2) indikator kinerja

utama pemerintah daerah; dan 3) indikator kinerja program pembangunan daerah.

2.3 Kondisi Masa Pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat

2.3.1 Kondisi Kesehatan Masa Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia merupakan bagian dari pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia dan dikategorikan sebagai bencana non alam sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kondisi pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat khususnya menuntut respon kesiapsiagaan yang harus didukung oleh kesiapan sistem kesehatan daerah yang optimal baik dari aspek upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia kesehatan, sumberdaya obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Pada 6 Maret 2021, jumlah kasus terkonfirmasi positif di Provinsi Jawa Barat sebanyak 219.940 orang dengan jumlah kasus sembuh sebanyak 181.128 orang dan meninggal 2.514 orang. Sedangkan jumlah orang dalam perawatan sebanyak 36.298 orang. Diinformasikan juga klasifikasi, yaitu Kontak Erat sebanyak 266.684 orang, Suspek sebanyak 133.629 orang, dan *Probable* sebanyak 3.338 orang. Data kasus baik kasus terkonfirmasi positif, sembuh, meninggal, dan dalam perawatan terus menunjukkan kecenderungan meningkat sehingga membutuhkan upaya ketat untuk mengendalikan penularan.

Berdasarkan kondisi fasilitas kesehatan saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu mengidentifikasi kebutuhan fasiltas pelayanan kesehatan bagi penanganan kasus pandemi COVID-19 yang terjadi di Provinsi Jawa Barat sehingga angka penularan dan angka kematian akibat pandemi COVID-19 dapat dikendalikan. Keterbatasan fasilitas kesehatan yang tersedia, tentunya akan memperlambat penanganan kasus akibat pandemi COVID-19. Sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas di beberapa wilayah Jawa Barat masih belum memenuhi standar minimal penanganan. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit (TT) menurut *World Health Organization* (WHO) adalah 1 (satu) TT untuk 1000 penduduk, sehingga dengan jumlah penduduk Jawa Barat sebesar kurang lebih 49 juta jiwa maka dibutuhkan total tempat tidur sebanyak 49

ribu TT. Sementara kondisi saat ini, dari 369 Rumah Sakit yang ada di Provinsi Jawa Barat, jumlah total tempat tidur yang tersedia adalah 37.296 tempat tidur, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 1.088 TT. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jumlah puskesmas di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.088 Puskesmas dimana 292 unit (26,84 persen) merupakan Puskesmas Rawat Inap dan 796 unit (73,16) merupakan Puskesmas Non Rawat Inap. Selain kebutuhan TT, permasalahan penting lain yang perlu menjadi perhatian bersama adalah persoalan data. Hal ini disebabkan tidak sinkronnya data antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ketidakserasian data ini menyebabkan ketidaktepatan dalam pengambilan kebijakan. Selain ketidaksinkronan data, permasalahan lain yang perlu diselesaikan adalah ketidaktepatan data dan penemuan data kasus sehingga memerlukan sistem informasi yang saling terintegrasi, transparan, dan terkini serta peningkatan kapasitas tes dan penguatan kegiatan *surveilans*.

2.3.2 Kondisi Ekonomi Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020

Kondisi ekonomi pada masa pandemi tercermin dari komponen pembentuk PDRB, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi serta ekspor dan impor. konsumsi rumah tangga menurun, konsumsi pemerintah teralihkan dari konsumsi untuk pembangunan menjadi konsumsi untuk penanggulangan pandemi COVID-19, investasi diperkirakan menurun, ekspor dan impor tumbuh negatif.

Konsumsi rumah tangga kondisi Maret 2020 menurun. Penurunan Konsumsi Rumah Tangga terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Keyakinan Konsumen (IEK) dan Konsumsi listrik. IKK turun menjadi 109,1 pada bulan Maret 2020, dari kondisi sebesar 118 bulan Februari 2020. IEK turun menjadi 124,2 pada bulan Maret 2020, dari kondisi sebesar 134,6 pada bulan Februari 2020.

Adapun konsumsi listrik pada triwulan I-2020 (Januari-Februari) sebesar -29,05 persen (*y-o-y*).

Konsumsi Pemerintah yang sudah dialokasikan untuk pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, proyek-proyek strategis dan program kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dilakukan realokasi dan *refocusing* anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19 sebesar 4,48 triliun rupiah. Pendapatan Daerah terkoreksi 2,6 triliun rupiah. Selain itu terjadi penurunan realisasi belanja pemerintah khususnya belanja modal.

Investasi pada masa pandemi COVID-19 terhenti karena seluruh dunia teralih perhatiannya pada penanganan pandemi COVID-19. Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurun 12 persen pada tahun 2020. Ekspor pada bulan Januari 2021 net masih surplus USD 1,64 milliar dan tumbuh positif 8,20 persen (*y-o-y*). Adapun impor tercatat tumbuh negatif -4,01 persen (*y-o-y*).

2.3.3 Kondisi Sosial Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap dunia pendidikan bahwa aktivitas belajar dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi sudah memberlakukan pembelajaran daring. Sehingga tentunya akan mempengaruhi kualitas pendidikan dari tatap muka langsung menjadi jarak jauh.

Selain itu juga terjadi peningkatan jumlah pengangguran dalam jumlah yang besar. Gelombang Penghentian Hubungan Kerja (PHK) semakin merebak di sejumlah sektor, mulai dari sektor manufaktur, pariwisata, transportasi, perdagangan, konstruksi, dan lainnya. Selain itu, ada pula sebagian perusahaan yang saat ini hanya mampu membayar separuh dari gaji karyawannya.

Dampak lain adalah kemiskinan meningkat yang salah satunya disebabkan juga oleh pengangguran, ketika tinggal di rumah bagi masyarakat yang pendapatanya harian maka otomatis tidak akan mendapat penghasilan, permalasahan lainya juga ini akan lebih berat bagi orang-orang yang memang kondisinya sudah miskin sebelum terjadi pandemi COVID-19. Kesimpulannya akibat dari pandemi COVID-19 di

Provinsi Jawa Barat adalah terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat, kualitas pendidikan terganggu**.**

2.3.4 Kondisi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020

Dengan adanya pandemi COVID-19, pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terganggu. Kebijakan penerapan PSBB mengakibatkan pembatasan terhadap aktivitas ekonomi, sosial, dan pembangunan. Kondisi ini mempengaruhi terhadap keuangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Kemudian dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan *refocusing* terhadap program dan anggaran. Sampai dengan bulan April 2020, anggaran untuk penanganan kesehatan dan *social safety net* (bantuan tunai dan bantuan nontunai) sebesar Rp1,2 triliun. Kondisi tersebut masih akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan pandemi COVID-19. Apabila pandemi COVID-19 masih terus berlangsung maka anggaran akan terus mengalami *refocusing*.

Selain itu, dari sisi pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 diperkirakan akan mengalami deviasi sebesar 12,74 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp41 triliun. Hal serupa, dana transfer dari pusat berkurang yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, yang telah mengoreksi penurunan rencana penerimaan dana transfer ke pemerintah daerah untuk tahun 2020.

Selain itu, dari sisi pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami deviasi sebesar 9,69 persen dari target yang telah ditetapkan pada Perubahan APBD 2020 sebesar Rp38,2 triliun.

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2020. Hasil evaluasi tersebut menjadi rujukan proses identifikasi permasalahan pembangunan daerah Jawa Barat yang harus menjadi perhatian tahun 2022, yaitu:

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan;
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;
3. Masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur;
4. Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pelambatan;
5. Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
6. Masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan disusun berdasarkan hasil evaluasi yang tercantum dalam sub bab evaluasi capaian RKPD Tahun 2020, evaluasi capaian RKPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan I, dan gambaran umum kondisi daerah. Berikut permasalahan pembangunan yang disusun menurut bidang urusan.

2.4.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.4.2.1.1 Bidang Pendidikan

Permasalahan pada bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penguatan sistem pembelajaran jarak jauh, diantaranya berkaitan dengan fasilitasi peralatan pembelajaran,

penguatan jaringan internet di *blank spot* area, distribusi kuota data internet gratis secara merata dan tepat sasaran. Mengingat trend pendidikan jarak jauh ini akan terus berlanjut seiring dengan kemajuan teknologi dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pasca pandemi COVID-19 perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terutama peningkatan mutu pembelajarannya;

2. Belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendidikan (bangunan sekolah dan ruang kelas), serta sarana prasarana penunjang lainnya untuk pendidikan formal;
3. Belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendidikan informal yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan karakter dan anak usia dini, seperti pondok pesantren, MDTA, RA, TK, PAUD;
4. Insentif untuk guru PAUD dan Madrasah yang masih belum memadai;
5. Pelatihan-pelatihan *life skill* dan *soft skill* yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum optimal dalam mengatasi masalah pengangguran;
6. Belum optimalnya ketersediaan, distribusi, dan kualitas tenaga pendidik (guru);
7. Belum efektifnya pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru; dan
8. Perhatian pemerintah terhadap guru honorer yang mengajar di sekolah di bawah Kemendikbud atau Kemenag perlu lebih ditingkatkan.

2.4.2.1.2 Bidang Kesehatan

Permasalahan kesehatan yang masih ditemui di Provinsi Jawa Barat meliputi:

1. Belum optimalnya peningkatan sarana prasarana kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit dan puskesmas diberbagai daerah, penambahan tenaga kesehatan, ketersediaan mobil pelayanan *Ambulance* di setiap desa/kelurahan, penyediaan alat-alat kesehatan, penyediaan obat-obatan, pembangunan MCK, serta penyediaan alat-alat kesehatan pandemi COVID-19 yang masih banyak di butuhkan di masyarakat;

2. Akses pelayanan kesehatan melalui jalur BPJS perlu ditingkatkan karena sering terjadi kendala dan cenderung mempersulit bagi pasien, selain itu perlu meningkatkan jumlah subsisdi bagi BPJS kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peningkatan jumlah kuota BPJS bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK);
3. Terkait dengan vaksinasi COVID-19, diperlukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi isu-isu yang meresahkan di masyarakat;
4. Penguatan sarana dan prasarana posyandu diberbagai daerah serta pelatihan kader bagi kader posyandu agar bisa lebih produktif;
5. Agar vaksin yang aman dan halal dapat diprioritaskan bagi warga Jawa Barat yang muslim. Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa barat dapat melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, serta memberikan sosialisasi dan penjelasan sebaik-baiknya ke warga masyarakat di Provinsi Jawa Barat;
6. Anggaran alat pelindung diri di pusat layanan kesehatan bagi masyarakat Jawa Barat harus tersedia dengan memadai, juga pemberian komponen gaji/insentif bagi petugas kesehatan yang sedang bertugas menangani COVID-19.

2.4.2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang masih ditemui di Provinsi Jawa Barat meliputi:

1. Perbaikan jalan lingkungan permukiman, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)/Turap, Rambat beton jalan, Tanggul jalan, pembangunan jembatan drainase, pembangunan/penghidupan situ, normalisasi sungai, serta pembangunan/perbaikan jembatan di kabupaten/kota.
2. Perlu adanya program terombosan untuk mengatasi daerah rawan banjir akibat alih fungsi lahan, penyempitan serta pendangkalan saluran pembungan air, penataan sungai, serta pembuatan sumur resapan.
3. Belum optimalnya penyediaan dan distribusi pelayanan air minum;
4. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, dan drainase);

5. Terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah regional;
6. Terdapat beberapa akibat dari BABS atau sanitasi buruk yaitu tingginya angka kematian balita, diare pada balita dan *stunting*;
7. Sebesar 27 persen desa/kelurahan di Provinsi Jawa Barat berada di area risiko sanitasi sangat tinggi dan tinggi (sektor air limbah domestik) berdasarkan studi *Environmental Health Risk Assesment* (EHRA);
8. Dibutuhkannya inovasi teknologi dalam penanggulangan sampah terutama di perkotaan, alat pengolahan sampah organik, alat transportasi serta pembuatan TPS di daerah-daerah;
9. Permasalahan terkait sanitasi dan jaringan air bersih serta pembangunan sumur bor;
10. Belum meratanya pembangunan *Fly Over*; jembatan sebagai jalan penghubung antar kabupaten/kota, antar kecamatan, dan antar desa, khususnya di daerah-daerah pelosok;
11. Memasuki musim hujan, beberapa daerah mengalami musibah banjir dan tanah longsor, sehingga merusak infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan, jembatan dan saluran air/irigasi. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya konkrit Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mengantisipasi permasalahan tersebut di atas;
12. Belum meratanya aksesibilitas di jalan-jalan kecil/trotoar untuk kenyamanan para pejalan kaki; dan
13. Permasalahan daerah rawan banjir akibat alih fungsi lahan, penyempitan serta pendangkalan saluran pembuangan air, penataan sungai, serta pembuatan sumur resapan untuk itu perlu adanya terobosan terkait pengentasan permasalahan tersebut.

2.4.2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pembangunan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi:

1. Masih tingginya angka *backlog* perumahan;
2. Masih banyak terdapat rumah tidak layak huni;
3. Masih banyak terdapat kawasan permukiman kumuh;
4. Masih belum terpenuhinya proporsi ruang terbuka hijau dan kecukupan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) permukiman; dan

5. Permasalahan terkait lahan pemakaman, pemeliharaan dan pembuatan taman kota.

2.4.2.1.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pembangunan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi:

1. Masih terdapat ancaman konflik sosial dan konflik agama yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
2. Masih rendahnya kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana;
3. Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku; dan
4. Belum Optimalnya pelaksanaan program pengorganisiran Pedagang Kaki Lima (PKL) dilokasi yang strategis.

2.4.2.1.6 Bidang Sosial

Permasalahan pembangunan bidang sosial meliputi:

1. Masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Belum optimalnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan UPTD Panti Rehabilitasi Sosial;
4. Belum optimalnya akses kaum disabilitas terhadap fasilitas pelayanan publik;
5. Belum optimalnya pelaksanaan bantuan sosial, hal tersebut perlu adanya kesinambungan selama pandemi belum berakhir, serta senantiasa memperbaharui data penerima bantuan agar tepat sasaran dalam penyalurannya; dan
6. Belum optimalnya program pembinaan dan pemberdayaan eks narapidana ketika kembali ke masyarakat.

2.4.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.4.2.2.1 Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan Bidang Tenaga Kerja meliputi:

1. Kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih rendah;
2. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata;
3. Tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda dengan pendidikan SMA ke bawah;
4. Rendahnya akses terhadap lapangan kerja;
5. Hubungan industrial belum kondusif;
6. Kesejahteraan pekerja/buruh masih rendah;
7. Perlindungan tenaga kerja masih rendah;
8. Minat untuk berwirausaha masih rendah;
9. Kurangnya kesesuaian jurusan di jenjang pendidikan SMK terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja; dan
10. Terkait dengan permasalahan pada lapangan pekerjaan, diharapkan adanya terobosan pemerintah dalam mempermudah akses, ketersediaan maupun fasilitas terkait lapangan pekerjaan, pelatihan tenaga kerja, pembangunan UPT Balai Latihan Kerja (BLK), serta memfasilitasi lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas.

2.4.2.2.2 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

1. Masih tingginya kasus kekerasan dan *trafficking* pada perempuan dan anak;
2. Belum optimalnya peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga;
3. Belum optimalnya peran perempuan dan anak dalam pembangunan;
4. Masih kurangnya keterwakilan perempuan di legislatif; dan
5. Pengadaan teknologi tepat guna, serta penyediaan alat-alat keterampilan ibu-ibu.

2.4.2.2.3 Bidang Pangan

Permasalahan pembangunan bidang pangan meliputi:

1. Masih tingginya masyarakat yang mengalami kerentanan pangan;
2. Ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Barat masih mengalami ketimpangan;
3. Keragaman konsumsi pangan masih rendah, hanya tergantung pada satu jenis bahan pokok yaitu beras;
4. Distribusi dan logistik pangan yang belum optimal;
5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), hal ini berpengaruh terhadap prevalansi *stunting* di Provinsi Jawa Barat;
6. Kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan masih rendah;
7. Sarana prasana laboratorium pengujian pangan kurang memadai; dan
8. Pemberian bantuan untuk melakukan riset dan penelitan dengan melibatkan akademisi yang ahli di bidangnya masing-masing dengan target mengembangkan produk-produk pertanian, perikanan dan yang lainya.

2.4.2.2.4 Bidang Pertanahan

Permasalahan pembangunan bidang pertanahan meliputi:

1. Belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainya;
2. Lambatnya proses administrasi pertanahan; dan
3. Masih banyak tanah provinsi yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain.

2.4.2.2.5 Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan Bidang Lingkungan Hidup meliputi:

1. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan;
2. Menurunnya kualitas udara ambien akibat emisi kendaraan bermotor dan cerobong industri, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik;

3. Menurunnya fungsi layanan jasa ekosistem DAS Jawa Barat yang ditandai dengan menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya tutupan vegetasi, dan meningkatnya alih fungsi lahan produktif;
4. Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem, dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan;
5. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang dalam mewujudkan kebijakan 45 persen kawasan lindung Jawa Barat;
6. Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana;
7. Belum sinerginya berbagai sektor diantaranya sektor permukiman dan perumahan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, energi, dan perhubungan dalam pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup;
8. Belum optimalnya komitmen dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari berbagai sektor yang berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan juga rentan terhadap dampak perubahan iklim, diantaranya sektor kehutanan, perkebunan, energi, perhubungan dan permukiman dan perumahan; dan
9. Permasalahan daerah rawan banjir akibat alih fungsi lahan, penyempitan serta pendangkalan saluran pembungan air, penataan sungai, serta pembuatan sumur resapan untuk itu perlu adanya terobosan terkait pengentasan permasalahan tersebut.

2.4.2.2.6 Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:

1. Masih terdapatnya masalah dalam pembuatan, pengurusan, atau penggantian *e-KTP*;
2. Kurang akuratnya data kependudukan skala provinsi;
3. Terbatasnya sarana prasarana dan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota;

4. Akurasi dan konsolidasi data kependudukan di Provinsi Jawa Barat belum optimal, karena dipengaruhi oleh akurasi data yang disajikan oleh kabupaten/kota dan kecepatan konsolidasi data yang merupakan kewenangan pemerintah pusat; dan
5. Data kependudukan dari Disdukcapil, belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk semua keperluan proses pembangunan, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

2.4.2.2.7 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:

1. Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kolaboratif dan inovatif untuk menuju Gerbang Desa Juara;
2. Belum sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota, baik secara parsial maupun sektoral di tingkat desa;
3. Masih belum optimalnya infrastruktur dasar dan ekonomi dalam mendukung perekonomian perdesaan antara lain: 1) belum seluruh desa memiliki BUMDes; 2) masih adanya desa belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi (*blankspot*); dan 3) belum optimalnya pemanfaatan potensi desa untuk mendorong *One Village One Company* (OVOC);
4. Belum optimalnya pengelolaan BUMDes sebagai katalis perekonomian desa;
5. Belum optimalnya pembangunan desa mencakup: 1) peningkatan pelayanan dasar; 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan; 3) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 4) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; dan 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;
6. Menurunnya budaya gotong royong pada masyarakat desa yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;

7. Belum meratanya aspalisasi/betonisasi jalan poros desa dengan panjang dan lebar disesuaikan dengan kondisi desa;
8. Masih ditemukan beberapa kantor Kepala Desa mengalami yang kerusakan; dan
9. Di beberapa desa, belum terdapat fasilitas lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat.

2.4.2.2.8 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi:

1. Pertambahan penduduk yang cepat disebabkan oleh migrasi dan kelahiran;
2. Persebaran penduduk yang tidak merata serta tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Belum optimalnya pembangunan keluarga di Provinsi Jawa Barat; dan
4. Masih banyaknya usia kawin pertama penduduk Jawa Barat di usia dini.

2.4.2.2.9 Bidang Perhubungan

Permasalahan pembangunan Bidang Perhubungan meliputi:

1. Belum berkembangnya sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel serta integrasi antar moda angkutan;
2. Masih rendahnya ketersediaan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
3. Jumlah penumpang angkutan umum yang masih rendah;
4. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan;
5. Masih tingginya kelebihan muatan angkutan barang;
6. Belum optimalnya keberadaan bandar udara untuk menampung penumpang dan barang baik domestik maupun internasional;
7. Belum tersedianya pelabuhan laut internasional dan belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau; dan

8. Belum optimalnya proses penertiban 4 (empat) jalur yang direncanakan akan direaktivasi, yaitu di jalur Cibatu-Garut dan jalur Ganda Bogor-Sukabumi.

2.4.2.2.10 Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika meliputi:

1. Permasalahan utama bidang komunikasi dan informatika untuk aplikasi dan informatika, meliputi:
   a) Belum ada rencana induk/*strategic plan*/*masterplan*/*blueprint* teknologi informasi di Provinsi Jawa Barat;
   b) Belum adanya standar pembangunan/pengembangan aplikasi/sistem informasi/*website*, data, serta infrastruktur TI.
   c) Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada beberapa layanan TI; dan
   d) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola TI.
2. Permasalahan terkait informasi dan komunikasi publik, yaitu:
   a) Kemajuan teknologi memberikan kemudahan terhadap akses informasi yang lebih beragam dan cepat, namun kelemahannya berdampak pada akurasi dan keamanan informasi; dan
   b) Belum ada regulasi terbaru seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

2.4.2.2.11 Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah meliputi:

1. Masih banyak UKM yang belum bisa mengakses dana dari perbankan dikarenakan UKM tidak *bankable*;
2. Secara umum akar permasalahan di Bidang Koperasi dan UKM;
   a) Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif;
   b) Masih rendahnya informasi akses permodalan bagi usaha kecil terutama di perdesaan;

c) Pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha kecil belum optimal;
d) Belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha kecil;
e) Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Permohonan bantuan permodalan dan pengembangan untuk wirausaha masyarakat, seperti UMKM dan Koperasi; dan
f) Pencegahan dan penangguhan pandemi COVID-19 telah memasuki masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali, sehingga mengakibatkan terjadinya perlambatan ekonomi di masyarakat. Untuk itu mohon perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan-kegiatan perekonomian bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2.4.2.2.12 Bidang Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan Bidang Penanaman Modal meliputi:

1. Belum meratanya persebaran investasi ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Investasi masih terkosentrasi di Jawa Barat bagian Utara;
2. Masih minimnya minat investor untuk menanamkan usahanya pada sektor primer misalnya di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi investasi saat ini masih pada sektor sekunder dan tersier;
3. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), hanya kurang lebih 10 persen perusahaan yang menyampaikan LKPM secara rutin;
4. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN di Provinsi Jawa Barat masih belum optimal disebabkan tidak adanya kewenangan Tim *Task Force* untuk menyelesaikan masalah tersebut;
5. Belum optimalnya akses permodalan serta perizinan usaha bagi masyarakat;
6. Masih tingginya kesenjangan antara minat dan realisasi investasi karena kurangnya pengawasan saat proses realisasi investasi; dan

7. Belum efektifnya promosi investasi yang disebabkan oleh peluang investasi yang belum siap ditawarkan. Hal ini disebabkan studi kelayakan potensi peluang investasi belum menarik bagi investor.

Adapun akar permasalahan yang menyebabkan hal tersebut, yaitu:

1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata;
2. Belum sesuainya kualifikasi angkatan kerja lokal dengan pasar tenaga kerja; dan
3. Dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha.

2.4.2.2.13 Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga meliputi:

1. Permasalahan utama kepemudaan di Provinsi Jawa Barat:
   a) Masih minimnya fasilitas pengembangan potensi pemuda;
   b) Rendahnya partisipasi pemuda Jawa Barat dalam menciptakan lapangan kerja;
   c) Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan; dan
   d) Belum optimalnya penanganan kesetaraan dan diskriminasi gender.
2. Permasalahan bidang olahraga:
   a) Masih minimnya sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Jawa Barat;
   b) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga yang ditandai dengan rendahnya persentase penduduk Jawa Barat yang melakukan kegiatan olahraga;
   c) Belum optimalnya peran serta keolahragaan (Sekolah Khusus Olahraga, PPLP, Puslatda) untuk pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
   d) Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan;

e) Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata, dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian di Provinsi Jawa Barat;
f) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Provinsi Jawa Barat yang memenuhi standar nasional dan internasional;
g) Kurangnya sarana terbuka publik yang dapat digunakan untuk berolahraga di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat;
h) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga; dan
i) Terbatasnya jumlah dan kualitas Sentra Pembinaan Olahraga di Jawa Barat yang memenuhi standar nasional dan internasional.

2.4.2.2.14 Bidang Statistik

Permasalahan pembangunan Bidang Statistik meliputi:

1. Masih rendahnya ketersediaan dan layanan data/informasi statistik sektoral;
2. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menyediakan dan menyampaikan data tepat waktu; dan
3. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik bagi pembangunan.

2.4.2.2.15 Bidang Persandian

Permasalahan pembangunan Bidang Persandian meliputi:

1. Belum optimalnya keamanan informasi pemerintah daerah;
2. Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi *(security awarness*);
3. Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang masih terbatas;
4. Belum selesainya *Vurnerability Assessment* (VA) pengamanan informasi baik jaringan maupun aplikasi;
5. Masih terbatasnya upaya pengamanan aset dan ruangan pimpinan dari kebocoran informasi; dan
6. Belum optimalnya pengamanan dan pelayanan dokumen penting dari pemalsuan.

2.4.2.2.16 Bidang Kebudayaan

Permasalahan pembangunan bidang Kebudayaan meliputi:

1. Masih rendahnya perlindungan terhadap budaya lokal Jawa Barat;
2. Masih rendahnya apresiasi terhadap budaya lokal Jawa Barat;
3. Kurang optimalnya promosi budaya lokal Jawa Barat di dalam dan luar negeri;
4. Kuatnya pengaruh budaya asing terhadap budaya Jawa Barat; dan
5. Belum optimalnya prasarana alat-alat kesenian, sarana sanggar seni, pelestarian kesenian di daerah, serta pengembangan pencak silat.

2.4.2.2.17 Bidang Perpustakaan

Permasalahan pembangunan Bidang Perpustakaan meliputi:

1. Belum optimalnya peran kelembagaan dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pelayanan perpustakaan di Provinsi Jawa Barat;
2. Masih minimnya minat masyarakat terhadap perpustakaan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan provinsi; dan
4. Perlunya peningkatan literasi dengan menambah dan memperbaharui buku-buku bacaan di sekolah-sekolah baik SMA-SMK termasuk bantuan untuk perpustakaan.

2.4.2.2.18 Bidang Kearsipan

Permasalahan pembangunan Bidang Kearsipan meliputi:

1. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan di perangkat daerah; dan
2. Transformasi pengelolaan arsip konvensional menjadi arsip dengan format digital belum didukung dengan infrastruktur yang efektif.

2.4.2.3 Urusan Pilihan

2.4.2.3.1 Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan meliputi:

1. Daya saing produk kelautan dan perikanan masih rendah;
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan masih kurang;

3. Pengawasan dan pengendalian SDKP (Penganggulangan dan penyelesaian IUU *Fishing*);
4. Degradasi lingkungan perikanan dan kelautan (Abrasi, intrusi, pencemaran, kerusakan hutan *mangrove*, kerusakan terumbu karang, kerusakan padang lamun, *overfishing* dan sedimentasi);
5. Pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan laut (manajemen dan teknologi pemanfaatan yang belum optimal dan tidak ramah lingkungan);
6. Terbatasnya jumlah perusahaan yang bergerak pada industri pengolahan perikanan;
7. Pelabuhan perikanan Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal;
8. Pemasaran hasil kelautan dan perikanan belum terintegrasi;
9. Minimnya fasilitas dan infrastruktur di wilayah Selatan Jawa Barat sehingga sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada belum termanfaatkan secara optimal; dan
10. Terbatasnya teknologi penangkapan yang dihadapi nelayan khususnya nelayan wilayah Selatan Jawa Barat.

2.4.2.3.2 Bidang Pariwisata

Permasalahan pembangunan bidang Pariwisata meliputi:

1. Masih terbatasnya ragam atraksi wisata untuk mendorong peningkatan lama kunjungan wisatawan;
2. Masih terbatasnya infrastruktur penunjang atraksi wisata dalam wilayah destinasi;
3. Masih terbatasnya infrastruktur aksesibilitas ke destinasi wisata yang memiliki waktu tempuh sesuai batas toleransi wisatawan;
4. Masih terbatasnya sarana amenitas di destinasi wisata yang dapat menunjang peningkatan kenyamanan, keamanan, dan pengeluaran wisatawan;
5. Masih perlu ditingkatkannya pengarusutamaan pariwisata kepada pemerintah lokal dan masyarakat;
6. Belum optimalnya pengembangan serta mempromosikan destinasi wisata pedesaan;

7. Belum teridentifikasinya keterkaitan tematik dan geografis antar destinasi wisata yang mendukung penciptaan jalur wisata multi destinasi; dan
8. Masih terbatasnya akses calon wisatawan terhadap paket-paket wisata di Provinsi Jawa Barat.

2.4.2.3.3 Bidang Pertanian

Permasalahan pembangunan bidang Pertanian meliputi:

1. Banyaknya terjadi alih fungsi lahan di Provinsi Jawa Barat;
2. Kondisi fisik jaringan irigasi belum optimal;
3. Adanya konflik kebutuhan dan pemanfaatan air;
4. Kondisi modal usaha petani masih sangat terbatas;
5. Penggunaan teknologi belum optimal pada sektor pertanian;
6. Belum optimalnya regenerasi petani;
7. Petani kesulitan dalam mengakses pasar; dan
8. Perlu adanya terobosan dalam pengentasan permasalahan pada bidang pertanian, permohonan permodalan, pemberdayaan dan pendampingan kelompok tani, pengadaan alat-alat pertanian dan argo bisnis holtikultura, bibit, jaringan irigasi pertanian, serta pupuk gratis bagi para petani dalam rangka penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.

2.4.2.3.4 Bidang Kehutanan

Permasalahan pembangunan bidang Kehutanan meliputi:

1. Tingginya tingkat degradasi hutan dan meningkatnya luas lahan kritis terutama pada Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat alih fungsi lahan;
2. Pengelolaan hutan di Provinsi Jawa Barat belum optimal;
3. Rendahnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Secara umum akar permasalahan bidang kehutanan:

1. Tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di kawasan hulu DAS;
2. Meningkatnya gangguan ekosistem;
3. Jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan masih tinggi;

4. Rendahnya teknologi pemanfaatan sumber daya hutan;
5. Kurangnya kuantitas penyuluh; dan
6. Kurangnya sarana prasarana dan SDM di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah.

2.4.2.3.5 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan pembangunan bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral meliputi:

1. Belum optimalnya cakupan pelayanan elektrifikasi rumah;
2. Rendahnya kesadaran para pelaku pengambil air tanah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin, seperti kewajiban untuk membuat sumur imbuhan, ataupun telah memiliki sumur imbuhan tetapi belum diregistrasi, dan belum memasang *piezometer*;
3. Adanya keberatan terhadap kewajiban untuk melakukan pengujian konstruksi sumur bor melalui *broe hole camera* dengan alasan biaya yang mahal;
4. Masih ditemukan adanya meter air yang belum dikalibrasi (ditera) atau meter air yang kondisinya rusak;
5. Masih banyak pelaku usaha pertambangan yang belum melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan, seperti laporan produksi, laporan triwulanan, laporan kemajuan tambang, laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan, laporan pelaksanaan reklamasi dan dokumen RKAB;
6. Ketersediaan lahan untuk instalasi biogas yang terbatas;
7. Masih kurangnya kesadaran para pemilik instalasi tenaga listrik untuk melakukan proses sertifikasi laik operasi;
8. Adanya dualisme penyelenggaraan sertifikasi instalasi pembangkit tenaga listrik dengan sektor ketenagakerjaan dan sektor minyak dan gas;
9. Masih terkendala dengan penggunaan *Online Single Submission* (OSS) sebagai pintu gerbang permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang digunakan;

10. Regulasi acuan dari Pemerintah Pusat sebagai NSPK yang berubah-ubah, serta kewenangan pemeriksaan intalasi tenaga listrik yang berbeda, sehingga diperlukan penetapan pedoman teknis yang sesuai dengan objek pemeriksaan pengujian berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi;
11. Kompleksitas mata uji pemeriksaan dan pengujian menyebabkan dari 37 butir mata uji jadi baru tersusun pedoman teknis dari 3 (tiga) sub bidang;
12. Belum tersedianya Peraturan dari Pemerintah Pusat/Kementerian ESDM sebagai NSPK bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tingkat mutu pelayanan bagi pemegang IUPTL di Provinsi Jawa Barat;
13. Metode pengambilan titik koordinat instalasi tenaga listrik pada pemegang IUPTL adalah sampling, sehingga basisdata yang digunakan pada pekerjaan pemetaan infrastruktur ketenagalistrikan perlu disempurnakan;
14. Penerima bantuan subsidi listrik hanya dapat diterima oleh masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah masuk di Basis Data Terpadu Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan (BDT TNP2K). Padahal kenyataan dilapangan masih banyak masyarakat miskin dan tidak mampu yang kondisinya layak untuk mendapatkan bantuan subsidi listrik namun belum masuk dalam BDT TNP2K;
15. Proses pemasukan masyarakat miskin dan tidak mampu kedalam BDT TNP2K memakan waktu yang cukup lama dan tidak pasti serta birokrasi panjang yang berjenjang;
16. Aplikasi pengaduan kepesertaan subsidi listrik tepat sasaran yang difasilitasi oleh pemerintah pusat belum mampu dan belum efektif menjawab persoalan dilapangan;
17. Peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan terhadap pelayanan aplikasi pengaduan kepesertaan subsidi listrik tepat sasaran belum mampu dilaksanakan secara baik dan benar;
18. Perluasan jaringan listrik pedesaan masih menemukan kendala penyelesaian apabila harus melintasi atau melewati kawasan kehutanan dan atau perkebunan;

19. Perlu adanya terobosan terkait bidang Energi dan Sumber Daya Mineral seperti *Sollar Cell Pump* untuk kebutuhan peningkatan daya listrik mandiri, Pengembangan energi terbarukan solar, angin, air dan biogas/biomass;
20. Belum adanya NSP dari Pemerintah Pusat/Kementerian ESDM terkait penetapan konsumsi listrik per kapita, dan sebagai Pemerintah Provinsi pertama yang menetapkan konsumsi listrik per kapita sebagai indikator kinerja pembangunan sektor ketenagalistrikan, belum ada acuan yang dapat dijadikan sebagai referensi pelaksanaan Perhitungan Konsumsi Per kapita; dan
21. Sektor terkait sebagai *driver factor* maupun sebagai pendukung peningkatan konsumsi listrik per kapita belum memiliki pemahaman yang baik mengenai kepentingan perhitungan konsumsi listrik per kapita.

2.4.2.3.6 Bidang Perdagangan

Permasalahan pembangunan bidang Perdagangan meliputi:

1. Perlambatan ekonomi global yang berdampak kepada menurunnya permintaan ekspor;
2. Dominasi barang impor;
3. Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok;
4. Promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang;
5. Persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern;
6. Kualitas dan kuantitas Infrastruktur pasar tradisional belum memadai; dan
7. Belum meratanya penerapan strandar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

2.4.2.3.7 Bidang Perindustrian

Permasalahan pembangunan bidang Perindustrian meliputi:

1. Produk industri berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi) sehingga mengakibatkan pertumbuhan sektor industri melambat;

2. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB meningkat tetapi pertumbuhan sektor industri cederung melambat;
3. Produk industri belum seluruhnya menjadi bagian dalam rantai pasok nasional maupun global; dan
4. Belum terciptanya kemitraan antara industri besar dan industri kecil menengah.

2.4.2.3.8 Bidang Transmigrasi

Permasalahan pembangunan Bidang Transmigrasi meliputi:

1. Masih belum terintegrasinya pola perencanaan ketransmigrasian;
2. Kabupaten/kota daerah transmigrasi dan daerah asal masih kurang memahami proses kerja sama antardaerah bidang transmigrasi sehingga berakibat pada lambatnya penyelesaian naskah Kerja Sama Antar Daerah (KSAD);
3. Pengelolaan lahan di lokasi transmigrasi yang masih tumpang tindih, sehingga warga terganggu dalam mengolah/memanfaatkan lahan, yang berakibat pada tingkat kesejahteraan yang tidak menentu; dan
4. Pelatihan bagi calon transmigran yang semula dilaksanakan di daerah saat ini dilaksanakan di pusat, menjadi kendala tersendiri bagi daerah karena: 1) Tidak tersedianya biaya untuk pendamping calon transmigran; dan 2) Tidak tersedianya uang saku bagi peserta pelatihan.

2.4.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.2.4.1 Bidang Perencanaan

Permasalahan bidang perencanaan pembangunan adalah belum optimalnya pelibatan *stakeholder* nonpemerintah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan.

2.4.2.4.2 Bidang Keuangan

Permasalahan pembangunan Bidang Keuangan meliputi:

1. Masih banyaknya kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal di bawah 15 persen sehingga rasio anggaran belanja publiknya masih banyak yang di bawah 50 persen;

2. Belum ada ukuran penetapan belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sarana prasarana tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasanya secara keseluruhan;
3. Masih banyak aset/tanah yang belum tersertifikasi;
4. Masih adanya sengketa asset; dan
5. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah tidak tercapai.

2.4.2.4.3 Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan pembangunan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan adalah rendahnya jumlah PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan sebagai jaminan profesionalisme PNS dan Persentase *Smart* ASN yang menurun.

2.4.2.4.4 Bidang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi:

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan riset dalam perencanaan dan pembangunan daerah;
2. Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat; dan
3. Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Provinsi Jawa Barat masih rendah.

2.4.2.4.5 Fungsi Lainnya

Permasalahan dalam fungsi lain penunjang pemerintahan daerah yaitu:

1. Terdapat BPR yang sudah melakukan proses merger di Kabupaten Bogor, Cirebon, dan Indramayu yang sampai saat ini masih menunggu diterbitkannya Perda untuk melakukan perubahan bentuk hukum menjadi perseroan daerah;
2. Masih kurangnya kesadaran Perangkat Daerah dalam mengisi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);

3. Adanya keterlambatan dalam penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap perangkat daerah;
4. Pengisian paket kegiatan saat ini dilakukan oleh staf/operator di perangkat daerah, yang belum sepenuhnya memahami metode pengadaan barang dan jasa;
5. Permasalahan dalam integrasi *e-Budgeting* dengan SIPD, dimana terdapat beberapa data yang belum ada di formulir sebelumnya, sehingga harus menambahkan lagi informasi yang sesuai dengan kebutuhan data SIPD;
6. Kesepakatan bersama yang ditandatangani pada acara rapat kerja Gubernur FKD MPU ada yang belum ditindaklanjuti;
7. Belum sinergisnya perencanaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri oleh perangkat daerah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota serta tidak ada perencanaan skala prioritas;
8. Dalam penyusunan dokumen perencanaan, koordinasi antar Biro yang belum efektif, SDM yang belum menguasai kompetensi dalam bidang perencanaan;
9. Dalam pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah masih diperlukan asistensi dari operator program untuk dapat membiasakan diri bagi para pengguna sistem;
10. Belum tersedianya instrumen dan indikator monitoring dan evaluasi kerja sama yang bersifat universal;
11. Ketersediaan dan validitas data capaian kinerja provinsi dan kabupaten/kota;
12. Belum terbitnya aturan yang mengatur tentang Penataan Daerah (PP tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah);
13. Kurang lengkapnya persyaratan administrasi dari pemohon fasilitasi administrasi pemerintahan umum;
14. Masih banyak kesalahan dalam persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pengajuan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
15. Jumlah kuasa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang masih terbatas;
16. Masih kurangnya desa/kelurahan yang belum memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum;

17. Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan kajian produk hukum kabupaten/kota serta pemahaman yang belum optimal dalam perancangan produk hukum di kabupaten/kota;
18. Belum adanya pedoman pengaturan investasi Pemerintah Daerah yang meliputi investasi langsung dan investasi pembelian surat berharga;
19. Adanya perubahan regulasi tentang kelembagaan yang berakibat kepada penyesuaian secara cepat kepada struktur organisasi perangkat daerah dan tugas pokok serta fungsinya;
20. Belum semua Perangkat Daerah menetapkan standar pelayanan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
21. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
22. Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan masyarakat desa;
23. Belum sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dengan kabupaten/kota;
24. BUMDes belum dioptimalisasi sebagai katalis perekonomian desa;
25. Belum optimalnya pembangunan desa mencakup: 1) peningkatan pelayanan dasar; 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan; 3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 4) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; dan 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;
26. Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan;
27. Belum optimalnya Penganggaran CSR dan *Crowdfunding*;
28. Penerapan *e-Government* belum ditindaklanjuti dengan kebijakan/ aturan hukum daerah;
29. Belum adanya standar keamanan informasi;
30. Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dikelola oleh Bidang statistik ;
31. Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral ;
32. Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (*security awarness*);

33. Permasalahan pembudayaan kegemaran membaca di Provinsi Jawa Barat;
34. Akses penggunaan arsip belum efektif;
35. Penelusuran dan identifikasi arsip kesejarahan belum efektif;
36. Belum optimalnya kelengkapan data dan infomasi, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan;
37. Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan;
38. Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat;
39. Munculnya berbagai ancaman serta gangguan terhadap ketenteraman dalam masyarakat sehingga menghambat pembangunan di masyarakat yang berdampak pada potensi kerawanan di masyarakat;
40. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
41. Belum optimalnya strukturisasi organisasi pemerintahan daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
42. Belum optimalnya promosi dan informasi potensi pembangunan di Provinsi Jawa Barat;
43. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; serta
44. Pelayanan publik masih belum sesuai.

2.5 Inovasi

Keberhasilan pembangunan Jawa Barat dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat. Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung oleh inovasi, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan tahunan daerah, maupun dalam program pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi yang dilakukan merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan.

2.5.1 Inovasi Perencanaan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah siklus yang menerus, yang perlu pembaharuan atau inovasi setiap tahun untuk menciptakan terobosan serta percepatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran hingga monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai perangkat daerah yang menangani perencanaan, secara proaktif melahirkan gagasan atau ide yang dituangkan dalam bentuk inovasi perencanaan pembangunan daerah. Beberapa inovasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

2.5.1.1 Warna Jabar

Merupakan aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana bagi seluruh warga Jawa Barat untuk dapat ikut berperan serta dalam proses perumusan kebijakan, yaitu pada penyusunan rencana pembangunan baik jangka Panjang, menengah, maupun rencana tahunan. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada akhir Tahun 2019 meluncurkan aplikasi Warna Jabar dan mulai digunakan pada tahun 2020. Warna Jabar merupakan aplikasi baru yang mendukung aplikasi *e-planning* untuk menampung aspirasi, laporan, masukan ide maupun gagasan dari masyarakat umum terhadap rencana pembangunan yang sedang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya Warna Jabar terintegrasi dengan aplikasi *website* Bappeda Jabar. Sehingga konektivitas, efektif dan efisiensi dalam memberikan masukan, ide, laporan maupun gagasan bagi seluruh warga Jawa Barat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan usulan kegiatan dalam perencanaan pembangunan Jawa Barat dapat menjadi lebih baik lagi.

Gambar 2.26
Aplikasi Warna Jabar

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2020

2.5.1.2 Penerapan Analisa Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH)

Penerapan Analisa Standar Belanja dan Standar Satuan Harga dalam aplikasi Sirampak Sekar, merupakan suatu inovasi yang menjadikan anggaran yang termuat dalam RKPD menjadi lebih tajam. Penentuan anggaran terhadap kegiatan sudah menggunakan standar satuan Analisa Standar Belanja dan Standar Satuan Harga, sehingga ketika proses pembahasan menjadi APBD proses penyesuaian anggaran adalah cukup mengurangi *output* yang tersedia, adapun anggaran secara otomatik akan menyesuaikan.

Analisa Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas biaya yang diperlukan dalam menjalankan suatu kegiatan. Nilai ASB ini didapatkan melalui analisa terhadap peraturan – peraturan yang ada di Kementerian seperti, Permen PU Nomor 45 Tahun 2007, analisa Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditahun sebelumnya, serta analisa perangkat daerah terkait untuk komponen khusus. Dengan adanya ASB, *output* kegiatan yang sama akan memiliki nilai anggaran yang sama untuk setiap perangkat daerah. Penggunaan ASB dalam penyusunan rencana anggaran, sudah digunakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2019 dan

terus berlanjut untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. Selain digunakan dalam penyusunan program dan kegiatan, Analisa Standar Belanja ini juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengusulan hibah, bansos dan bantuan keuangan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan besaran bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam proses penyusunannya, ASB yang bersifat umum disediakan oleh BPKAD, sementara untuk yang bersifat khusus diusulkan oleh perangkat daerah yang telah diintegrasikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digunakan dalam penyusunan RKPD hingga APBD. Nilai ASB ini sudah tersedia di dalam sistem, sehingga tidak perlu dilakukan pengisian manual oleh perangkat daerah, cukup memilih dari menu yang sudah tersedia. Begitu juga saat proses pengusulan Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial, pengusul cukup mengisi data volume usulan sesuai dengan kamus usulan yang tersedia. ASB ini juga sudah terhubung dengan nilai Standar Satuan Harga (SSH), sehingga saat harga barang di dalam SSH tersebut berubah, akan ikut mengubah nilai dari ASB yang ada.

Gambar 2.27
Penggunaan E-ASB di Provinsi Jawa Barat

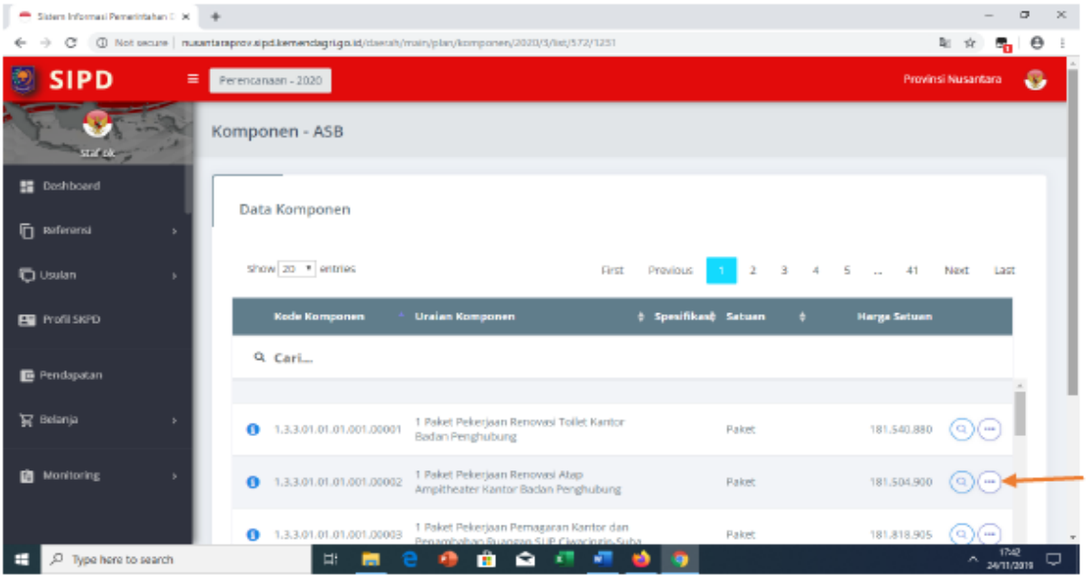

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), 2021

2.5.2 Inovasi Pembangunan Daerah

Berbagai inovasi pembangunan daerah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu Tahun 2018-2020. Melanjutkan budaya untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru, maka untuk Tahun 2022 direncanakan melaksanakan inovasi sebagai berikut:

2.5.2.1 Pikobar

Pusat Koordinasi dan Informasi COVID-19 Jawa Barat (Pikobar) merupakan sebuah sistem yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyajikan informasi, data, dan visualisasi tentang penyebaran, pencegahan, dan penanggulangan pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Informasi yang ditampilkan melalui *website* dan aplikasi *mobile* Pikobar tersebut meliputi perkembangan jumlah kasus, peta sebaran kasus dan lokasi fasilitas kesehatan, daftar pusat panggilan COVID-19 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, dan grafik data kasus Orang Dalam Pengawasan (ODP), PDP Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Positif COVID-19.

Pikobar diresmikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil pada tanggal 4 Maret 2020 di Jabar *Command Center*, menyusul penetapan status Siaga-1 COVID-19 di wilayah Jawa Barat.

Berikut ini 8 (delapan) manfaat yang bisa didapatkan jika menggunakan aplikasi PIKOBAR, yaitu:

1. Menghindari penyebaran *hoaks* COVID-19;
2. Berisi informasi seputar data ODP, PDP dan Positif COVID-19;
3. Terdapat fasilitas nomor darurat untuk penanganan COVID-19;
4. Menampilan video dan grafis;
5. Bisa memberikan bantuan masukan;
6. Deteksi 29 macam penyakit pernafasan;
7. Peningkatan ketepatan pemberian bantuan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kemudahan pemantauan penyaluran bantuan dengan penambahan fitur “Bantuan Sosial”; dan
8. Penyediaan fasilitas telekonsultasi kesehatan mandiri melalui penyediaan fitur “Periksa Mandiri”.

Gambar 2.28
Aplikasi Pikobar

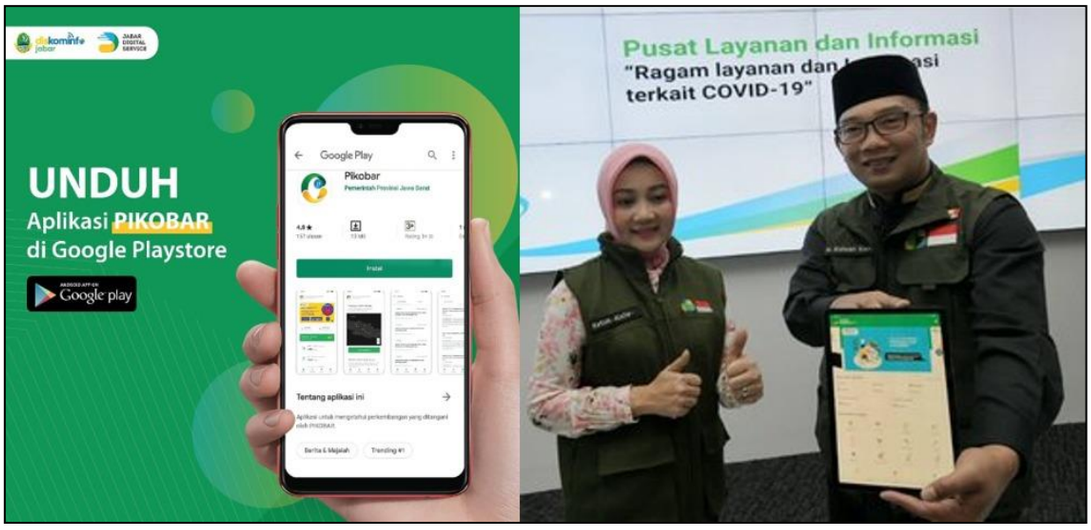

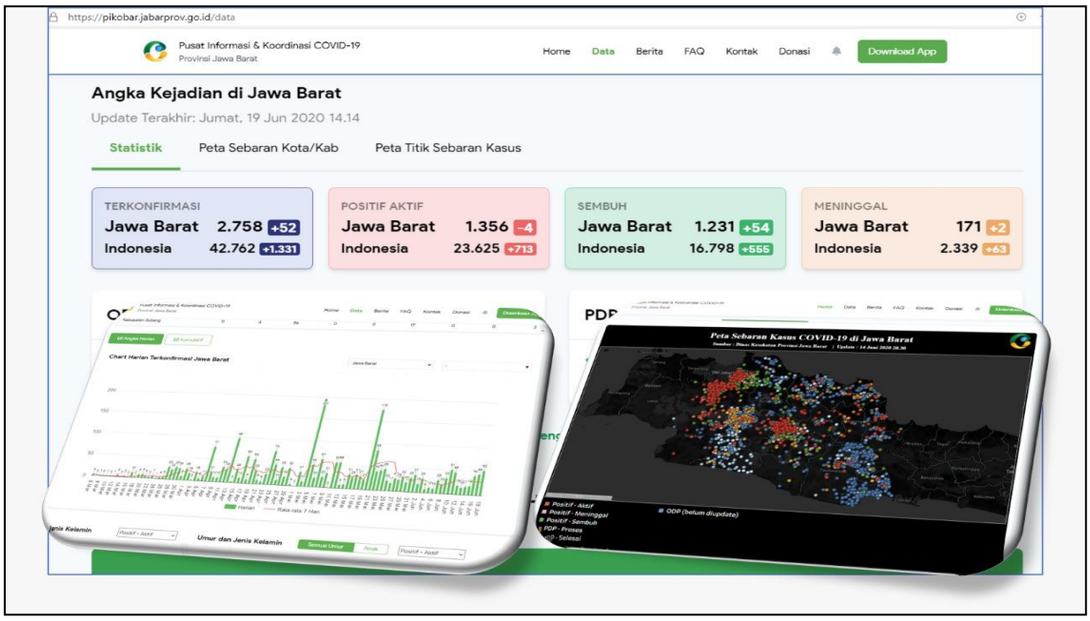

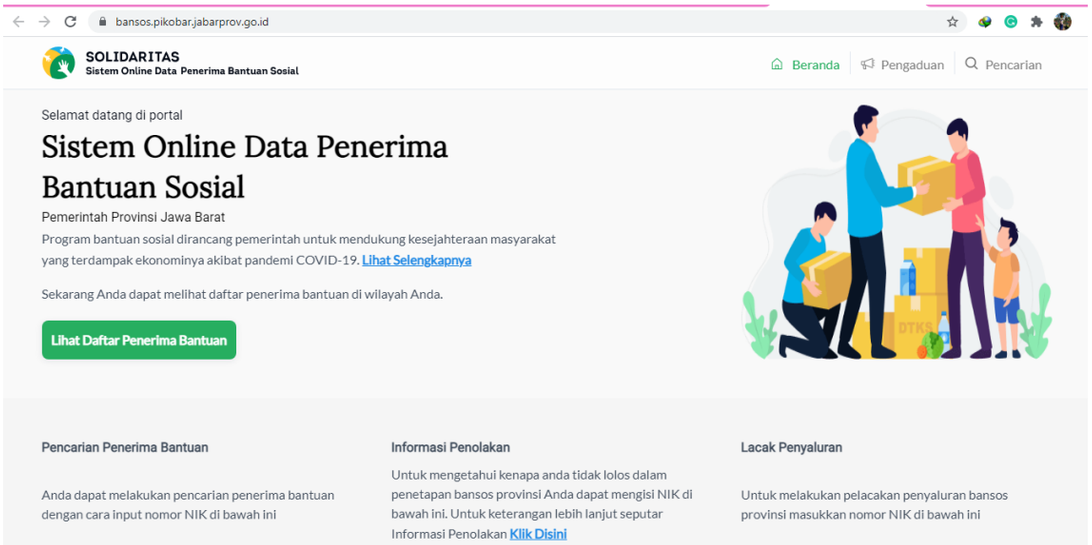

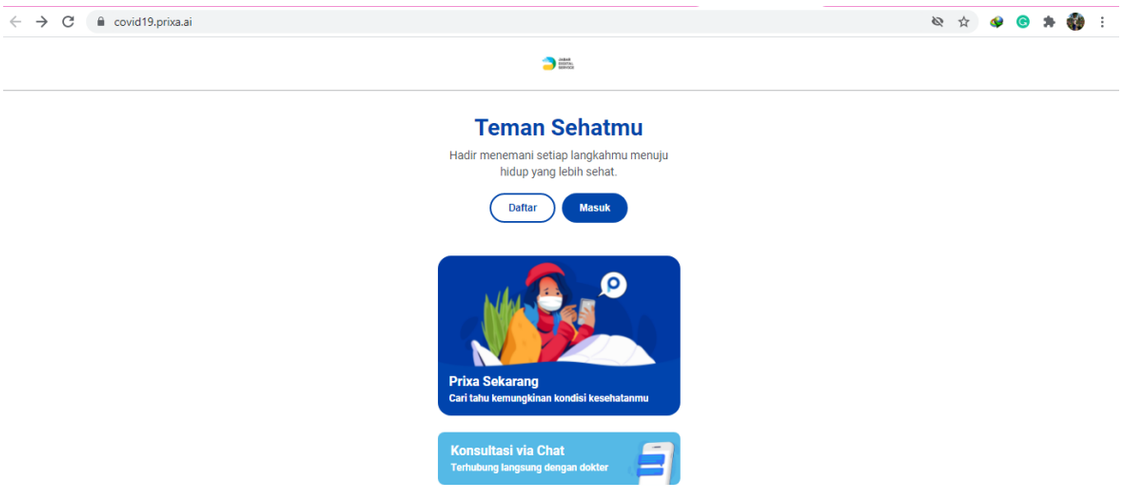

Sumber: Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat, 2021

2.5.2.2 Command Center

Command Center (Pusat Komando) adalah ruangan pusat visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh melalui *online*, *offline*, internal maupun eksternal disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar *video wall.* Fungsi dari *command center* yaitu monitoring kinerja perangkat daerah, monitoring laporan lapangan secara *realtime*, penyajian informasi eksekutif , *video conference*, dan presentasi. Fasilitas *command center* antara lain sistem komunikasi (*seluler*, VOIP *phone*, *video conference*), sistem keamanan (CCTV dan *electronic access), dan fasilitas emergency support.* Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membangun *Command Center* di 27 kabupaten/kota dan ditargetkan selesai pada tahun 2022.

Pada masa pandemi COVID-19 *command center* berperan sebagai pusat informasi penanganan pandemi COVID-19. Pada operasionalnya *command center* menggunakan aplikasi Pikobar sebagai aplikasi utama dalam penanganan pandemi COVID-19.

Gambar 2.29
Command Centre

Sumber: Diskominfo Provinsi Jawa Barat, 2020

2.5.2.3 Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa)

Gerbang Desa merupakan gerakan untuk mewujudkan desa yang mandiri yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan sarana prasarana desa, sehingga mampu menekan angka kemiskinan dan urbanisasi melalui penciptaan lapangan pekerjaan diperdesaan. Gerbang Desa melaksanakan skema yang sudah disusun secara sistematis, skema tersebut disajikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 2.30
Model Kerangka Pikir Gerbang Desa

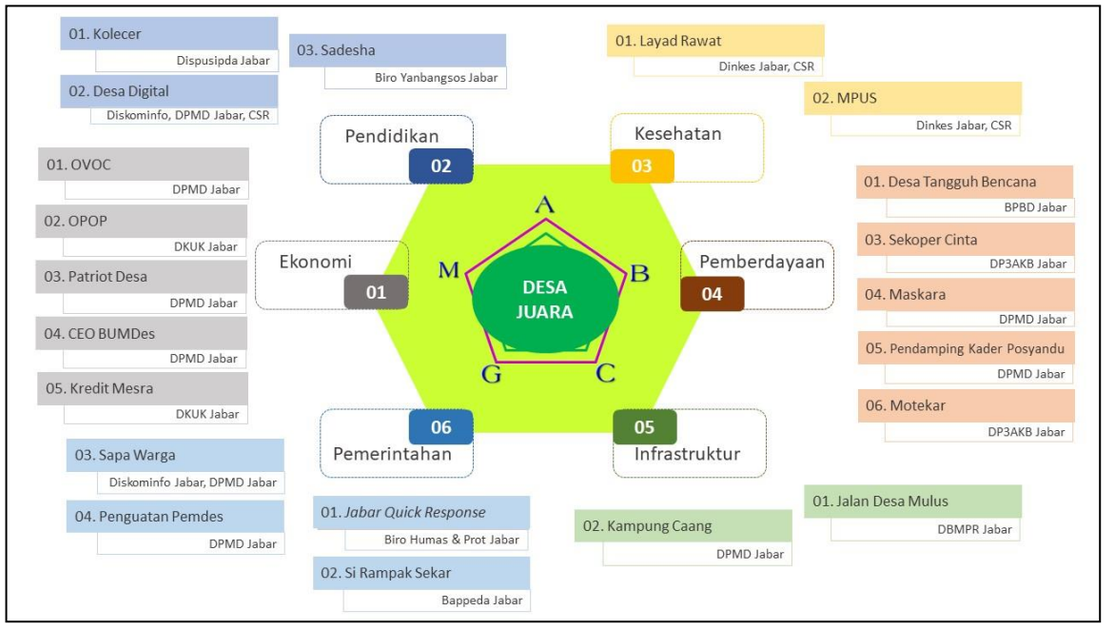

Sumber: DPM Desa Provinsi Jawa Barat, 2021

Gambar 2.31
Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa)

Sumber: DPM Desa Jawa Barat, 2020

Gambar 2.32
Gerakan Membangun Desa Jawa Barat

Sumber: DPM Desa Provinsi Jawa Barat, 2020

2.5.2.4 Creative Center

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membuat *Creative Center* di sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat, sebagai wadah untuk mewujudkan kreativitas, ide dan gagasan anak-anak muda untuk menghasilkan sebuah karya inovasi.

Pada tahun 2020 pembangunan gedung *Creative Center* sudah selesai di Kabupaten Sumedang, Kota Bogor dan Kota Cirebon, Sedangkan pada tahun 2021 pembangunan gedung *Creative Center* akan dilanjutkan di Kabupaten Purwakarta dan Kota Bekasi. Diharapkan kehadiran *Creative Center* bisa meningkatkan perekonomian kreativitas masyarakat di kabupaten dan kota tersebut.

Gambar 2.33
Creative Center

Sumber: Disparbud Provinsi Jawa Barat, 2020

2.5.2.5 Inovasi Pembangunan Infrastruktur

Jawa Barat berkomitmen menjadi provinsi dengan tingkat konektivitas wilayah tertinggi. Adapun tahapan pembangunan Bandara Kertajati direncanakan sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap 1A (Tahun 2018-2024), Tahap 1B (Tahun 2024-2027), Tahap 2 (Tahun 2027-2030), Tahap 3 (Tahun 2030-2032). Skema Pendanaan Bandara Kertajati dengan ekuitas dan utang. Ekuitas diperoleh dari PT Jasa Sarana, Provinsi Jawa Barat, Investor RDPT Ekuitas, dan PT Angkasa Pura II. Sementara utang bersumber dari Sindkikasi Perbankan.

Gambar 2.34
BIJB Kertajati

Sumber: BIJB Kertajati, 2020

2.5.2.6 Citarum Harum

Program Citarum Harum merupakan upaya untuk merevitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Nasional Citarum Harum yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Inovasi yang dilakukan adalah pengelolaan pengendalian DAS secara masif, multi-sektor dan lintas wilayah kewenangan yang sinergis antara Pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat dengan melibatkan unsur TNI, POLRI, komunitas filantropi dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya dibentuk Tim DAS Citarum yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota di DAS Citarum, TNI dan POLRI, yang beroperasi melalui Satuan Tugas dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagai Komandan Satuan Tugas.

Pelaksanaan Program Citarum Harum dilaksanakan secara tematik dan holistik melalui penanganan menyeluruh dan terfokus pada upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan fungsi DAS. Program yang dilakukan disesuaikan dengan berbagai permasalahan pencemaran dan kerusakan di DAS Citarum, meliputi penanganan lahan kritis, penanganan limbah industri, penanganan limbah domestik, penanganan persampahan, penanganan limbah peternakan, penanganan limbah perikanan dari keramba jaring apung, pemantauan kualitas air, pengendalian pemanfaatan ruang, penegakan hukum, pengelolaan sumber daya air, pariwisata, edukasi dan hubungan masyarakat. Pendanaan dari berbagai program penanganan bersumber dari APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui APBN; kolaborasi APBD kabupaten/kota; PHLN; Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP); swadaya masyarakat; serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat.

Berbagai penanganan dilaksanakan oleh multisektor secara terintegrasi sesuai pembagian kewenangan, yang tertuang dalam Rencana

Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Tahun 2019-2025. Rencana Aksi pada dasarnya mengintegrasikan program dan kegiatan pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan tujuan utama (*ultimate goal*) untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA) hingga mencapai 40,86 pada Tahun 2025, yang menunjukan adanya perbaikan status mutu sungai dari kategori cemar berat menjadi cemar sedang.

Kinerja pada setiap program diukur melalui indikator dan target sebagai berikut:

Tabel 2.64
Target *Outcome* Kinerja Program Tahun 2025

Program	Indikator *Outcome*	Target Tahun 2025
Penanganan Lahan Kritis	Luas lahan kritis yang ditangani	199.514, 14 Ha
Penanganan Limbah Industri	Jumlah industri yang telah terawasi dan taat terhadap izin	1242 industri
Penanganan Limbah Peternakan	Jumlah ternak yang diintervensi	13.000 ternak
Penanganan Air Limbah Domestik	Jumlah desa yang terlayani	629 desa bebas BABS dan sanitasi layak
Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	Seluruh sampah dikelola (100%)
Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersedianya data ketidaksesuaian ruang	Terbangunnya sistem pemanfaatan ruang berbasis GIS
Pemantauan Kualitas Air	Jumlah titik pantau	329 titik
Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengurangan luas genangan banjir	7 lokasi banjir
Penataan Keramba Jaring Apung	Jumlah KJA yang tertata	3 Waduk
Penegakan Hukum	Jumlah kasus tertangani	Menurunnya jumlah kasus pembuangan limbah
Pariwisata	Jumlah lokasi	6 Lokasi
Edukasi	Jumlah industri teredukasi	350 industri
	Jumlah institusi pendidikan PHBS & 3R	390 institusi pendidikan
Hubungan Masyarakat	Jumlah desa prioritas terintervensi kampanye PHE	629 desa

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021

Penanganan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum dilaksanakan di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota dengan luas penanganan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.65
Penanganan Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum yang dilaksanakan 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	Luas Adm (Ha)	Luas Dalam DAS (Ha)	Persentase Luas DAS (%)
1	Bandung	174.304,12	134.384,06	77,10
2	Bandung Barat	128.468,03	128.305,52	99,87
3	Subang	216.871,79	95,16	0,04
4	Bekasi	125.172,77	46.655,77	37,27
5	Bogor	299.225,41	44.623,40	14,91
6	Cianjur	363.409,06	127.626,97	35,12
7	Cimahi	4.248,10	4.248,10	100,00
8	Garut	310.605,53	1.198,39	0,39
9	Karawang	191.540,46	94.026,31	49,09
10	Kota Bandung	16.681,01	16.681,01	100,00
11	Purwakarta	99.407,63	70.788,95	71,21
12	Sukabumi	416.338,79	379,61	0,09
13	Sumedang	156.916,42	13.213,51	8,42
Total		**2.503.189,13**	**682.227**	**27.25**

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021

Adapun lingkup penanganan meliputi wilayah dari hulu hingga hilir DAS Citarum dengan fokus penanganan pada setiap segmen disesuaikan dengan permasalahan pada masing-masing segmen. Lingkup wilayah penanganan disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.35
Fokus Penanganan DAS Citarum

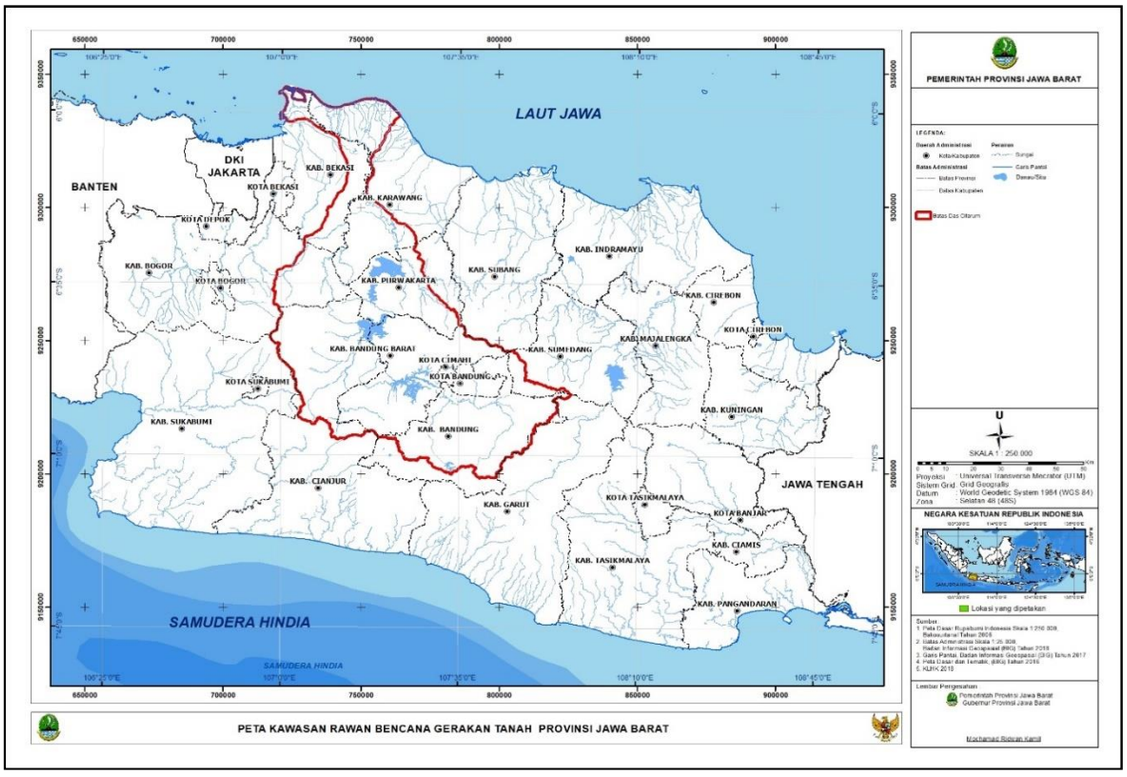

Sumber: Hasil Pengolahan dari SK MENLHK SK.304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Peta Daerah Aliran Sungai, 2018

Gambar 2.36
Citarum Harum Juara

Sumber: DLH Provinsi Jawa Barat, 2020

2.5.2.7 *One Pesantren One Product* (OPOP) dan Pesantren Juara

One Pesantren One Product (OPOP) merupakan salah satu dari program Pesantren Juara yang fokus pada penguatan ekonomi Pesantren. OPOP bertujuan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi Pesantren

dengan cara membangun bisnis Pesantren. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan dalam mencari produk yang laku di pasaran, membangun forum pembeli, memberikan pelatihan, dan pendampingan pada aktivitas produksi, pemasaran, dan keuangan.

Gambar 2.37
***One Pesantren One Product* (OPOP) dan Pesantren Juara**

Sumber: Dinas KUK Provinsi Jawa Barat, 2020

2.5.2.8 JABAR MASAGI

Jabar MASAGI merupakan program Pendidikan karakter berbasis budaya. Program ini muncul atas kekhawatiran kondisi siswa-siswi di Jawa Barat yang mulai kehilangan identitas budaya lokal, nilai *IQ-EQ-SQ-PQ* yang belum seimbang, dan kurikulum formal yang tidak bisa mengajarkan mata pelajaran, nilai-nilai lokal dan moralitas dalam waktu yang bersamaan. Lebih lanjut, program ini merupakan upaya Provinsi Jawa Barat menumbuhkan manusia Jawa Barat yang harmoni dengan diri, alam, dan seluruh mahluk hidup untuk mewujudkan nilai-nilai universal yang dititipkan oleh Sang Maha Pencipta.

Gambar 2.38
Masagi

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2020

2.5.2.9 KOLECER dan CANDIL

Kolecer atau Kotak Literasi Cerdas adalah sebuah inovasi perpustakaan mini yang diletakkan di jalur-jalur pejalan kaki. Sementara Candil atau Maca Dina *Digital Library* adalah sebuah aplikasi *e-library* yang memuat berbagai *e-book* dengan pengarang dari seluruh Indonesia.

Gambar 2.39
Kolecer dan Candil

Sumber: Dispusipda Provinsi Jawa Barat, 2018

2.5.2.10 Layad Rawat

Layad Rawat merupakan sebuah inovasi pelayanan kesehatan dengan konsep mendatangi warga hanya dengan menghubungi pusat panggilan 119. Program ini ditujukan untuk Warga Jawa Barat yang sedang sakit dan tidak mampu ke rumah sakit dalam hal fisik dan finansial. Melalui program ini, warga Jawa Barat yang kurang mampu dapat menikmati layanan kesehatan istimewa untuk mencegah potensi kondisi kesehatan yang semakin buruk dengan pertolongan pertama.

Gambar 2.40
Layad Rawat

Sumber: Dinkes Provinsi Jawa Barat, 2019

2.5.2.11 KREDIT MESRA (Masyarakat Ekonomi Sejahtera)

Kredit Mesra adalah program kredit mikro yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UKM dari masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bekerja sama dengan rumah ibadah sebagai mitra strategis dalam penyaluran kredit. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih religius.

Program ini selaras dengan misi Jawa Barat untuk menjadikan rumah ibadah sebagai pusat peradaban yang berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.41
Kredit Mesra

Sumber: Dinas KUK Provinsi Jawa Barat, 2019

2.5.2.12 Jabar Saber *Hoaks*

Jabar SABER *Hoaks* adalah kanal yang bertugas untuk verifikasi informasi/berita yang beredar di masyarakat. Tim akan rutin memberikan informasi dan mengajak masyarakat ikut aktif melawan berita bohong.

Berita bohong begitu meresahkan, menghambat produktivitas hingga merusak kedamaian. Keadaan yang kondusif adalah pondasi dasar dalam membangun Jawa Barat Juara Lahir Batin. Jabar Saber *Hoaks* hadir sebagai instrumen penyangga agar keadaan tetap kondusif.

Gambar 2.42
Jabar Saber *Hoaks*

Sumber: Diskominfo Provinsi Jawa Barat, 2019

2.5.2.13 SAMBARA (Samsat *Mobile* Jawa Barat)

SAMBARA adalah inovasi yang memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Bank BJB, Gerai Modern, Loket PPOB.

Gambar 2.43
Sambara

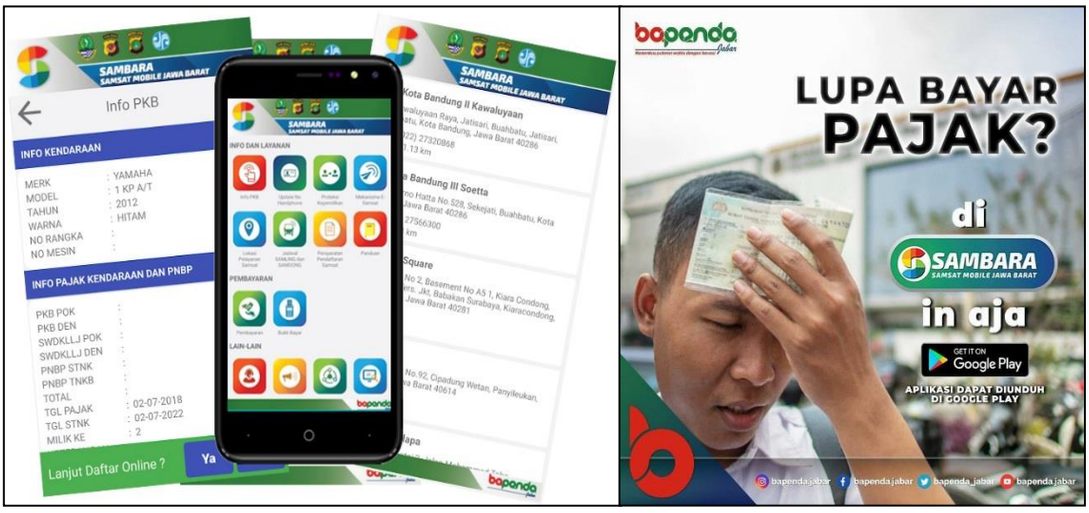

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Barat, 2020

2.5.2.14 JABAR *QUICK RESPONSE*

Merupakan kanal aduan kemanusiaan bagi masyarakat Jawa Barat. Jabar *Quick Response* (JQR) hadir untuk memberikan solusi atau pertolongan pertama bagi permasalahan yang bersifat kemanusiaan dan darurat.

Gambar 2.44
Jabar *Quick Response*

Sumber: Diskominfo Provinsi Jawa Barat, 2018

2.5.2.15 Petani Milenial

Program Petani Milenial bercita-cita mendorong regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian Jawa Barat yang memiliki inovasi, gagasan, dan kreativitas. Melalui pemanfaatan teknologi digital, petani milenial akan menggerakkan kewirausahaan bidang agrikultur yang menjadikan wajah pertanian menjadi lebih segar dan atraktif untuk bisa berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.

Saat ini, sektor pertanian nampaknya belum menjadi magnet pekerjaan bagi generasi milenial di Provinsi Jawa Barat. Jumlah petani muda di Provinsi Jawa Barat masih relatif kecil. Padahal kita butuh tenaga baru di bidang pertanian yang sampai saat ini adalah sektor penyumbang ekonomi terbesar ke-3 di Provinsi Jawa Barat. Program Petani Milenial diharapkan dapat menyelesaikan masalah keterbatasan tenaga kerja sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan mencapai swasembada pangan.

Beberapa hal yang dilakukan oleh para petani milenial antara lain:

1. Inventarisasi potensi lahan;
2. Inventarisasi peluang pasar;
3. Penentuan komoditas pertanian;
4. Pendataan petani milenial;
5. Pengembangan kapasitas petani milenial;
6. Pemberian bantuan benih, bibit, pupuk, pestisida, dan peralatan; dan
7. Pemberian fasilitasi pembiayaan dan pemasaran produk.

Gambar 2.45
Petani Milenial

Sumber: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tahun 2022 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2022. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Provinsi Jawa Barat, baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain kondisi perekonomian pada masa pandemi COVID-19, perekonomian regional, nasional maupun global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2022. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisis yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2022 diharapkan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2022 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2020 dan awal tahun 2021, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2021 dan 2022. Pada triwulan-I 2020, dunia dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang membuat kondisi ekonomi global memburuk hingga turut berdampak pada terkontraksinya perekonomian di Provinsi Jawa Barat.

Implikasi pandemi COVID-19 di seluruh dunia telah mengakibatkan korban jiwa serta kerugian material sehingga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut tentunya mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi yang berfokus pada belanja di sektor kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta penanganan dampak ekonomi yang didalamnya termasuk dunia usaha dan masyarakat terdampak.

Seiring belum meredanya pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat yang dimulai sejak 2 Maret 2020, dan terjadi fluktuasi penambahan kasus di berbagai wilayah di Provinsi Jawa Barat, program vaksinasi dari pemerintah, serta peningkatan jumlah kasus secara signifikan pasca Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2021. Implementasi penanganan pandemi COVID-19 tidak terlepas dari kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan baik di tingkat primer dalam melakukan deteksi dini maupun di tingkat lanjutan.

Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) bahwa untuk setiap 1000 penduduk dibutuhkan 1 (satu) tempat tidur rawat inap rumah sakit, sehingga dengan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat sebesar kurang lebih 49 juta jiwa maka dibutuhkan total Tempat Tidur (TT) sebanyak 49 ribu TT. Di tingkat provinsi kebutuhan tempat tidur rawat inap di rumah sakit baru mencapai 7,9 persen dengan rentang dari 1,85 persen sampai dengan 53 persen. Angka ini masih jauh dari yang diharapkan. Tingkat keterisian TT Isolasi COVID-19 di Rumah Sakit atau *Bed Ocupancy Rate* (BOR) per tanggal 20 Juni 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 86,03 persen dimana angka tersebut merupakan BOR tertinggi sepanjang tahun 2021, setelah BOR tanggal 11 Januari 2021 yaitu sebesar 81,61 persen yang diakibatkan Libur Panjang Natal dan Tahun Baru. Selain kebutuhan TT, permasalahan penting lain yang perlu menjadi perhatian adalah persoalan data. Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan ketersediaan sarana prasarana di rumah sakit akan mempengaruhi keserasian dan kualitas data. Pada akhirnya akan mempengaruhi ketepatan dalam pengambilan kebijakan. Sementara itu dalam menangani peningkatan kasus pandemi COVID-19 ini langkah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah memberlakukan kebijakan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat, dimana hal ini akan berimplikasi kepada penyesuaian-penyesuian skenario pembangunan yang diantaranya dipengaruhi oleh kebutuhan mobilisasi sumber daya yang ada.

Pada tahun 2022 kondisi kesehatan masyarakat akibat pandemi COVID-19 diprediksi membaik sehingga perekonomian Jawa Barat diperkirakan sudah mulai bangkit. Prediksi perbaikan kondisi perekonomian berdasarkan kepada asumsi telah terdistribusinya vaksin COVID-19, meningkatnya aktivitas di beberapa sektor lapangan usaha, dimulainya kembali pembangunan proyek–proyek infrastruktur berbasis padat karya dan digitalisasi perdagangan.

Pelaksanaan vaksinasi sebagai titik tolak pemulihan perekonomian. Selain vaksinasi, implementasi UU Cipta Kerja menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi. Melalui UU Cipta Kerja terkait peningkatan ekosistem investasi, pemberdayaan UMKM, kemudahan untuk berusaha, dan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020, Awal Tahun 2021 dan Prediksi Tahun 2022

Kondisi ekonomi daerah pada tahun 2020, awal tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022 merupakan gambaran indikator makro Jawa Barat yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, ekspor dan impor, inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan yang diuraikan sebagai berikut.

3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I-2021 melanjutkan perbaikan dengan mencatat kontraksi yang semakin kecil menjadi -0,83 persen (*y-o-y*) dari -2,39 persen (*y-o-y*) pada triwulan IV-2020. Perbaikan ini searah dengan perekonomian nasional yang juga mengecil kontraksinya -0,74 persen (*y-o-y*). Dari sisi domestik, perbaikan ekonomi bersumber dari konsumsi rumah tangga yang meningkat dari triwulan sebelumnya, searah dengan membaiknya aktivitas ekonomi yang turut mendorong kenaikan pendapatan dan daya beli masyarakat. Selain itu peningkatan konsumsi juga didorong adanya kenaikan UMK pada

mayoritas kabupaten/kota, di samping berlanjutnya bantuan sosial yang turut menjaga daya beli masyarakat kelompok bawah. Namun demikian, akselerasi konsumsi rumah tangga tertahan oleh PPKM dan pengurangan cuti bersama pada Maret 2021.

Di sisi lain, realisasi investasi tercatat meningkat di triwulan I-2021 seiring dengan realisasi PMA oleh korporasi yang lebih tinggi dibandingkan PMDN. Optimisme investor perlahan membaik di tengah program vaksinasi yang terus bergulir di Indonesia. Dari sisi eksternal, peningkatan permintaan global berdampak pada ekspor Jawa Barat yang meningkat signifikan di triwulan I-2021.

Dari sisi lapangan usaha**,** beberapa sektor terus melanjutkan perbaikan, terutama perdagangan, pertanian, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan. Perbaikan daya beli masyarakat serta mobilitas masyarakat yang relatif meningkat mendorong kinerja sektor perdagangan. Kondisi yang sama terjadi pada sektor konstruksi yang tumbuh positif sejalan dengan pembangunan proyek infrastruktur yang mulai berjalan kembali. Di sisi lain, pergeseran musim tanam di tahun 2020 membawa keuntungan tersendiri bagi para petani di Provinsi Jawa Barat dengan terjadinya panen sejak Maret 2021, sehingga mengangkat kinerja sektor pertanian. Namun demikian, perbaikan permintaan global dan domestik belum cukup mendorong kinerja sektor industri pengolahan yang justru mengalami kontraksi yang lebih dalam. Perbaikan kinerja pada subsektor industri otomotif dan elektronik kurang mampu mengompensasi penurunan kinerja industri TPT yang masih tertekan akibat permintaan yang belum membaik, serta berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di subsektor tersebut.

Perekonomian Jawa Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) triwulan I-2021 mencapai Rp535,89 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 mencapai Rp368,28 triliun.

Ekonomi Jawa Barat triwulan I-2021 terkontraksi sampai -0,83 persen, terjadi penurunan dibanding capaian triwulan I-2020 yang tercatat sebesar 2,77 persen (*y-on-y*).Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan ini sebagai dampak dari masih berlangsungnya

pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas produksi di beberapa lapangan usaha.

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran Triwulan I-2020

Pertumbuhan Tiga Lapangan Usaha dengan Pertumbuhan NTB Terendah Triwulan I-2021 (y-on-y)

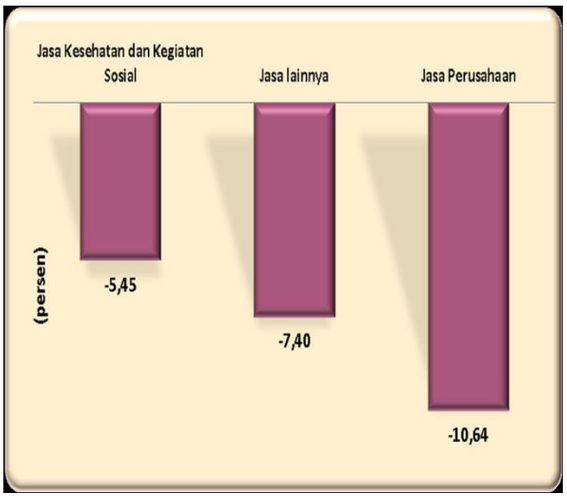

Sumber Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha

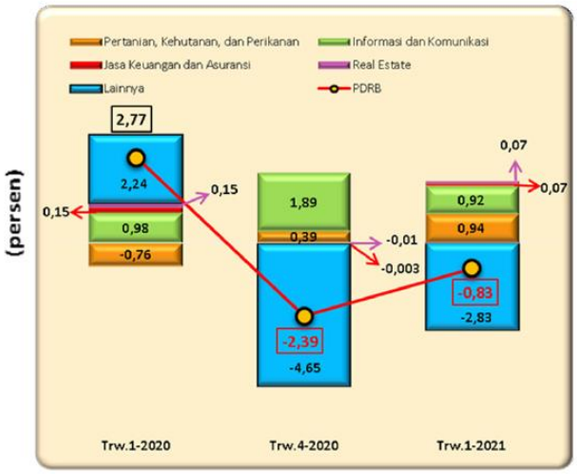

Secara umum Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung memberikan dampak kepada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I- 2021. Pada PDRB dari sisi pengeluaran kontraksi pada triwulan I- 2021 terhadap triwulan I-2020 (*y-on-y*) terjadi pada seluruh komponen. Kontraksi tertinggi terjadi pada Komponen Perubahan Inventori sebesar 93,65 persen; diikuti Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,63 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,96 persen; dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 0,16 persen. Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan I-2021 (*y-on-y*) yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) memberikan sumbangan negatif sebesar 1,22 persen sementara Pembentukan Modal Tetap Bruto memberikan sumbangan positif sebesar 0,59 persen. Komponen lainnya memberikan sumbangan negatif sebesar 0,20 persen terhadap perekonomian Jawa Barat.

Gambar 3.2
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan I-2021

Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Triwulan I-2021 (y-on-y)

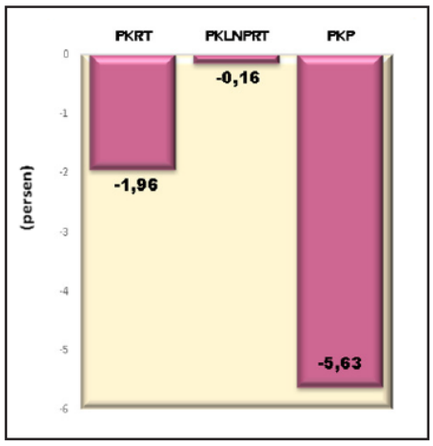

Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

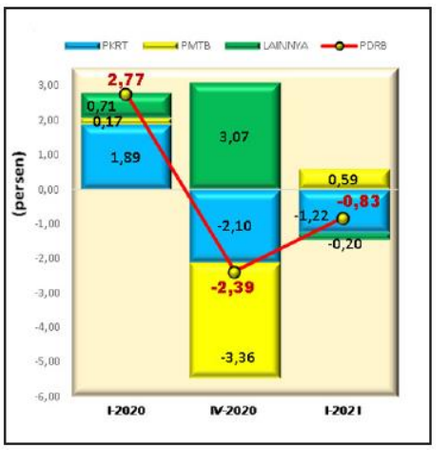

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat,2021

3.1.1.2 Ekspor dan Impor

Nilai ekspor Jawa Barat Mei 2021 mencapai USD 2,25 miliar atau menurun 21,53 persen dibanding April 2021. Akan tetapi jika dibandingkan Mei 2020 naik 49,94 persen. Secara kumulatif, nilai ekspor Jawa Barat Januari-Mei 2021 mencapai USD 13,27 miliar atau meningkat 26,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2020, demikian juga ekspor Non Migas mencapai USD 13,21 miliar atau meningkat 26,85 persen. Penurunan nilai ekspor Non Migas terbesar Mei 2021 terhadap April 2021 terjadi pada golongan Kendaraan dan Bagiannya (USD 169,35 juta), diikuti Mesin dan Peralatan Mekanis (USD 77,99 juta) serta Alas Kaki (USD 54,00 juta).

Nilai ekspor 10 (sepuluh) golongan barang utama Mei 2021 seluruhnya mengalami penurunan dibanding April 2021, dengan rata-rata penurunan sebesar 21,96 persen. Jika dibanding Mei tahun sebelumnya menunjukkan ekspor bulan ini mengalami kenaikan rata-rata sebesar 63,83 persen. Pada Mei 2021 seluruh golongan barang utama mengalami penurunan nilai ekspor dibanding bulan sebelumnya, tidak ada yang mengalami kenaikan. Penurunan terbesar terjadi pada golongan Kendaraan dan Bagiannya sebesar USD 169,35 juta (-39,30 persen), diikuti

oleh Mesin dan Peralatan Mekanis sebesar USD 77,99 juta (-26,76 persen) serta Alas Kaki sebesar USD 54,00 juta (-29,82 persen).

Nilai impor Jawa Barat Mei 2021 mencapai USD 0,93 miliar atau turun 11,38 persen dibanding April 2021. Akan tetapi jika dibanding Mei 2020 naik 99,21 persen. Penyumbang Penurunan nilai impor Non Migas terbesar Mei 2021 terhadap April 2021 terjadi pada golongan Kapas (USD 15,24 juta), diikuti oleh Plastik dan Barang dari Plastik (USD 9,53 juta), serta Mesin dan Perlengkapan Elektrik (USD 5,86 juta).

Dilihat dari 10 (sepuluh) golongan barang utama, nilai impor pada Mei 2021 di Jawa Barat sebagian besar mengalami penurunan dibanding April 2021 dengan rata-rata penurunan sebesar 2,46 persen. Apabila dilihat lebih rinci, diketahui bahwa penurunan terbesar dialami golongan Kapas sebesar USD 15,24 juta (-37,86 persen), diikuti Plastik dan Barang dari Plastik sebesar USD 9,53 juta (-11,44 persen), serta golongan Mesin dan Perlengkapan Elektrik sebesar USD 5,86 juta (-2,91 persen).

Rata-rata nilai impor dari 13 (tiga belas) negara mitra utama menurun 5,45 persen dibanding bulan sebelumnya. Kondisi tersebut disebabkan ada 7 (tujuh) negara mitra utama impor Jawa Barat mengalami penurunan, sedangkan 6 (enam) negara lainnya mengalami peningkatan. Penurunan terbesar berasal dari Jepang sebesar USD 33,26 juta (-27,90 persen), diikuti oleh Thailand sebesar USD 8,11 juta (-23,88 persen) serta Malaysia sebesar USD 6,56 juta (-29,59 persen). Secara kumulatif Impor Non Migas Jawa Barat Januari-Mei 2021 yang terbesar berasal dari Tiongkok senilai USD 1.377,72 juta, disusul Korea Selatan senilai USD 916,99 juta, dan Jepang senilai USD 528,61 juta, dengan peran ketiganya mencapai 63,58 persen terhadap total nilai impor non migas.

Kontribusi dari 13 (tiga belas) mitra dagang utama selama periode Januari-Mei 2021 mencapai 93,33 persen dari total impor Non Migas. Sementara itu ASEAN berperan sekitar 15,65 persen, sedangkan Amerika dan Eropa berkontribusi sebesar 9,41 persen.

Neraca perdagangan Jawa Barat Mei 2021 mengalami surplus dari sisi nilai sebesar USD 1,33 miliar yang ditunjang oleh surplus komoditi Non Migas sebesar USD 1,41 miliar, sedangkan komoditi Migas defisit sebesar USD 82,98 juta. Dari sisi volume perdagangan luar negeri, pada bulan Mei 2021 terjadi surplus sebesar 269,65 ribu ton, yang disumbang oleh surplus

komoditi Non Migas sebesar 411,75 ribu ton, sedangkan komoditi Migas defisit sebesar 142,10 ribu ton. Dilihat dari transaksi perdagangan Non Migas dengan 13 negara mitra dagang utama, pada periode Mei 2021, Jawa Barat mengalami defisit neraca perdagangan dengan Korea Selatan, Tiongkok, Taiwan, serta Hongkong senilai USD 175,67 juta, meningkat dibanding bulan sebelumnya yang defisitnya sebesar USD 121,67 juta. Sedangkan perdagangan Non Migas dengan negara utama lainnya menunjukkan surplus. Surplus neraca perdagangan terbesar adalah dengan Amerika Serikat yang mencapai USD 357,42 juta. Kondisi diatas digambarkan dengan grafik sebagai berikut.

Gambar 3.3
Perkembangan Nilai Ekspor Migas dan Non Migas
Tahun 2010-2021 (Juta USD)

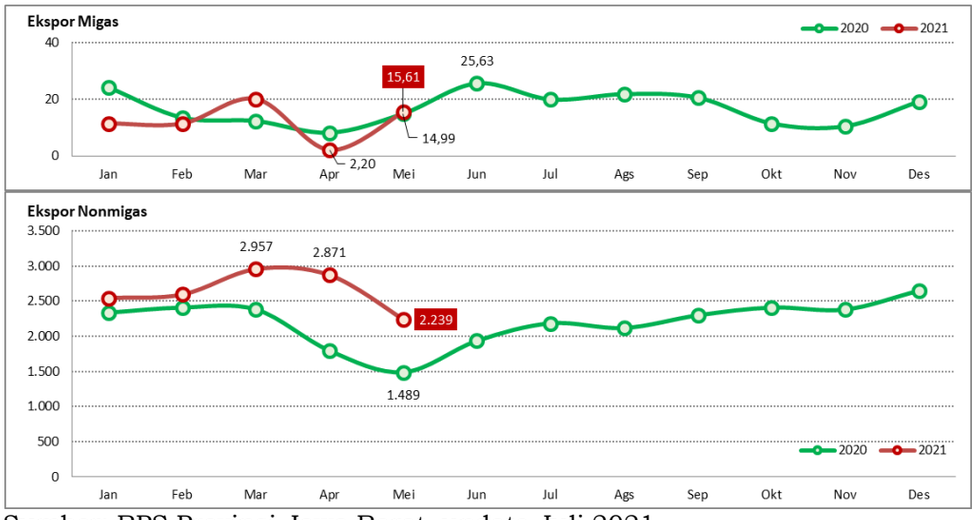

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, update Juli 2021

Gambar 3.4
Perkembangan Nilai Impor Migas dan Non Migas
Tahun 2020-2021

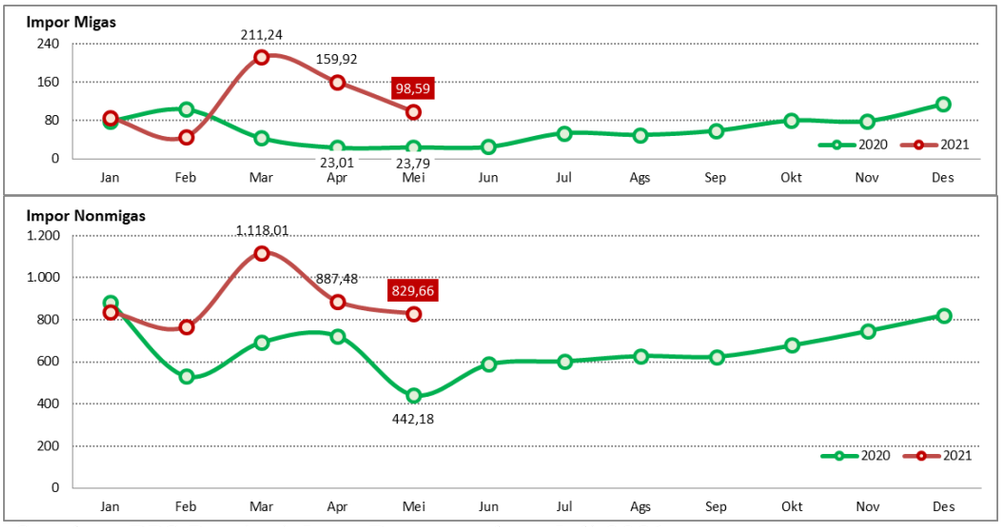

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, update Juli 2021

3.1.1.3 Inflasi

Pada Juni 2021, IHK Gabungan Jawa Barat yang meliputi 7 (tujuh) kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya mengalami penurunan. Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,78 pada Mei 2021 menjadi 107,53 pada Juni 2021; dengan demikian terjadi deflasi sebesar 0,23 persen. Laju inflasi tahun kalender "*year to date*" (Januari - Juni 2021) sebesar 0,73 persen dan laju inflasi dari tahun ke tahun "*year on year*" (Juni 2021 terhadap Juni 2020) tercatat sebesar 1,46 persen.

Dari 7 (tujuh) kota pantauan IHK di Provinsi Jawa Barat Juni 2021 seluruhnya mengalami deflasi dengan deflasi tertinggi di Kota Bekasi sebesar 0,33 persen dan deflasi terendah di kota Tasikmalaya sebesar 0,05 persen. Deflasi di Kota Bogor sebesar 0,17 persen; Kota Sukabumi 0,12 persen; Kota Bandung 0,09 persen, Kota Cirebon 0,17 persen; dan Kota Depok 0,29 persen.

Gambar 3.5
Perkembangan Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Provinsi Jawa Barat

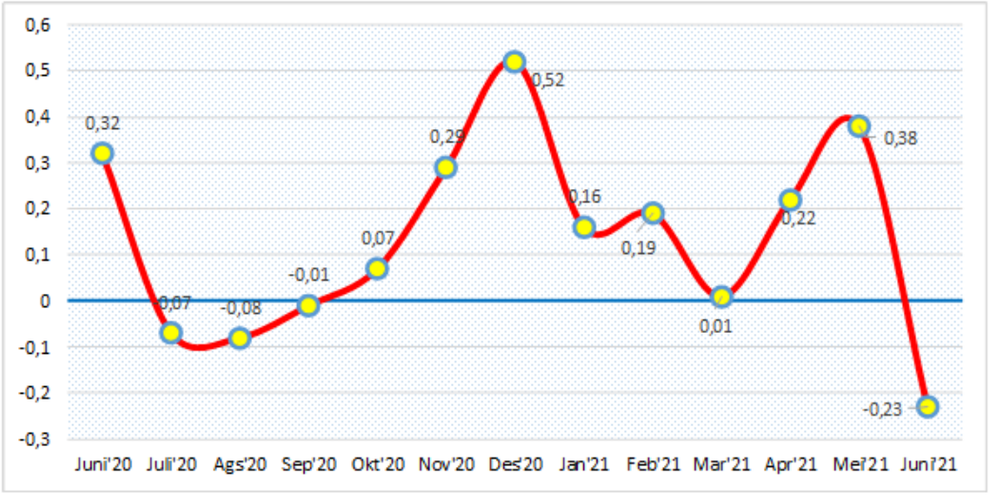

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, update Juli 2021
Keterangan: Tahun 2020 dan 2021 Menggunakan IHK Tahun Dasar 2018=100

Andil deflasi diberikan oleh 11 (sebelas) kelompok pengeluaran yaitu Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 0,82 persen; Kelompok Pakaian & Alas Kaki sebesar 0,04 persen; Kelompok Transportasi sebesar 0,61 persen; serta Kelompok Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,01 persen. Yang mengalami inflasi yaitu Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,03 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,26 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga & Budaya sebesar 0,15 persen; Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran sebesar 0,26 persen; dan Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya sebesar 0,10 persen. Sementara Kelompok Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah dan Kelompok Pendidikan tidak mengalami perubahan indeks harga.

3.1.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2021 sebesar 8,92 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 9 (sembilan) orang penganggur. Pada Februari 2021, TPT mengalami peningkatan sebesar 1,21 persen poin dibandingkan keadaan Februari 2020 sebesar 7,71 persen pada Februari 2020, namun mengalami penurunan sebesar 1,54 persen

poin dibandingkan dengan keadaan TPT pada Agustus 2020 sebesar 10,46 persen.

Gambar 3.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat
Februari 2020 – Februari 2021 (Persen)

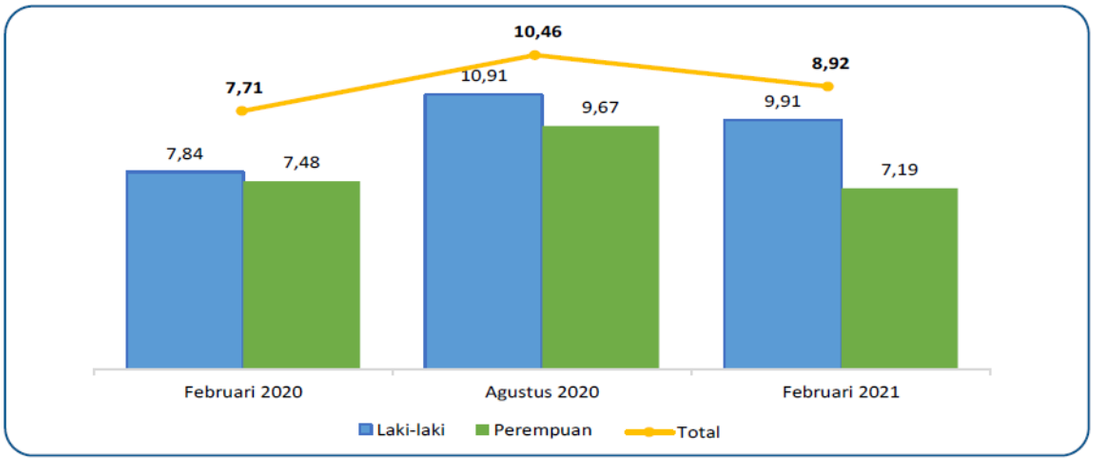

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. 2021

Ketenagakerjaan mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan rumah tangga di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 yaitu sebanyak 24,50 juta orang, turun 0,01 juta orang dibanding Februari 2020. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran, pada februari 2021, sebanyak 22,31 juta orang adalah penduduk bekerja sedangkan sebanyak 2,19 juta orang menganggur. Sementara bandingkan dengan februari 2020, jumlah penduduk yang bekerja turun sebanyak 0,31 juta orang dan jumlah penduduk yang menganggur naik sebanyak 0,30 juta orang.

Menurunnya jumlah angkatan kerja pada februari 2021, berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan penurunan dari bulan februari 2021. Penurunan sebanyak 1,60 persen pada bulan februari 2021 membuat TPAK hanya mencapai angka 64,83 persen secara keseluruhan. Sedangkan jika berdasarkan jenis kelamin, terjadi penurunan TPAK laki-laki sebanyak 1,92 persen dan TPAK perempuan turun sebanyak 1,01 persen pada periode Februari 2020-2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2020 sebesar 7,71 persen naik menjadi 8,92 persen pada Februari 2021. Ditinjau dari

tingkat pendidikan pada Februari 2020, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 14,87 persen. TPT tertinggi berikutnya adalah pada tingkat SMA sebanyak 12,82 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA. Sedangkan jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, baik TPT Perkotaan maupun TPT Perdesaan mengalami kenaikan, yaitu sebanyak 1,35 persen poin untuk TPT Perkotaan dan Perdesaan sebanyak 0,72 persen poin pada Februari 2021.

3.1.1.5 Indeks Gini

Di Provinsi Jawa Barat, Indeks gini mengalami fluktuasi pada periode Maret 2015 – September 2020. Pada Maret 2015, Indeks gini sebesar 0,415 poin kemudian meningkat menjadi 0,426 poin pada September 2015. Pada Maret – September 2016, nilai indeks gini mengalami penurunan. Kemudian pada Maret 2017 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,403 poin dan pada September 2017 menurun menjadi 0,393 poin. Kemudian pada Maret 2018 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,407 poin dan pada September 2018 menurun menjadi 0,405 poin. Pada Maret 2019 ini mengalami penurunan menjadi 0,402 poin dan menurun lagi pada September 2019 menjadi 0,398 poin. Namun pada Maret 2020, Indeks gini naik kembali menjadi 0,403 poin. Pada September 2020 Indeks Gini turun menjadi 0,398 poin.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Indeks Gini di daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,409 poin. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2020. Untuk daerah perdesaan, Indeks Gini September 2020 tercatat sebesar 0,326 poin. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,001 poin dibandingkan pada kondisi Maret 2020 yang mencapai 0,325 poin.

Indeks gini mengalami fluktuasi pada periode Maret 2018 – September 2020. Pada Maret 2018 indeks gini menunjukkan angka 0,407 poin yang kemudian turun sebanyak 0,002 poin menjadi 0,405 poin pada bulan September 2018. Pada Maret 2019, angka ini mengalami penurunan menjadi 0,402 poin dan menurun lagi pada September 2019 menjadi 0,398 poin, namun mengalami kenaikan sebesar 0,005 poin di bulan Maret 2020

dan mengalami penurunan kembali sebesar 0,005 poin pada September 2020, sehingga indeks gini September 2019 sama dengan September 2020.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks gini di daerah perkotaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,408 poin. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2019. Sedangkan pada bulan Maret 2020, angka ini mengalami kenaikan menjadi 0,412 poin. Untuk daerah perdesaan, Indeks Gini September 2019 tercatat sebesar 0,318 poin. Angka ini mengalami penurunan 0,001 poin dibandingkan pada kondisi Maret 2019 yang mencapai 0,319 poin. Namun pada bulan Maret 2020, angka ini mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar 0,007 poin menjadi 0,325 poin dan mengalami penurunan pada bulan September 2020 sebesar 0,003 poin menjadi 0,409 poin.

Gambar 3.7
Perkembangan Indeks Gini Maret 2015 – September 2020

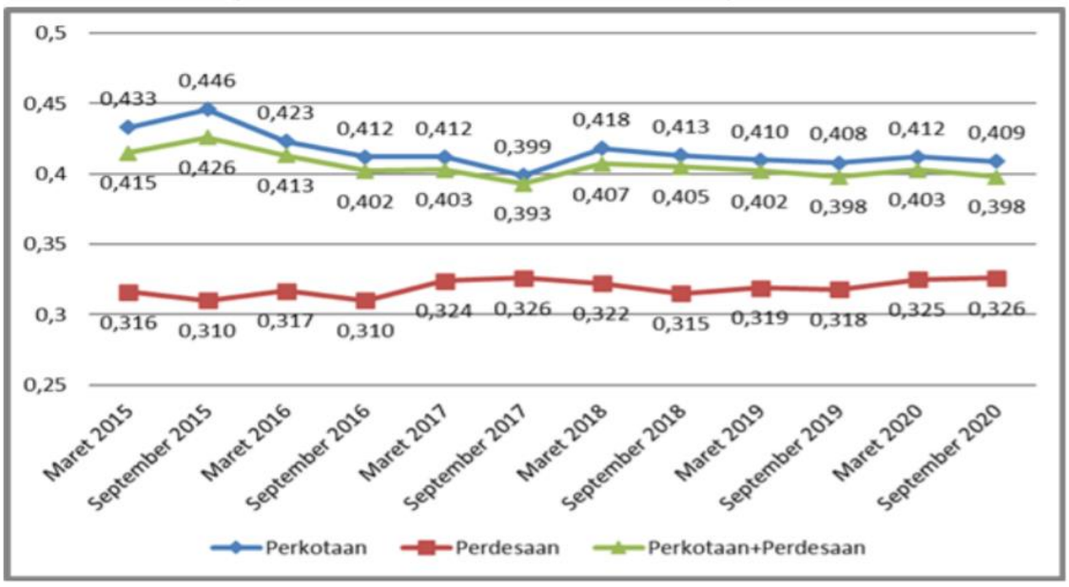

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2020

3.1.1.6 Tingkat Kemiskinan

Secara umum, pada periode Maret 2015 – September 2019 tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren menurun baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Namun, pada periode Maret-September 2020, terjadi kenaikan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2015 sampai dengan September 2020.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat September 2020 mencapai 4,19 juta jiwa (8,43 persen). Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sekitar 268,29 ribu jiwa dibandingkan keadaan Maret 2020. Jika dibandingkan dengan keadaan September 2019, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sekitar 812,63 ribu jiwa. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret dan September 2020 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 0,65 poin persen dari 7,14 persen menjadi 7,79 persen. Sedangkan di perdesaan mengalami kenaikan sebesar 0,37 poin persen dari 10,27 persen menjadi 10,64 persen.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada periode Maret 2015 – September 2020 menunjukkan tren menurun baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Namun pada bulan September 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 1,06 persen menjadi 7,88 persen. Fluktuasi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat bulan Maret 2018 sampai dengan Maret 2020 ditunjukkan oleh Gambar 3.8 di bawah ini.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat pada September 2019 mencapai 3,38 juta jiwa (6,82 persen). Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 23,27 ribu jiwa dibandingkan Maret 2019. Jika dibandingkan dengan September tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sekitar 163,51 ribu jiwa. Namun pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi sebanyak 3,92 juta jiwa. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19 di Indonesia sejak awal tahun 2020.

Gambar 3.8
Fluktuasi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat
Maret 2015 – September 2020

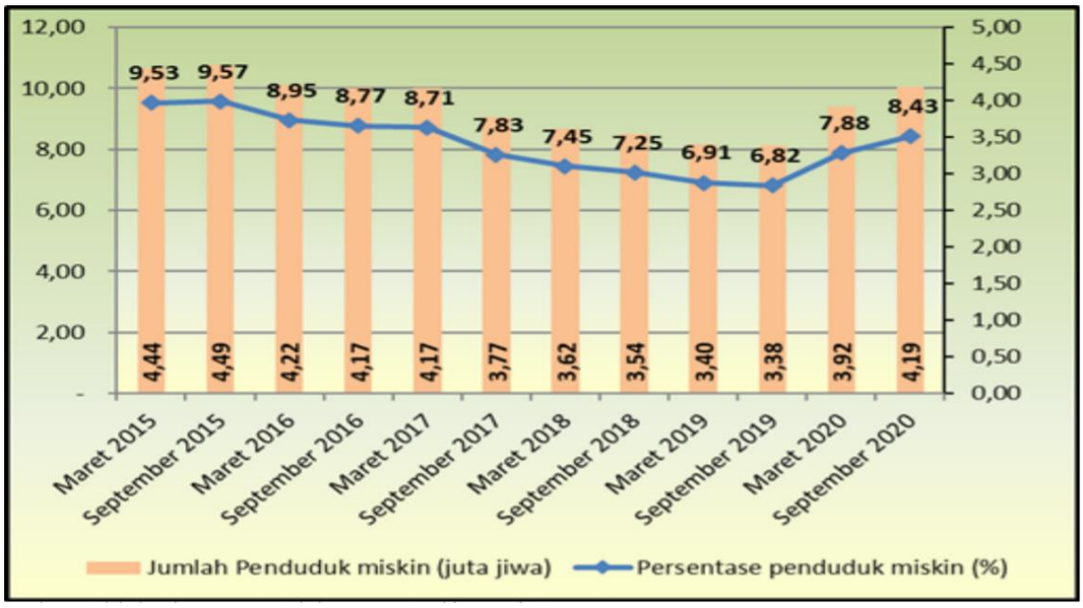

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2020

Dalam rangka perencanaan tahun 2022 perlu memproyeksikan indikator ekonomi makro yang menjadi kerangka untuk perencanaan pembangunan. Proyeksi indikator makro tahun 2021 dan tahun 2022 berdasarkan RPJMD disandingkan dengan target nasional disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Barat
Disandingkan dengan Nasional Tahun 2022-2023

No.	Indikator Makro & Pembangunan	Nasional	Jawa Barat
		2022	2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	73,44 – 73,48	72,57**
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,40 – 6,00	5,00*
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,24 – 5,52	9,70*
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,50 – 9,00	7,30 – 7,90*
5	Indek Gini (Poin)	0,376 – 0,378	0,400**
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,04	1,16**
7	Pendapatan Per Kapita* (Juta Rupiah)	N/A	46,48**

Sumber: *Permendagri 17 Tahun 2021
**RPJMD 2018-2023

Pada awal tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor kesehatan dan memerlukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pergerakan ekonomi diasumsikan sejalan dengan pergerakan manusia sehingga pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya capaian PDRB Jawa Barat di sepanjang tahun 2020 dan pada triwulan I-2021 juga masih diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga pada tahun 2022 perekonomian diperkirakan belum kembali pulih seperti tahun 2019. Dampak pandemi COVID-19 juga mempengaruhi beberapa sektor ekonomi di Provinsi Jawa Barat, diantaranya sektor pariwisata, UMKM dan Ketenagakerjaan.

3.1.1.6.1 Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat mewujudkan ekonomi yang inklusif, hal inilah yang membuat sektor pariwisata menjadi *leading sector* perekonomian di Indonesia. Akan tetapi pandemi COVID-19 yang dimulai sejak tahun 2020 silam membuat sektor pariwisata tidak bisa berjalan dengan normal hingga mengalami keterpurukan.

Pada bulan Mei 2020, tercatat destinasi wisata yang mengalami penutupan berjumlah 411 destinasi dan membuat 5.179 orang tenaga kerja terkena dampaknya. Baik karena diberlakukan PHK maupun dirumahkan sementara.

Hotel pun terkena dampak dari pandemi ini. Berkurangnya wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara membuat sejumlah hotel tidak beroperasi. Sebanyak 1.076 hotel ditutup dan membuat 12.143 tenaga kerjanya ikut terdampak.

Sebanyak 626 unit usaha ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Barat pun berhenti berproduksi dengan jumlah tenaga kerja terdampak mencapai 14.991 orang. Tak luput pula tenaga seni dan budaya yang mencapai 15.034 orang ikut terkena dampak pandemi COVID-19.

Berkurangnya wisatawan membuat hotel berbintang maupun hotel non bintang mengalami penurunan tingkat penghunian kamar walaupun

sempat pula mengalami perkembangan positif. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat 2021:

a. TPK Hotel di Provinsi Jawa Barat pada triwulan III-2020 menunjukkan nilai 57,41 persen dan mengalami sedikit kenaikan pada triwulan IV-2020 menjadi 65,18 persen.
b. TPK Hotel di Provinsi Jawa Barat pada Januari 2021 mencapai 48,05 persen, turun 36,36 poin dibandingkan TPK Januari 2020 yang mencapai 84,41 persen.

Gambar 3.9
Perkembangan TPK Hotel Bintang dan Non Bintang
di Provinsi Jawa Barat Mei 2020 - Mei 2021

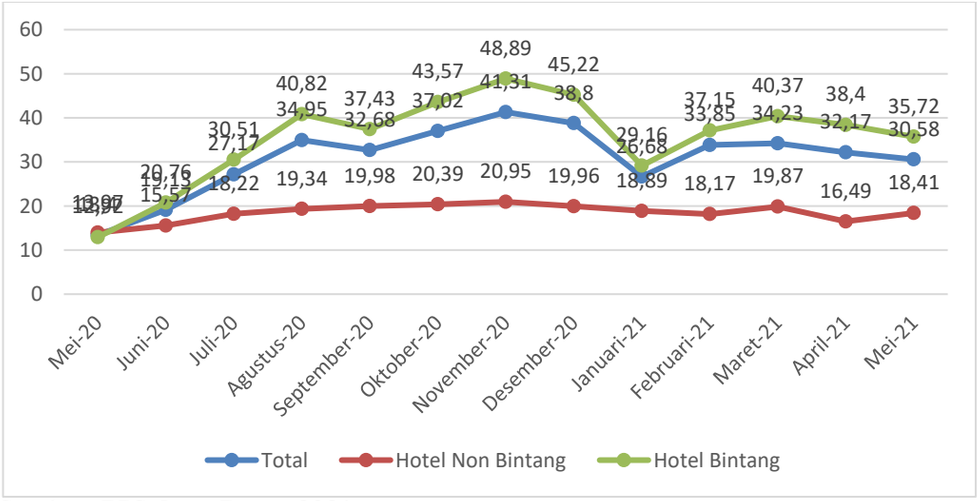

Sumber: BPS Jawa Barat, 2021

Adapun perkembangan pariwisata di Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus). Untuk mengetahui seberapa minat wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Jawa Barat adalah dengan melihat banyaknya wisatawan mancanegara yang datang langsung melalui pintu masuk ke Provinsi Jawa Barat hingga Januari 2021. Kedatangan wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Jawa Barat melalui pintu masuk Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung, Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, dan Pelabuhan Muarajati di Kota Cirebon.

Gambar 3.10
Perkembangan Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Provinsi Jawa Barat Melalui Pintu Masuk Bandara Husein Sastranegara dan Pelabuhan Muarajati Januari 2020 - Januari 2021

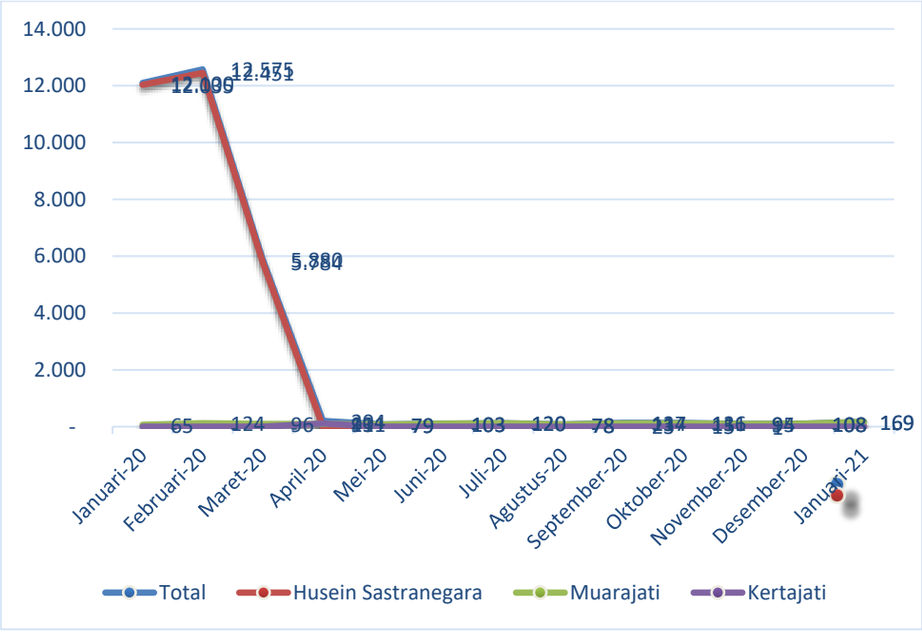

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2021

3.1.1.6.2 Sektor UMKM

Jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terus meningkat setiap tahunnya, namun pandemi COVID-19 yang muncul pada tahun 2020 membuat sektor UMKM mengalami penurunan hanya UMKM yang dapat memanfaatkan teknologi digital yang dapat bertahan.

Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan oleh BPS dalam kurun waktu 10-26 Juli 2020, sebanyak 5 (lima) dari 10 (sepuluh) perusahaan di Provinsi Jawa Barat masih beroperasi seperti biasa. Namun sebanyak 28,1 persen UMKM di Provinsi Jawa Barat berhenti beroperasi, 52,4 persen beroperasi normal, 11,6 persen melebihi kapasitas dan 7,6 persen mengurangi kapasitas. Adapun 3 (tiga) sektor tertinggi perusahaan yang masih beroperasi, yaitu air dan pengelolaan sampah (77,88 persen), *real estate* (77,87 persen), serta komunikasi dan informasi (66,86 persen). Kemudian, Sebanyak 86 persen di sektor UMKM mengalami penurunan pendapatan, 11 persen pendapatan tetap dan 2 persen pendapatannya meningkat (BPS, 2020).

3.1.1.6.3 Sektor Ketenagakerjaan

Dampak dari pandemi COVID-19 pada sektor industri memengaruhi ketenagakerjaan (para pekerja/buruh). Salah satu alasan yang melandasi tidak naiknya upah karena banyak perusahan di Provinsi Jawa Barat yang pendapatannya jauh dari target dampak pandemi COVID-19. Pandemi juga membuat perusahaan sudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemotongan gaji, hingga merumahkan sementara sebagian pekerjanya. (Jabar.idntimes.com). Berdasarkan data November 2020, sebanyak 2.001 perusahaan dan total pekerja/buruh 112.293 orang yang terdampak dari pandemi COVID-19.

Gambar 3.11
Persentase Pekerja/Buruh yang Dirumahkan Dampak COVID-19 Per Sektor Usaha (%)

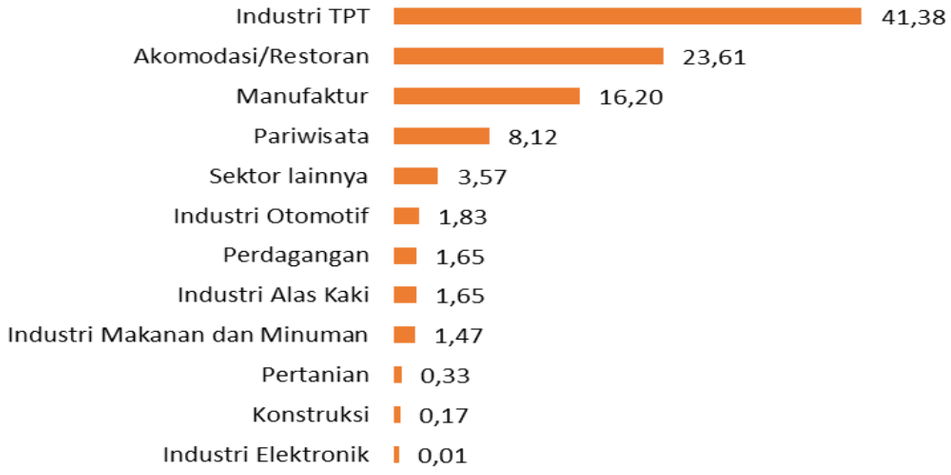

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, 20 November 2020

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa sektor usaha yang memberlakukan kebijakan untuk merumahkan pekerja/buruh selama pandemi COVID-19 adalah sektor industri TPT dengan persentase sebesar 41,38 persen, kemudian sektor akomodasi/restoran sebesar 23,61 persen dan sektor usaha manufaktur sebesar 16,20 persen. Sektor usaha yang merumahkan paling sedikit pekerja/buruh adalah sektor industri elektronik dan sebesar kontruksi dengan persentase masing- masing sebesar 0,01 persen dan 0,17 persen. Secara keseluruhan, jumlah perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 dan mengadaptasi

kebijakan merumahkan pekerja/buruh adalah sebanyak 987 perusahaan dengan total 80.151 pekerja buruh yang terdampak.

Gambar 3.12
Persentase Pekerja/Buruh yang Di_PHK Dampak COVID-19
Per Sektor Usaha (%)

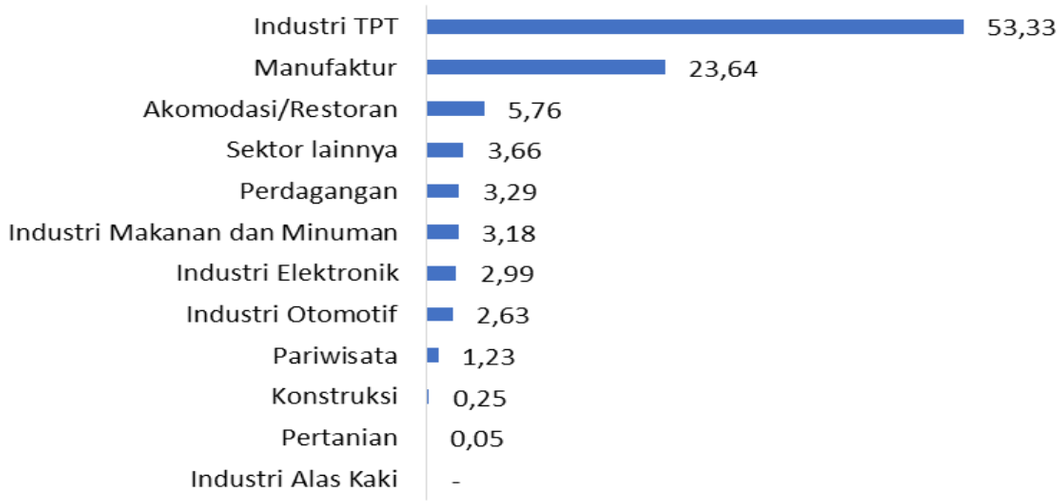

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, 20 November 2020

Kebijakan lain selain merumahkan pekerja/buruh sebagai akibat dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh. Dari total sebanyak 2.001 perusahaan terdampak, sebanyak 474 perusahaan melakukan PHK terhadap para pekerja/buruh dengan total 19.384 pekerja/buruh mengalami PHK. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui informasi mengenai persentase pekerja/buruh yang terkena PHK per sektor usaha. Industri TPT memiliki persentase paling besar dalam jumlah pekerja/buruh yang di-PHK akibat dampak pandemi COVID-19 sebanyak 53,33 persen disusul dengan sektor manufaktur dengan persentase sebesar 23,64 persen dan sektor akomodasi/restoran sebesar 5,76 persen. Sektor konstruksi, pertanian, dan industri alas kaki memiliki persentase yang sangat kecil dalam pemberlakuan PHK terhadap pekerja/buruh dengan persentase kurang dari 1 (satu) persen.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

Kondisi perekonomian Jawa Barat ke depan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi akibat dari pandemi COVID-19 yaitu penanganan dampak pada sektor ketenagakerjaan. Sektor yang menyerap tenaga kerja seperti industri, UMKM, dan pariwisata yang tidak dapat berjalan menghasilkan efek domino bagi kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat terlihat dengan semakin meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 2020. Tantangan yang dihadapi Jawa Barat secara sektoral pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi adalah membangkitkan kembali realisasi penanaman modal yang tadinya menurun akibat pandemi COVID-19 sehingga kondisi investasi yang ideal untuk pembangunan ekonomi Jawa Barat dapat tercapai kembali;
2. Tantangan pada sektor industri terletak pada kondisi industri Jawa Barat yang merupakan industri besar berorientasi ekspor, terutama industri otomotif, elektronik, kimia, dan produk pangan olahan. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat besar bagi kondisi industri pengolahan di Provinsi Jawa Barat, baik dalam hal pemasaran produk hasil industri maupun dalam aspek penyediaan bahan baku impor sehingga mempengaruhi kinerja industri Jawa Barat secara keseluruhan. Oleh sebab itu tantangan sektor industri adalah substitusi bahan baku impor, penyesuaian alur produksi terhadap protokol kesehatan dan percepatan revolusi industri 4.0;
3. Tantangan pada sektor pariwisata yaitu kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan/atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berdampak pada penutupan sejumlah destinasi pariwisata, perhotelan, restoran, dan biro perjalanan. Hal ini berimplikasi pada kondisi ketenagakerjaan yang digambarkan dengan besarnya jumlah karyawan sektor pariwisata yang di-PHK dan dirumahkan;
4. Tantangan pada sektor perdagangan tercermin dari kondisi ekspor Jawa Barat yang menjadi penyumbang ekspor terbesar nasional. Ekspor dan impor Jawa Barat cukup terganggu dengan adanya

pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari melambatnya pertumbuhan ekspor Jawa Barat, serta menurunnya impor bahan baku dan barang yang merupakan 90 persen komoditas impor Provinsi Jawa Barat. Kedua hal tersebut dapat dikatakan sebagai imbas dan penyebab menurunnya aktivitas industri di Provinsi Jawa Barat. Pada perdagangan di tingkat Usaha Menengah Besar, Usaha Mikro Kecil dan Usaha Pertanian menurut survei BPS (2020), hanya sekitar 50,56 perusahaan yang beroperasi normal di tengah pandemi COVID-19;

5. Tantangan pada sektor pangan terkait ketersediaan bahan pangan. Pada sisi produksi ketersediaan pangan Jawa Barat cukup memadai tetapi sistem transportasi dan logistik pangan terganggu akibat pembatasan aktivitas, sehingga produk petani tidak bisa dipasarkan yang memicu rendahnya harga jual di tingkat petani; dan
6. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan merupakan sektor yang mengalami dampak terbesar dalam pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya PHK dan karyawan yang dirumahkan sebagai akibat dari aktivitas usaha yang terhenti.

Prospek perekonomian tahun 2021, pada triwulan I-2021 diberlakukan PPKM sehingga pergerakan ekonomi diperkirakan sama dengan triwulan IV-2020. Pada triwulan I -2021, vaksin COVID-19 sudah mulai terdistribusi untuk tenaga kesehatan dan Lansia, pada akhir tahun 2021 diperkirakan vaksin COVID-19 telah terdistribusi dengan merata di seluruh Provinsi Jawa Barat. Kinerja ekspor dan impor mulai membaik, Jawa Barat merupakan provinsi dengan kinerja ekspor terbaik di Indonesia, hal ini terjadi karena negara tujuan mulai membuka peluang impor ke negaranya dan terdapat peluang ekspor non tradisional, komoditas ekspor baru dan Negara tujuan ekspor baru. Impor barang produksi atau bahan baku juga mulai membaik. Perdagangan dalam negeri didorong oleh penggunaan digitalisasi pemasaran, juga *QR-code* dalam pembayaran. Secara umum kinerja perdagangan luar negeri maupun dalam negeri pada tahun 2021 membaik.

Pembangunan infrasruktur padat karya pada tahun 2021 sudah dapat dilaksanakan, hal ini dapat menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang cukup besar. Pembukaan objek wisata alam, hotel, restoran mulai dilaksanakan dengan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety* dan

Environment Sustainability (CHSES). UKM lebih banyak yang dapat beroperasi dan melakukan transaksi tanpa tatap muka, seperti menggunakan aplikasi dan pembayaran non tunai, serta pemasaran secara daring (*e-commerce*). Industri sudah mulai berjalan normal seiring banyaknya permitaan pasar ekspor.

Secara umum, perekonomian pada tahun 2021 akan lebih baik daripada tahun 2020, sehingga diperkirakan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2021 akan sama atau lebih besar dari 3,15 persen. Pada tahun 2022, diperkirakan vaksin telah didistribusikan secara merata di seluruh Jawa Barat, telah terjadi *herd immunity* atau kekebalan secara populasi, sehingga dapat menekan jumlah kasus pandemi COVID-19. Penurunan kasus pandemi COVID-19 akan berdampak pada perbaikan ekonomi. Industri sudah mendekati normal, pariwisata sudah mulai bergerak, perdagangan luar dan dalam negeri sudah mulai membaik, pembangunan infrastruktur stategis sudah dimulai kembali. Secara umum, pada tahun 2022, perekonomian sudah mulai pulih walaupun belum kembali seperti tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diperkirakan akan sama atau lebih besar dari 3,92 persen. Proyeksi perekonomian Jawa Barat tahun 2022 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2021-2022

No	Indikator	Realisasi 2020	Target	
			2021	2022
1	Nilai PDRB-ADHB (miliar rupiah)	2.088.038,74	2.208.740	2.374.390
2	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)	-2,44	3,15	3,92
3	Inflasi (persen)	2,18	3,00	3,00
4	Pendapatan per Kapita (juta rupiah)	41,50	44,02	46,48
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	10,46	10,45	9,70
6	Persentase Penduduk Miskin (persen)	8,43	7,77	7,9 – 7,3
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB (triliun rupiah)	493,96	501,52	515,31

Sumber: Realisasi BPS Provinsi Jawa Barat dan Target Bappeda Provinsi Jawa Bara,2021

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 masih dalam fase pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19. Tiga sektor lapangan

usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat diperkirakan tumbuh positif dan mengarah pada tren sebelum pandemi COVID-19. Ketiga sektor tersebut adalah Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Pertanian, serta Kehutanan dan Perikanan. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor utama perekonomian Jawa Barat dengan peranan lebih dari 41 persen diperkirakan mulai tumbuh positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi global dan nasional. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diharapkan memperoleh pengaruh positif dengan meningkatnya aktivitas perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang terbukti menjadi penopang ditengah krisis ekonomi dengan tumbuh positif diperkirakan akan mengalami peningkatan pertumbuhan dibanding tahun 2020. Proyeksi pertumbuhan lapangan usaha tahun 2022 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha Tahun 2022 (Persen)

Lapangan Usaha		Realisasi	Proyeksi	
		2020	2021	2022
A	Pertanian. Kehutanan, dan Perikanan	2,29	1,37	1,90
B	Pertambangan dan Penggalian	-4,11	0,17	0,46
C	Industri Pengolahan	-4,22	2,95	4,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-7,62	0,36	0,84
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,80	3,12	4,33
F	Konstruksi	-5,97	4,32	5,99
G	Perdagangan Besar dan Ecerean; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7.94	3,41	4,73
H	Transportasi dan Pergudangan	-4,18	3,14	4,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,60	4,93	6,84
J	Informasi dan Komunikasi	34,64	6,30	8,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,15	2,10	2,91
L	Real Estate	1,92	5,92	8,21
M,N	Jasa Perusahaan	-18,38	5,46	7,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	-6,92	2,39	3,32
P	Jasa Pendidikan	6,69	4,06	5,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-5,39	5,37	7,45

Lapangan Usaha	Realisasi	Proyeksi	
	2020	2021	2022
R,S,T,U Jasa Lainnya	-2,63	4,91	6,81

Sumber: Realisasi BPS Provinsi Jawa Barat dan Proyeksi Bappeda, 2021

Dari sisi komponen pengeluaran, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 digerakkan oleh komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Ekspor. Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan daya beli masyarakat. Adapun PMTB diperkirakan akan mengalami kenaikan pertumbuhan seiring dengan masuknya investasi dalam bentuk penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Kinerja Ekspor Jawa Barat tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh dikisaran 4 persen yang didorong oleh ekspor non migas khususnya produk-produk Industri Pengolahan seiring dengan membaiknya perdagangan luar negeri. Proyeksi pertumbuhan komponen pengeluaran tahun 2022 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Proyeksi Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Tahun 2022

Komponen Pengeluaran		Realisasi	Proyeksi	
		2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-2,89	3,37	4,24
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-3,78	3,93	4,21
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,48	1,60	2,22
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-8,34	3,86	5,01
5	Ekspor	-6,55	3,90	4,40
6	Dikurangi Impor	-17,07	3,60	1,64

Sumber: Realisasi BPS Provinsi Jawa Barat dan Proyeksi Bappeda, 2021

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2022.

Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2022

No.	Indikator Makro dan Pembangunan	Satuan	2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	72,19	72,57**
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	3,15	5,00*
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	10,45	9,70*
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,77	7,30 – 7,90*
5	Indeks Gini (Poin)	0,402	0,400**
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,21	1,16**
7	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)*	44,02	46,48**

Sumber: *Permendagri 17 Tahun 2021
**RPJMD 2018-2023

3.1.3 Strategi Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan memfokuskan pemulihan ekonomi dan reformasi nasional pada sejumlah sektor akibat pandemi COVID-19 ditahun 2021. Setidaknya ada 4 (empat) sektor akan menjadi fokus pemerintah yakni pemulihan sektor industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan negara, yang tentu saja hal ini akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat. Untuk mendorong pemulihan perekonomian daerah, di tahun 2020, lebih dikonsentrasikan pada penguatan perekonomian pada peningkatan daya beli masyarakat terutama kalangan menengah dan atas, pemulihan kepercayaan investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perijinan di daerah, dan *government spending* pada proyek-proyek padat karya, peningkatan ekspor, serta transformasi digital pemasaran produk UMKM.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Sedangkan

pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui APBN; kolaborasi APBD kabupaten/kota; PHLN; Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP); swadaya masyarakat; serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan (PKBL) di Provinsi Jawa Barat, yang semuanya berkolaborasi menjadi potensi sumber penerimaan guna menunjang belanja pembangunan daerah. Konsep pendanaan pembangunan di Jawa Barat dikenal dengan 6 (enam) pintu anggaran dalam membangun Jawa Barat.

Gambar 3.13
Kolaborasi Pendanaan Pembangunan

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada subbab terdahulu dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan dilaksanakan melalui arah kebijakan sebagai berikut.

3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskalnya baik, akan memiliki kemampuan yang lebih baik di dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang akhirnya dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2019 dan tahun 2020, asumsi pendapatan tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023.

Pada awal tahun 2020, Indonesia terkena pandemi COVID-19 dengan penyebarannya sangat cepat. Hal ini berdampak pada banyak aspek antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya

akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Perkembangan penyebaran pandemi COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan *social distancing* dan anjuran *Work From Home* (WFH) yang diambil pemerintah, beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berdampak terhadap melemahnya sendi-sendi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro.

Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor penerimaan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat. Diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri di rumah selama pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi, maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2020 diasumsikan akan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat pada realisasi APBD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.

Pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran sebelumnya, struktur pendapatan daerah masih berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan untuk proyeksi/target pendapatan daerah mulai Tahun Angaran 2021 dan seterusnya struktur Pendapatan Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, sehingga pendapatan daerah tahun 2021 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara rinci yang disajikan dalam tabel yang berbeda seperti di bawah ini.

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020

Struktur APBD berdasarkan PP 58/2005

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2019[1)]	Realisasi Tahun 2020[2)]
4.1	**Pendapatan asli daerah**	**21.244.266.598.018**	**18.521.882.178.042**
4.1.1	Pajak daerah	19.626.352.311.765	17.035.963.236.918
4.1.2	Retribusi daerah	56.222.370.756	40.220.203.478
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	386.442.976.038	401.703.315.844
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	1.175.248.939.459	1.043.995.421.802
4.2	**Dana perimbangan**	**14.715.372.046.649**	**15.881.415.189.271**
4.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	1.483.785.231.865	2.063.105.718.266
4.2.2	Dana alokasi umum	3.212.647.404.000	2.964.612.155.000
4.2.3	Dana alokasi khusus	10.018.939.410.784	10.853.697.316.005
4.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**78.256.117.794**	**100.978.338.005**
4.3.1	Hibah	23.188.473.794	36.459.066.005
4.3.2	Dana darurat		
4.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya		
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.579.794.000	29.413.272.000
4.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	12.487.850.000	35.106.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)	**36.037.894.762.461**	**34.504.275.705.318**

Sumber: Diolah Bappeda, 2021
[1)] Perda Pertanggungjawaban APBD 2019
[2)] Realisasi 2020 (*Audited* BPK)

Mulai Tahun Anggaran 2021, struktur pendapatan daerah sudah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah diasumsikan mengalami penurunan sebesar 0,84 persen apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2021, penurunan tersebut diasumsikan dari PAD ditargetkan turun sebesar 2,25 persen dan Dana Transfer mengalami kenaikan sebesar 1,43 persen. Namun asumsi pendapatan daerah pada tahun 2022 tersebut bergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah asumsi kesuksesan pembagian vaksin kepada masyarakat selesai pada tahun 2021 sehingga masyarakat dapat kembali hidup normal dan perekonomian dapat membaik. Diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak dan membeli kendaraan bermotor.

Secara umum penyusunan proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 mempertimbangkan kondisi ekonomi makro, masa pandemi COVID-19

yang diharapkan berakhir di semester pertama 2021, potensi yang dimiliki, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, serta upaya intesifikasi yang akan dilakukan. Selain hal tersebut di Provinsi Jawa Barat masih banyak potensi yang harus digali dan dioptimalkan kembali, sehingga diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang yang secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2022 dan 2023

Struktur APBD berdasarkan PP 12/2019

No	Uraian	Target Tahun 2021[1)]	Proyeksi/Target pada Tahun 2022[2)]	Proyeksi/Target pada Tahun 2023[3)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.1	**Pendapatan asli daerah**	**25.066.632.128.677**	**24.736.388.750.376**	**26.035.021.934.969**
4.1.1	Pajak daerah	23.458.576.336.110	23.022.755.449.938	24.300.840.179.240
4.1.2	Retribusi daerah	48.719.409.971	44.487.094.443	46.389.801.722
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	408.899.021.533	426.579.275.567	445.225.023.579
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	1.150.437.361.063	1.242.566.930.428	1.242.566.930.428
4.2	**Dana Transfer**	**16.381.985.627.446**	**16.381.985.627.446**	**17.325.366.695.496**
4.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**16.381.985.627.446**	**16.381.985.627.446**	**17.325.366.695.496**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**16.293.819.865.446**	**16.293.819.865.446**	**17.325.366.695.496**
	Dana Transfer Umum	**4.968.806.121.446**	**4.968.806.121.446**	**5.907.424.579.496**
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	1.861.356.621.446	1.861.356.621.446	1.612.237.954.500
4.2.01.01.02	DAU	3.107.449.500.000	3.107.449.500.000	4.295.186.624.996
	Dana Transfer Khusus	11.325.013.744.000	11.325.013.744.000	11.417.942.116.000
4.2.01.01.03	DAK Fisik	820.786.986.000	820.786.986.000	
4.2.01.01.04	DAK Non Fisik	10.504.226.758.000	10.504.226.758.000	
4.2.01.02	**Dana Insentif Daerah (DID)**	88.165.762.000	88.165.762.000	
	Transfer Antar Daerah			
	Pendapatan			
	Bantuan Keuangan			
4.3	**Lain-lain pendapatan yang sah**	**23.379.000.000**	**23.379.000.000**	**23.379.000.000**
4.3.1	Hibah	23.379.000.000	23.379.000.000	23.379.000.000
4.3.2	Dana darurat			
4.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya			
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
4.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)			
	PENDAPATAN DAERAH	**41.471.996.756.123**	**41.141.753.377.822**	**43.383.767.630.465**

Sumber : Bappeda, 2021
[1)] Perda APBD 2021,
[2)] Tahun 2022 (hasil proyeksi masih sangat sementara), dan
[3)] Tahun 2023 (Ranhir Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023).

Pada tabel di atas, terlihat bahwa pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 ini diasumsikan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2021. Hal ini bahwa pandemi COVID-19 masih akan mempengaruhi terhadap proyeksi pendapatan daerah, sehingga diperlukan analisis atau strategi di dalam penggalian pendapatan mengingat masih banyak potensi yang harus digali dan dioptimalkan kembali sehingga pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) dan Dinas/Balai Penghasil.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
4. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

6. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
8. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), ditempuh melalui:
    a. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
    b. Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
    c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
    d. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang

pendapatan antara lain *drive thru*, Gerai Samsat dan Samsat *Mobile,* layanan SMS, mengembangkan Samsat *Outlet*, Samsat Gendong, Aplikasi Sambara dan Aplikasi Sipolin serta Samsat J'Bret (Samsat Jawa Barat Ngabret). Selain itu dilakukan kerja sama dengan beberapa toko ritel dalam rangka kemudahan pelayanan pembayaran.

e. Menggalakkan sebuah program akselerasi pendapatan daerah yaitu "Program Triple Untung Plus". Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan sebagai tahun Tertib Administrasi Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor sekaligus memberikan insentif pajak daerah kepada dunia usaha sektor otomotif dan masyarakat/wajib pajak di Provinsi Jawa Barat. Program Triple Untung Plus tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 973/267-Bapenda/2020. Program Triple Untung Plus merupakan tindak lanjut terhadap arahan Presiden Republik Indonesia terkait pemberian relaksasi pajak untuk mengurangi dampak ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
f. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008.
g. Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
h. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya dalam rangka peningkatan kinerja BUMD yaitu mengelola BUMD secara profesional, meningkatkan sarana dan prasarana, memberikan kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik.
i. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
j. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam

operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah (PD) penghasil.

2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
   a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
   b. Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
   c. Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan *lifting* migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi.
   d. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD-RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Transfer (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Strategi pencapaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang optimal ditempuh melalui:
   a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
   b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.
   c. Membentuk lembaga pengelola dana masyarakat.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Tahun 2018 pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow program* yang merupakan pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Penganggaran *money follow program* juga mendukung pendekatan penyusunan perencanaan yang holistik (menyeluruh), tematik (terfokus), terintegrasi (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas), *money follow program* diimplementasikan dengan cara mengamankan alokasi pada prioritas; realokasi dari program kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-tahun sebelumnya; dan efisiensi program/kegiatan

nonprioritas. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2022.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Jawa Barat menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2022, adalah sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai ASN BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS.
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi Dan Misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, diantaranya :
    a. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, sebanyak 11 (sebelas) prioritas, sebagai berikut: 1) Reformasi sistem kesehatan daerah; 2) Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi; 3) Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan; 4) Reformasi sistem perlindungan sosial; 5) Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan; 6) Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana; 7) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah; 8) Gerakan membangun desa; 9) Pendidikan

agama dan tempat ibadah juara; 10) Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 11) Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan provinsi, meliputi 19 (sembilan belas) jenis pelayanan dasar yaitu: pendidikan menengah; pendidikan khusus; pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi; pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi; pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

3. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.
5. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
6. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Provinsi Jawa Barat secara konsisten dan

berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.

7. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
8. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018-2023, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.
9. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.
10. Mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial semua yang terdampak pandemi COVID-19.

Belanja daerah dari tahun 2019 tahun relatif mengalami kenaikan, tetapi pada awal tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 mengakibatkan target yang sudah ditetapkan mengalami perubahan karena penurunan pendapatan daerah, baik PAD, dana perimbangan, maupun pendapatan-pendapatan lain. Pada realisasi APBD Tahun 2020, bahwa realisasi belanja tetap mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 dikarenakan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia tentang Penanganan pandemi COVID-19 bahwa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diminta agar fokus kepada 3 (tiga) hal, yaitu 1) kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19; 2) *social safety net* (jaring pengaman sosial) dalam bentuk bantuan sosial; serta 3) memastikan kesiapan stok pangan di daerah masing-masing. Hal tersebut dilaksanakan dengan memangkas rencana belanja yang tidak prioritas dalam APBN maupun APBD, anggaran perjalanan dinas,

pertemuan-pertemuan dan belanja lain yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, sehingga terdapat perubahan atau pengalihan alokasi dana dari pos Belanja Langsung kepada Belanja Tidak Terduga dalam bentuk bantuan baik tunai maupun non tunai. Secara rinci realisasi belanja daerah pada tahun 2019 dan 2020 sesuai dengan struktur pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2020

Struktur APBD berdasarkan PP 58/2005

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019[1)]	Realisasi Tahun 2020[2)]
(1)	(2)	(3)	(4)
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**28.033.579.142.382**	**31.377.525.521.203**
5.1.1	Belanja pegawai	5.605.436.893.218	5.816.825.233.210
5.1.2	Belanja bunga	-	18.123.947.774
5.1.3	Belanja subsidi	19.384.264.000	-
5.1.4	Belanja hibah	8.736.051.702.117	9.948.395.206.015
5.1.5	Belanja bantuan sosial	277.421.000.000	206.085.750.000
5.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa*	7.901.869.013.400	7.212.501.291.449
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa*	5.493.416.269.647	5.020.674.544.240
5.1.8	Belanja tidak terduga	-	3.154.919.548.515
		-	-
A	**JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**28.033.579.142.382**	**31.377.525.521.203**
5.2	**Belanja Langsung**	7.799.506.984.135	6.750.006.228.046
5.2.1	Belanja Pegawai	283.317.579.553	280.747.359.080
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	4.985.841.862.221	4.796.352.354.090
5.2.3	Belanja Modal	2.530.347.542.361	1.672.906.514.876
B	**JUMLAH BELANJA LANGSUNG**	**7.799.506.984.135**	**6.750.006.228.046**
C	**TOTAL JUMLAH BELANJA**	**35.833.086.126.517**	**38.127.531.749.249**

Sumber: Bappeda, 2021
[1)] Perda Pertanggungjawaban APBD 2019
[2)] Realisasi 2020 (*Audited* BPK)

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun serta perkembangan terakhir, dan melihat asumsi dan proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021, maka belanja daerah pada Tahun Anggaran 2022 diasumsikan mengalami penurunan sebesar 2,23 persen, diantaranya adalah penurunan pada belanja transfer sebesar 10,64 persen, sedangkan belanja operasi diproyeksikan mengalami kenaikan 2,11 persen. Secara rinci proyeksi Belanja Daerah dengan struktur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021-2023

Struktur APBD berdasarkan PP 12/2019

No	Uraian	Target Tahun 2021[1)]	Proyeksi/Target pada Tahun 2022[2)]	Proyeksi/Target pada Tahun 2023[3)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.1	**Belanja Operasi**	**24.836.798.357.117**	**23.070.836.738.564**	**25.813.010.514.364**
5.1.1	Belanja pegawai	6.857.125.031.176	6.757.601.650.176	7.054.266.985.879
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.220.375.246.644	6.155.203.474.650	7.863.892.326.042
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	15.000.000.000	30.000.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	10.199.076.329.297	9.758.301.863.738	10.480.121.452.443
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	560.221.750.000	384.729.750.000	384.729.750.000
5.2	**Belanja Modal**	**3.207.473.349.875**	**3.539.239.469.382**	**3.565.069.216.960**
5.2.1	Belanja Modal	3.207.473.349.875	3.539.239.469.382	3.565.069.216.960
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**368.913.568.696**	**100.000.000.000**	**100.000.000.000**
5.3.1	Belanja tidak terduga	368.913.568.696	100.000.000.000	100.000.000.000
5.4	**Belanja Transfer**	**16.201.880.386.111**	**13.574.137.081.484**	**12.887.152.765.468**
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pajak	9.301.544.755.277	9.183.233.553.530	9.565.164.965.468
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemeritah Daerah Lainnya	6.900.335.630.834	4.390.903.527.954	3.321.987.800.000
5.4.3	Transer Bantuan Keuangan Ke Desa			
	TOTAL BELANJA DAERAH	**44.615.065.661.799**	**40.284.213.289.430**	**42.365.232.496.792**

Sumber : Bappeda, 2021
[1)] Perda APBD 2021,
[2)] Tahun 2022 (hasil proyeksi masih sangat sementara), dan
[3)] Tahun 2023 (Ranhir Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selain berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis Standar Belanja (ASB) adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja perangkat daerah untuk meningkatkan tingkat pelayanan tertentu dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

ASB merupakan salah satu elemen utama untuk penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif. ASB dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam peraturan tersebut di atas, disebutkan bahwa ASB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Provinsi Jawa Barat sudah mengembangkan *e-ASB* yang berbasis teknologi informasi dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2019. *e-ASB* yang dikembangkan tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran daerah Provinsi Jawa Barat yang sudah berjalan yaitu *e-planning* dan *e-budgeting*.

Pada tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elekronik. Adapun ruang lingkup SIPD meliputi:

a) Informasi Pembangunan Daerah; b) Informasi Keuangan Daerah; dan c) Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Ini berarti bahwa sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat sudah terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga diharapkan dapat mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan belanja kegiatan di Provinsi Jawa Barat.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi pemerintah daerah.
2. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun, maka dapat dihasilkan proyeksi/target tahun rencana dan perkiraan maju. Pada tahun 2022 pembiayaan netto diperkirakan akan terjadi peningkatan dikarenakan pada tahun 2023 diperkirakan penerimaan pembiayaan penurunan. Rumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam 2 (dua) tabel sebagai berikut.

Tabel 3.10
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019-2020

Struktur APBD berdasarkan PP 58/2005

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi Tahun 2019[1)]	Realisasi Tahun 2020[2)]
(1)	(2)	(3)	(4)
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	3.060.677.232.835	3.289.300.908.323
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		1.532.607.660.148
6.1.8	Penerimaan Kembali dana Bergulir	100.615.038.344	50.131.410.442
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**3.161.292.271.179**	**4.872.039.978.913**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**		
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
6.2.2	Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah	76.799.998.800	53.018.000.000
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang		
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**76.799.998.800**	**53.018.000.000**
	PEMBIAYAAN NETTO	**3.084.492.272.379**	**4.819.021.978.913**

Sumber: Bappeda, 2021
[1)] Perda Pertanggungjawaban APBD 2019
[2)] Realisasi 2020 (*Audited* BPK)

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan dan realisasi pembiayaan daerah 3 (tiga) tahun serta perkembangan terakhir, maka penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2022 belum memperhitungan adanya SiLPA artinya mengoptimalkan pendapatan daerah untuk mendanai seluruh belanja daerah, sehingga penerimaan pembiayaan

mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang selain berasal dari SiLPA juga dari pinjaman daerah melalui skema PEN, sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan mengalami kenaikan diantaranya adalah mulainya pembayaran cicilan pinjaman, penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan daerah untuk pelaksanaan Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2024. Secara rinci proyeksi Belanja Daerah dengan struktur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11
Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021-2023

Struktur APBD berdasarkan PP 12/2019

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Target Tahun 2021[1)]	Proyeksi/Target pada Tahun 2022[2)]	Proyeksi/Target pada Tahun 2023[3)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**3.243.068.905.676**	**-**	**805.726.592.688**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	1.030.106.207.659	-	805.726.592.688
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.212.962.698.017	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**3.243.068.905.676**	**-**	**805.726.592.688**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	-100.000.000.000	-857.540.088.392	-1.824.261.726.361
6.2.1	Pemberian Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	255.434.610.025	624.261.726.361
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000	402.105.478.367	300.000.000.000
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	200.000.000.000	900.000.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**100.000.000.000**	**857.540.088.392**	**1.824.261.726.361**
	PEMBIAYAAN NETTO	**3.143.068.905.676**	**(857.540.088.392)**	**(1.018.535.133.673)**

Sumber : Bappeda, 2021
[1)] Perda APBD 2021,
[2)] Tahun 2022 (hasil proyeksi masih sangat sementara), dan
[3)] Tahun 2023 (Ranhir Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023).

Rencana pembayaran pengembalian PEN Daerah dimulai pada tahun 2022 dan berakhir pada tahun 2028, sedangkan pada tahun 2022 ini dialokasikan sebesar Rp255.434.610.025 pada komponen Pemberian Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Selain hal-hal di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali tearkhir dengan Peranturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024, maka dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2024, maka diperlukan pendanaan pelaksanaan kegiatan tersebut. Apabila mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018, bahwa pendanaan penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 mencapai Rp1,71 triliun, maka pendanaan penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada tahun 2024 diperkirakan akan mencapai Rp2 triliun. Tingginya kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkada tersebut menjadi masalah yang harus segera dicarikan solusinya. Dana cadangan menjadi salah satu alternatif solusi yang dipertimbangkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Untuk itu, dalam struktur pendanaan daerah tahun 2022 dan tahun 2023, pada pengeluaran pembiayaan diproyeksikan dana cadangan masing-masing pada tahun 2022 sebesar Rp200 miliar dan pada tahun 2023 sebesar Rp900 miliar, yang nantinya akan dipergunakan pada tahun 2024 sebagai penerimaan pembiayaan.

3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Provinsi Jawa Barat dan terbatasnya sumber–sumber penerimaan konvesional mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Jawa Barat. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3) Dana Masyarakat/Umat; 4) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 5) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); dan 6) Hibah. Adapun penjelasan alternatif pembiayaan pembangunan adalah sebagai berikut:

3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Provinsi Jawa Barat selain bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah Provinsi.

3.3.2 APBD Kabupaten/Kota

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

3.3.3 Dana Masyarakat/Umat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat adalah melalui dana masyarakat/umat mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang sangat besar, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana umat cukup besar. tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana umat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat.

Dari berbagai jenis dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.3.4 *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD Provinsi Jawa Barat yang lainnya adalah Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Mitra PKBL dan TJSL diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini harus berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang. Sampai dengan saat ini, telah terdaftar sebanyak 228 mitra PKBL dan TJSL Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya terbagi menjadi 170 perusahaan swasta, 49 BUMN dan 9 (sembilan) BUMD.

Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL adalah program yang kesinambungan serta berdampak positif

terhadap masyarakat, penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

3.3.5 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”.

Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah,

BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

Sampai dengan tahun 2020, dari seluruh proyek strategis yang direncanakan dibiayai melalui skema KPBU telah ada 1 (satu) proyek strategis yang sedang dalam proses pelaksanaan, yaitu TPPAS Regional Lulut Nambo, 1 (satu) proyek yang dalam proses transaksi, yaitu TPPAS Regional Legok Nangka, dan 5 (lima) proyek dalam proses penyiapan, yaitu SPAM Jatigede, Sinumbra dan Kertasari, serta LRT Bandung Raya dan TPPAS Bekarpur. Sementara terdapat 5 (lima) proyek yang telah menyelesaikan tahap perencanaan, dan 8 (delapan) proyek dalam proses perencanaan. Pada tahun-tahun berikutnya diharapkan proses pembangunan proyek strategis melalui skema KPBU dapat dilanjutkan.

3.3.6 Hibah

Hibah dimaksud adalah Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan diberbagai sektor. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) diperlukan karena adanya kebutuhan investasi untuk membangun ekonomi dan adanya keterbatasan sumber dana pemerintah untuk investasi.

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Peraturan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), diantaranya Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pengusulan kegiatan yang dibiayai dengan PHLN dapat dilakukan oleh Kementerian Negara (departemen dan non-departemen), lembaga

pemerintahan non-departemen (selanjutnya disebut lembaga), Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kegiatan yang dapat diusulkan Pemerintah Daerah adalah:

a. Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri untuk penerusan pinjaman; Untuk usulan kegiatan ini harus melampirkan Surat Persetujuan DPRD calon penerima penerusan pinjaman, dan memenuhi kriteria khusus sebagai berikut:
   1) Kegiatan yang diusulkan merupakan kegiatan investasi untuk prasarana dan/atau sarana yang menghasilkan penerimaan pada APBD Pemda, yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut;
   2) Kegiatan tersebut merupakan urusan Pemda;
   3) Kegiatan yang diusulkan adalah dalam rangka pencapaian sasaran program yang merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sejalan dengan program RPJM;
   4) Hasil dari kegiatan PHLN yang diusulkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat daerah setempat; dan
   5) Pemda mempunyai kemampuan fiskal untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman.

b. Kegiatan yang dibiayai dari hibah luar negeri untuk penerusan hibah. Untuk usulan kegiatan ini harus memenuhi kriteria khusus sebagai berikut:
   1) Kegiatan tersebut untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan;
   2) Kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemberian layanan dasar umum;
   3) Kegiatan tersebut untuk pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah.
   4) Sumber PHLN adalah Negara Asing, Lembaga Multilateral, Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan Asing. Jenis PHLN meliputi pinjaman lunak, Fasilitas Kredit Ekspor, Pinjaman Komersial dan Pinjaman Campuran.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 merupakan tahap pembangunan keempat dari RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Sesuai dengan arah kebijakan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, tema atau fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 adalah "**Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian**". Tema ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 diimplementasikan dengan: (1) tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah, dengan 7 (tujuh) tujuan, dan 21 sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program)*, serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2022; (3) kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, dana umat, dan hibah, untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta (4) melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar

pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 mengacu dan memerhatikan: (1) RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2020, RKPD Tahun 2021 Triwulan I; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022; (5) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2022; dan (6) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Jawa Barat. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis, yang akan dijadikan sebagai salah satu masukan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2022, amanat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19, pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu *refocusing* dan realokasi anggaran pada tahun 2020, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah dalam APBD

Tahun Anggaran 2021. *Refocusing* dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Untuk memulihkan turunnya indikator makro pembangunan daerah, sejalan dengan prioritas pemulihan kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional, maka konsentrasi prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2022 tetap bertumpu pada stimulus pemulihan sektor kesehatan dasar yang mengoptimalkan fungsi dan kapasitas puskesmas, agar puskesmas dapat dimanfaatkan sebagai tempat pelayanan pasien COVID-19 dengan mengembangkan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap, melengkapi sarana prasarana/alat kesehatan yang diperlukan, meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM puskesmas serta meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas dengan melakukan akreditasi puskesmas serta fasilitasi pembangunan rumah sakit tipe D.

Demikian juga untuk mendorong pemulihan perekonomian daerah, pada tahun 2022 pemulihan ekonomi akan dikonsentrasikan pada penguatan perekonomian dan peningkatan daya beli masyarakat terutama kalangan menengah dan atas, pemulihan kepercayaan investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perijinan di daerah, dan belanja pemerintah pada proyek-proyek padat karya, peningkatan ekspor, serta transformasi digital pemasaran produk UMKM.

Adapun untuk membantu masyarakat yang terdampak secara langsung akibat pandemi COVID-19, masih diperlukan program jaring pengaman sosial yang dapat berupa bantuan sembako, subsidi listrik, subsidi internet, bantuan biaya pendidikan bagi keluarga ekonomi tidak mampu, transfer uang secara *cash* atau bentuk bantuan lainnya yang disediakan pemerintah.

Berdasarkan hal yang disebutkan di atas serta kajian permasalahan dan isu strategis di Provinsi Jawa Barat, maka prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023 adalah:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;

7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;
8. Gerakan Membangun Desa;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian diterjemahkan dalam arahan program-program prioritas sebagai berikut:

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah dan Arahan Program

NO	PRIORITAS	ARAHAN PROGRAM
1	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	Melakukan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui: 1. Peningkatan pengawasan dan kolaborasi/kemitraan tata kelola kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat; 2. Peningkatan pelayaan kesehatan yang efektif, aman, dan berkualitas baik; 3. Pemenuhan kebutuhan Rumah Sakit, termasuk penyediaan pusat isolasi COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan; 4. Peningkatan kompetensi, ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan yang ideal; 5. Peningkatan penggunaan informasi kesehatan yang andal dan tepat waktu di berbagai tingkat sistem kesehatan baik secara teratur maupun dalam keadaan darurat; 6. Peningkatan akses dan ketersediaan produk-produk medis, vaksin dan teknologi; 7. Peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat menuju 100% *Universal Health Coverage* (UHC); dan 8. Optimalisasi strategi preventif dan promotif, seperti digitalisasi 3T dan 5M.m
2	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Melakukan percepatan pemulihan ekonomi melalui: 1. Peningkatan kapasitas kewirausahaan terutama bagi korban PHK; 2. Pelatihan *digital marketing*, fasilitasi promosi bagi UMKM; 3. Kemudahan akses dan prosedur perizinan usaha dan permodalan; 4. Fasilitasi pengembangan ekspor; 5. Regenerasi petani dan nelayan melalui program petani milenial; 6. Pembentukan wirausaha pemula berkolaborasi dengan inkubator bisnis; dan 7. Fasilitasi akses pemasaran dan pembiayaan.
3	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	Melakukan penguatan sistem ketahanan pangan dengan memperhatikan aspek ketersediaan, aspek akses (distribusi), dan aspek pemanfaatan, melalui: 1. Penyediaan pangan baik secara mandiri ataupun mendatangkan dari luar Jawa Barat (ekspor-impor)

NO	PRIORITAS	ARAHAN PROGRAM
		serta menyediakan stok cadangan pangan untuk kejadian pasca bencana; 2. Intensifikasi melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan; 3. Pemberian insentif serta mempermudah akses permodalan bagi petani dan nelayan untuk biaya produksi; 4. Mempermudah akses pasar bagi petani dan nelayan; 5. Peningkatan/Rehabilitasi jaringan irigasi; 6. Peningkatan kualitas SDM (penyuluh dan petani); 7. Penerapan *agriculture* 4.0; 8. Membangun gudang penyimpanan sesuai komoditi; 9. Merancang perubahan pola rantai pasok; 10. Stabilisasi harga pangan; 11. Optimalisasi penganekaragaman konsumsi pangan serta meningkatkan keamanan dan mutu pangan; dan 12. Membangun sistem informasi satu data pangan.
4	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Melakukan penguatan sistem perlindungan sosial melalui: 1. Peningkatan bantuan tunai bagi keluarga miskin khususnya bagi yang terdampak pandemi COVID-19.
5	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	A. Penguatan sistem pendidikan melalui: 1. Pemerataan dan penguatan tata kelola, aksesibilitas, sarana dan prasarana, serta peningkatan mutu pendidikan di daerah; 2. Penguatan sistem pendidikan jarak jauh; 3. Penguatan program vokasi; dan 4. Bantuan hukum bagi tenaga pendidik. B. Pemajuan kebudayaan untuk pembentukan karakter melalui pemanfaatan sekolah sebagai pusat pengembangan kebudayaan
6	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Penguatan sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana melalui: 1. Pengembangan sistem mitigasi bencana; 2. Pemetaan (*mapping*) daerah rawan bencana; dan 3. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan yang modern.
7	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Melakukan peningkatan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah melalui: 1. Digitalisasi pelayanan publik (administrasi hingga prosedur perizinan usaha); 2. Peningkatan sarana dan prasarana media digital; 3. Pelatihan digitalisasi bagi aparatur terkait.
8	Gerakan Membangun Desa	Mewujudkan desa yang mandiri, yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana prasarana desa, melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	Melakukan peningkatan pendidikan agama dan tempat ibadah melalui: 1. Peningkatan fungsi, kualitas dan kuantitas tempat peribadatan melalui pembangunan sarana dan prasarana dan penguatan tata kelola/manajemen tempat ibadah;

NO	PRIORITAS	ARAHAN PROGRAM
		2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan agama; dan 3. Peningkatan kemampuan manajerial pendidikan keagamaan.
10	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Melakukan pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup melalui: 1. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur melalui KPBU dan sumber pendanaan lainnya; 2. Pembangunan dan revitalisasi jalan provinsi; 3. Akselerasi pembangunan jalan tol dengan koordinasi multi pemangku kepentingan; 4. Pembangunan dan peningkatan jalan di perbatasan antar provinsi maupun perbatasan antar kabupaten/kota; 5. Pembangunan jalan alternatif, jalan khusus maupun jalan lingkar di kabupaten/kota; 6. Pembangunan/Peningkatan jalan baik horizontal maupun vertikal di Provinsi Jawa Barat bagian selatan, dan infrastruktur yang menghubungkan pusat ekonomi; 7. Bantuan dana untuk perbaikan/peningkatan jalan kabupaten/kota; 8. Dukungan Pembangunan transportasi berbasis rel dan transportasi massal berbasis jalan di 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Bodebek, Bandung Raya dan Cirebon ; 9. Pembangunan dan rehabilitasi terminal tipe B, penyediaan fasilitas lalu lintas, pemantauan lalu lintas, dan sistem pengendalian transportasi; 10. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di DAS Citarum yang direplikasi untuk penanganan DAS Ciliwung, DAS Cilamaya serta Sub DAS Cileungsi dan Sub DAS Cikeas serta DAS lainnya melalui Penanganan lahan kritis, air limbah domestik, persampahan, limbah industri, limbah peternakan, limbah perikanan, pengelolaan sumber daya air, edukasi dan penegakan hukum; 11. Pengembangan kawasan pengolahan persampahan tuntas; dan 12. Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan kritis.
11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	1. Pembangunan atau penataan destinasi dan infrastruktur pariwisata; 2. Pembenahan amenitas, atraksi dan akses pariwisata; 3. Pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal; 4. Standarisasi dan sosialisasi protokol kesehatan yang berbasis pada *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE); 5. Promosi pariwisata dan ekonomi kreatif; 6. Pembangunan pusat budaya; 7. Pengembangan sentra industri ekonomi kreatif; dan 8. Pengembangan pengelolaan kawasan ekonomi khusus pariwisata.

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Selain penjabaran pelaksanaan prioritas pembangunan di atas, juga dilakukan upaya-upaya transformasi pembangunan di Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan upaya-upaya adaptasi terhadap situasi pandemi

COVID-19 melalui program-program Jabar Juara, meliputi pesantren juara, masjid juara, ulama juara, kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara ibu juara, millenial juara, perguruan tinggi juara, SMK juara, transportasi juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, energi juara, nelayan juara, pariwisata juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, UMKM juara, wirausaha juara, birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, BUMD juara.

Upaya penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1
Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Sumber: Hasil Analisa Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024,

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, di antaranya sebagai berikut: **Pilar Pertama** Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; **Pilar Kedua** Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; **Pilar Ketiga** Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan **Pilar Keempat** Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

Ketujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

   Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

   a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
   b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan

harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
b. Distribusi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ke wilayah belum berkembang;
c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
d. Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

   Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

   a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
   b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
   c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
   d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
   e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
   f. Pengentasan kemiskinan; dan
   g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

   Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

a. Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
b. Memajukan kebudayaan;
c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
e. Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

   Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

   a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
   b. Peningkatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam pembangunan;
   c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
   d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
   e. Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

   Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

   a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
   b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
   c. Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

   Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi, dan tata kelola keamanan siber;
d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan RKPD tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan tahun kedua pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 bersumber dari Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 disajikan sebagai berikut.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jawa Barat Juara Lahir Batin: Pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi: Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan 5 (lima) misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.

   Konsep Jawa Barat Juara secara "batin" sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Provinsi Jawa Barat. Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik dan berjiwa besar. Selain Masjid, pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat yang bertaqwa juga dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun lingkungan masyarakat yang damai, tenteram, dan bahagia.

2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

   Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat, agar rakyat Provinsi Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan, perempuan Provinsi Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya serta dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

   Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

   Misi 3 dalam penjabaran Visi Provinsi Jawa Barat Juara Lahir Batin

dengan Inovasi dan Kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, meningkatkan efisiensi distribusi logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten serta antar provinsi. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.

   Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Provinsi Jawa Barat. Ekonomi kerakyatan yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Provinsi Jawa Barat. Penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses dan menghubungkan antar pelaku ekonomi secara cepat dapat mengatasi ketimpangan antar kawasan perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

   Dalam tata kelola pemerintahan, *good governance* atau tata kelola yang baik harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan 8 (delapan) pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan, dan akuntabel.

   Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merepresentasikan *good governance* melalui penerapan Provinsi Cerdas (*Smart Province*) untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal.

Kelima misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 21 sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran: meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi;
2. Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat; (2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan; (3) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; (4) Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan; dan (5) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional.
3. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran: (1) Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal; dan (2) Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial;
4. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; (2) Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; (3) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan (4) Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan.
5. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat; (2) Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik; dan (3) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.
6. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran:

(1) Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri; (2) Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif; (3) Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat; dan (4) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.

7. Terwujudnya *good governance* dan *whole of government*, dengan sasaran: (1) Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel; dan (2) Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Perwujudan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Barat didasarkan pada nilai-nilai sebagai prinsip pembangunan yang hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat. Nilai pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi:

Religius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Jawa Barat Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Kerakyatan dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat didukung oleh pendayagunaan modal dasar pembangunan, yaitu:

1. Karakteristik masyarakat Provinsi Jawa Barat yang religius dan berbudaya adil yang mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan;

2. Posisi geografis Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan ibukota negara menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai lintasan utama arus regional penumpang dan barang koridor Sumatera-Jawa-Bali;
3. Keanekaragaman sumber daya alam hayati dan sumber daya buatan serta sumber daya manusia produktif menjadi potensi pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;
4. Keragaman budaya Provinsi Jawa Barat merupakan modal sosial yang akan mempercepat proses pembangunan; dan
5. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil menjadi pendukung pelaksanaan pembangunan.

Perumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan penjabaran visi dan misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

Indikasi pencapaian Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, ditandai dengan:

1. Provinsi termaju dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu, akuntabel, dan berbasis ilmu pengetahuan.
2. Provinsi termaju dalam bidang pengembangan masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi (*society development*).
3. Provinsi termaju dalam bidang pengelolaan pertanian dan kelautan.
4. Provinsi termaju dalam bidang energi baru dan terbarukan.
5. Provinsi termaju dalam bidang industri manufaktur, industri jasa, dan industri kreatif.
6. Provinsi termaju dalam bidang infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan.
7. Provinsi termaju dalam bidang pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Adanya pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Ditinjau dari dimensi ekonomi, dampak pandemi COVID-19 ditandai dengan perlambatan konsumsi masyarakat, penurunan investasi, penurunan *output* di berbagai sektor terutama manufaktur, konstruksi dan jasa. Pada dimensi sosial terjadi penurunan derajat kesehatan masyarakat,

peningkatan angka kematian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran.

Target indikator kinerja tujuan dan sasaran tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami penyesuaian. Penyesuaian target, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan daerah. Indikator makro Provinsi Jawa Barat ditetapkan dengan mempertimbangkan dukungan terhadap pencapaian target indikator makro nasional dan kemampuan Provinsi Jawa Barat dengan adanya pandemi COVID-19. Penentuan proyeksi indikator makro telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta para pakar dan akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu, capaian pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan publikasi BPS.

Sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 pada periode yang sama. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa walaupun periodesasi kedua dokumen rencana ini berbeda dan penetapan RPJMD Provinsi Jawa Barat sebelum RPJMN, namun seluruh sasaran RPJMD dapat mendukung seluruh sasaran RPJMN. Sebuah sasaran RPJMD dapat mendukung lebih dari 1 (satu) sasaran RPJMN sebab lingkupnya masih berkaitan. Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan.

Adapun penjelasan keterhubungan sasaran-sasaran RPJMD dengan RPJMN, diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran nasional 1: “Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan” didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu “Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif” dan “Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Provinsi Jawa Barat”;

2. Sasaran nasional 2: “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” didukung oleh 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu “Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi” dan “Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian”;
3. Sasaran nasional 3: “Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera” memiliki keterkaitan dengan 3 (tiga) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu: “Jawa Barat sebagai daerah Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang mandiri”; “Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa”; dan “Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan”;
4. Sasaran nasional 4: “Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu: “Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak” dan “Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih, dan akuntabel”;
5. Sasaran nasional 5: “Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk” memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat “Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat”;
6. Sasaran nasional 6: “Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: “Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan” dan “Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan”;
7. Sasaran nasional 7: “Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda” memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: “Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak” dan “Meningkatnya peran pemuda dalam

pembangunan, masyarakat berolahraga, dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional";

8. Sasaran nasional 8: "Terwujudnya pengentasan kemiskinan" memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu: "Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat" dan "Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan yang mandiri";
9. Sasaran nasional 9: "Meningkatnya produktivitas dan daya saing" didukung oleh sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat: "Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan";
10. Sasaran nasional 10: "Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya" didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat: "Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal";
11. Sasaran nasional 11: "Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan" didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat: "Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal";
12. Sasaran nasional 12: "Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial" didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat, yakni "Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi";
13. Sasaran nasional 13: "Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat" didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat, yakni "Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi";
14. Sasaran nasional 14: "Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa" memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu: "Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi" dan "Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak";
15. Sasaran nasional 15: "Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif"

didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat, yakni "Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan";

16. Sasaran nasional 16: "Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar" memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: "Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik" dan "Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat";
17. Sasaran nasional 17: "Meningkatnya konektivitas wilayah" didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat: "Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian";
18. Sasaran nasional 18: "Meningkatnya layanan angkutan umum masal di 6 (enam) kota metropolitan" didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat: "Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian";
19. Sasaran nasional 19: "Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien" didukung oleh sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat, yakni "Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok";
20. Sasaran nasional 20: "Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi" memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat: "Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel";
21. Sasaran nasional 21: "Peningkatan kualitas lingkungan hidup" memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat: "Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat";
22. Sasaran nasional 22: "Peningkatan ketahanan bencana dan iklim" memiliki keterkaitan dengan 2 (dua) sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: "Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana", dan "Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat";
23. Sasaran nasional 23: "Pembangunan rendah karbon" memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat:

"Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat"; dan

24. Sasaran nasional 24: "Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik" memiliki keterkaitan dengan beberapa sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu: "Terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial"; "Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel"; dan "Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif".

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN		Realisasi		TARGET		KET
						2019	2020	2021	2022	
Visi :Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi										
Misi 1: Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban										
1.1	Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial			a.	**Indeks Demokrasi (poin)**	**69,09**	**69,09****	**70,79**	**71,79**	
		1.1.1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	68,50	68,50**	68,60	69,10	
				b.	Indeks Demokrasi (Poin)	69,09	69,09**	70,79	71,79	
Misi 2: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif										
2.1	Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat			a.	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)**	**72,03**	**72,09**	**72,19**	**72,57**	
		2.1.1	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	a.	Persentase Penduduk Miskin (persen)	6,82	8,43	7,77	7,30-7,90*	
				b.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	7,99	10,46	10,45	9,70*	
		2.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan	a.	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	72,85	73,04	73,06	73,09	

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN		Realisasi		TARGET		KET
						2019	2020	2021	2022	
			pelayanan kesehatan		(tahun)					
		2.1.3	Meningkatnya Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	a.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Poin)	69,48	69,48**	69,6	69,8	
				b.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Persen)	89,26	89,26**	89,30	89,42	
		2.1.4	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	a.	Rata–Rata lama sekolah (tahun)	8,37	8,55	8,58	8,60	
				b.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,48	12,50	12,52	12,54	
		2.1.5	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	a.	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	50,00**	50,00**	50,00	52,00	
2.2	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah			a.	**Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)**	**17,43**	**37,69**	**19,56**	**24,89**	
		2.2.1	Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	a.	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)	17,43	37,69	19,56	24,89	
		2.2.2	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial	a.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban (poin)	77,50	88,40	72,00	74,00	

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN		Realisasi		TARGET		KET
						2019	2020	2021	2022	
Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah										
3.1	Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan			a.	**Indeks Williamson (poin)**	**0,665**	**0,692**	**0,659**	**0,655**	
				b.	**Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)**	**46,13**	**39,06**	**41,00**	**44,00**	DBMPR / Dishub Bid Infraswil Bappeda
		3.1.1	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	a.	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	1320	1.146,6	1.050	1.100	
		3.1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	a.	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	46,13	39,06	41,00	44,00	DBMPR / Dishub Bid Infraswil Bappeda
		3.1.3	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a.	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,67	0,69	0,70	0,71	
		3.1.4	Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan	a.	Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (Usulan)	0	3	0	1	
3.2	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan			a.	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)**	**52,12**	**61,59**	**60,78**	**61,19**	

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN		Realisasi		TARGET		KET
						2019	2020	2021	2022	
		3.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)	52,12	61,59	60,78	61,19	
				b.	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	3,85	3,87	4,29	4,75	
				c.	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (persen)	N/A	52,28	51,70	52,80	Disperkim
		3.2.2	Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik	a.	Indeks Penggunaan Air (Poin)	1,1920	1,1927	1,1922	1,1912	
		3.2.3	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	a.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Poin)	152,13	145,82	149,00	147,00	
Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.										
4.1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi			a.	**Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) (Rp. Triliun)**	**2.125,16**	**2.088,84**	**2.224,99**	**2.376,70**	
				b.	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (persen)**	**5,07**	**-2,44**	**3,15**	**5,00***	
		4.1.1	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri	a.	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	85,20	84,80	84,00	84,80	
				b.	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	112,36	101,41	102,25	103,39	

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN		Realisasi		TARGET		KET
						2019	2020	2021	2022	
		4.1.2	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	a.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	6,48	2,85	2,91	2,99	
		4.1.3	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	a.	Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)	4,04	-4,22	2,78	3,40	
				b.	Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	7,51	-7,94	3,23	4,01	
		4.1.4	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah)	535,72	493,96	501,52	515,31	
				b.	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)	21,10	19,41	19,90	20,50	
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif A4ntara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota										
5.1	Terwujudnya *good governance* dan *whole of government*			a.	**Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)**	**BB**	**BB****	**BB (78,01)**	**A (80,01)**	
		5.1.1	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel	b.	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	BB	BB**	BB (78,01)	A (80,01)	
		5.1.2	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.	a.	Tingkat efektivitas kerja sama Daerah (%)	61,22	73,43	56,00	58,00	

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

*) Permendagri Nomor 17 Tahun 2021

**) Data realisasi tahun 2019, tahun 2020 akan release pada TW II tahun 2021

Seluruh sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sesuai tabel diatas dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2022 yang ditetapkan pemerintah sebanyak 6 (enam) sasaran. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2022, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yaitu "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**", dengan 4 (empat) Fokus Pembangunan, yaitu: (1) Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi; (2) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; (3) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial; dan (4) Reformasi Sistem Ketahanan Bencana. Agenda untuk setiap fokus pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Agenda Untuk Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2022

Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi	Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Reformasi Sistem Ketahanan Bencana
Industri • Pemulihan rantai pasok, peningkatan keterampilan SDM, restrukturisasi permesinan serta peningkatan standar produk; • Akselerasi industri substansi impor khususnya makanan, minuman, kimia dan farmasi. **Pariwisata** • Peningkatan aksesibiltas, pemulihan dan peningktana frekuensi dan jalur penerbangan, diskon avur dan biaya bandara; • Peningkatan wisatawan domestik, pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik, diskon tiket, pertemuan K/L di daerah; • Peningkatan pemasaran wisata, insentif dan paket wisata khusus untuk organisasi yang sudah pulih, optimalisasi pameran terintegrasi dengan pasar international; • Peningkatan *event,* olah raga, seni budaya, dan MICE • Percepatan kesiapan destinasi, akselerasi infrastruktur, standar layanan (transportasi, makanan, minuman, arus wisatawan, kebersihan, keamanan) **Investasi:** Menarik investasi sebesar besarnya untuk menggerakan ekonomi, melalui • Penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian usaha; • Perluasan *positive lists* investasi, didukung kolaborasi lintas K/L dan pemda untuk harmonisasi regulasi dan prosedur, serta fasilitasi pengembangan kemitraan usaha;	Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas *health security* terutama *surveilans*, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal.	Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Langkah ini dilakukan utamanya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan, pasca pandemi COVID-19.	Penguatan Sistem Peringatan Bencana

Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi	Reformasi Sistem Kesehatan Nasional	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Reformasi Sistem Ketahanan Bencana
• Percepatan integrasi sistem perizinan; • Promosi investasi terarah; • Pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata dan infrastruktur; *debottlenecking* dan *aftercare* investsi agar tidak pindah ke negara lain.			

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Tema pembangunan RKP Tahun 2022 tersebut dijabarkan dalam bentuk prioritas pembangunan nasional. Pada dokumen Rancangan RKP Tahun 2022, telah ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:

A. Prioritas Nasional (PN) Tahun 2022
   1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
   2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
   3. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
   4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
   5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
   6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
   7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

B. Sasaran Nasional (SN) Tahun 2022
   1. SN 1, Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
   2. SN 2, Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian;
   3. SN 3, Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dengan Mendorong Transformasi dan Akselerasi Pembangunan Wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Tetap Menjaga Momentum Pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera;

4. SN 4, Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan;
5. SN 5, Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk;
6. SN 6, Terpenuhinya Layanan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
7. SN 7, Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
8. SN 8, Meningkatnya Aset Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin dan Rentan;
9. SN 9, Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing;
10. SN 10, Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya;
11. SN 11, Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan;
12. SN 12, Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial;
13. SN 13, Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat;
14. SN 14, Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkukuh Karakter Bangsa;
15. SN 15, Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif;
16. SN 16, Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar;
17. SN 17, Meningkatnya Konektivitas Untuk Mendukung Kegiatan Ekonomi dan Akses Menuju Pelayanan Dasar;
18. SN 18, Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perkotaan;
19. SN 19, Meningkatnya Layanan Energi dan Ketenagalistrikan;
20. SN 20, Meningkatnya Layanan Infrastruktur TIK;
21. SN 21, Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
22. SN 22, Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
23. SN 23, Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan
24. SN 24, Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal; serta

25. SN 25, Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional tersebut, sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada tahun 2021 yaitu masih belum berakhirnya pandemi COVID-19, maka pada tahun 2022 prioritas pembangunan nasional tahun 2022 ditekankan pada PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Risiko dari adanya pandemi COVID-19 yaitu terjadinya perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, serta perubahan dan pergeseran rencana, namun menjadi pemicu terjadinya optimalisasi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

4.2.2 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain:

a. Permasalahan Kesehatan
   1. Peningkatan sarana prasarana kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit dan puskesmas diberbagai daerah, penambahan tenaga kesehatan, ketersediaan mobil pelayanan *Ambulance* di setiap desa/kelurahan, penyediaan alat-alat kesehatan, penyediaan obat-obatan, pembangunan MCK, serta penyediaan alat-alat kesehatan pandemi COVID-19 yang masih banyak di butuhkan di masyarakat.
   2. Terkait dengan pelayanan kesehatan melalui jalur BPJS mohon untuk ditingkatkan karena sering terjadi kendala dan cenderung mempersulit bagi pasien, selain itu perlu meningkatkan jumlah subsisdi bagi BPJS kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peningkatan jumlah kuota BPJS bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK).
   3. Terkait dengan vaksinasi COVID-19, mohon untuk memberikan sosialisasi yang masif kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi isu-isu yang meresahkan di masyarakat.

4. Penguatan sarana dan prasarana posyandu di berbagai daerah serta pelatihan kader bagi kader posyandu agar bisa lebih produktif.
5. Agar vaksin yang aman dan halal dapat diprioritaskan bagi warga Jawa Barat yang muslim. Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, serta memberikan sosialisasi dan penjelasan sebaik-baiknya ke warga masyarakat di Provinsi Jawa Barat.
6. Anggaran Alat Pelindung Diri (APD) di pusat layanan kesehatan bagi masyarakat Jawa Barat harus tersedia dengan memadai, juga pemberian komponen gaji/insentif bagi petugas kesehatan yang sedang bertugas menangani pandemi COVID-19.

b. Permasalahan Pendidikan

1. Permohonan penguatan sistem pembelajaran jarak jauh, diantaranya berkaitan dengan fasilitasi peralatan pembelajaran, penguatan jaringan internet di *blank spot* area, distribusi kuota data internet gratis secara merata dan tepat sasaran. Mengingat trend pendidikan jarak jauh ini akan terus berlanjut seiring dengan kemajuan teknologi dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pasca pandemi COVID-19 perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terutama peningkatan mutu pembelajarannya.
2. Permohonan pembangunan dan rehab Ruang Kelas Baru (RKB) dan sarana prasarana penunjang lainnya bagi pendidikan formal di berbagai tingkatan, baik swasta maupun negeri, pembelian lahan sekolah untuk SMK.
3. Permohonan bantuan terhadap pendidikan informal seperti pondok pesantren, MDTA, RA, TK, PAUD, agar dilakukan secara merata di berbagai daerah.
4. Permohonan pengangkatan PNS dan P3K bagi guru honorer, insentif Operator Sekolah, serta peningkatan insentif untuk guru PAUD dan Madrasah yang masih jauh dari kata layak untuk para pendidik, maka mohon sekiranya diberikan apresiasi insentif yang layak bagi mereka.
5. Pengadaan pelatihan-pelatihan *life skill* dan *soft skill* yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini untuk mengurangi pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Barat.

6. Perhatian terhadap guru honorer yang mengajar di sekolah di bawah Kemendikbud atau Kemenag sudah berpuluh tahun tidak mendapatkan apresiasi yang layak.
7. Perlunya anggaran untuk peningkatan literasi dengan menambahn dan memperbaharui buku-buku bacaan di sekolah-sekolah baik SMA-SMK termasuk bantuan untuk perpustakaan.

c. Permasalahan Ekonomi dan Permodalan
   1. Permohonan bantuan permodalan dan pengembangan untuk wirausaha masyarakat, seperti UMKM, Koperasi, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), kelompok-kelompok pemberdayaan, pengrajin, serta BUMDes dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
   2. Berkaitan dengan bidang pertanian, permohonan permodalan, pemberdayaan dan pendampingan kelompok tani, pengadaan alat-alat pertanian dan argo bisnis holtikultura, bibit, jaringan irigasi pertanian, serta pupuk gratis bagi para petani dalam rangka penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.
   3. Bantuan modal untuk kelompok ternak dan perikanan, pengadaan bibit, pelatihan pembuatan pakan ternak, serta bantuan untuk pengadaan perahu dan alat tangkap ikan bagi nelayan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.
   4. Mempermudah akses permodalan serta perizinan usaha bagi masyarakat.
   5. Berkaitan bantuan sosial, agar pemerintah melakukan secara berkesinambungan selama pandemi belum berakhir, serta senantiasa memperbaharui data penerima bantuan agar tepat sasaran dalam penyalurannya.
   6. Terkait dengan banyaknya masukan terkait dengan perlunya lapangan pekerjaan, mohon untuk dapat mempermudah akses, ketersediaan maupun fasilitas terkait lapangan pekerjaan, pelatihan tenaga kerja, pembangunan UPT Balai Latihan Kerja (BLK), serta memfasilitasi lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas.
   7. Pencegahan dan penangguhan pandemi COVID-19 telah memasuki masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali, sehingga mengakibatkan terjadinya

perlambatan ekonomi di masyarakat. Untuk itu mohon perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan-kegiatan perekonomian bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

8. Kelangkaan pupuk masih terjadi di sebagian daerah, masih diperlukannya subsidi pupuk agar kebutuhan petani terpenuhi. Perlunya peningkatan sarana dan prasaranan untuk sanggar seni, untuk meningkatkan pariwisata daerah.
9. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di haruskan menambah jumlah anggaran untuk bantuan hukum gratis bagi masyarakat.
10. Perlunya peraturan daerah terkait perlindungan pekerja perempuan di Provinsi Jawa Barat, termasuk peraturan daerah terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
11. Pembentukan perda kewirausahaan.
12. Pemberian bantuan untuk melakukan riset dan penelitan dengan melibatkan akademisi yang ahli di bidangnya masing-masing dengan target mengembangkan produk-produk pertanian, perikanan, dan yang lainya.
13. Penambahan anggaran untuk pertanian khususnya pembenihan komoditas kopi, teh, vanila, dan kelapa.
14. Dilakukan kajian yang matang, serta implementasi vaksinisasi yang telah dituntaskan.

d. Permasalahan Infrastruktur dan Lainnya

1. Perbaikan jalan lingkungan permukiman, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)/turap, rambat beton jalan, tanggul jalan, pembangunan jembatan drainase, pembangunan/penghidupan situ, normalisasi sungai, serta pembangunan/perbaikan jembatan di kabupaten/kota.
2. Perlu adanya program terombosan untuk mengatasi daerah rawan banjir akibat alih fungsi lahan, penyempitan serta pendangkalan saluran pembuangan air, penataan sungai, serta pembuatan sumur resapan.
3. Bantuan mobil operasional kebencanaan serta oprimalisasi upaya mitigasi untuk daerah rawan bencana beserta mempercepat upaya *recovery* setelah bencana.

4. Permohonan bantuan pembangunan/perbaikan/pengembangan sarana peribadatan baik mesjid, pondok pesantren/kobong/asrama santri, mushola, majelis taklim, serta termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
5. Permohonan bantuan untuk mengatasi masalah sanitasi dan jaringan air bersih serta pembangunan sumur bor.
6. Pengadaan sarana penerangan jalan umum.
7. Permohonan perbaikan rumah tidak layak huni.
8. Penyediaan lahan pemakaman, pemeliharaan, dan pembuatan taman kota.
9. Permohonan peningkatan sarana dan prasarana olahraga masyarakat, seperti pembangunan lapangan sepakbola, perbaikan lapangan serbaguna PPIK, lapangan bola voli, lapangan futsal, tenis meja, serta pembangunan GOR desa.
10. Permohonan alat-alat kesenian, sarana sanggar seni, pelestarian kesenian di daerah, serta pengembangan pencak silat.
11. Pengadaan teknologi tepat guna, serta penyediaan alat-alat keterampilan ibu-ibu.
12. Permohonan bantuan untuk inovasi teknologi dalam penanggulangan sampah terutama di perkotaan, alat pengolahan sampah organik, alat transportasi serta pembuatan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di daerah-daerah.
13. Pendampingan pengolahan pasca panen buah-buahan agar memiliki nilai jual lebih, seperti mesin pengolahan kopi.
14. Permohonan pengembangan serta mempromosikan destinasi wisata pedesaan.
15. Permohonan penguatan sarana prasarana dan SDM perangkat desa, seperti pembangunan dan rehab kantor desa, insentif perangkat desa, penguatan kapabilitas perangkat desa terutama berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat, serta peningkatan jumlah anggaran dana desa karena dampak kebijakan *refocusing* anggaran sehingga program desa lainnya terbengkalai.
16. Memasuki musim hujan, beberapa daerah mengalami musibah banjir dan tanah longsor, sehingga merusak infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan, jembatan dan saluran air/irigasi. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya konkrit Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat untuk mengatisipasi pemasalahan tersebut di atas.

17. Hampir di setiap desa di kabupaten/kota banyak permohonan bantuan berkaitan dengan aspalisasi/betonisasi jalan poros desa dengan panjang dan lebar disesuaikan dengan kondisi desa.
18. Beberapa kantor Kepala Desa mengalami kerusakan, sehingga terdapat permohonan bantuan berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan kantor Kepala Desa.
19. Di beberapa desa, terdapat permohonan bantuan pembuatan dan perbaikan fasilitas lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat.
20. Beberapa daerah mengajukan pembangunan/perbaikan paving blok di jalan-jalan kecil/trotoar untuk kenyamanan para pejalan kaki.
21. Pembangunan *Fly Over*.
22. Beberapa desa mengajukan pembangunan *Sollar Cell Pump* untuk kebutuhan peningkatan daya listrik mandiri.
23. Regulasi sistem transportasi angkutan umum yang seimbang, agar moda transportasi angkutan umum dan *online* bisa hidup bersama (Kompentran).
24. Program pengorganisiran PKL dilokasi yang strategis.
25. Membangun jembatan sebagai jalan penghubung antar kabupaten/kota, antar kecamatan, dan antar desa, khususnya di daerah-daerah pelosok.
26. Pengembangan energi terbarukan solar, angin, air dan biogas/biomass.
27. Program pelebaran jalan menuju tempat destinasi wisata di kabupaten/kota Se-Jawa Barat.
28. Perlunya program pembinaan dan pemberdayaan eks narapidana ketika kembali ke masyarakat.
29. Perlunya penyegeraan akses jalan cepat (Tol) diberbagai daerah Jawa Barat agar aktifitas yang berhubungan dengan pelayanan provinsi.
30. Perwakilan dari Badan Pengawas Desa berharap kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat agar dapat membuat tempat Sekretariat BPD untuk mendukung kinerja pengawasan desa.
31. Terintegrasinya pembangunan infrastruktur jalan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Harus benar-benar terkonsolidasikan antara APBN dan APBD.

32. Aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB); perlunya pemekaran daerah di kabupaten/kota. Usulan pemekaran DOB ini harus terus dilakukan secara serius dan berkesinambungan bersama usulan pemekaan DOB lainnya yang telah ada.

4.2.3 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis Provinsi Jawa Barat tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2021, arah kebijakan dari RPJMD dan arah kebijakan RKP serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional seperti fenomena Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah pandemi COVID-19 yang mengharuskan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan *refocusing* dan realokasi APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun 2020. Proses penyusunan isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Arah Kebijakan RKP 2022	Isu Global	Isu Strategis Perubahan RPJMD Jabar 2018-2023	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2022	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2022
1. Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Industri 2. Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata 3. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat 4. Meningkatkan Peran UMKM terhadap Ekonomi Nasional 5. Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur 6. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Layanan Digital 7. Meningkatkan Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) 8. Mempercepat Reformasi Perlindungan Sosial 9. Meningkatkan Kualitas SDM dan Inovasi 10. Penanganan COVID-19 dan Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional	Dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19	Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	1. Belum meratanya akses dan partisipasi pendidikan menengah dan tinggi. 2. Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular. 3. Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan kesehatan. 4. Dampak pandemi COVID-19 yang memerlukan percepatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat. 5. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan. 6. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga 7. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan (Sekolah Khusus Olahraga, PPLP, Puslatda) guna pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. 8. Terbatasnya jumlah dan kualitas Sentra Pembinaan Olahraga di Jawa Barat yang memenuhi standar nasional dan internasional. 9. Masih rendahnya perlindungan terhadap budaya lokal Jawa Barat. 10. Kurang optimalnya promosi budaya lokal Jawa Barat di dalam dan luar negeri. 11. Kuatnya pengaruh budaya asing terhadap budaya Jawa Barat. 12. Meningkatnya Angka Kriminalitas	- Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
	Kemiskinan dan kesenjangan serta Pandemi COVID-19	Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial	1. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal 2. Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 3. Lapangan kerja terbatas. 4. Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja. 5. Proporsi penduduk bekerja yang tergolong	- Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial

Arah Kebijakan RKP 2022	Isu Global	Isu Strategis Perubahan RPJMD Jabar 2018-2023	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2022	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2022
			"pekerja rentan/*vulnerable employment*" cukup tinggi lebih dari 50 persen. 6. Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian mengalami penurunan. 7. Masih banyaknya jumlah perdagangan perempuan dan anak di Jawa Barat. 8. Masih banyaknya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak.	
	Pemerataan pembangunan, kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim	Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Konektivitas daerah yang mendukung peningkatan dan pemerataan perekonomian Jawa Barat belum optimal 2. Jaringan jalan belum merata, masih terdapat ketimpangan antara kawasan jalur utara, tengah dan selatan sehingga tingkat mobilitas antar wilayah terbatas 3. Umur teknis layanan jalan sudah terlampaui 4. Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan provinsi belum optimal 5. Pergerakan barang maupun penumpang antar wilayah belum efisien 6. Akses dan standardisasi terhadap layanan listrik belum merata 7. Pemanfaatan energi final belum efisien dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan belum optimal 8. Penyediaan sumber daya air untuk aktivitas domestik dan industri belum optimal sehingga penggunaan air tanah meningkat 9. Umur jaringan irigasi sudah terlalu tua dengan tingkat kerusakan tinggi sehingga rentan terhadap kejadian bencana alam 10. Cakupan pelayanan air minum belum optimal 11. Cakupan pelayanan air limbah domestik belum optimal 12. Pelayanan persampahan belum optimal 13. Penyediaan perumahan masih terkendala pelayanan PSU yang masih terbatas dan tidak memenuhi standar	- Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Arah Kebijakan RKP 2022	Isu Global	Isu Strategis Perubahan RPJMD Jabar 2018-2023	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2022	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2022
			14. Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan terjadi akibat pengendalian pemanfaatan ruang dalam melaksanakan pembangunan belum optimal 15. Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pembangunan belum diantisipasi secara optimal 16. Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas domestik, industri, pertanian, dan pertambangan belum optimal 17. Penerapan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim belum optimal 18. Degradasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) mengakibatkan luas lahan kritis meningkat 19. Upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana belum optimal 20. Penanganan dampak pandemi COVID-19 yang memerlukan percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat mengakibatkan pembangunan infrastruktur sedikit terhambat.	
	Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi menurun, karena pandemi COVID-19 2. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi, minimnya akses permodalan koperasi dan UMKM terhadap Perbankan. 3. Belum optimalnya akses pemasaran dan promosi bagi produk Koperasi dan UMKM 4. Belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil. 5. Belum meratanya realisasi investasi di kabupaten/kota 6. Belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN 7. Belum optimalnya akses (konektivitas), amenitas dan atraksi pada destinasi wisata.	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan

Arah Kebijakan RKP 2022	Isu Global	Isu Strategis Perubahan RPJMD Jabar 2018-2023	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2022	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2022
			8. Produktivitas komoditas pertanian masih belum optimal 9. Menurunnya luas lahan pertanian yang disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian 10. Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir. 11. Eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran 12. Pelabuhan perikanan Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal 13. Pemasaran hasil kelautan dan perikanan belum terintegrasi 14. Masih rendahnya tingkat pengguasaan teknologi oleh nelayan 15. Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020 masih di bawah angka 100 poin, ini menandakan pola konsumsi pangan di Provinsi Jawa Barat belum seimbang 16. Pengelolaan hutan belum optimal dan rendahnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu 17. Degradasi lahan masih tinggi di Daerah Aliran Sungai 18. Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok 19. Belum optimalnya rantai pasok pemasaran 20. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB meningkat tetapi pertumbuhan sektor industri cederung melambat 21. Aktvitas perekonomian belum secara optimal menerapkan prinsip rendah karbon dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim 22. Dampak pandemi COVID-19 yang memerlukan percepatan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat.	

Arah Kebijakan RKP 2022	Isu Global	Isu Strategis Perubahan RPJMD Jabar 2018-2023	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2022	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2022
	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	1. Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan masyarakat desa 2. Belum sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dengan kabupaten/kota 3. BUMDes belum dioptimalisasi sebagai katalis perekonomian desa 4. Belum optimalnya pembangunan desa mencakup: 1) peningkatan pelayanan dasar 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan 3) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif 4) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa 5. Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan 6. Belum optimalnya Penganggaran: CSR dan *Crowdfunding* 7. Penerapan *e-Government* belum ditindaklanjuti dengan kebijakan/ aturan hukum daerah 8. Belum adanya standar keamanan informasi 9. Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dikelola oleh Bidang statistik 10. Belum optimalnya layanan data dan informasi statistik sektoral 11. Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (*security awarness*) 12. Permasalahan pembudayaan kegemaran membaca di Provinsi Jawa Barat, 13. Akses penggunaan arsip belum efektif. 14. Penelusuran dan identifikasi arsip kesejarahan belum efektif. 15. Belum optimalnya kelengkapan data dan	Reformasi birokrasi

Arah Kebijakan RKP 2022	Isu Global	Isu Strategis Perubahan RPJMD Jabar 2018-2023	Permasalahan Pembangunan RKPD Tahun 2022	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2022
			infomasi, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan 16. Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan. 17. Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan masyarakat. 18. Munculnya berbagai ancaman serta gangguan terhadap ketenteraman dalam masyarakat sehingga menghambat pembangunan di masyarakat yang berdampak pada potensi kerawanan di masyarakat. 19. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah. 20. Belum optimalnya strukturisasi organisasi pemerintahan daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. 21. Belum optimalnya promosi dan informasi potensi pembangunan di Jawa Barat. 22. Meningkatnya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan LGBT. 23. Kecenderungan peningkatan konflik sosial. 24. mengurangi potensi konflik antar umat beragama. 25. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. 26. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.	

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2021
Catatan:
Sumber perumusan isu strategis:
1. Permasalahan pembangunan dalam RPJMD;
2. Permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD;
3. Arah kebijakan RPJMD; dan
4. Arah kebijakan RKP.

Berdasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus seperti pada Tabel 4.3, maka 5 (lima) isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut:

1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Kemiskinan, Pengangguran, dan Masalah Sosial;
3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan;
5. Reformasi Birokrasi.

Adapun penjelasan terhadap masing-masing isu strategis, sebagai berikut:

1. Kualitas Nilai Kehidupan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Provinsi Jawa Barat mampu bersaing secara global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain masih rendahnya pelayanan pendidikan di Provinsi Jawa Barat yang ditunjukkan oleh capaian APK dan APM untuk pendidikan menengah yang belum mencapai 100 persen. Selain peningkatan pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah pemerataan distribusi guru antardaerah, pemerataan jumlah sekolah masih terdapat 19 (sembilan belas) kecamatan yang tidak terdapat sekolah (SMA/SMK) Negeri dari total kecamatan di Provinsi Jawa Barat.

Selain hal tersebut di atas, masalah tata kelola juga terjadi seperti masih banyaknya sekolah yang terakreditasi C dan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan, tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, serta belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dikategorikan sebagai bencana non alam karena wabah penyakit. Kejadian pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat memiliki dampak sangat luas di berbagai sektor mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kondisi kerentanan sosial akibat pandemi ini menyebabkan ketahanan keluarga dan masyarakat mengalami penurunan sehingga produktivitas menurun, mata pencaharian terganggu, serta munculnya kepanikan sosial di tengah masyarakat.

Penyesuaian-penyesuaian lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terkait Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), yaitu:

a. Penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan di fasilitas umum;
b. Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat;
c. Perpaduan pembelajaran (*Blended Learning*) melalui daring (*online*) dan luring (*offline*);
d. Konsultasi pengobatan jarak jauh (*Telemedicine*);
e. Pembatasan jumlah pengunjung pada pelayanan kesehatan dan fasilitas umum;
f. Peningkatan digitalisasi pelayanan publik; dan
g. Efisiensi belanja barang dan jasa pemerintah, yang meliputi: perjalanan dinas, rapat di luar kantor, serta makan dan minum rapat.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Provinsi Jawa Barat pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan rasio balita per satuan posyandu yang cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukan dengan 1 (satu) dari 4 (empat) anak usia 0 (nol) sampai 59 bulan di Provinsi Jawa Barat mengalami *stunting*. Rasio layanan kesehatan bagi masyarakat

Provinsi Jawa Barat masih rendah yang dikarenakan kurangnya aksesibilitas ke tempat layanan kesehatan. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti peningkatan dan pemenuhan alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit dan/atau puskesmas. Pemulihan dampak pandemi COVID-19 dilakukan melalui rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan, serta pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19. Dalam kondisi pandemi COVID-19, masyarakat tetap dituntut untuk terus berdaya guna dan beradaptasi dengan pola kehidupan baru/beradaptasi dalam kondisi pandemi COVID-19.

Pemberdayaan perempuan di Provinsi Jawa Barat saat ini masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi, politik, hukum, dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Penguatan industri rumahan dan UKM bagi perempuan memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan perempuan. Dari perspektif pembangunan, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Provinsi Jawa Barat sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan Provinsi Jawa Barat.

2. Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya adalah pola hidup konsumtif. Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan adalah Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2). Kemiskinan lebih banyak terjadi di desa dibandingkan dengan perkotaan, hal ini disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup

masyarakat di desa termasuk penurunan volume perdagangan hasil-hasil pertanian akibat penurunan permintaan pasar dampak pandemi COVID-19.

Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan. Faktor pemicu angka pengangguran tinggi di Provinsi Jawa Barat adalah keterbatasan kesempatan kerja baru, tidak adanya *link and match* antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja, dan kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri termasuk dampak pandemi COVID-19 yang menambah jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. PPKS di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasaan anak, perempuan, dan *human trafficking*, belum optimalnya penanganan PPKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial, dan masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan PSKS.

Selain dampak sosial yang terjadi selama pandemi COVID-19, perlambatan pertumbuhan ekonomi sangat dirasakan di Provinsi Jawa Barat. Penurunan penerimaan pajak terutama dari sektor perdagangan, terganggunya pasokan bahan baku, dan gelombang PHK yang begitu besar, sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga memerlukan strategi pemulihan yang tepat.

Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman ideologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intensif demi terciptanya kerukunan umat beragama.

Provinsi Jawa Barat pada awal tahun 2020 menjadi salah satu provinsi terdampak oleh penyebaran pandemi COVID-19. Di samping aspek kesehatan, dampak yang ditimbulkan adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran dan sektor lainnya.

Agenda pembangunan tahun 2022 diarahkan dalam rangka rekonstruksi dan rehabilitasi ekonomi, reformasi sistem kesehatan daerah, reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana dan reformasi sistem perlindungan sosial.

3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Pemerataan pembangunan dan kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerataan pembangunan dituangkan dalam rencana wilayah pengembangan, daya dukung lingkungan dituangkan dalam penetapan kawasan lindung 45 persen, sedangkan daya tampung lingkungan dituangkan dalam rencana pola ruang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, serta kawasan budidaya lainnya. Namun di sisi lain, dinamika pembangunan dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang lebih mengutamakan kepentingan investasi dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, sehingga berkembang tanpa prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, serta tidak menciptakan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan yang sudah berkembang, dan sebagian lainnya berlokasi di kawasan yang berfungsi lindung atau di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Kondisi ini menyebabkan pemerataan pembangunan tidak tercapai, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diutamakan.

Pemerataan pembangunan perlu mendapat dukungan dalam penetapan sistem perkotaan dan jaringan prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri. Konektivitas perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pemerataan pembangunan berbasis komunitas diwujudkan melalui pemenuhan sarana prasarana permukiman seperti penyediaan perumahan, peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan air baku, serta pengolahan persampahan dan limbah. Pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan menjadi dasar peningkatan pertumbuhan dan

pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga menjadi penting untuk diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan wilayah dan sektoral.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan diwujudkan pula melalui antisipasi dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana, sehingga meminimalisir kerugian ekonomi, memberi kenyamanan, dan berkelanjutan. Antisipasi dampak perubahan iklim melalui peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, diharapkan dapat meminimalkan kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi, serta mampu mempertahankan kesehatan masyarakat.

Pengolahan sampah terpadu lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal/terpusat, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama peningkatan cakupan pelayanan dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan air limbah domestik dan industri dalam rangka mengendalikan pencemaran sungai dan pengelolaan terpadu.

Salah satu hal penting dalam isu ini adalah penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Barat masih belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami perlambatan selama beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka semakin berdampak buruk terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 terhadap tahun 2019 mengalami kontraksi.

Sebelum terjadinya pandemi, perekonomian Provinsi Jawa Barat telah dihadapkan dengan beberapa hal, diantaranya belum berkembangnya KUKM, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil, dan belum optimalnya kapasitas *digital*

literacy bagi para pelaku UKM dalam memasarkan produknya, sehingga UKM bisa tetap bertahan di masa pandemi COVID-19.

Terjadinya penurunan realisasi PMA yang disebabkan oleh realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN. Dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial di berbagai negara dan wilayah di Indonesia menyebabkan terjadinya dinamika ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatkan ketidakpastian dalam berusaha sehingga menyebabkan keragu-raguan pasar dalam berinvestasi.

Pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dan memastikan masyarakat kembali memiliki ketahanan sosial pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan amenitas pariwisata, belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota, serta kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata kurang profesional, terlihat dari masih adanya pungli atau pungutan liar di destinasi wisata. Pandemi COVID-19 yang menyebabkan dikeluarkannya kebijakan *lockdown* di berbagai negara, PSBB di berbagai wilayah di Indonesia, *social distancing* di tempat umum, dan pembatasan mobilitas penduduk menyebabkan banyak destinasi wisata, pelaku usaha maupun pelaku seni yang tutup atau tidak melakukan aktivitasnya. Kondisi ini menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisata secara drastis baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Bahkan pada saat PSBB tidak diberlakukan lagi dan diterapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), belum mampu mendorong hidupnya kembali industri pariwisata.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya

pertanian, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian, petani kesulitan dalam akses modal dan pasar, usia petani Provinsi Jawa Barat berada di atas usia produktif dan regenerasi petani masih rendah, teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian Provinsi Jawa Barat; jumlah gudang penyimpanan hasil panen masih terlalu minim. Disamping itu, belum tersedianya pusat distribusi daerah produk pertanian dan rendahnya infrastruktur irigasi.

Pada sektor kelautan dan perikanan terdapat permasalahan yang ditandai oleh turunnya Nilai Tukar Nelayan. Hal tersebut disebabkan oleh eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran mengakibatkan penurunan laju tangkapan (*fish landing*) dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir, pelabuhan perikanan Provinsi Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dan lain-lain), pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematik antara hulu dan hilir, serta masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan.

Pada sektor pangan harus dilakukan antisipasi potensi krisis pangan yang disebabkan oleh adanya pembatasan aktivitas saat pandemi COVID-19. Potensi krisis pangan tidak hanya terjadi pada skala Provinsi Jawa Barat namun pada skala nasional maupun global. Hal ini ditandai dengan ketersediaan stok pangan yang mulai berkurang sehingga mengakibatkan lonjakan harga pada beberapa komoditi pangan. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah antara lain seperti meningkatnya jumlah masyarakat miskin rawan pangan, masyarakat akan kesulitan dalam mendapatkan pangan dari sisi harga dan kualitas sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi gizi masyarakat Jawa Barat.

Pada sektor kehutanan masih terdapat permasalahan yang ditandai oleh degradasi lahan yang masih tinggi di DAS, pengelolaan hutan belum optimal dan rendahnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di kawasan hulu DAS, meningkatnya gangguan ekosistem, dan rendahnya teknologi pemanfaatan sumber daya hutan.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan oleh dominasi barang impor,

kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Provinsi Jawa Barat) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu menurunnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi). Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur pendukung kawasan industri belum terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik, bahan baku industri mayoritas impor, peranan IKM masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikasi.

5. Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, perlu ditingkatkannya profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, serta belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu bagaimana mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk penanganan dampak dari pandemi COVID-19. Sejak kemunculannya di Indonesia, pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak hanya terkait kesehatan dan kematian, namun telah merambat pada timbulnya permasalahan lain, diantaranya sosial, ekonomi, keuangan daerah, dan tidak terlaksananya rencana-rencana pembangunan tahun 2020 akibat pengalihan sebagian besar sumber daya untuk penanganan pandemi COVID-19. Hal ini tentu membutuhkan koordinasi dan kerja sama seluruh aktor pembangunan dan inovasi yang tepat, sehingga diperlukan kualitas SDM ASN yang mampu meningkatkan pelayanan, peningkatan transparansi, penerapan merit sistem, penghapusan jabatan struktural, serta reformasi birokrasi.

Berdasarkan 5 (lima) isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat tahun 2022 yang telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dipilih untuk pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 4.5
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
VISI: TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI							
Misi 1: Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban							
1.1.	Terwujudnya Manusia yang Berketuhanan, Berdemokrasi, Berkebangsaan dan Berkeadilan Sosial	1.1.1.	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	1.1.1.1.	Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan pancasila dalam kehidupan masyarakat	a.	Meningkatkan fasilitasi penguatan sumberdaya dan lembaga keagamaan serta ekonomi umat
						b.	Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan dan kewaspadaan terhadap paham-paham radikalisme dan komunisme melalui penciptaan sistem kewaspadaan dini masyarakat
Misi 2: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia, dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif							
2.1.	Meningkatnya Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat	2.1.1.	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	2.1.1.1.	Mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu	a.	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan/atau terdampak COVID-19
						b.	Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin dan/atau terdampak COVID-19
						c.	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
				2.1.1.2.	Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha	a.	Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar
						b.	Mengembangkan inkubator bisnis
		2.1.2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	2.1.2.1.	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	a.	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing melalui penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai standar WHO.
						b.	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						c.	Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan melalui upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif.
		2.1.3.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	2.1.3.1.	Menguatkan peran keluarga dan kesetaraan gender	a.	Meningkatkan ketahanan keluarga serta peran dan perlindungan perempuan dan anak
		2.1.4.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	2.1.4.1.	Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau	a.	Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah melalui pembentukan *center of excellence* di setiap kabupaten/kota dan pengembangan SMK yang relevan di kawasan metropolitan
						b.	Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah melalui sertifikasi kompetensi
						c.	Pemberlakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) penyelenggaraan pendidikan melalui pendidikan jarak jauh, penyediaan *e-book* gratis di portal pemerintah dengan ditopang kehandalan infrastruktur jaringan TI
						d.	Meningkatkan minat baca masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital
		2.1.5.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga jawa barat di tingkat nasional	2.1.5.1.	Meningkatkan peran *stakeholder* pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	a.	Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif
						b.	Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat
						c.	Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga
2.2.	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang	2.2.1.	Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	2.2.1.1.	Melestarikan kearifan lokal dan kebudayaan Jawa Barat	a.	Meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal
						b.	Memperluas tingkat partisipasi dan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
	Tertib dan Tentram Berbasiskan Kearifan Lokal dan Seni Budaya Daerah						kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan
		2.2.2	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial	2.2.2.1	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat	a. b.	Mengembangkan fasilitasi peningkatan kesadaran hukum masyarakat Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda
Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah							
3.1.	Terwujudnya Percepatan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	3.1.1.	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	3.1.1.1.	Meningkatkan akses layanan listrik yang memenuhi standar	a.	Meningkatkan kualitas operasional instalasi tenaga listrik
						b.	Meningkatkan jangkauan pelayanan listrik untuk kepentingan aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan rumah tangga hingga ke pelosok
		3.1.2.	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	3.1.2.1.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi	a.	Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok
						b.	Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial
				3.1.2.2.	Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal yang handal dan modern	a.	Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau dan antar moda
						b.	Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat, dan ASDP serta mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut, udara dan kereta api, yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis
		3.1.3.	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	3.1.3.1.	Mempercepat pembangunan desa	a.	Memperkuat infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan
						b.	Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan
						c.	Memperkuat pemerintahan desa

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		3.1.4.	Terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan	3.1.4.1.	Optimalisasi penataan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru	a.	Mempercepat pemekaran wilayah yang memiliki potensi untuk menjadi DOB
3.2.	Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	3.2.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	3.2.1.1.	Meningkatkan pengelolaan DAS, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya	a.	Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara
						b.	Meningkatkan kualitas tutupan lahan
						c.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
				3.2.1.2.	Mengembangkan implementasi pembangunan rendah karbon	a.	Meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik
						b.	Meningkatkan upaya adaptasi perubahan iklim melalui perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat pada sektor-sektor terdampak
				3.2.1.3.	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	a.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman
						b.	Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman
						c.	Meningkatkan tertib tata kelola pertanahan
		3.2.2.	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik	3.2.2.1.	Meningkatkan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air	a.	Meningkatkan kelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya air
						b.	Meningkatkan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian
						c.	Meningkatkan kinerja jaringan irigasi
		3.2.3.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	3.2.3.1.	Mengurangi risiko bencana	a.	Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan							
4.1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berdaya Saing Serta Mengurangi Disparitas Ekonomi	4.1.1.	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri	4.1.1.1.	Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat	a.	Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat Jawa Barat serta memperbaiki sistem informasi pangan
				4.1.1.2.	Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan	a.	Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.
						b.	Pengembangan kawasan klaster pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
						c.	Mengembangkan unit pengelolaan hutan rakyat lestari dan meningkatkan akses pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial
		4.1.2.	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	4.1.2.1.	Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata	a.	Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif
						b.	Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital
		4.1.3.	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	4.1.3.1.	Meningkatkan daya saing industri	a.	Mengembangkan industri unggulan Jawa Barat, perwilayah industri, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri serta meningkatkan pemberdayaan industri
				4.1.3.2.	Meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri	a.	Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang; menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok; meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan; revitalisasi atau membangun pasar rakyat; serta perlindungan konsumen

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
						b.	Memperluas infrastruktur dan teknologi bagi peningkatan daya saing usaha ekonomi kreatif
		4.1.4.	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	4.1.4.1.	Meningkatkan investasi daerah	a.	Meningkatkan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (*Off Taker* dan Promosi)
						b.	Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota							
5.1.	Terwujudnya *Good Governance* dan *Whole Of Government*	5.1.1.	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel	5.1.1.1.	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi	a.	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan *e-government*
						b.	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika
						c.	Pemberlakuan sistem merit secara penuh
		5.1.2	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.	5.1.2.1.	Meningkatkan kerja sama pembangunan	a.	Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar tingkat pemerintahan untuk menopang pelaksanaan kawasan metropolitan di Jawa Barat.

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Berdasarkan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, tema atau fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 adalah:

"Permantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian"

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kearifan lokal Jawa Barat. Peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan "Jabar Juara" dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat Jawa Barat.

Bencana pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 memiliki dampak yang sangat luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa Barat terutama pada aspek perekonomian dan kesehatan sehingga berimplikasi cenderung negatif pada kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif pada perekonomian masyarakat sangat dirasakan dengan terganggunya akitvitas dunia usaha terutama menurunnya aktivitas perdagangan pada sektor UMKM, penurunan produktivitas sektor industri yang mengakibatkan terjadinya gelombang PHK yang begitu besar, dan terhambatnya proyek-proyek infrasruktur yang mengakibatkan perlambatan pembentukan modal/investasi di Provinsi Jawa Barat. Selain pada aspek perekonomian, dengan penyebarannya yang begitu masif, wabah ini tentunya berdampak buruk pada kondisi kesehatan masyarakat dan semuanya berujung pada kondisi kerentanan sosial masyarakat yang meningkat. Untuk itu, pada tahun 2022 pemerintah perlu untuk mengakselerasi pemulihan kondisi Jawa Barat pasca pandemi COVID-19 dengan menitikberatkan pada pemantapan daya saing daerah menuju pada kemandirian melalui sistem pangan berkelanjutan, dengan 1) menjaga ketersediaan, yaitu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri; mendatangkan dari luar Jawa Barat (ekspor – impor); menyiapkan cadangan pangan (untuk pasca bencana ataupun sosial); 2) menyiapkan akses, dengan menjaga stabilitas pasokan dan harga; meningkatkan daya beli masyarakat; menyederhanakan sistem logistik dan distribusi; meningkatkan akses petani terhadap pasar; penyediaan infrastruktur (akses

jalan, gudang penyimpanan, dan sebagainya), dan 3) Mengoptimalkan pemanfaatan, melalui pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat; optimalisasi penganekaragaman konsumsi pangan; dan meningkatkan keamanan dan mutu pangan.

Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Berikut uraian singkat program pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 pada setiap misi, tujuan dan sasaran, serta kaitannya dengan prioritas pembangunan daerah dan program Jabar Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari **Misi 1**, yaitu Membentuk Manusia Pancasila yang Bertakwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban, dilaksanakan melalui **3 (tiga) program pembangunan** dan mendukung prioritas pembangunan daerah Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara, serta 3 (tiga) Program Jabar Juara, terdiri dari: 1) Masjid Juara; 2) Pesantren Juara; dan 3) Ulama Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran **Misi 2**, yaitu Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif, dilaksanakan melalui **71 program** pembangunan dan mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, meliputi 1) Reformasi sistem kesehatan daerah; 2) Reformasi sistem perlindungan sosial; 3) Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi; 4) Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan; dan 5) Gerakan membangun desa, serta **11 (sebelas) Program Jabar Juara**, terdiri dari: 1) Kesehatan Juara; 2) Perempuan Juara; 3) Olahraga Juara; 4) Budaya Juara; 5) Sekolah Juara; 6) Guru Juara; 7) Ibu Juara; 8) Milenial Juara; 9) Perguruan Tinggi Juara; 10) Wirausaha Juara; dan 11) Tanggap Bencana Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi 3, yaitu Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah, dilaksanakan melalui **163 program pembangunan** dan mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, meliputi: 1) Pengembangan Infrastruktur, Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan; 3) Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

Pariwisata; 4) Gerakan Membangun Desa; dan 5) Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi, serta 11 (sebelas) Program Jabar Juara, terdiri dari: 1) Energi Juara; 2) Transportasi Juara; 3) Lingkungan Juara; 4) Kelola Sampah Juara; 5) Kota Juara; 6) Pantura Juara; 7) Pansela Juara; 8) Tanggap Bencana Juara; 9) Pariwisata Juara; 10) BUMD Juara; dan 11) Birokrasi Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi 4, yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan, dilaksanakan melalui **73 Program pembangunan** dan mendukung 6 (enam) prioritas pembangunan daerah, meliputi: 1) Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi; 2) Pengembangan Infratsruktur, Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3) Reformasi sistem kesehatan daerah; 4) Gerakan Membangun Desa; 5) Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata; dan 6) Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara, serta 14 (empat belas) Program Jabar Juara, terdiri dari: 1) Pariwisata Juara; 2) Nelayan Juara; 3) Ekonomi Kreatif Juara; 4) *One Village One Company*; 5) Petani Juara; 6) Pantura Juara; 7) Logistik Juara; 8) Pasar Juara; 9) UMKM Juara; 10) Wirausaha Juara; 11) Lingkungan Juara; 12) BUMD Juara; 13) Birokrasi Juara; dan 14) Gerbang Desa Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi 5, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui **37 program pembangunan** dan mendukung 1 (satu) prioritas pembangunan daerah, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, serta 3 (tiga) Program Jabar Juara, terdiri dari: 1) Birokrasi Juara; 2) ASN Juara; dan 3) APBD Juara.

Total program pembangunan daerah untuk seluruh misi adalah **347 program.** Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 secara lengkap disajikan pada Lampiran II.

4.2.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan isu strategis serta memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD Tahun 2020 dan janji Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Barat, yang tertuang dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2022 dengan arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2022 sangat erat. Terdapat 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Pada tahun 2020 terdapat kejadian luar biasa yang melanda Provinsi Jawa Barat yaitu pandemi COVID-19 yang diprediksi akan terus berdampak sampai tahun 2022. Berdasarkan isu strategis tahun 2022, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat fokus menangani pandemi COVID-19 dan memasukkan kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2022.

Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, isu strategis, dan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2022	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
1	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing melalui penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai standar WHO
2	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	a. Mengembangkan industri unggulan Jawa Barat, perwilayah industri, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri serta meningkatkan pemberdayaan industri. b. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang; menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok; meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan; revitalisasi atau membangun pasar rakyat; serta perlindungan konsumen c. Meningkatkan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi) d. Menciptakan iklim usaha yang berdaya Saing e. Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok; f. Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial; g. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2022	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
		teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar
3	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	a. Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat Jawa Barat serta memperbaiki sistem informasi pangan b. Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. c. Pengembangan kawasan klaster pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan d. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi
4	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan/atau terdampak COVID-19
5	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah melalui pembentukan *center of excellence* di setiap kabupaten/kota dan pengembangan SMK yang relevan di kawasan metropolitan; b. Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah melalui sertifikasi kompetensi; c. Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) penyelenggaraan pendidikan melalui pendidikan jarak jauh, penyediaan e-book gratis di portal pemerintah dengan ditopang kehandalan infrastruktur jaringan TI; d. Meningkatkan minat baca masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital;
6	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana
7	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan e-government
8	Gerakan Membangun Desa	Memperkuat pemerintahan desa
9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	Meningkatkan fasilitasi penguatan sumber daya dan lembaga keagamaan serta ekonomi umat
10	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	a. Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok b. Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial c. Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau dan antar moda.

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2022	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
		d. Mengembangkan prasarana transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP serta mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut, udara, dan kereta api yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis e. Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara f. Meningkatkan kualitas tutupan lahan g. Meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman h. Meningkatkan kualitas operasional instalasi tenaga listrik
11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif b. Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Tabel 4.7
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	1. PD1 - Reformasi Sistem Kesehatan Daerah 2. PD5 - Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan 3. PD9 - Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara
2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial	1. PD1 - Reformasi Sistem Kesehatan Daerah 2. PD2 Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi 3. PD3 Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 4. PD4 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. PD8 Gerakan Membangun Desa 2. PD10 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	1. PD2 - Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi 2. PD3 - Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 3. PD8 - Gerakan Membangun Desa 4. PD10 - Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
	dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. PD11 Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata
5. Reformasi birokrasi	1. PD7 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Tabel 4.8
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah
dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

NO	PRIORITAS	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
1	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	1. Peningkatan Sarana prasarana kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit dan puskesmas diberbagai daerah, penambahan tenaga kesehatan, ketersediaan mobil pelayanan Ambulance di setiap desa/kelurahan, penyediaan alat-alat kesehatan, penyediaan obat-obatan, pembangunan MCK, serta penyediaan alat-alat kesehatan pandemi COVID-19 yang masih banyak di butuhkan di masyarakat. 2. Terkait dengan pelayanan kesehatan melalui jalur BPJS mohon untuk ditingkatkan karena sering terjadi kendala dan cenderung mempersulit bagi pasien, selain itu perlu meningkatkan jumlah subsisdi bagi BPJS kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peningkatan jumlah kuota BPJS bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK). 3. Terkait dengan vaksinasi COVID-19, mohon untuk memberikan sosialisasi yang masif kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi isu-isu yang mersahkan di masyarakat. 4. Penguatan sarana dan prasarana posyandu di berbagai daerah serta pelatihan kader bagi kader posyandu agar bisa lebih produktif. 5. Agar vaksin yang aman dan halal dapat diprioritaskan bagi warga Jawa Barat yang muslim. Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa barat dapat melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, serta memberikan sosialisasi dan penjelasan sebaik-baiknya ke warga masyarakat di Provinsi Jawa Barat. 6. Anggaran alat pelindung diri di pusat layanan kesehatan bagi masyarakat Jawa Barat harus tersedia dengan memadai, juga pemberian komponen gaji/insentif bagi petugas kesehatan yang sedang bertugas menangani COVID-19. 7. Pencegahan dan penangguhan pandemi COVID-19 telah memasuki masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali, sehingga mengakibatkan terjadinya perlambatan ekonomi di masyarakat. Untuk itu mohon perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan-kegiatan perekonomian bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 8. Dilakukan kajian yang matang, serta implementasi vaksinisasi yang telah dituntaskan

NO	PRIORITAS	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
2	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Permohonan bantuan permodalan dan pengembangan untuk wirausaha masyarakat, seperti UMKM, Koperasi, KUBE, kelompok-kelompok pemberdayaan, pengrajin, serta BUMDes dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. 2. Mempermudah akses permodalan serta perizinan usaha bagi masyarakat. 3. Terkait dengan banyaknya masukan terkait dengan perlunya lapangan pekerjaan, mohon untuk dapat mempermudah akses, ketersediaan maupun fasilitas terkait lapangan pekerjaan, pelatihan tenaga kerja, pembangunan UPT Balai Latihan Kerja (BLK), serta memfasilitasi lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas. 4. Pencegahan dan penangguhan pandemi COVID-19 telah memasuki masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali, sehingga mengakibatkan terjadinya perlambatan ekonomi di masyarakat. Untuk itu mohon perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan-kegiatan perekonomian bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 5. Pembentukan perda kewirausahaan 6. Program pengorganisiran PKL dilokasi yang strategis
3	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	1. Berkaitan dengan bidang pertanian, permohonan permodalan, pemberdayaan dan pendampingan kelompok tani, pengadaan alat-alat pertanian dan argo bisnis hortikultura, bibit, jaringan irigasi pertanian, serta pupuk gratis bagi para petani dalam rangka penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan. 2. Bantuan modal untuk kelompok ternak dan perikanan, pengadaan bibit, pelatihan pembuatan pakan ternak, serta bantuan untuk pengadaan perahu dan alat tangkap ikan bagi nelayan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. 3. Kelangkaan pupuk masih terjadi di sebagian daerah, masih diperlukannya subsidi pupuk agar kebutuhan petani terpenuhi. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk sanggar seni, untuk meningkatkan pariwisata daerah. 4. Penambahan anggaran untuk pertanian khususnya pembenihan komoditas kopi, teh, vanila dan kelapa. 5. Pendampingan pengolahan pasca panen buah-buahan agar memiliki nilai jual lebih, seperti mesin pengolahan kopi.
4	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	1. Berkaitan bantuan sosial, agar pemerintah melakukan secara berkesinambungan selama pandemi belum berakhir, serta senantiasa memperbaharui data penerima bantuan agar tepat sasaran dalam penyalurannya. 2. Terkait dengan banyaknya masukan terkait dengan perlunya lapangan pekerjaan, mohon untuk dapat mempermudah akses, ketersediaan maupun fasilitas terkait lapangan pekerjaan, pelatihan tenaga kerja, pembangunan UPT Balai Latihan Kerja (BLK), serta

NO	PRIORITAS	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
		memfasilitasi lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas. 3. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di haruskan menambah jumlah anggaran untuk bantuan hukum gratis bagi masyarakat. 4. Perlunya peraturan daerah terkait perlindungan pekerja perempuan di Provinsi Jawa Barat, termasuk peraturan daerah terkait Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) 5. Perlunya program pembinaan dan pemberdayaan eks narapidana ketika kembali ke masyarakat
5	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	1. Pemberian bantuan untuk melakukan riset dan penelitan dengan melibatkan akademisi yang ahli di bidangnya masing-masing dengan target mengembangkan produk-produk pertanian, perikanan dan yang lainya. 2. Perlunya anggaran untuk peningkatan literasi dengan menambahn dan memperbaharui buku-buku bacaan di sekolah-sekolah baik SMA-SMK termasuk bantuan untuk perpustakaan 3. Permohonan alat-alat kesenian, sarana sanggar seni, pelestarian kesenian di daerah, serta pengembangan pencak silat.
6	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	1. Bantuan mobil operasional kebencanaan serta optimalisasi upaya mitigasi untuk daerah rawan bencana beserta mempercepat upaya *recovery* setelah bencana.
7	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	1. Permohonan peningkatan sarana dan prasarana olahraga masyarakat, seperti pembangunan lapangan sepakbola, perbaikan lapangan serbaguna PPIK, lapangan bola voli, lapangan futsal, tenis meja serta pembangunan GOR desa. 2. Pengadaan teknologi tepat guna, serta penyediaan alat-alat keterampilan ibu-ibu. 3. Permohonan bantuan untuk inovasi teknologi dalam penanggulangan sampah terutama di perkotaan, alat pengolahan sampah organik, alat transportasi serta pembuatan TPS di daerah-daerah. 4. Regulasi sistem transportasi angkutan umum yang seimbang, agar moda transportasi angkutan umum dan online bisa hidup bersama (Kompentran) 5. Aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB); perlunya pemekaran daerah di kabupaten/kota. Usulan pemekaran DOB ini harus terus dilakukan secara serius dan berkesinambungan bersama usulan pemekaan DOB lainnya yang telah ada.
8	Gerakan Membangun Desa	1. Permohonan pengembangan serta mempromosikan destinasi wisata pedesaan. 2. Permohonan penguatan sarana prasarana dan SDM perangkat desa, seperti pembangunan dan rehab kantor desa, insentif perangkat desa, penguatan kapabilitas perangkat desa terutama berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat, serta peningkatan jumlah anggaran dana desa karena dampak kebijakan Refocusing anggaran sehingga program desa lainnya terbengkalai. 3. Hampir di setiap desa di kabupaten/kota banyak permohonan bantuan berkaitan dengan aspalisasi/betonisasi jalan poros desa dengan

NO	PRIORITAS	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
		panjang dan lebar disesuaikan dengan kondisi desa. 4. Beberapa kantor Kepala Desa mengalami kerusakan, sehingga terdapat permohonan bantuan berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan kantor Kepala Desa. 5. Di beberapa desa, terdapat permohonan bantuan pembuatan dan perbaikan fasilitas lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat. 6. Beberapa desa mengajukan pembangunan *Solar Cell Pump* untuk kebutuhan peningkatan daya listrik mandiri. 7. Perwakilan dari Badan Pengawas Desa berharap kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat agar dapat membuat tempat Sekretariat BPD untuk mendukung kinerja pengawasan desa.
9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	1. Permohonan bantuan pembangunan/ perbaikan/ pengembangan sarana peribadatan baik masjid, pondok pesantren/ kobong/ asrama santri, mushola, majelis taklim, serta termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
10	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Perbaikan jalan lingkungan permukiman, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)/Turap, Rabat beton jalan, Tanggul jalan, pembangunan jembatan drainase, pembangunan/penghidupan situ, normalisasi sungai, serta pembangunan/perbaikan jembatan di kabupaten/kota. 2. Perlu adanya program terombosan untuk mengatasi daerah rawan banjir akibat alih fungsi lahan, penyempitan serta pendangkalan saluran pembuangan air, penataan sungai, serta pembuatan sumur resapan. 3. Permohonan bantuan untuk mengatasi masalah sanitasi dan jaringan air bersih serta pembangunan sumur bor. 4. Pengadaan sarana penerangan jalan umum. 5. Permohonan perbaikan rumah tidak layak huni. 6. Penyediaan lahan pemakaman, pemeliharaan dan pembuatan taman kota. 7. Memasuki musim hujan, beberapa daerah mengalami musibah banjir dan tanah longsor, sehingga merusak infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan, jembatan dan saluran air/irigasi. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya konkrit Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mengatisipasi pemasalahan tersebut. 8. Beberapa daerah mengajukan pembangunan/perbaikan paving blok di jalan-jalan kecil/trotoar untuk kenyamanan para pejalan kaki. 9. Pembangunan *Fly Over*. 10. Membangun jembatan sebagai jalan penghubung antar kabupaten/kota, antar kecamatan, dan antar desa, khususnya di daerah-daerah pelosok. 11. Pengembangan energi terbarukan solar, angin, air dan biogas/biomass. 12. Perlunya penyegeraan pembangunan akses jalan cepat (Tol) di berbagai daerah Jawa Barat agar aktivitas yang berhubungan dengan pelayanan provinsi. 13. Terintegrasinya pembangunan infrastruktur jalan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Harus benar-benar terkonsolidasikan antara APBN dan

NO	PRIORITAS	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
		APBD.
11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	1. Permohonan pengembangan serta mempromosikan destinasi wisata pedesaan. 2. Program pelebaran jalan menuju tempat destinasi wisata di kabupaten/kota Se-Jawa Barat.

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* pembangunan Jawa Barat. Strategi dan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Adapun untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dilakukan melalui 28 strategi dan 54 arah kebijakan yang tersebar ke dalam 11 (sebelas) prioritas pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah

   Terjadinya pandemi COVID-19 di Jawa Barat memberikan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan Provinsi Jawa Barat terutama bagi upaya pencegahan penularan dan meminimalisasi jumlah kematian akibat COVID-19. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan *surveilans*, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan.

   Sistem kesehatan daerah Provinsi Jawa Barat seyogyanya memiliki 3 (tiga) tujuan utama yaitu:

   a. Menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas (efektif, aman dan berfokus pada pasien);
   b. Menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan (biaya, waktu tunggu dan jarak ke fasilitas layanan kesehatan); dan
   c. Menjamin keterjangkauan biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan (kontrol biaya).

   Merujuk pada data statistik kesehatan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat yang meliputi: data *surveilans* penyakit, data fasilitas kesehatan, dan data tenaga kesehatan, kebijakan dan strategi yang perlu

dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Penguatan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi mulai dari fasilitas layanan primer (Puskesmas atau Klinik Swasta) sampai ke fasilitas layanan tingkat lanjut yaitu Rumah Sakit Rujukan termasuk laboratorium kesehatan berbasis data kependudukan;
b. Penguatan jejaring rujukan laboratorium berdasarkan 5 (lima) kewilayahan di Jawa Barat yang meliputi: Purwasuka, Bandung Raya, Priangan Timur, Bodemi, Ciayumajakuning;
c. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan berdasarkan jenjang layanan kesehatan;
d. Menjamin pembiayaan kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
e. Penguatan penelitian dan pengembangan kesehatan (Litbangkes); dan
f. Pemberdayaan Masyarakat.

2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi

Dalam rangka mengatasi dampak yang besar akibat COVID-19 baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu merumuskan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan program pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, dan pariwisata serta mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya. Untuk kepentingan tersebut maka arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 khusus untuk memulihkan kondisi yang terdampak pandemi, diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui pemulihan sektor industri, pariwisata, dan investasi serta melakukan reformasi pada sistem kesehatan daerah, sistem perlindungan sosial, dan sistem ketahanan bencana.

a. Pemulihan Ekonomi

1) Pemulihan Industri

Industri merupakan sektor utama dalam pembangunan ekonomi Jawa Barat sekaligus memiliki *share* terbesar dalam PDRB dan bagi industri nasional. Selain itu, Jawa Barat

dikenal sebagai "rumah" bagi industri-industri besar berorientasi ekspor, terutama industri otomotif, elektronik, kimia, dan produk pangan olahan. COVID-19 memiliki dampak yang sangat besar bagi industri di Jawa Barat, baik dalam hal pemasaran produk hasil industri dan penyediaan bahan baku impor sehingga mempengaruhi kinerja industri Jawa Barat secara keseluruhan yang berimplikasi pada kondisi ketenagakerjaan yang digambarkan dengan meningkatnya jumlah karyawan yang di PHK dan dirumahkan. Strategi pemulihan ekonomi pada sektor perindustrian adalah : 1) Menghidupkan kembali industri Jawa Barat yang bersifat strategis dan padat karya; 2) Mengakselerasi perwujudan kawasan industri terpadu dalam konteks pengembangan industri 4.0; serta 3) Meningkatkan implementasi pola kemitraan antara industri besar dengan IKM sebagai salah satu solusi dalam mengatasi keterbatasan bahan baku impor dan penciptaan lapangan kerja baru.; 4) Meningkatkan dukungan kelancaran distribusi hasil produksi melalui aksesibilitas, pengawasan dan pengendalian transportasi sarana prasarana logistik.

2) Pemulihan Investasi

Investasi merupakan kunci utama dalam pembangunan perekonomian suatu daerah. Menurunnya realisasi penanaman modal yang diakibatkan oleh situasi pandemi COVID-19 di Jawa Barat merupakan salah satu masalah yang harus ditangani secara tepat. Jawa Barat selama ini dikenal sebagai penyumbang realisasi investasi terbesar nasional, khususnya dalam hal Penanaman Modal Asing (PMA) yang tentu menjadi ukuran tersendiri dalam upaya pemulihan ekonomi pasca COVID 19. Untuk itu tantangan terbesar dalam hal investasi di Provinsi Jawa Barat adalah mengembalikan kondisi investasi yang ideal untuk pembangunan ekonomi di Jawa Barat. Strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 antara lain dengan : 1) Realisasi "investasi baru" di Jawa Barat dengan mengoptimalkan promosi investasi dan fasilitasi para calon investor; 2) Fasilitasi proyek-proyek investasi yang

terhambat pelaksanaannya melalui *Investor Relation Officer* (IRO); dan 3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Sektor pertanian terkena dampak pandemi COVID-19 paling kecil dibandingkan sektor lain. Hal ini terjadi karena dampak dari pembatasan sosial akan relatif minimal pada sektor pertanian, walaupun masih ada resiko dari disrupsi rantai penawaran (*supply chain*) dan terpuruknya permintaan.

Ketahanan pangan mencakup ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamaan produksi pangan, keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, dan pendistribusian pangan pokok. Salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi akibat COVID-19, dibutuhkan reformasi ketahanan pangan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu:

a. Ketersediaan Pangan

Mendorong peningkatan produksi dan pasokan pangan, yakni melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, penggunaan teknologi yang bersifat *sustainable* dan pemberdayaan masyarakat bersifat padat karya.

b. Akses Pangan

1) Meningkatkan distribusi, logistik, dan perbaikan tata niaga pangan, yakni melalui:

a) Pembenahan distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada penerapan sistem logistik dan distribusi yang terintegrasi, termasuk koordinasi antardaerah dan pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI);

b) Optimalisasi BUMD untuk meningkatkan distribusi komoditas pangan antardaerah terutama dari daerah surplus kepada daerah defisit pangan;

c) Pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung optimalisasi distribusi pangan; dan

d) Pengaturan distribusi pangan melalui penguatan pengaturan oleh pemerintah, serta penetapan kebijakan

impor yang tepat waktu dengan dukungan data sistem logistik dan distribusi.

2) Membenahi struktur pasar, melalui:
   a) Penguatan pengaturan distribusi pangan oleh pemerintah, melalui pengaturan pelaku usaha distribusi terdaftar, dan monitoring harga; dan
   b) Optimalisasi peran BULOG sebagai lembaga penyangga untuk mendukung stabilisasi harga pangan, serta penyediaan alternatif pasokan komoditas strategis seperti jagung, serta penguatan pemantauan harga dan pasokan dengan dukungan sistem informasi dan harga yang terintegrasi, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional.

3) Pemanfaatan Pangan
   a) Mendorong pemanfaatan pangan untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologik, psikologik, maupun sosial.
   b) Optimalisasi pemanfaatan pangan dalam meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
   c) Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif;
   d) Memperbaiki status gizi masyarakat; dan
   e) Menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan.

4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Pandemi COVID-19 di Jawa Barat memberikan tekanan yang cukup berat bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kondisi tersebut perlu direspon cepat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selain pemulihan ekonomi diperlukan pula perlindungan sosial yang komprehensif di antaranya:

a. Peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan miskin dilakukan dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE),

akses permodalan usaha melalui kredit MESRA, pelatihan kewirausahaan dll; dan

b. Penurunan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan miskin dilakukan dengan SPP gratis, beasiswa siswa miskin, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (PBI JKN KIS), pelayanan gratis bagi masyarakat miskin di RS Provinsi, pelayanan panti, pembangunan rutilahu (rumah tidak layak huni), pemasangan listrik gratis, dan perlindungan sosial bagi korban bencana.

Prioritas pembangunan daerah dijabarkan menjadi program prioritas, penanggungjawab Perangkat Daerah untuk masing-masing program prioritas, indikator sasaran untuk prioritas pembangunan daerah, indikator kinerja untuk masing-masing program prioritas, keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas, serta tingkat keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas. Selanjutnya, penerapan konsep tematik, tingkat penerapan konsep holistik terkait perencanaan yang komprehensif dari hulu sampai hilir, serta penerapan konsep integratif terkait pelibatan Perangkat Daerah.

5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan

Pandemi COVID-19 merupakan suatu bencana kesehatan yang dapat dikategorikan pada kejadian luar biasa dan merubah hampir seluruh tatanan hidup masyarakat di dunia. Tidak terkecuali di Provinsi Jawa Barat, berbagai pola hidup masyarakat dipaksa untuk berubah dan menyesuaikan dengan keadaan pandemi ini melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat. Begitu pula dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang tidak memungkinkan untuk dilangsungkan secara konvensional pada masa pandemi ini, oleh karena itu pola Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) melalui sistem daring (*online*) merupakan langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam menyikapi kondisi tersebut. Namun demikian pelaksanaan PJJ tersebut tentu membutuhkan dukungan dalam berbagai hal, baik itu berupa sarana prasarana dan infrastruktur penunjang maupun aturan atau kebijakan sebagai acuan pelaksanaan PJJ agar dapat berjalan dengan efektif untuk mewujudkan peningkatan kualitas, akses, dan tatakelola pendidikan di Provinsi Jawa Barat yang bersinergi dengan unsur budaya lokal sehingga

menghasilkan manusia Jawa Barat yang berkualitas dan berkarakter.

Selain itu, reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan merupakan prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal perbaikan sistem pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjawab tantangan peningkatan daya saing dalam menghadapi persaingan global yang diimbangi dengan pemajuan nilai-nilai kebudayaan Jawa Barat. Untuk itu, reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan merujuk kepada perbaikan tatakelola pendidikan, pemenuhan akses pendidikan, dan peningkatan kualitas mutu lulusan yang berdaya saing.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dilakukan melalui pengembangan sekolah terintegrasi dimana sekolah jenjang pertama dan sekolah jenjang menengah berada dalam satu kawasan yang bertujuan untuk memudahkan akses perserta didik melanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Selain itu, diberikan pula dana bantuan Biaya Operasional Sekolah yang membebaskan SPP bagi siswa SMA/SMK/SLB Negeri dan dana Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi sekolah swasta dan Madrasah Aliyah (MA), serta bantuan dana bagi siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) yang tidak masuk sekolah menengah/ sederajat negeri.

Peningkatan kualitas pendidikan vokasi sebagai salah satu prioritas di Jawa Barat dilakukan melalui revitalisasi SMK serta pengembangan SMK sebagai pusat unggulan *Center of Excellent* (COE) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi lulusan yang berdaya saing. SMK COE sebagai sekolah pusat unggulan penjamin kualitas mutu lulusan pendidikan vokasi dan diharapkan dapat mewujudkan *link and match* dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sebagai market dari lulusan SMK.

Dalam membangun sumberdaya manusia, peran kebudayaan sangat besar pengaruhnya terutama terhadap pembentukan karakter masyarakat. Integrasi unsur kebudayaan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan karakter di Provinsi Jawa Barat diwujudkan melalui progam Jabar Masagi dengan tujuan untuk membangun pendidikan karakter berbasis budaya Jawa Barat yang menumbuhkan niti surti, niti harti, niti bukti, dan niti bakti sehingga dapat terwujud generasi

masa depan Jawa Barat yang beriman, berkarakter, sehat dan cerdas.

6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana

   Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Bencana pandemi dan wabah penyakit COVID-19 memiliki potensi risiko yang cukup besar jika tidak dilakukan pengendalian secara cepat dan komprehensif. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagai pelaksana juga telah menetapkan kejadian ini sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan melalui SK BNPB No.9.A Tahun 2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, yang kemudian diperpanjang melalui SK No. 13.A Tahun 2020 yang status ini berakhir pada 29 Mei 2020.

   Konsep penanganan pandemi COVID-19 ini pada dasarnya sama dengan konsep penanganan bencana. Perbedaannya hanya ada pada prinsip dasar penanganan karena perbedaan sifat agen kausatifnya. Sejak 30 Januari 2020, WHO mengumumkan bahwa wabah COVID-19 menjadi perhatian kesehatan masyarakat internasional. Pada 4 Maret 2020, kasus COVID-19 telah dilaporkan di 116 negara dengan 1,2 juta orang terinfeksi virus COVID-19. Pada Februari 2020, jumlah kasus di China menurun, sedangkan jumlah kasus di berbagai negara lain terus meningkat. Kondisi ini membuat seluruh masyarakat di tanah air waspada. Pemerintah Indonesia saat ini sudah melakukan upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Himbauan menjaga jarak fisik (*physical distancing*), kerja dari rumah, belajar di rumah, hingga beribadah di rumah terus dianjurkan.

   Penanganan pandemi COVID-19 ini menjadi hal yang baru dibandingkan dengan penanganan akibat bencana alam. Namun belajar dari sekian kali penanganan bencana alam harus diakui sangat jarang upaya-upaya dilakukan dimitigasi ataupun kesiapsiagaan. Dalam penanganan bencana berupa mitigasi ataupun kesiapsiagaan seringkali terlewatkan. Budaya penanggulangan bencana yang terbangun masih pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana (rekonstruksi/rehabilitasi) yang reaktif dan *insidentil*. Budaya bencana masih pada semangat dan implementasi kegawatdaruratan, dilakukan proses evakuasi, pencarian, penyelamatan, pembuatan posko, penempatan pengungsi, dapur umum, distribusi bantuan, pembersihan puing-puing atau longsoran, sampai perbaikan sarana dan prasarana

fisik yang hancur atau rusak akibat bencana.

Selanjutnya, upaya mitigasi dan rehabilitasi perlu lebih mendapatkan perhatian dimana ruang lingkup upaya-upaya tersebut meliputi edukasi guna meningkatkan kepedulian masyarakat tentang bencana, mempersiapkan persediaan makanan, menyiapkan tempat untuk persediaan makanan, memberikan pelatihan kedaruratan, mempersiapkan peta bahaya, melakukan inventarisasi dan identifikasi kerentanan, membangun sistem peringatan dini, dan lain-lain. Belajar dari pengalaman tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan melakukan reformasi terhadap sistem kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Jawa Barat agar siap dengan kondisi yang dihadapi akibat bencana alam maupun bencana non alam.

Sistem kesiapsiagaan merupakan langkah penting dalam upaya penanggulangan bencana karena pada kenyataannya tidak semua bahaya dapat dicegah ataupun ditangani dengan aktivitas mitigasi yang komprehensif untuk menghindari kerugian lebih besar yang diakibatkan dari sebuah bencana. Sistem kesiapsiagaan dibuat bukan pada saat bahaya muncul tetapi saat sebelum ancaman bencana terjadi. Lingkup kesiapsiagaan penanggulangan bencana meliputi pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana.

Strategi dan kebijakan untuk penguatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Jawa Barat yaitu melalui peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana melalui 6 (enam) aspek yaitu 1) Ketangguhan Masyarakat dan Komunitas (*Resilience Citizen*), 2) Ketangguhan Ilmu Pengetahuan (IPTEK) dan Kearifan Lokal (*Resilience Knowledge and Local Wis*dom), 3) Ketangguhan Kelembagaan dan Kebijakan (*Resilience Institutional and Policy*), 4) Ketangguhan Pendanaan (*Resilience Financing*), 5) Ketangguhan Infrastruktur (*Resilience Infrastructure*), serta 6) Ketangguhan Ekologi (*Resilience Ecology*). Strategi dan kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dalam kerangka kerja untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Jawa Barat, yang dikategorikan ke dalam 9 (sembilan) aktivitas yaitu: 1) Penilaian resiko, 2) Rencana kontijensi, 3) Kelembagaan, 4) Sistem informasi, 5) Mobilisasi sumberdaya, 6) Peringatan dini, 7) Mekanisme respon, 8) Pendidikan dan pelatihan publik, serta 9) Gladi/simulasi.

7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

   Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah merupakan prioritas untuk menjawab isu reformasi birokrasi. Prioritas ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Misi 3 dan 5 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

8. Gerakan Membangun Desa

   Gerbang Desa adalah sebuah gerakan untuk mewujudkan desa yang mandiri yaitu desa yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana prasarana desa, melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

   Gerbang Desa merupakan prioritas untuk menjawab isu kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia, kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan. Prioritas ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran Misi 2, Misi 3 dan Misi 4 RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023.

9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara

   Pendidikan agama dan tempat ibadah juara merupakan prioritas untuk menjawab isu strategis Jawa Barat yaitu peningkatan kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia. Prioritas ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran Misi 1 RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, menetapkan 2 (dua) indikator untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi.

10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

    Infrastruktur konektivitas wilayah merupakan prioritas untuk menjawab isu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran Misi 3 RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023.

11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang terdampak cukup berat, terutama dengan adanya kebijakan *social distancing/physical distancing* saat pandemi COVID-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), untuk memperlambat penyebaran COVID-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Sebagai akibatnya kelompok usaha pendukung penggerak pariwisata juga ikut terpengaruh. Kelompok usaha tersebut antara lain perjalanan (penerbangan, pelayaran, agen travel lokal), hotel, restoran dan lokasi destinasi wisata/desa wisata.

Strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 antara lain dengan mengaktifkan pembangunan pariwisata, dimana pariwisata merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi. Arah kebijakan yang diambil adalah dengan melaksanakan program yang dapat menyerap tenaga kerja terutama yang kehilangan pekerjaan, membangkitkan kembali usaha terdampak COVID-19 dan membangun usaha baru untuk meningkatkan investasi dan serapan tenaga kerja.

Untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan beberapa kegiatan antara lain peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan promosi wisata pada originasi yang sudah pulih; peningkatan event-event seni, budaya dan olah raga; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas, peningkatan sarana prasarana pendukung dan standar layanan; serta pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

Tabel 4.9
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Reformasi Sistem Kesehatan Daerah

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah/Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
1	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	**1**	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	a	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Tahun	**73,09**	Meningkatkan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing melalui penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai standar WHO	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Persentase Kabupaten/Kota Dengan Minimal 50 % Puskesmas Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	Persen	88,00	704.037.120.906	Dinas Kesehatan
												2	Persentase Puskesmas di Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Persen	96,00		Dinas Kesehatan
												3	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	Persen	90,00		Dinas Kesehatan
												4	Persentase Fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	Persen	60,00		Dinas Kesehatan
												5	Persentase Kab/Kota Yang Siap Melaksanakan pelayanan Layad Rawat dalam upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	Persen	100,00		Dinas Kesehatan
												6	Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Menuju Universal Health Coverage (UHC)	Persen	95,00	1.448.714.455.680	Dinas Kesehatan
															TOTAL ANGGARAN	**Rp2.152.751.576.586**	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Tabel 4.10
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	**1** Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	a. Laju pertumbuhan Sektor Industri	Persen	3,40	Meningkatkan daya saing industri	Mengembangkan industri unggulan Jawa Barat, perwilayah industri, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri serta meningkatkan pemberdayaan industri	1 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1 Laju Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	Unit Usaha	200	3.519.552.260	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
								2 Program Pengendalian Izin Usaha Industri	2 Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	1,6	120.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
								3 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1 Persentase perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas**	Persen	50	237.354.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			b. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,01	Meningkat-kan perda-gangan dalam dan luar negeri	Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang; Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok;	1 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan urusan Perdagangan	Persen	100	285.056.640	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
								2 Program Pengembangan Ekspor	1 Pertumbuhan nilai ekspor non migas	milyar USD	3.64	1.014.303.680	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
									Meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri; Meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan; Revitalisasi atau membangun Pasar Rakyat; serta Perlindungan konsumen	3	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1	Laju Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persen	7,89	700.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
										4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1	Laju Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	5	16,239,988,160	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
										5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1	Persentase Stabilitas dan Jumlah ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	5	15.738.428.800	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
										6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1	Persentase pengaduan konsumen yang ditangani	Persen	71	7.876.846.120	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (triliun rupiah)	Triliun Rupiah	515,31	Meningkatkan investasi daerah	Meningkatkan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker dan Promosi)	1	Program Promosi Penanaman Modal	1	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Informasi Potensi dan Peluang Investasi	Persen	10	1.300.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
										2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Investasinya	Persen	15	1.523.322.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
										3	Program Pelayanan Penanaman Modal	1	Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	Persen	65-70	1.449.992.300	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
										4	Program Pengelolaan Data Dan Sistem	1	Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem	Persen	80	1.100.020.680	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								Informasi Penanaman Modal	Informasi Penanaman Modal				
							Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing	5 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Peningkatan Indikator daya saing (Peningkatan Peringkat Ease of Doing Business)	Peringkat	2	1.125.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			b. Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Persen	20,50		Meningkatkan Kualitas Kelembagaan, Dukungan Pembiayaan Usaha dan Peningkatanj Akses Pasar (Off Taker dan Promosi)	1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1 Persentase kelembagaan usaha UMKM	Persen	32	1.000.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
								2 Program Pengembangan UMKM	1 Laju Pertumbuhan Omzet UMKM Binaan	Persen	6.00	2.500.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
								3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1 Tingkat kepatuhan koperasi	Persen	3.7	950.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
								4 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	1 Persentase sertifikat kesehatan KSP/USP Koperasi	Persen	50	300.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
								5 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1 Persentase Rekomendasi penerbitan izin usaha dan izin operasional	Persen	7	200.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
								6 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1 Tingkat Koperasi yang berkualitas	Persen	35		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
									2 Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	1,6	2.500.000.000	

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
										7	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1 2	Persentase Wirausaha menjadi usaha mikro Persentase Pertumbuhan SDM Koperasi	Persen Persen	74.1 66,6	18.386.738.797	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
		3	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	Persen	9,70	Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha	Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar	1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	Persentase Pencari Kerja yang Diuji Kompetensi	Persen	100	7.515.848.197	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
										2	Program Penempatan Tenaga Kerja	1	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persen	86.151	1.813.201.900	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
															TOTAL ANGGARAN	**Rp 87.395.653.534**	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Tabel 4.11
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
3	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	1	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan	a	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	84,80	Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan Bagi Masyarakat	Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat Jawa Barat serta memperbaiki sistem informasi pangan	1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1	Persentase Cadangan Pangan	Persen	50	15.136.485.000	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan
										2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1	Persentase desa rawan pangan yang dintervensi	Persen	10	194.335.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
										3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1	Persentase peningkatan sertifikasi PSA	Persen	11.35	1.920.452.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
										5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	5	4.402.099.263	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
										6	Program Penyuluhan Pertanian	1	Prosentase petugas dan pelaku usaha peternakan yang meningkat kinerjanya	Persen	25	1.935.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
				b.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	103,39	Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan	Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.	1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1	Tingkat pemenuhan penataan prasarana peternakan	Persen	78.6	343.770.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
										2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Rata-Rata performa ternak yang sesuai standar	Persen	43	22.749.365.161	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
										3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	184.345,92	8.681.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
										4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	857.207,20	9.617.393.690	Dinas Kelautan dan Perikanan
										5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)	Ku/Ha	58,26	2.128.984.285	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
												2	Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ku/Ha)	Ku/Ha	90,26		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
												3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pengawasan Sertifikasi Benih		81,59		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
										6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	Angka Konsumsi Ikan Jawa Barat	Kg/Kap/Th	28,62	2.300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
										7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana	1	Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI	Persen	4.5	30.438.118.581	Dinas Tanaman Pangan Dan Horti-kultura

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
									Pertanian						
								8	Program Perizinan Usaha Pertanian	1	Persentase Rekomendasi Teknis Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diterbitkan	Persen	100	133.770.836	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
								9	Program Penyuluhan Pertanian	1	Persentase Penyuluh yang Berprestasi	Persen	2,13	88.107.098.004	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
										2	Persentase Kelompok Tani yang dibina oleh Penyuluh	Persen	72,2		
										3	Persentase Sumber Daya Manusia Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilatih	Persen	20,41		
										4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	88,86		
								10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Laju Peningkatan Penyediaan sarana perkebunan	Persen	25	10.217.804.120	Dinas Perkebunan
								11	Program Perizinan Usaha Pertanian	1	Persentase Perkebunan Bear yang mendapatkan	Persen	67	150.000.000	Dinas Perkebunan

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
												1	Izin Usaha Perkebunan				
										12	Program Penyuluhan Pertanian	1	Persentase Pelaku Usaha Tani Perkebunan yang memiliki kompetensi	Persen	75	8.813.632.000	Dinas Perkebunan
										13	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	Persentase Bencana Usaha Perkebunan yang ditangani	Persen	95	2.659.000.000	Dinas Perkebunan
									Pengembangan kawasan klaster pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	1	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	81.51	17.226.694.034	Dinas Kelautan dan Perikanan
												2	Jumlah Produksi Garam	Ton	271.191		
										2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1	Luas Panen Tanaman Pangan	Ha	1.892.521	8,363,515,879	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
												2	Luas Panen Tanaman Hortikultura	Ha	196.981		
										3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1	Laju Peningkatan Penyediaan Prasarana perkebunan	Persen	25	2.250.000.000	Dinas Perkebunan
		2	Meningkatkan Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Pertanian	a	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Persen	55,50	Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air	Meningkatkan kinerja jaringan irigasi	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1	Kondisi baik jaringan irigasi kewanangan Provinsi	Persen	69,71	240.219.239.075	Dinas Sumber Daya Air

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											TOTAL ANGGARAN	**Rp 477.988.256.928**	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Tabel 4.12
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
4	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial																
		1	Meningkat-nya kualitas dan taraf hidup masyarakat														
				a.	Indeks Kesejahteraan Sosial	persen	39,67	Mempercepat Penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan/atau terdampak COVID-19	1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	Persentase PPKS yang tertangani dan berfungsi sosial di dalam panti	Persen	100	5.663.866.496	Dinas Sosial
TOTAL ANGGARAN																**Rp 5.663.866.496**	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Tabel 4.13
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
5	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	1	Meningkatnya Aksesibiltas dan Mutu Pendidikan	a.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,54	Menyelenggarakan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah melalui pembentukan *center of excellence* di setiap kabupaten/kota dan pengembangan SMK yang relevan di kawasan metropolitan	1	Program Pengelolaan Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Persen	75,51	13.092.744.840.960	Dinas Pendidikan
												2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Persen	46,43		
										2	Program Pengembangan Kurikulum	1	Tingkat pengembangan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus	Persen	80	-	Dinas Pendidikan
										3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	1	Persentase Penerbitan Izin Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan Masyarakat	Persen	80	400.000.000	Dinas Pendidikan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
									Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah melalui sertifikasi kompetensi	4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	Persen	100	25.000.000.000	Dinas Pendidikan
									Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) penyelenggaraan pendidikan melalui pendidikan jarak jauh, penyediaan *e-book* gratis di portal pemerintah dengan ditopang kehandalan infrastruktur jaringan TI	5	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahan	Persen	50.00	98.721.867.166	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Meningkatkan minat baca masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital	6	Program Pembinaan Perpustakaan		Tingkat Pemanfaatan Bahan Bacaan	Point	70.00	5.994.651.705	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	a	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	69,80	Menguatkan Peran Keluarga dan Kesetaraan Gender	Meningkatkan ketahanan keluarga serta Peran dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1	Program Pemenuhan Hak Anak	1	Peningkatan Cakupan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Provinsi	Persen	50	600.239.000	DP3AKB

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
				b	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	89,42					2	Peningkatan Cakupan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat Provinsi	Persen	50		DP3AKB
										2	Program Perlindungan Perempuan	1	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100 rb penduduk perempuan	Persen	1,90	270.000.000	DP3AKB
												2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Ked) Yang Mendapat Layanan Pengaduan Oleh UPTD PPA	Persen	100		
										3	Program Perlindungan Khusus Anak	1	Rasio kekerasan terhadap (per 10 ribu anak)	Rasio	0,24	685.103.000	DP3AKB
												2	Cakupan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan oleh UPTD PPA	Persen	100		
		3	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	a	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	52,00	Meningkatkan Peran Stakeholder Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan	Meningkatkan Peran Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif	1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	Persen	17,80	1.842.818.086	Dinas Pemuda dan Olahraga
												2	Persentase Sarana dan Prasarana kemepudaan dalam kondisi baik	Persen	70,00		
												3	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	Persen	3,00		

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
									4 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	11,5		
							Menumbuhkan Budaya Bergerak dan Berolahraga di Masyarakat	1 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	1 Persentase Medali Emas yang diperoleh dalam Event Nasional Popwilnas	Persen	20	73,229,113,898	Dinas Pemuda dan Olahraga
									2 Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga dalam kondisi Baik	Persen	85		
									3 Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Persen	10		
											TOTAL ANGGARAN	**Rp13.299.488.633.815**	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Tabel 4.14
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
6	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	1	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	a.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	147	Mengurangi Risiko Bencana	Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana	1	Program Penanggulangan Bencana	1	Persentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana	Persen	100	5.939.980.160	Badan Penanggulanagn Bencana Daerah
												2	Persentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana	Persen	100	-	Badan Penanggulanagan Bencana Daerah
												3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	-	Badan Penanggulanagn Bencana Daerah
															TOTAL ANGGARAN	**Rp 5.939.980.160**	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Tabel 4.15
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ stakeholder
7	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	1	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	a.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	A (80,01)	Meningkat-kan pene-rapan reformasi birokrasi	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan *e-government*	1	Program Kepegawaian Daerah	1	Nilai kriteria perencanaan kebutuhan pegawai, Pengadaan Pegawai, dan Mutasi Pegawai	Poin	40,00	22.048.489.789	BKD
												2	Nilai kriteria Pengembangan Karir Manajemen Kinerja dan Promosi Pegawai	Poin	103,50		
												3	Nilai Kriteria Penggajian,Pengharg aan, Disiplin, Perlindungan, dan Pelayanan	Poin	120		
												4	Nilai Kriteria Sistem Informasi Kepegawian	Poin	0		
										2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	Persentase Pejabat Struktural bersertifikat kompetensi dan ber STTPL	Persen	80	13.944.951.572	BPSDM
												2	Persentase Pejabat Struktural bersertifikat kompetensi dan ber STTPL	Persen	80		
												3	Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan atau STTPL Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	80		

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ stakeholder
										3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D	Persen	100	17,050,098,768	BPKAD
												2	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi yang tepat waktu	Waktu	Tepat Waktu		
												3	Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD dan APBD Perubahan yang dievaluasi tepat waktu	Persen	100		
												4	Persentase Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota yang dievaluasi tepat waktu	Persen	80		
												5	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	6		
												6	Persentase Ketetapan Waktu Penyusunan RAPBD dan Perubahan RAPBD	Waktu	Tepat Waktu		
										4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Tingkat Kepatuhan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah	Persen	90	19.620.500.000	BPKAD
													Persentase pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	0,32		
													Persentase Akurasi Pelaporan Barang Milik Daerah	Persen	75		

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ stakeholder
									Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika	1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1	Persentase Sasaran dan Program RKPD yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	12.700.000.000	Bappeda
												2	Persentase Sasaran dan Program RKPD yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100		
												3	Persentase Sasaran dan Program RKPD yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100		
										2	Program Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah	1	Tingkat Kesesuaian Perencanaan antar waktu dan level pemerintahan	Persen	100	13.000.000.000	Bappeda
										3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	80,50	66.139.242.760	Dinas Komunikasi dan Informatika
										4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	Persen	98	98.721.867.166	Diskominfo

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ stakeholder
												2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	58		
												3	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	Persen	50		
										5	Program Penataan Organisasi	1	Persentase Perangkat Daerah dengan kinerja yang efektif dan efisien	Persen	94	5.148.500.000	Biro Organisasi Sekretariat Daerah
										6	Program Penge-lolaan Pendapatan Daerah	1	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	Persen	100	28.235.444.818	Bapenda
										7	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terhadap Perangkat Daerah Provinsi yang Diselesaikan	Persen	90	38.798.102.250	Inspektorat
												2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang Diselesaikan Terhadap PD Provinsi yang diselesaikan	Persen	80		
										8	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	1	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persen	90	5.264.675.000	Inspektorat

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ stakeholder
												2	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persen	98		
												3	Persentase Pemenuhan Infrasturuktur Kebijakan Peningkatan Kapabilitas APIP	Persen	100		
												4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	Persen	80		
		2	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	a.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	74,00	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat	Meningkatkan penanganan pelanggaran Perda	1	Program Peningkatan Ketenteraman Ketertiban Umum	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	68,00	19.762.735.997	Satuan Polisi Pamong Praja
												2	Persentase anggota Linmas Untuk Perlindungan Masyarakat	Persen	73,00		
												3	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	Persen	95,00		
												4	Persentase Anggota Satpol dan PPNS yang Kompeten	Persen	45,00		
		3	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan	a.	Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru	Usulan	1	Optimalisasi penataan daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru	Mempercepat pemekaran wilayah yang memiliki potensi untuk menjadi DOB	1 1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1	Persentase Fasilitasi Kebijakan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	Persen	90	14.811.754.746	Biro Pemerintahan dan Otda

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ stakeholder
		4	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif	a.	Tingkat Efektivitas Kerja sama Daerah	Persen	58,00	Meningkatkan kerjasama pembangunan	Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar tingkat pemerintahan untuk menopang pelaksanaan Kawasan Metropolitan di Jawa Barat			1	Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti	Persen	90		
															TOTAL ANGGARAN	**Rp375.246.362.866,-**	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Tabel 4.16
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Gerakan Membangun Desa

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
8	Gerakan Membangun Desa																
		1	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa														
				a.	Persentase perkembangan strata desa mandiri	Persen	8,22	Mempercepat pembangunan desa	Memperkuat pemerintahan desa	1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	Persentase fasilitas penataan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	100	8.638.810.904	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
												2	Persentase fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	Persen	100		
												3	Persentase fasilitasi administrasi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persen	100		
										2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1	Persentase fasilitasi kelembagaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di desa	Persen	100	56.350.000.150	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
										3	Program Penataan Desa	1	Persentasi Desa yang difasilitasi Penataannya	Persen	100	600.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
										4	Program Peningkatan kerjasama Desa	1	Persentase Kerjasama antar Desa kewenangan Provinsi yang terfasilitasi	Persen	100	1.025.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
															TOTAL ANGGARAN	**Rp 66.613.811.054**	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Tabel 4.17
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara																
		1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi														
				a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	69,10	Meningkatkan Penerapan Nilai-nilai Agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan fasilitasi penguatan sumber daya dan lembaga keagamaan serta ekonomi umat	1	Program Penataan Bangunan Gedung	1	Tingkat Pembangunan Sarana Ibadah	Persen	100	309.997.026.863	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
										2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1	Prosentase cakupan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota	Persen	66	110.639.561.820	Dinas Perumahan dan Permukiman
										3	Program Kesejahteraan Rakyat					153.678.024.398	Biro Adkesra
														TOTAL ANGGARAN		**Rp 574.314.613.081**	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Tabel 4.18
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakteholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
10	Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok		Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	(Kwh/ kapita)	1.100	Meningkatkan akses layanan listrik yang memenuhi standar	Meningkatkan kualitas operasional instalasi tenaga listrik	1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan		Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	persen	100	3.938.988.390	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		2	Meningkat-nya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	a.	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	44	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrast-ruktur transportasi	Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok	1	Program Penyelenggaraan Jalan	1	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang	Km	1.953,98	863.073.802.196	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
									Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1	Rasio konektivitas angkutan jalan lingkup provinsi	Persen	87,69	128.807.754.713	Dinas Perhubungan
												2	Rasio konektivitas provinsi angkutan jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah I)	Persen	87,69		
												3	Rasio konektivitas provinsi angkutan jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah II)	Persen	87,69		
												4	Rasio konektivitas provinsi angkutan jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah III)	Persen	87,69		
												5	Rasio konektivitas provinsi angkutan jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah IV)	Persen	87,69		

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakteholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
								Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal yang handal dan modern	Mengembang-kan sistem jaringan transportasi massal per-kotaan ber-basis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjang-kau dan antar moda	1	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1	Persentase kebijakan penetapan jaringan perkeretapian yang merupakan kewenangan provinsi	Persen	60,00	1.900.000.000	Dinas Perhubungan
									Mengembangkan prasarana transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP serta mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut, udara, dan kereta api yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis	2	Program Pengelolaan Pelayaran	1	Persentase lintas penyebrangan yang beroperasi	Persen	96,30	1.650.000.000	Dinas Perhubungan
												2	Persentase dermaga yang terpenuhi standar (UPTD PPP LLASDP)	Persen	100		
												3	Jumlah dokumen pendukung pelabuhan pengumpan regional yang disiapkan (UPTD PPP Pelabuhan Laut)	Dokumen	14,00		
		3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahtera-an masya-rakat	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	61,19	Meningkatkan pengelolaan DAS, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya	Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara	1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	Persentase penurunan konsentrasi Parameter COD (mg/L)	Persen	97	8.484.618.516	Dinas Lingkungan Hidup
												2	Persentase penurunan konsentrasi parameter SOX	Persen	92		
										2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan	1	Persentase pelaporan pengendalian B3 dan LB3	Persen	70	200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakteholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
											Beracun (LIMBAH B3)						
										3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1	Persentase peningkatan dokumen lingkungan yang dinilai dan diawasi implementasinya	Persen	85	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
										4	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH		Persentase status masyarakat hukum adat di kabupaten/kota	Persen	60	435.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				b.	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	4,75		Meningkatkan kualitas tutupan lahan	1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1	Persentase peningkatan luasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persen	100	425.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
										2	Program Pengelolaan Hutan	1	Persentase peningkatan produksi hasil hutan	Persen	30,00	5.488.000.000	Dinas Kehutanan
												2	Persentase peningkatan penerimaan dari jasa lingkungan	Persen	10,00		
										3	Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1	Persentase penanganan lahan kritis	Persen	4,00	300.000.000	Dinas Kehutanan
												2	Tingkat kerusakan hutan	Persen	0,6		
										4	Program Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya	1	Persentase peningkatan habitat dan populasi pertumbuhan satwa liar yang ditangkarkan	Persen	5,00	1.620.588.470	Dinas Kehutanan

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakteholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
				c	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak	Persen	52,80	Meningkatkan kualitas lingkungan dan permukiman	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	Persen	0,00	5.800.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
										2	Program Pengelolaan Persampahan	1	Persentase peningkatan sampah yang terolah di TPA/TPST Regional	Persen	98,55	32,221,254,254	Dinas Lingkungan hidup
										3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persen	50,00	17.500.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
										4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1	Persentase luas genangan yang tertangani	Perssn	57	1.900.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
									Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	1	Program Penataan Bangunan Gedung	1	Rasio Pemenuhan Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persen	83	28.071.211.430	Dinas Perumahan dan Permukiman
										2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Kab/Kota	Persen	66	110,639,561,820	Dinas Perumahan dan Permukiman
										3	Program Kawasan Permukiman	1	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Persen	75	45.225.763.028	Dinas Perumahan dan Permukiman
										4	Program Pengembangan Perumahan	1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	37.100.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
												1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	376.250.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakteholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
								5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1	Persentase satuan perumahan yag sudah dilengkapi PSU	Persen	46,02	9.000.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
							Meningkatkan tertib tata kelola pertanahan	1	Program Pengelolaan Izin Lokasi	1	Persentase rekomendasi teknis izin lokasi lintas Kab/Kota yang diterbitkan	Persen	100	200.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
								2	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	1	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	100	250.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
								3	Program Pengelolaan Tanah Kosong	1	Persentase pemafaatan tanah kosong untuk pembangunan strategis di Jawa Barat	Persen	50	500.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
								4	Program Penatagunaan Tanah	1	Persentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kab/Kota	Persen	60	6.450.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
												TOTAL ANGGARAN		**Rp1.688.431.542.817**	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Tabel 4.19
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)	(12)	(13)	(14)
11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata																
		1	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	a.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,99	Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata	Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	Persentase Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	Persen	24,39	20.862.578.000	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
										2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Persentase sumber daya Industri kreatif yang dikembangkan	Persen	25,93	5.761.159.522	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
									Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital	1	Program Pemasaran Pariwisata	1	Persentase Seni Budaya dan Destinasi Pariwisata yang Dipromosikan	Persen	23,81	20.532.540.026	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		2	Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	a	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)	Persentase	24,89	Melestarikan kearifan lokal dan kebudayaan Jawa Barat	Meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal	1	Program Pengembangan Kebudayaan	1	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan (Usulan WBTB Jabar yang ditetapkan sebagai wbtb nasional, Bahasa, Sastra, dan Aksara daerah yang dilestarikan, dan seni budaya yang dilindungi)	Persen	34,48	12.139.432.067	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
									Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan	2	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola	Jumlah	26,09	1.925.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										TOTAL ANGGARAN		**Rp 61.220.709.615**	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat diterjemahkan kedalam program prioritas, serta salah satu pelaksanaanya dilakukan melalui kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4.20
Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Kedalam Program Prioritas dan Kegiatan Pembangunan

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	• Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. • Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Kesehatan
2.	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	• Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster • Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Biro BUMD
		Program Promosi dan Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk EksporUnggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
		Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	• Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota • Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	• Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi • Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
		Program Penempatan Tenaga Kerja	• Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi • Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota • Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota • Pengelolaan Informasi Pasar Kerja • Pengelolaan Informasi Pasar Kerja • Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi • Penerbitan Perpanjangan IMTA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
3.	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan provinsi	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	• Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih /Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi • Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian • Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi • Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman • Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penyuluhan Pertanian	• Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian • Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan • Pengembangan penerapan penyuluhan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	• Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi • Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi • Kesejahteraan hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sumber Daya Air
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	• Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi • Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Dinas Sosial
5.	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan	Program Pendidik dan ketenaga Kependidikan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas Komunikasi dan Informasi
		Program Pengelolaan Pendidikan	• Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas • Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah Kejuruan • Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	• Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah • Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Daerah
6.	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana	• Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana • Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana • Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7.	Inovasi Pelayanan Publik dan penataan daerah	Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Biro Organisasi
8.	Gerakan membangun desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	• Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta • Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa • Dinas Sosial
9.	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	Program Penataan Bangungan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Sekretariat Daerag
10.	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	• Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B • Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			• Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
		Program Pengelolaan Pelayaran	• Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional • Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	• Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian • Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dinas Perhubungan
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Penanggulangan pencemaran dan/kerusakann lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program pengelolaan persampahan	Penanganan sampah di TPA/TPST Regional	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan DAS	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan
		Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Dinas Kehutanan
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
		Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Izin Lokasi	Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Tanah Kosong	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penatagunaan Tanah	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11.	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	• Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi • Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program pemasaran pariwisata	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program pengembangan kebudayaan	• Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi • Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi • Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersifat strategis selanjutnya disebut proyek strategis. Adapun lokasi pelaksanaan proyek strategis Tahun 2022 secara spasial disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 4.2
Peta Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

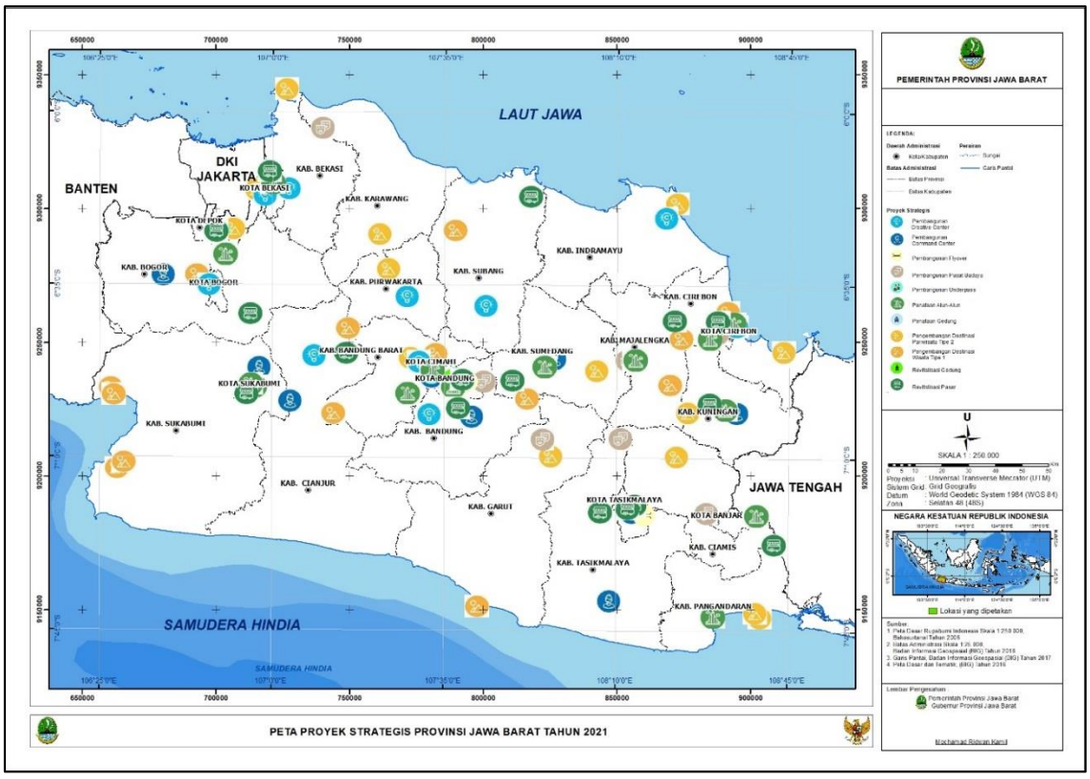

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

4.2.5 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, sehingga keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2022 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2022; Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD Tahun 2022 dengan sasaran PN RKP Tahun 2022; Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2022 dengan PN RKP Tahun 2022; serta Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP Tahun 2022, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.21
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2022 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2022

No	Prioritas Nasional Tahun 2022	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	a. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi b. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan c. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup d. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	a. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan c. Gerakan Membangun Desa d. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	a. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan b. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah c. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial d. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	a. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan b. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	a. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	a. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	a. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial b. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

Keterkaitan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dengan sasaran pembangunan nasional Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.22
Persandingan antara Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2022 dengan Sasaran Prioritas Daerah RKPD Tahun 2022

Sasaran RKP Tahun 2022		Sasaran RKPD Tahun 2022	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S17	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif
		S2	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S3	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
		S15	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
S3	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	S6	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri
		S12	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
S4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S11	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel
S5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S5	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat
S6	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	S1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan
		S9	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
S7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda		
S8	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	S5	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat
S9	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S9	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
S10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S18	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal
S11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S18	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal
S12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S13	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S13	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa	S13	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi

Sasaran RKP Tahun 2022		Sasaran RKPD Tahun 2022	
S15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	S9)	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan
S16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S7	Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
S17	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	S15	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
S18	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	S15	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian
S19	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	S14	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok
S20	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel
S21	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	S16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
S22	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	S10	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
		S16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
S23	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline*	S16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat
S24	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	S11	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel
S25	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	S11	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2021

Adapun keterkaitan indikator sasaran prioritas nasional dengan indikator prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.23
Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2022	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2022
Skor Pola Pangan Harapan (nilai)	Skor Pola Pangan Harapan (SPAH)
Penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan (jumlah WPP)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)
Rasio kewirausahaan nasional (%)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)
Pertumbuhan PDB Pertanian (%)	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin
Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1(a)) (%)	laju pertumbuhan sektor industri (%)
Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1*) (%)	laju pertumbuhan sektor industri (%)
Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)*) (US$ Miliar	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)
Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (%)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)
Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	Tingkat Efektivitas Kerja sama Daerah
Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)
Indeks Ketahanan Energi (indeks)	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)
Produktivitas air (water productivity) (m3/kg)	Indeks Penggunaan Air
Luas Minimal Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif) (juta ha)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Nilai Tukar Petani (NTP) (nilai)	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)
Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	Skor Pola Pangan Harapan (SPAH)
Konservasi Kawasan Kelautan (14.5.1*) (juta ha)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Produksi ikan (juta ton)	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)
Produksi garam (juta ton)	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)
Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (8.10.1(b)*) (%)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)
Pertumbuhan wirausaha (%)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah)
Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (%)	Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)
Kontribusi PDB industri pengolahan non migas (%)	Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)
Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp Triliun)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)
Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)
Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2*) (%)	Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)
Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (juta orang)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)
Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/ EODB (Peringkat)	Indeks Reformasi Birokrasi
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	Tingkat Efektivitas Kerja sama Daerah
Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	Tingkat Efektivitas Kerja sama Daerah

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2022	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2022
Neraca perdagangan (US$ miliar)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)
Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)
Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a)) (juta kunjungan)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)
Peringkat travel and tourism competitiveness index (peringkat)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) (%)	Indeks Reformasi Birokrasi
Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)
Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)
	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)
Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)
Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)
Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM) yang dikembangkan (WM)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)
Perkembangan status pembangunan desa	Indeks Desa Membangun (Poin)
Penurunan angka kemiskinan Desa (persen)	Indeks Desa Membangun (Poin)
Jumlah revitalisasi Bumdes berdasarkan status	Indeks Desa Membangun (Poin)
Jumlah revitalisasi Bumdes Bersama berdasarkan status	Indeks Desa Membangun (Poin)
Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Indeks Desa Membangun (Poin)
Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (persen)	Indeks Reformasi Birokrasi
Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (Kab/Kota)	Indeks Reformasi Birokrasi
Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	Indeks Reformasi Birokrasi
Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	Indeks Reformasi Birokrasi
Persentase capaian SPM di daerah (persen)	Indeks Reformasi Birokrasi
Jumlah hari layanan data center beroperasi (hari)	Indeks Reformasi Birokrasi
Jumlah kapasitas sistem penyimpanan pendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang dibangun (terabyte)	Indeks Reformasi Birokrasi
Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	Tingkat Efektivitas Kerja sama Daerah
Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (persen)	Indeks Reformasi Birokrasi
Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi (daerah)	Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2022	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2022
Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (Ha)	Indeks Reformasi Birokrasi
An gka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan jaminan sosial (%)	Indeks Kebahagian
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	Indeks Kebahagian
Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	Indeks Kebahagian
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika (nilai) Membaca (nilai) Sains Nilai)	Rata–Rata lama sekolah (tahun)
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Rata–Rata lama sekolah (tahun)
Harapan lama sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)
Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Poin)
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Persen)
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai)	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai)
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan) (%)	Indeks Kebahagian
Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	Rata–Rata lama sekolah (tahun)
Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university (PT)	Rata–Rata lama sekolah (tahun)
Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	Indeks Kebahagian
Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)	Indeks Reformasi Birokrasi
Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2022	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2022
Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%)	Indeks Kebahagian
Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)	Indeks Kebahagian
Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif (%)	Indeks Reformasi Birokrasi
Angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Persentase puskesmas dengan obat esensial (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Persentase obat memenuhi syarat (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Persentase makanan memenuhi syarat (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup
Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (rasio)	Rata–Rata lama sekolah (tahun
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%)	Rata–Rata lama sekolah (tahun
Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%)	Harapan Lama Sekolah (tahun)
Tingkat penyelesaian pendidikan (%)	Rata–Rata lama sekolah (tahun
Persentase anak kelas 1 SD/MI/ SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	Harapan Lama Sekolah (tahun)
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	Rata–Rata lama sekolah (tahun
Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	Indeks Pemberdayaan Gender
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Indeks Pemberdayaan Gender

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2022	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2022
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	Indeks Pemberdayaan Gender
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	Indeks Pemberdayaan Gender
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	Indeks Pemberdayaan Gender
Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	Indeks Pemberdayaan Gender
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Indeks Pemberdayaan Gender
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	Indeks Pemberdayaan Gender
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	Indeks Pemberdayaan Gender
Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%)	Indeks Pembangunan Pemuda
Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar (%)	Indeks Pembangunan Pemuda
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)	Indeks Kebahagian
Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh akses terhadap pengelolaan lahan (%)	Indeks Kebahagian
Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)
Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)
Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha (inovasi)	Laju Pertumbuhan Sektor Indukstri
Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik (paten)	Laju Pertumbuhan Sektor Indukstri
Jumlah paten granted (domestik) (paten)	Laju Pertumbuhan Sektor Indukstri
Budaya dan Prestasi Olahraga:	
Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	Indeks Pembangunan Pemuda
Indeks Aktualisasi Pancasila (nilai)	Indeks Pembangunan Pemuda
Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)
Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)
	Indeks Demokrasi (Poin)
Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	Indeks Kebahagiaan (Poin)
Nilai Budaya Literasi (nilai)	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai)	Indeks Pembangunan Pemuda
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih (nilai)	Indeks Pembangunan Pemuda

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2022	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2022
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib (nilai)	Indeks Pembangunan Pemuda
Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri (nilai)	Indeks Pembangunan Pemuda
Nilai Dimensi Mental Kultural (nilai)	Indeks Pembangunan Pemuda
Nilai Dimensi Kelembagaan Sosial Politik (nilai)	Indeks Pembangunan Pemuda
Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)
Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)
Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)
Tingkat Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya (nilai)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	rata–Rata lama sekolah (tahun
Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	indeks Resiko bencana (poin)
Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km) (terdapat dalam narasi RPJMN)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)
Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten/kota (%)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)
Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)
Rute pelayaran yang paling terhubung (loop) (%)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)
Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)
Rasio Elektrifikasi (%)	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita
Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	Indeks Kebahagian
Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	Indeks Penggunaan Air
Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan m3/detik)	Indeks Penggunaan Air
Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	Indeks Resiko bencana (poin)
Jumlah Provinsi yang meningkatan ketahanan terhadap bencana (hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan) (Provinsi)	Indeks Resiko bencana (poin)
Jumlah wilayah sungai yang menerapkan restrorasi dan konservasi lingkungan dan sumber daya air (wilayah sungai)	Indeks kualitas lingkungan hidup
Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (Kumulatif, miliar m3)	Indeks Penggunaan air
Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya (Kumulatif, unit)	Indeks Penggunaan air
Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko (unit)	
1.20 Persentase Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen (kumulatif, persen)	Nilai Tukar Petani

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2022	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2022
Luas lahan beririgasi untuk komoditas non padi (Hektare)	Nilai Tukar Petani
Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi (Km)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)
Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)
Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (Km's)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)
Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)
Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)
Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)
Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)
Jumlah rute jembatan udara (rute)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)
Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang (kota)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)
Jumlah BUMD Air Minum yang menerapkan Smart Grid Water Management (BUMD Air Minum/ PDAM)	Indeks Penggunaan Air (poin)
Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (Kab/Kota)	Indeks Penggunaan Air (poin)
Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik per Kapita (kWh)	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)
Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	indeks kualitas Lingkungan Hidup (poin)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks kualitas Lingkungan Hidup (poin)
	Indeks Penggunaan Air (poin)
Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	indeks Resiko bencana (poin)
Persentase penurunan emisi GRK (%)	indeks kualitas Lingkungan Hidup (poin)
Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	indeks kualitas Lingkungan Hidup (poin)
Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks kualitas Lingkungan Hidup (poin)
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	
Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks kualitas Lingkungan Hidup (poin)
Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	indeks kualitas Lingkungan Hidup (poin)
Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	indeks Resiko bencana (poin)
Penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim (%)	indeks Resiko bencana (poin)
Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	indeks Resiko bencana (poin)
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2022	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2022
Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (%)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Indeks Demokrasi Indonesia (nilai)	Indeks Demokrasi (Poin)
Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)
Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori Baik ke Atas (%) (3)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)
	Tingkat efektivitas kerja sama Daerah (%)
Persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa diseluruh Wilayah NKRI yang dapat di atasi. (%)	Indeks Ketentraman dan Ketertiban (poin)

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2021

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap dukungan pada Program prioritas nasional dalam RPJMN disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.24
Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN

No.	RPJMN			RKPD 2022
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
1.	KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis			
	Pembangunan DPP Baru Bandung-Halimun-Cileteuh			
	Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Baru Bandung-Halimun-Cileteuh	Kab. Bandung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
				Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	Peningkatan Jalur KA di Jawa Barat (Bandung - Banjar)	Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jawa Barat	Program Bina Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.	KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan			
	Pengembangan komoditas unggulan			

No.	RPJMN			RKPD 2022
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	lada, pala, dan cengkeh			
	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Purwakarta, Kab. Kuningan, Kab. Pangandaran	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Pengembangan komoditas unggulan Kopi			
	Kawasan Kopi	Provinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Ciamis	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Pengembangan komoditas unggulan Kelapa			
	Kawasan Kelapa	Provinsi Jawa Barat, Kab. Sumedang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Pengembangan komoditas unggulan Tebu			
	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Provinsi Jawa Barat, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Subang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Optimalisasi komoditas unggulan emas			
	Optimalisasi produksi emas		Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
	Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap			
	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya			
	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Provinsi Jawa Barat, a.l: Kab.	Program Pengelolaan	Program Pengelolaan

No.	RPJMN			RKPD 2022
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	(ikan dan rumput laut)	Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Garut	Perikanan Budidaya	Perikanan Budidaya
	Pengembangan komoditas unggulan Garam			
	Peningkatan produksi garam	Jawa Barat	Program Pengelolaan Ruang Laut	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Keci
3.	KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan			
	ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabekpunjur)	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur		
	Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Provinsi Jawa Barat		Program Pengelolaan Energi Terbarukan
	Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat		Program Pengelolaan Energi Terbarukan
	Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan *Transit Oriented Development* (TOD) di Jabodetabek (Dukungan KPBU)	Jawa Barat dan (DKI, Banten)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan *Transit Oriented Development* (TOD) di Jabodetabek (Dukungan APBN)	Jawa Barat dan (DKI, Banten)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Pengembangan integrasi simpul transportasi Jabodetabek	Jawa Barat dan (DKI, Banten)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Kota Bogor, Kab. Bogor (Provinsi Jawa Barat)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	Pembangunan Underpass Bulak Kapal	Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
	Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Pembangunan dan Peningkatan SPAM	WM Jakarta di Provinsi Jawa Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD	Kota Bogor, Kota Depok, Kota	Program Pembinaan Dan Pengembangan	Program Pengelolaan Dan

No.	RPJMN			RKPD 2022
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	Penyelenggara SPAM – Zona Air Minum Prima	Bekasi, Bogor, Kab. Bekasi (Provinsi Jawa Barat)	Infrastruktur Permukiman	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM – Smart Grid Water Management	Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bogor, Kab. Bekasi (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	SPALD-T Skala Kota/Regional	Kota Bekasi, Kota Depok (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	SPALD-T Skala Permukiman	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan
	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai	WM Jakarta di Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	WM Jakarta di Provinsi Jawa Barat		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Bandung (Cekungan Bandung)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang		
	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
	Pembangunan instalasi Pengolah Sampah	Kota Bandung, Provinsi Jawa		Program Pengelolaan Energi

No.	RPJMN			RKPD 2022
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	menjadi Energi Listrik (PSEL)	Barat		Terbarukan Dan Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah Regional
	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan:			
	a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Rel (APBN)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Rel (KPBU)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Rel (APBD)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Jalan (APBN)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Jalan (KPBU)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Jalan (APBD)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	c. Pembangunan Jalur Ganda dan elektrifikasi KA Kiara Condong - Cicalengka	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat (Provinsi Jawa Barat)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Cianjur-Padalarang; Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan APBN)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan KPBU)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian

No.	RPJMN			RKPD 2022
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	Peningkatan Jalur KA di Jawa Barat (Bandung - Banjar)	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	Jalan Akses Stasiun Gede Bage	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
	Pembangunan KA Ekspres Jakarta-Semarang	Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	Lanjutan Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) (KPBU)	Jakarta, Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	Pusat Pengembangan Keahlian/ Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat (Provinsi Jawa Barat)	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Jalan Tol Non Trans Jawa	Kota Bandung, Kab. Bandung (Provinsi Jawa Barat)	-	Program Penyelenggaraan Jalan
	Jalan Tol Non Trans Jawa	Kab. Bandung, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
	Jalan Tol Non Trans Jawa	Kab. Bandung, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
	Pembangunan Fly Over Kopo	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Provinsi Jawa Barat	Program Pengembangan Perumahan	Program Peningkaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	-	Program Peningkaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	-	Program Peningkaan Prasarana, saranan dan Utilitas Umum (PSU)
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Penataan Bangunan Gedung dan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
	Pembangunan dan Peningkatan SPAM	WM Bandung (lingkup pelayanan), Provinsi Jawa Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No.	RPJMN			RKPD 2022
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	SPALD-T Skala Kota/Regional	Kota Bandung, Kab. Bandung (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	SPALD-T Skala Permukiman	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Kota Bandung, Kab. Bandung Barat (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan
	Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	-	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Jawa Barat)	Kota Sukabumi, Kota Cirebon		
	Jalan Tol Non Trans Jawa	Kota Bogor, Kab. Bogor (Provinsi Jawa Barat)	-	Program Penyelenggaraan Jalan

No.	RPJMN			RKPD 2022
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian
	Pembangunan Bandara Sukabumi	Provinsi Jawa Barat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	-
	SPALD-T Skala Permukiman	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan
	Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan
	Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
4.	KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi			
	Pembangunan Desa Terpadu	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, DPP Baru Bandung-Halimun-Ciletuh	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
			2. Bina Pemerintahan Desa	
	Desa Wisata (DEWI)	DPP Baru Bandung-Halimun-Ciletuh	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	Desa Digital (P3PD)	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi,	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga

No.	RPJMN			RKPD 2022
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
		Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya		Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	Penetapan Batas Desa	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Bina Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut,	Bina Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan

No.	RPJMN			RKPD 2022
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
		Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya		Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Bina Pemerintahan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Pendampingan pada 74.957 Desa	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Bina Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang,	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa

No.	RPJMN			RKPD 2022
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
		Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya		
	Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Konvergensi Pencegahan *Stunting* di Desa	Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Subang, Karawang, Bandung Barat, Majalengka	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	Kab. Sukabumi	1. Program Pengembangan Pariwisata	
			2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	
			3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	
			4. Program Ketenagalistrikan	
	Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Kab. Sukabumi	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Kab. Sukabumi	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat

No.	RPJMN			RKPD 2022
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
				Hukum Adat
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Penerapan *Sustainable Tourism Practices* Di Destinasi Utama dan Prioritas	Kab. Sukabumi	Program Pengembangan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Kab. Sukabumi	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Sukabumi	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Program Administrasi Pemerintahan Desa
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri	Kab. Sukabumi	Program Ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
	Sertifikat Hak Atas Tanah	Jawa Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Program Administrasi Pemerintahan Desa
				Program Pengelolaan Izin Lokasi
5.	KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah			
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat			
	Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pelayanan Penanaman Modal
		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
	Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Pusat dan regional (alokasi	Program Pengembangan	Program Pengembangan

No.	RPJMN			RKPD 2022
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
		Kementerian)	Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Sumber Daya Manusia
	Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Pusat (alokasi Kementerian)		Program Penataan Organisasi
	Program optimalisasi SIPD: *e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register*	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat			
	Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Percepatan kerja sama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Monitoring perjanjian kerja sama	-	-	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat			

No.	RPJMN			RKPD 2022
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	Integrasi dan penerapan SPM	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Penerapan SPM Sub bidang Bencana	-	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Program Penanggulangan Bencana
	Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat			
	Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	RPJMN			RKPD 2022
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat			
	Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat			
	Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pemenuhan Mandatory Spending Daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat			
	Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	RPJMN			RKPD 2022
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	Pengesahan APBD tepat waktu	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat			
	Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	-
		Provinsi	Program Bina Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	-
	Diklat Camat	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-
	Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-
	Peningkatan Pelayanan Pertanahan			
	Sertifikat Hak Atas Tanah	Jawa Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Program Pengelolaan Izin Lokasi
	Peta Dasar Pertanahan	Jawa Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Layanan Pertanahan	Jawa Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Program Pengelolaan Izin Lokasi
	Penyelenggaraan Penataan Ruang			
	Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana	Jawa Barat	Program Perencanaan Tata	Program Penyelenggaraan

No.	RPJMN			RKPD 2022
	PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program
	Tata Ruang Prov/Kab/Kota		Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang
	Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jawa Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jawa Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jawa Barat (KSN Kawasan Teropong Bintang Boscha)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah Tahun 2021

Dukungan program daerah RKPD Tahun 2022 terhadap arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, gender, modal sosial budaya dan transformasi digital, disajikan dalam subbab ini. RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Untuk mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan pengarusutamaan di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mempersiapkan program-program pembangunan daerah Tahun 2022 agar target-target pembangunan baik nasional maupun daerah dapat tercapai secara optimal. Berikut program-program pembangunan yang mendukung kebijakan pengarusutamaan pada RPJMN Tahun 2020-2024:

Tabel 4.25
Sandingan Program Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (*Mainstreaming*) Pembangunan Nasional Tahun 2022

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2022
Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	
Goal 1 Tanpa Kemiskinan • Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi • Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. • Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. • Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 3. Program Pemberdayaan Sosial 4. Program Rehabilitasi Sosial 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 6. Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah 7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 8. Program Pengelolaan Kota Administrasi 9. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 10. Program Penempatan Tenaga Kerja 11. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 12. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 13. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 14. Program Perlindungan Khusus Anak 15. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 16. Program Penanganan Bencana 17. Program Penanggulangan Bencana 18. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 19. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 20. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 21. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Program Perizinan Usaha Pertanian
Goal 2 Tanpa Kelaparan • Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. • Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan 5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertania 6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2022
memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. • Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian. • Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang me-ningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. • Target 2.5 Pada tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian	7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 9. Program Perizinan Usaha Pertanian 10. Program Penyuluhan Pertanian 11. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 12. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 13. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 14. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 15. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Goal 3 Kehidupan Sehat & Sejahtera • Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup • Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. • Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. • Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Program Rehabilitasi Sosial 6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2022
• Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. • Target 3.8 Pada tahun 2030,Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. • Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. • Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	
Goal 4 Pendidikan Berkualitas • Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. • Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. • Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. • Target 4.5 Pada tahun 2030,menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2022
masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. • Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	
Goal 5 Kesetaraan Gender • Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. • Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. • Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. • Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	1. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 3. Program Perlindungan Perempuan 4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Goal 6 Air Bersih & Sanitasi Layak • Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua • Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan • Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. • Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat 3. Program Perekonomian dan Pembangunan 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 7. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2022
Goal 7 Energi Bersih & Terjangkau • Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. • Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global. • Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	1. Program Pengelolaan Energi Terbarukan 2. Program Perekonomian dan Pembangunan 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Goal 8 Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi • Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. • Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. • Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan • Target 8.6 Pada tahun 2021, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. • Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. • Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 3. Program Pengembangan UMKM 4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 5. Program Penempatan Tenaga Kerja 6. Program Pengembangan Kebudayaan 7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman 9. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata 10. Program Pemasaran Pariwisata 11. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 12. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 13. Program Perekonomian dan Pembangunan
Goal 9 Industri, Inovasi & Infrastruktur • Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. • Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan	1. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Darat 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan Darat 3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4. Program Pembangunan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) 5. Program Pemberdayaan Industri Pangan, Olahan dan Kemasan 6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2022
produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. • Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. • Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2021.	7. Program Pengembangan Aplikasi Informatika
Goal 10 Berkurangnya Kesenjangan • Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. • Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	1. Program Kesejahteraan Rakyat 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manunsia 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Program Hubungan Industrial 5. Progam Penanganan Bencana 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
Goal 11 Kota & Permukiman Yang Berkelanjutan • Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. • Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. • Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan • Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 3. Program Kesejahteraan Rakyat 4. Program Pengembangan Perumahan 5. Program Pelayanan Penghubung 6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 7. Program Penanggulangan Becana 8. Program Pencegahan, Penganggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. 9. Program penangan bencana 10. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 11. Program Pengelolaan Persampahan 12. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2022
Goal 12 Konsumsi & Produksi yang Bertanggung Jawab • Target 12.4 Pada tahun 2021 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. • Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. • Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Program Pengendalian Bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Goal 13 Penanganan Perubahan Iklim • Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. • Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 3. Program Penanganan Bencana
Goal 14 Ekosistem Lautan • Target 14.2 Pada tahun 2021, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. • Target 14.5 Pada tahun 2021, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. • Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 4. Program Pengaturan pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau ****** 5. Program Perencanaan Lingkungan hidup 6. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau kecil
Goal 15 Ekosistem Daratan • Target 15.1 Pada tahun 2021, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	1. Program Konsservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 4. Program Pengelolaan Hutan 5. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2022
• Target 15.3 Pada tahun 2021, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. • Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. • Target 15.9 Pada tahun 2021, mengitegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan. • Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.	
Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh • Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. • Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. • Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. • Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	1. Program Kesejahteraan Rakyat 2. Program Perlindungan Khusus Anak 3. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 4. Program Pengkuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH 5. Program Penataan Organisasi
Goal 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan • Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kerentanan Bencana	1. Program Penanganan Bencana 2. Program Penanggulangan Bencana 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2022
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. Program Penataan Organisasi 4. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 5. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 7. Program Penyelenggaraan Pengawasan
Gender	
menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia melalui pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan
Modal Sosial dan Budaya	
internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan local (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas	1. Program Penataan Desa 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pembinaan Sejarah 6. Program Majelis Adat Aceh (MAA) 7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 8. Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali
Transformasi Digital	
Optimalisasi peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sumber pertumbuhan ekonomi	1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021

Tabel 4.26
Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Masing-Masing Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional Tahun 2022

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
PN.01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1. Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan		
		2. Peningkatan pasokan bahan bakar nabati		
		3. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi		
		4. Peningkatan pemenuhan energi domestik		
		5. Pengembangan industri pendukung EBT		
2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Penyediaan air untuk pertanian	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Irigasi
		2. Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		3. Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan DAS
		4. Pengembangan waduk multiguna	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 6. Program Penyuluhan Pertanian
		3. Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar		
		4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian		
		5. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional		
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	1. Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikana 4. Program Penyuluhan Pertanian
		2. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiyaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya		
		3. Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan		

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
5	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengan (UMKM), dan koperasi	1. Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM
		2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha		1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM
		3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi		1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 3. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		4. Peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha		1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Promosi Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Pelayanan Penanaman Modal 6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial		1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil, dan industrialisasi	1. Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		2. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Program Pemasaran Pariwisata 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pelestariaan dan Pengelolaan Cagar Budaya
		3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Promosi Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Pelayanan Penanaman Modal 6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
				7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja
		4. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM
		5. Pengembangan industri halal	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)	1. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Pengembangan Ekspor 2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
		2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor		
		3. Pengelolaan impor	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		4. Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif		
		5. Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Pengembangan Ekspor 2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
				(UMKM) Program Pengembangan UMKM
		6. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan desinasi branding, dan produk kreatif	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Program Pemasaran Pariwisata
8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	1. Peningkatan pendalaman sektor keuangan		
		2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		3. Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		4. Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
PN.02 Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan				

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
1	Pembangunan Wilayah Sumatera	1. Pengembangan Kawasan strategis	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	1. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
			Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
2	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	2. Pengembangan sektor unggulan	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
3	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	3. Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi)	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Penaatan Bangunan dan Lingkungannya
4	Pembangunan Wilayah Kalimantan	4. Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)	Gerakan membangun desa	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
			Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	3. Program Penyelenggaraan Jalan
5	Pembangunan Wilayah Sulawesi	5. Kelembagaan dan keuangan daerah	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	1. Program Penataan Organisasi
6	Pembangunan Wilayah Maluku			
7	Pengembangan Wilayah Papua			

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
PN.03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				
1	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan		
		2. Integrasi sistem administrasi kependudukan		
		3. Pendampingan layanan terpadu	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	1. Program Pelayanan Penanaman Modal
		4. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk		
2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	1. Sistem jaminan sosial nasional	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran		
		3. Perlindungan sosial adaptif		
		4. Kesejahteraan sosial		
3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat		
		3. Peningkatan pengendalian penyakit		
		4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)		
		5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan		
4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran		1. Program Pengelolaan Pendidikan

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun	Reformasi sistem Pendidikan dan pemajuan kebudayaan	2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pengembangan Kurikulum
		3. Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan		
		4. Penjaminan mutu pendidikan		
		5. Peningkatan tata kelola pendidikan		
5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	1. Pemenuhan hak dan perlindungan anak		
		2. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan		
		3. Kualitas pemuda		
6	Pengentasan kemiskinan	1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		2. Keperantaraan usaha dan dampak sosial		
		3. Reformasi agraria	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan Izin Lokasi 2. Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum 3. Program Pengelolaan Tanah Kosong Program Penatagunaan tanah
		4. Perhutanan sosial	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan Hutan
7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri	Reformasi sistem Pendidikan dan pemajuan kebudayaan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pengembangan Kurikulum
		2. Prestasi olahraga		
PN.04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti		
		2. Revolusi mental dalam tata kelola		
		3. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter		
		4. Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila		
		5. Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme		
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	1. Program pengembangan kebudayaan 2. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
		2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat		
		3. Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif		

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		4. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan		
3	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	1. Peningkatan budaya literasi	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	1. Program Pembinaan Perpustakaan
		2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah serta sastra		
		3. Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	1. Program Inovasi Daerah
		4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	1. Program Pembinaan Perpustakaan
PN.05 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar				
1	Infrastruktur pelayanan dasar	1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Pengembangan Perumahan 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU)
		2. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 2. Program Pengelolaan Persampahan 3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
		3. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		4. Keselamatan dan keamanan transportasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		5. Ketahanan kebencanaan infrastruktur	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	1. Program Penanggulangan Bencana
		6. Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA
2	Infrastruktur ekonomi	1. Konektivitas jalan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		2. Konektivitas darat	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Program Pengelolaan Perkeretapian
3	Infrastruktur perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)	1. Transportasi perkotaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Program Pengelolaan Perkeretapian
		2. Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		3. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 2. Program Pengelolaan Persampahan 3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
		4. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Pengembangan Perumahan 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
4	Transformasi digital	1. Penuntasan infrastruktur TIK	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		2. Pemanfaatan infrastruktur TIK	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		2. Fasilitas pendukung transformasi digital	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
PN.06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim				
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Program Pengelolaan DAS Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 4. Program Pengelolaan Hutan
		2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Program Pengelolaan DAS 4. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 5. Program Pengelolaan Hutan
		3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Program Pengelolaan DAS

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
				4. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 5. Program Pengelolaan Hutan
		4. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	1. Penanggulangan bencana	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	1. Program Penanggulangan Bencana
		2. Peningkatan ketahanan iklim	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	1. Program Penanggulangan Bencana
3	Pembangunan rendah karbon	1. Pembangunan energi berkelanjutan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		2. Pemulihan lahan berkelanjutan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan Hutan 2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
		3. Pengelolaan limbah	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		2. Pengembangan industri hijau	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program Pengelolaan Hutan

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
				3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
PN.07 Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik				
1	Konsolidasi Demokrasi	1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi		
		2. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan		
		3. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik		
2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1. Penguatan Integrasi NKRI dan Perlindungan WNI di luar Negeri		
		2. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional		
		3. Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global		
3	Penegakan Hukum Nasional	1. Penataan Regulasi		
		2. Perbaikan Sistem Hukum dan Perdata		
		3. Penguatan Sistem Anti Korupsi		
		4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan		
4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1. Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	1. Program Penataan Organisasi
		2. Transformasi Pelayanan		
		3. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis		
		4. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan		
5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1. Penguatan Keamanan Dalam Negeri		

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		2. Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi *Confidence Building Measures* (CBM)		
		3. Penguatan Keamanan Laut		
		4. Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakaat		
		5. Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber		

Sumber: Lampiran 1 Matriks Pembangunan Rancangan Awal RKP Tahun 2022, hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

4.3 Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan kewilayahan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dan RTRW Nasional, yang dijabarkan melalui kebijakan pengembangan wilayah, serta kebijakan struktur dan pola ruang.

Kebijakan pengembangan wilayah Jawa Barat diwujudkan melalui pembagian 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP) serta keterkaitan fungsional antar wilayah dan antar pusat pengembangan. WP ditentukan berdasarkan potensi wilayah, aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi serta perkembangan daerah sekitarnya. WP mengacu pada skenario pengembangan wilayah sesuai target pencapaian penataan ruang dan arah pengembangan ekonomi. Penetapan WP dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan, sesuai dengan sektor unggulan dan fokus pengembangan masing-masing kabupaten/kota. WP di Jawa Barat terdiri dari WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakunig, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Cekungan Bandung, dan WP Sukabumi dan sekitarnya. Peta WP tercantum pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.3
Wilayah Pengembangan di Jawa Barat

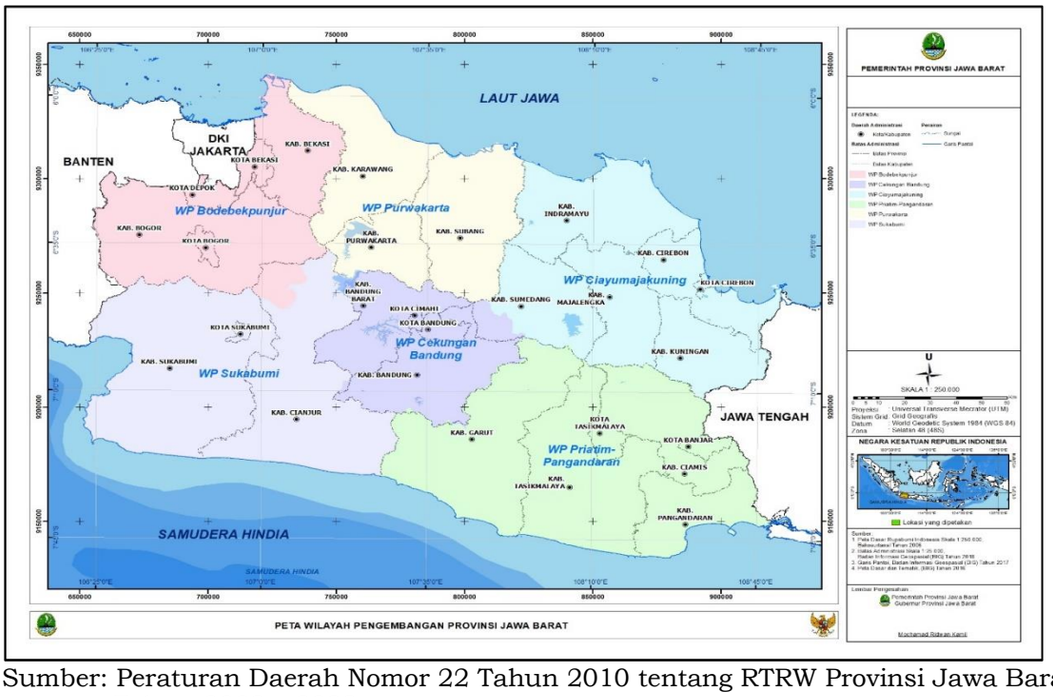

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029

Kebijakan pengembangan wilayah melalui keterkaitan fungsional antar WP, meliputi:

1. Kawasan yang terletak di bagian Utara Provinsi mencakup Wilayah Pengembangan (WP) Bodebekpunjur dan sebagian WP Purwasuka, Wilayah Pengembangan Kawasan Khusus (WP KK) Cekungan Bandung dan WP Ciayumajakuning menjadi kawasan yang dikendalikan perkembangannya.

   Strategi mengendalikan pengembangan meliputi :

   a. Memenuhi kebutuhan pelayanan umum perkotaan yang berdayasaing dan ramah lingkungan;
   b. Membatasi kegiatan perkotaan yang membutuhkan lahan luas dan potensial menyebabkan alih fungsi kawasan lindung dan lahan sawah;
   c. Menerapkan kebijakan yang ketat untuk kegiatan perkotaan yang menarik arus migrasi masuk tinggi;
   d. Mengembangkan sistem transportasi massal;
   e. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antarprovinsi dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di KSN; dan
   f. Mengembangkan mekanisme pembagian peran (*role sharing*) terutama dengan provinsi yang berbatasan dalam pengelolaan kawasan lindung berbasis das dan pemanfaatan sumber daya alam.

2. Kawasan yang terletak di bagian Timur Provinsi mencakup sebagian WP Ciayumajakuning, WP KK Cekungan Bandung, dan WP Priangan Timur-Pangandaran ditetapkan sebagai menjadi kawasan yang didorong pengembangannya.

   Strategi mendorong pengembangan meliputi:

   a. Memprioritaskan investasi untuk mengembangkan kawasan sesuai dengan arahan RTRWP;
   b. Mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa;
   c. Memprioritaskan pengembangan infrastruktur wilayah;
   d. Menjamin ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana permukiman yang memadai, terutama di wilayah perbatasan; dan
   e. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antarprovinsi dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di wilayah perbatasan.

3. Kawasan yang terletak di bagian Selatan Provinsi mencakup sebagian WP KK Cekungan Bandung, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Priangan Timur-Pangandaran ditetapkan menjadi kawasan yang dibatasi perkembangannya.

   Strategi membatasi pengembangan meliputi :

   a. Mempertahankan dan menjaga kelestarian Kawasan Lindung yang telah ditetapkan;
   b. Meningkatkan produktivitas lahan dan aktivitas budidaya secara optimal dengan tetap memperhatikan fungsi lindung yang telah ditetapkan;
   c. Meningkatkan akses menuju dan ke luar kawasan;
   d. Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman terutama di wilayah perbatasan;
   e. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar provinsi dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di KSN; dan
   f. Mengembangkan mekanisme pembagian peran (*role sharing*) terutama dengan provinsi yang berbatasan dalam pengelolaan Kawasan Lindung berbasis DAS.

4. Kawasan yang terletak di bagian Barat Provinsi mencakup sebagian WP Bodebekpunjur, WP KK Cekungan Bandung, dan WP Sukabumi dan sekitarnya, ditetapkan sebagai kawasan yang ditingkatkan perkembangannya.

   Strategi meningkatkan pengembangan meliputi :

   a. Mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri, dan perdagangan/jasa;
   b. Memprioritaskan pengembangan infrastruktur wilayah;
   c. Mengembangkan sistem transportasi massal;
   d. Menjamin ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana permukiman yang memadai, terutama di wilayah perbatasan; dan
   e. Meningkatkan koordinasi dalam mewujudkan kesetaraan peran dan fungsi di wilayah perbatasan.

Efektifitas pengembangan wilayah di WP dan antar WP didorong oleh pembangunan dan peningkatan jaringan prasarana wilayah yang mendukung fungsi masing-masing kawasan. Peta keterkaitan fungsional antar WP tercantum pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.4
Keterkaitan Fungsional Antar Wilayah Pengembangan di Provinsi Jawa Barat

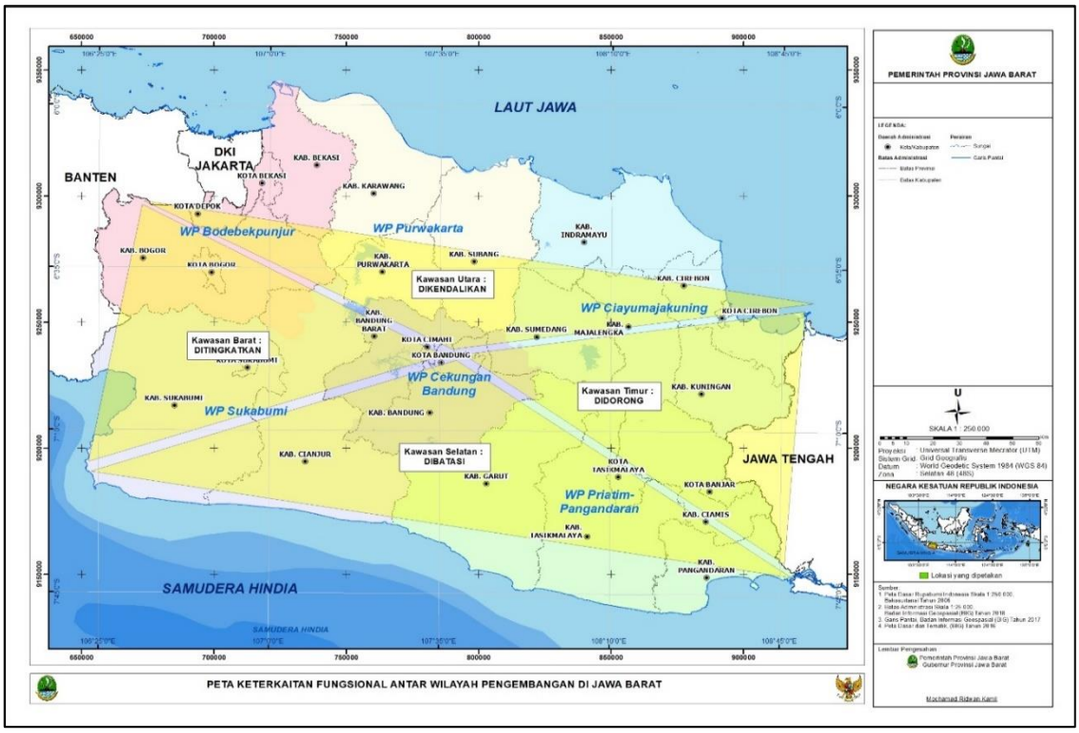

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029

4.3.1 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan pengembangan struktur ruang Provinsi Jawa Barat, meliputi:

1. Pemantapan peran perkotaan sesuai fungsi yang telah ditetapkan, yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
2. Pengembangan sistem kota-desa yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, serta fungsi kegiatan dominannya;
3. Pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah Utara serta wilayah yang berada di antara wilayah Utara dan Selatan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan;
4. Pengendalian perkembangan sistem kota di wilayah Selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya;
5. Penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali, dan pendorong pengembangan wilayah untuk mewujudkan sistem kota di daerah; dan

6. Mendorong terlaksananya peran WP serta KSP dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk.

Pemantapan peran dan fungsi PKN, PKW, dan PKL dipenuhi melalui pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana minimal, yang terdiri dari :

1. PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. PKN di Jawa Barat terdiri dari PKN Jabodetabek, PKN Bandung Raya, dan PKN Cirebon. Sarana dan prasarana minimal di PKN meliputi :
   a. Perhubungan : bandar udara dan/atau pelabuhan laut dan/atau terminal tipe A, angkutan umum massal
   b. Ekonomi : pusat distribusi regional
   c. Kesehatan : rumah sakit umum tipe A atau B
   d. Pendidikan : kawasan pendidikan tinggi, pusat kebudayaan
   e. Permukiman : TPPAS Regional, kawasan olah raga terpadu, hunian vertikal, SPAM regional, dan sistem pengolahan air limbah
2. PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. PKW di Jawa Barat terdiri dari PKW Cikopo-Cikampek, PKW Indramayu, PKW Tanjungsari, PKW Pangandaran, PKW Tasikmalaya, PKW Cidaun, PKW Kota Sukabumi, dan PKW Palabuhanratu. Sarana dan prasarana minimal di PKW meliputi:
   a. Perhubungan : Bandar udara/ pangkalan udara, dan/atau pelabuhan laut, dan/atau terminal tipe B
   b. Ekonomi : pusat distribusi provinsi, fasilitas bisnis pariwisata internasional, fasilitas bisnis perikanan
   c. Kesehatan : rumah sakit umum tipe B
   d. Pendidikan : perguruan tinggi, pusat kebudayaan
   e. Permukiman : penyediaan Rusun, penyediaan PSU, kawasan olah raga terpadu, sistem pelayanan air minum dan sistem pengolahan air limbah
   f. PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Penetapan PKL diarahkan pada pertimbangan teknis bahwa kota-kota yang ditetapkan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan dengan kegiatan-kegiatan yang berciri

perkotaan, seperti industri, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, dan lainnya. Perubahan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 menetapkan 69 PKL di Jawa Barat yang tersebar di Kabupaten/Kota. Sarana dan prasarana minimal di PKL, meliputi:

1) Sarana pendidikan: pembangunan unit sekolah baru untuk jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan pembangunan ruang kelas baru untuk jenjang SD, SMP, SMA/SMK.
2) Sarana kesehatan: pembangunan Rumah Sakit Tipe C, dan pembangunan Puskesmas Poned.
3) Sarana ekonomi dan budaya: terminal agribisnis, pasar, jasa keuangan, IPAL industri komunal, masjid, lapangan olahraga/ruang publik, dan tempat atraksi budaya.
4) Sarana dan prasarana dasar permukiman: drainase, jalan lingkungan, TPA lokal, fasilitas TPST, SPAM IKK, dan SPALD komunal.
5) Sarana dan prasarana transportasi : peningkatan akses jalan dari PKL ke kecamatan sekitarnya, penyediaan terminal tipe C dan sarana angkutan umum.

Kebijakan pengembangan pola ruang, meliputi kebijakan pengembangan kawasan lindung, dan pengembangan kawasan budidaya. Kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi:

1. Pencapaian luas kawasan lindung sebesar 45 persen; dan
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung.

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:

1. Mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan luas kawasan hutan, serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan daerah dan nasional;
2. Mendorong pengelolaan wilayah pesisir darat dan pulau kecil, dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

4. Mengutamakan pembangunan hunian vertikal pada kawasan permukiman perkotaan guna optimalisasi dan efisiensi ruang budidaya yang semakin terbatas, terutama pada kawasan yang perlu dikendalikan; dan
5. Mengamankan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan rencana tata ruang pertahanan dan keamanan.

Sistem perkotaan dan rencana jaringan prasarana tercantum dalam Perubahan Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 yang menampilkan pusat-pusat kegiatan sistem nasional dan provinsi (PKN, PKW, PKL), serta jaringan prasarana utama yang terdiri dari jaringan prasarana transportasi, energi, dan prasarana lainnya yang lintas kabupaten/kota (SPAL, SPAM, TPPAS). Perubahan Peta Rencana Struktur Ruang tercantum dalam Gambar berikut ini.

Gambar 4.5
Perubahan Peta Rencana Struktur Ruang

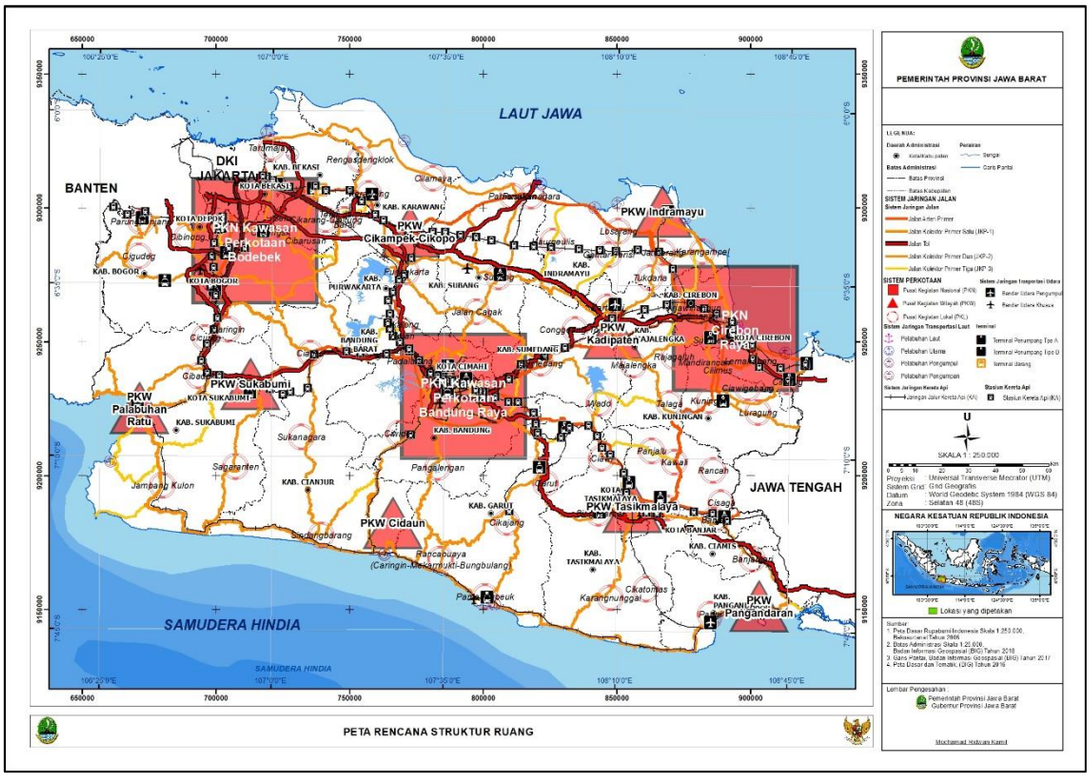

Sumber : Raperda tentang Perubahan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

4.3.2 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Ruang

Kawasan lindung dan budidaya tercantum dalam Perubahan Peta Pola Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 yang menampilkan dominasi ruang dalam skala peta provinsi (1:250.000).

Kawasan lindung berupa deliniasi kawasan lindung hutan (hutan lindung dan hutan konservasi), serta kawasan lindung non hutan (kawasan resapan air, kawasan perlindungan geologi, kawasan rawan bencana). Sedangkan kawasan budidaya yang tercantum dalam peta pola ruang terdiri dari kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman, simbol kawasan hankam (kawasan peruntukan lainnya diatur dalam pasal). Kawasan berfungsi lindung merupakan informasi yang penting dalam pemanfaatan ruang/pembangunan di kawasan budidaya, karena pembangunan harus dilaksanakan sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Perubahan Peta Rencana Pola Ruang tercantum dalam gambar berikut ini.

Gambar 4.6
Perubahan Peta Rencana Pola Ruang

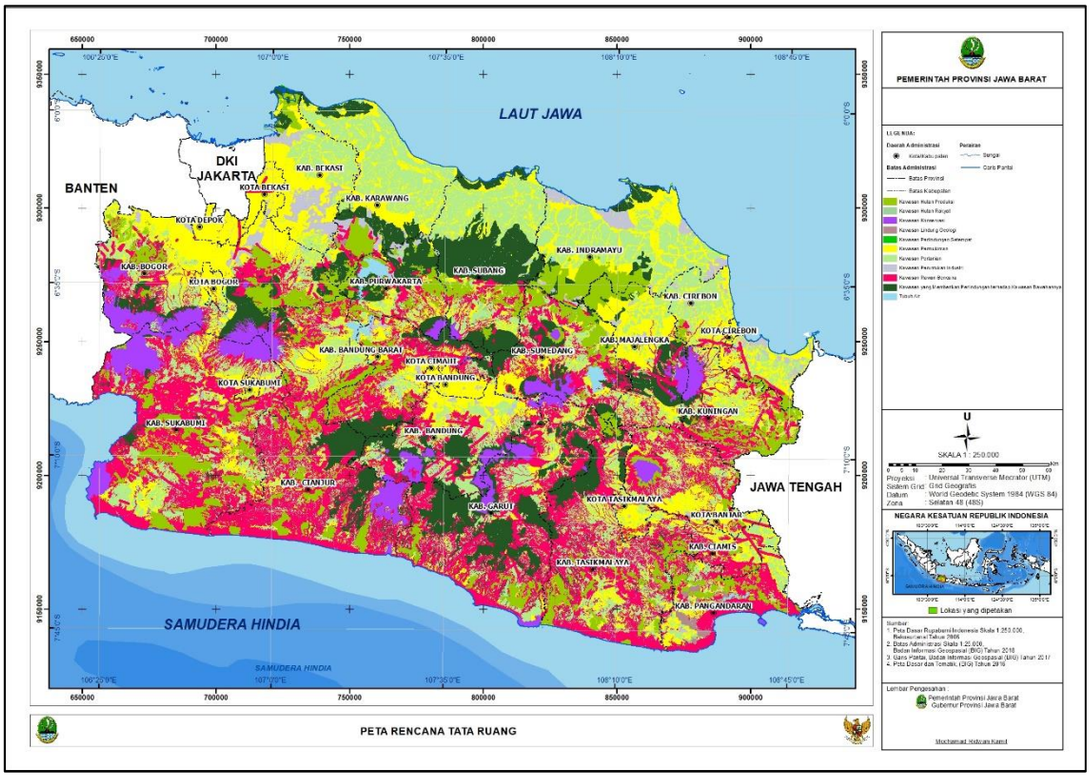

Sumber : Raperda tentang Perubahan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Menindaklanjuti penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) oleh Pemerintah Pusat, yang meliputi WPPI 1 (mencakup Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang), dan WPPI 2 (mencakup Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka), Pemerintah Provinsi Jawa Barat merencanakan pengembangan pusat pertumbuhan

ekonomi baru berupa kota baru dan kawasan peruntukan industri dalam rangka meningkatkan ekonomi wilayah di Pantura Jawa Barat. Pengembangan tersebut khususnya di sekitar tiga simpul transportasi utama di wilayah Pantura meliputi Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Patimban Subang, dan Bandara Internasional Kertajati Majalengka. Kawasan yang dikembangkan tersebut dikenal dengan sebutan Pengembangan Kawasan Cirebon- Patimban- Kertajati, yang digambarkan sebagai wilayah segitiga emas perekonomian dan menjadi pintu masuk-keluar jalur perdagangan dan logistik. Perencanaan pengembangan kawasan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan penataan kawasan berbasis daya dukung lingkungan, konektivitas kawasan, proyeksi kondisi ekonomi dan sosial, serta kolaborasi dengan investasi industri dalam rangka meningkatkan IPM daerah.

Perubahan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 menetapkan kawasan-kawasan yang dinilai strategis sesuai sudut kepentingan provinsi sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP), meliputi :

1. KSP Bandung Utara sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
2. KSP Sukabumi Bagian Selatan dan sekitarnya, sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
3. KSP *Aerocity* Kertajati dan sekitarnya, sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
4. KSP Patimban, sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
5. KSP Mundu-Losari, sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan Peta KSP tercantum dalam gambar berikut ini.

Gambar 4.7
Perubahan Peta Kawasan Strategis Provinsi

Sumber : Raperda tentang Perubahan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

4.4 Kerja Sama Pembangunan Wilayah Perbatasan

Pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, sehingga harus memperhatikan pemerataan yang menjangkau daerah terpencil dan juga daerah perbatasan. Wilayah perbatasan sering diidentikkan dengan daerah pinggiran, daerah terpencil dan daerah miskin sebagai daerah yang termarginalkan. Oleh karena itu, kerja sama antardaerah yang berbatasan menjadi suatu kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik yang lebih efisien apabila dikelola secara bersama.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Musrenbang perbatasan untuk membahas permasalahan bersama di wilayah perbatasan, yaitu dengan Provinsi Jawa Tengah dan juga dengan Provinsi Banten yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

4.4.1 Perbatasan Jawa Barat dan DKI Jakarta

Pembangunan di wilayah yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi

Jawa Barat tentang Kerja sama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.

Objek kerja sama yaitu pemenuhan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan dengan ruang lingkup meliputi urusan: Kesehatan; Pendidikan; Sosial; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Perumahan dan Permukiman; Pariwisata; Koperasi dan Usaha Kecil; Perdagangan; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Penataan Ruang; Lingkungan Hidup; Perhubungan; Pekerjaan Umum; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perencanaan; dan Kebudayaan.

Wilayah administrasi kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan Jawa Barat dan DKI Jakarta yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Peta wilayah perbatasan Jawa Barat dan Banten sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 4.8
Peta Administrasi Perbatasan Jawa Barat – DKI Jakarta

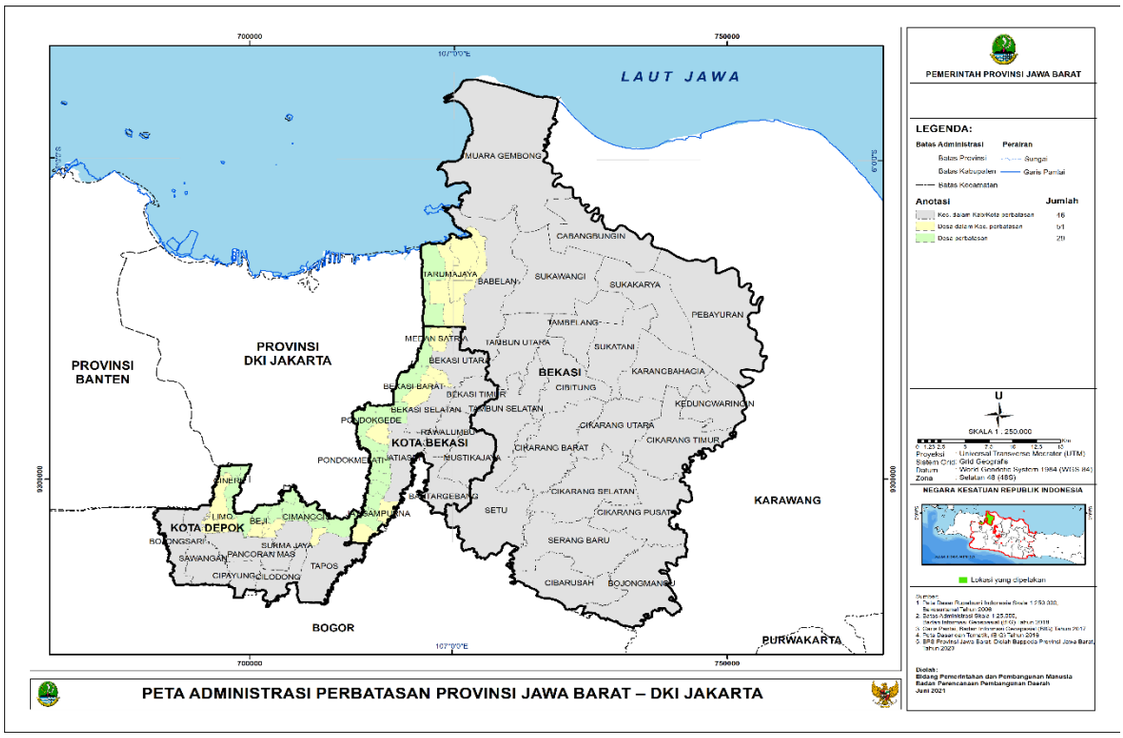

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021

4.4.2 Perbatasan Jawa Barat dan Banten

Pembangunan di wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Banten dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Kerja sama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023.

Objek kerja sama yaitu pemenuhan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan dengan ruang lingkup meliputi urusan: Kesehatan; Pendidikan; Sosial; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Perumahan dan Permukiman; Pariwisata; Koperasi dan Usaha Kecil; Perdagangan; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Penataan Ruang; Lingkungan Hidup; Perhubungan; Pekerjaan Umum; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perencanaan; dan Kebudayaan.

Wilayah administrasi kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Banten yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Peta wilayah perbatasan Jawa Barat dan Banten sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 4.9
Peta Administrasi Perbatasan Jawa Barat – Banten

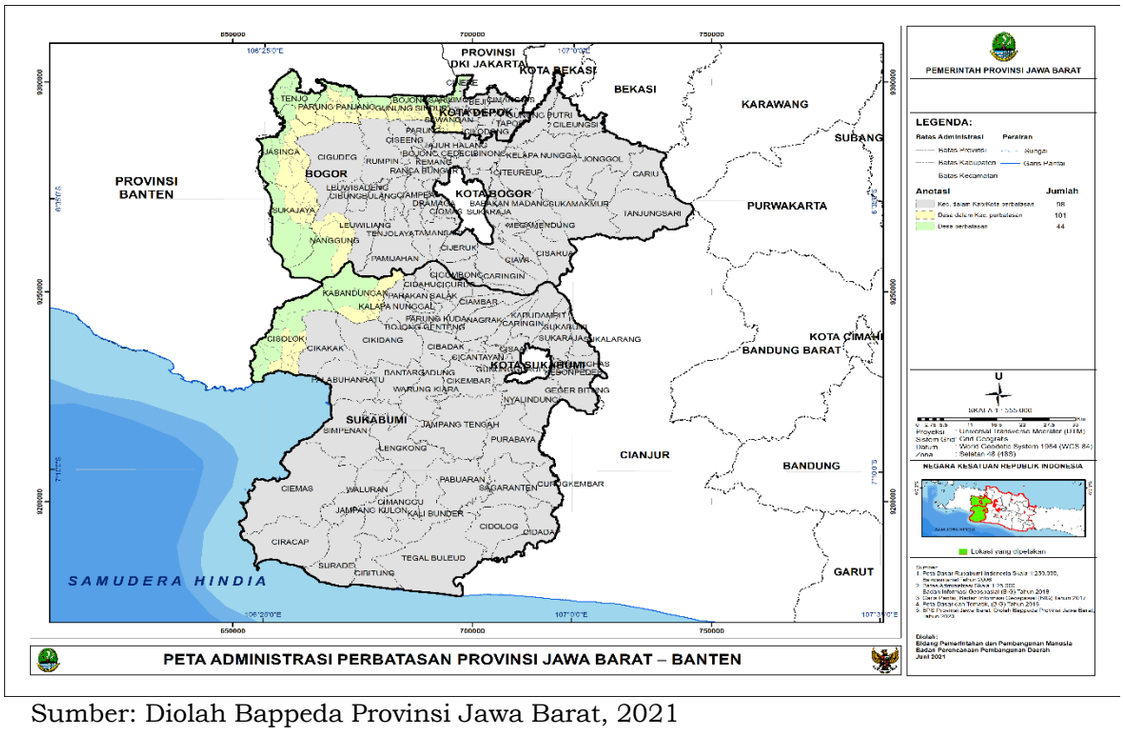

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021

4.4.3 Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah

Pembangunan di wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembangunan di Daerah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.

Objek kerja sama yaitu pembangunan daerah yang berbatasan dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik di daerah yang berbatasan, dengan ruang lingkup meliputi: Pemerintahan; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Sosial; Lingkungan Hidup; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perhubungan; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; dan Perindustrian dan Perdagangan.

Wilayah administrasi kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Brebes. Peta wilayah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 4.10
Peta Administrasi Perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah

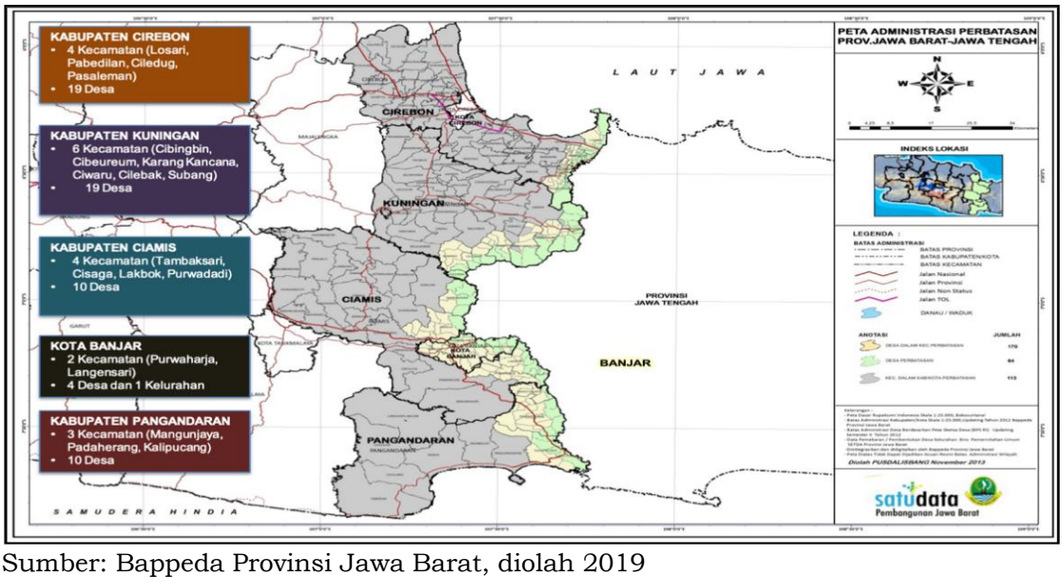

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, diolah 2019

4.5 Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon adalah *platform* baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan dengan emisi gas rumah kaca rendah dan penggunaan sumber daya alam yang efisien. Fokus perencanaan pembangunan rendah karbon adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan emisi gas rumah kaca (karbon) (Bappenas, 2018). Pembangunan rendah karbon diharapkan dapat menjawab isu pada 3 (tiga) pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu: (1) lingkungan, melalui pengurangan emisi gas rumah kaca; (2) pertumbuhan ekonomi; dan (3) sosial melalui pengurangan kemiskinan.

Dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam TPB, setidaknya terdapat 11 (sebelas) tujuan yang terkait langsung dan diharapkan dapat dicapai melalui kebijakan pembangunan rendah karbon sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
4. Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
5. Tujuan 8: Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu meningkatkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
6. Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
7. Tujuan 11: Kota yang Berkelanjutan dan Komunitas, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
8. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

9. Tujuan 13: Tindakan terhadap Iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasai perubahan iklim dan dampaknya;
10. Tujuan 14: Kehidupan di Bawah Air, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautam dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; dan
11. Tujuan 15: Kehidupan di Darat, yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pembangunan rendah karbon telah dituangkan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti Perpres tersebut melalui penetapan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

Komitmen pemerintah pusat dalam hal ini juga tertuang dalam RPJMN Tahun 2018-2023 dimana pembangunan rendah karbon menjadi sasaran nasional ke-23. Terkait hal ini, Provinsi Jawa Barat melalui dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 juga mencoba menuangkan kebijakan ini ke dalam salah satu sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu sasaran ke-13: “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat”. Sasaran ini dicapai melalui strategi “mengembangkan implementasi pembangunan rendah karbon” yang diturunkan ke dalam 2 (dua) arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik;
2. Meningkatkan upaya adaptasi perubahan iklim melalui perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat pada sektor-sektor terdampak.

Untuk menindaklanjuti dinamika perkembangan dunia internasional dalam upaya antisipasi dampak perubahan iklim, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* melalui penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). *Paris Agreement* adalah persetujuan yang dihasilkan COP 21 di Paris pada Tahun 2015 yang memuat mengenai komitmen negara-negara di dunia untuk meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral dalam pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta meningkatkan penanganan perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya pengentasan kemiskinan.

Sebagai implikasi dari penetapan Undang-Undang tersebut, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 akan digantikan dengan Peraturan Presiden mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK), sebagai transformasi dari kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca dimana di dalamnya telah memasukkan upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan jumlah dan intensitas emisi gas rumah kaca, serta kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Jawa Barat dalam rangka mentransformasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan Menteri PPN/Bappenas pada tahun 2019. Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu dari 7 (tujuh) provinsi yang menjadi percontohan perencanaan pembangunan rendah karbon nasional. Peraturan Gubernur melalui Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Jawa Barat ditargetkan dapat ditetapkan pada tahun 2021 dan menjadi acuan kebijakan untuk RPJMD periode berikutnya. Kendatipun demikan, prinsip-prinsip pembangunan rendah karbon pada dasarnya telah tertuang pada program dan kegiatan di dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023; dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana dan program strategis, penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan proyek strategis, serta pengawasan ketaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun profil emisi gas rumah kaca Provinsi Jawa Barat dapat digambarkan melalui proyeksi besar emisi *baseline* tahun 2030 pada kondisi tanpa aksi mitigasi (*Business as Usual*), yaitu sebesar 135.212.470 ton CO2 eq, dengan sumber emisi mencakup sektor energi (40,65 persen), transportasi (30,99 persen), kehutanan (11,75 persen), sampah dan limbah domestik (11 persen), dan pertanian (5,60 persen). Adapun target penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Jawa Barat sebesar 9,94 persen pada tahun 2030 dari proyeksi jumlah emisi pada kondisi *Business as Usual* (BAU) atau tanpa melakukan upaya apapun, sehingga emisi dapat diminimalkan hingga sebesar 121.765.650 ton CO2 eq sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.11
Profil Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Barat

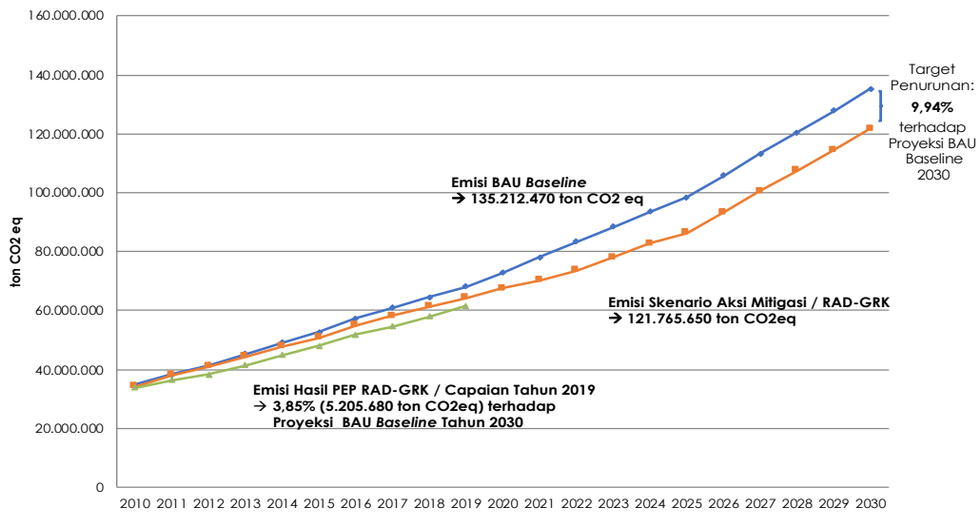

Sumber: Dokumen Kaji Ulang RAD-GRK Provinsi Jawa Barat (2018) dan Laporan PEP RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Kebijakan pembangunan rendah karbon Provinsi Jawa Barat akan dilaksanakan pada 3 (tiga) basis bidang yang terbagi atas 5 (lima) sektor, yaitu:

1. Bidang berbasis lahan, meliputi sektor kehutanan dan pertanian;
2. Bidang berbasis energi, meliputi sektor energi dan transportasi; dan
3. Bidang berbasis pengelolaan limbah, meliputi sampah dan air limbah domestik.

Kebijakan pembangunan rendah karbon pada ketiga bidang tersebut ditetapkan dengan target kontribusi penurunan emisi sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.12
Kontribusi Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Provinsi Jawa Barat

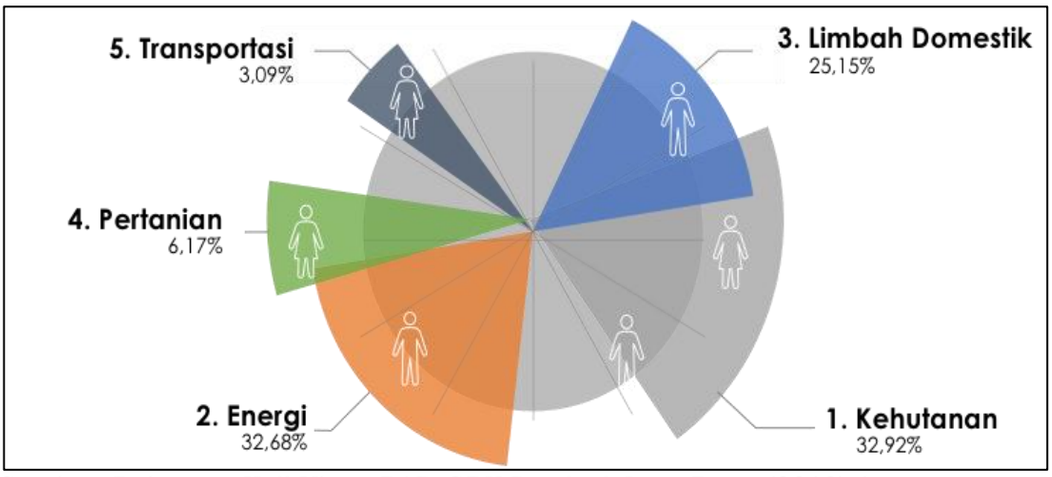

Sumber: Dokumen Kaji Ulang RAD-GRK Provinsi Jawa Barat (2018) dan Laporan PEP RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Sektor yang ditargetkan menurunkan emisi paling besar adalah sektor kehutanan sebesar 32,92 persen, sedangkan sektor lainnya meliputi sektor energi (32,68 persen), pengelolaan limbah (25,15 persen), pertanian (6,17 persen), dan transportasi (3,09 persen). Adapun penurunan emisi pada sektor industri menjadi ranah implementasi dari RAN-GRK karena kewenangannya berada di pemerintah pusat.

Upaya pembangunan rendah karbon Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan memenuhi kaidah-kaidah pembangunan rendah karbon yang terdiri atas:

1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
2. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Pertahanan luasan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan, terutama padi;
4. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air;
5. Konservasi dan perlindungan habitat spesies kunci;
6. Pengembangan energi baru terbarukan;
7. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah
8. Bahan berbahaya beracun secara terpadu; dan
9. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

Dikaitkan dengan kelima sektor sebagaimana dimaksud di atas, upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan rendah karbon Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui:

1. Kehutanan, meliputi penanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan hutan;
2. Pertanian, meliputi peningkatan produktivitas padi melalui penggunaan teknologi budidaya *System Rice Intensification* (SRI) dan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), serta pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO);
3. Energi, meliputi pengembangan energi baru terbarukan, diantaranya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta substitusi bahan bakar fosil ke biogas dan efisiensi energi;
4. Transportasi, meliputi pengembangan transportasi massal, pembangunan *Integrated Transportation System* (ITS) atau *Area Traffic Control System* (ATCS), pelaksanaan *car free day*, peremajaan armada transportasi umum, penerapan manajemen parkir, dan pelatihan *eco-smart driving*; dan
5. Pengelolaan sampah dan air limbah domestik, meliputi pembangunan dan operasional TPPAS Regional Lulut Nambo, Legok Nangka dan Ciayumajakuning, pembangunan TPS Terpadu 3R (komposting dan daur ulang sampah), serta pembangunan IPAL domestik dan Sanimas.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat menjadi panduan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota di Tahun 2022. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota berdasarkan pada arah kebijakan pembangunan daerah Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 yang tercantum dalam Bab IV.

5.1 Indikator Makro Kabupaten/Kota

Indikator makro pembangunan terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, dan Pengeluaran Penduduk Perkapita. Arah kebijakan pembangunan seluruh kabupaten dan kota di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat mendukung pencapaian 5 (lima) indikator kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten/kota tahun 2019 dibandingkan capaian tahun 2018, maka capaian IPM kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM **LEBIH RENDAH** dan Laju Pertumbuhan IPM **LEBIH TINGGI** dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM **LEBIH TINGGI** dibanding capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM **LEBIH RENDAH** dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM **LEBIH TINGGI** dan Laju Pertumbuhan IPM **LEBIH RENDAH** dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. 2020

1. **Kuadran I**. Pada kelompok ini terdapat 9 (sembilan) kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih rendah dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang.
2. **Kuadran II**. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Sukabumi dan Kota Tasikmalaya.
3. **Kuadran III**. Pada kelompok ini terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, dan Kota Banjar.
4. **Kuadran IV**. Pada kelompok ini terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah

Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bandung.

Gambar 5.1
Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020

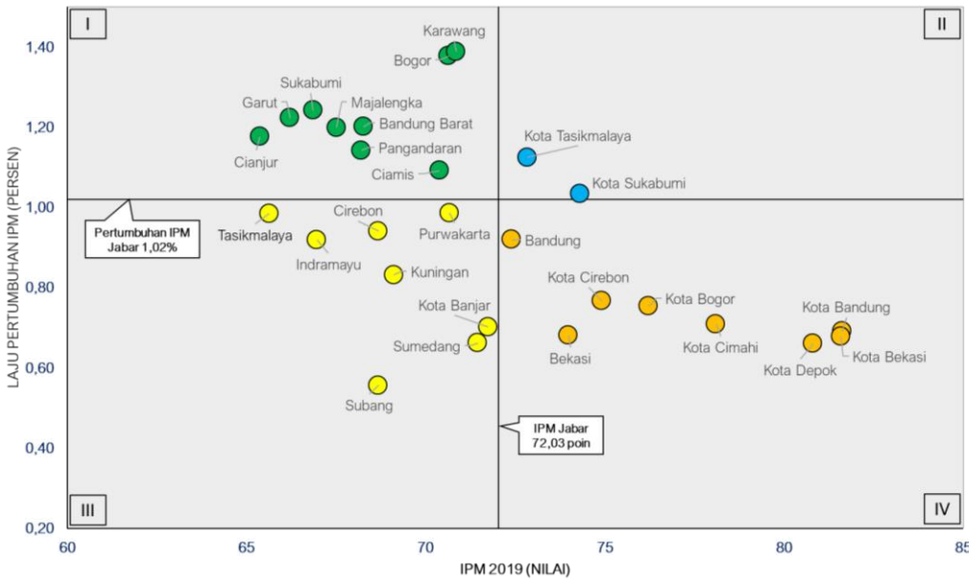

Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. 2020

Pada tahun 2019, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. Capaian IPM kabupaten/kota berkisar antara 65,38 (Kabupaten Cianjur) hingga 81,62 (Kota Bandung). Hal ini menunjukan masih adanya kesenjangan status capaian pembangunan manusia kabupaten/kota satu dan lainnya. Berdasarkan statusnya, terdapat 3 (tiga) kota dengan status IPM "Sangat Tinggi", 14 (empat belas) kabupaten/kota dengan status IPM "Tinggi", dan 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan status IPM "Sedang".

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Jawa Barat, upaya akselerasi dilaksanakan pada daerah dengan IPM Status "Sedang", antara lain melalui pembangunan infrastruktur transportasi guna meningkatkan konektivitas antar wilayah kabupaten/kota, sehingga mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Tabel 5.2
Penetapan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2022

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Poin)			
		REALISASI		TARGET	
		2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bogor	70,65	70.40	70,89	71,24
2	Kabupaten Sukabumi	66,87	66.88	67,73	67,83
3	Kabupaten Cianjur	65,38	65.36	65,01	66,13
4	Kabupaten Bandung	72,41	72.39	72,80	73,53
5	Kabupaten Garut	66,22	66.12	66,69	66,65
6	Kabupaten Tasikmalaya	65,64	65.67	65,44	66,95
7	Kabupaten Ciamis	70,39	70.49	70,32	71,42
8	Kabupaten Kuningan	69,12	69.38	69,26	70,42
9	Kabupaten Cirebon	68,69	68.75	68,86	70,23
10	Kabupaten Majalengka	67,52	67.59	67,85	68,47
11	Kabupaten Sumedang	71,46	71.64	71,49	72,66
12	Kabupaten Indramayu	66,97	67.29	66,75	68,66
13	Kabupaten Subang	68,69	68.95	68,56	70,39
14	Kabupaten Purwakarta	70,67	70.82	69,56	72,02
15	Kabupaten Karawang	70,86	70.66	70,60	71,69
16	Kabupaten Bekasi	73,99	74.07	74,34	75,47
17	Kabupaten Bandung Barat	68,27	68.08	68,51	69,29
18	Kabupaten Pangandaran	68,21	68.06	68,00	68,85
19	Kota Bogor	76,23	76.11	76,67	77,18
20	Kota Sukabumi	74,31	74.21	74,45	75,36
21	Kota Bandung	81,62	81.51	82,27	82,19
22	Kota Cirebon	74,92	74.89	75,44	75,56
23	Kota Bekasi	81,59	81.50	82,31	82,33
24	Kota Depok	80,82	80.97	81,54	81,81
25	Kota Cimahi	78,11	77.83	78,42	78,35
26	Kota Tasikmalaya	72,84	73.04	72,51	74,27
27	Kota Banjar	71,75	71.70	71,80	72,84

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE kabupaten/kota tahun 2019 dibandingkan capaian tahun 2018, maka capaian LPE kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.3
Kategori Capaian LPE Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE **LEBIH RENDAH** dan Rata-rata LPE **LEBIH TINGGI** dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Rata-rata LPE **LEBIH TINGGI** dibanding capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Rata-rata LPE **LEBIH RENDAH** dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE **LEBIH TINGGI** dan Rata-rata LPE **LEBIH RENDAH** dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. 2020

1. **Kuadran I**. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian LPE lebih rendah dan rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.
2. **Kuadran II**. Pada kelompok ini terdapat 11 (sebelas) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Tasikmalaya, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Cimahi, Kabupaten Majalengka, Kota Cimahi, dan Kota Bandung.
3. **Kuadran III**. Pada kelompok ini terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut.
4. **Kuadran IV**. Pada kelompok ini terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih tinggi dan rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Sumedang.

Gambar 5.2
Analisis Kuadran Capaian LPE dan Rata-Rata LPE Kabupaten/Kota

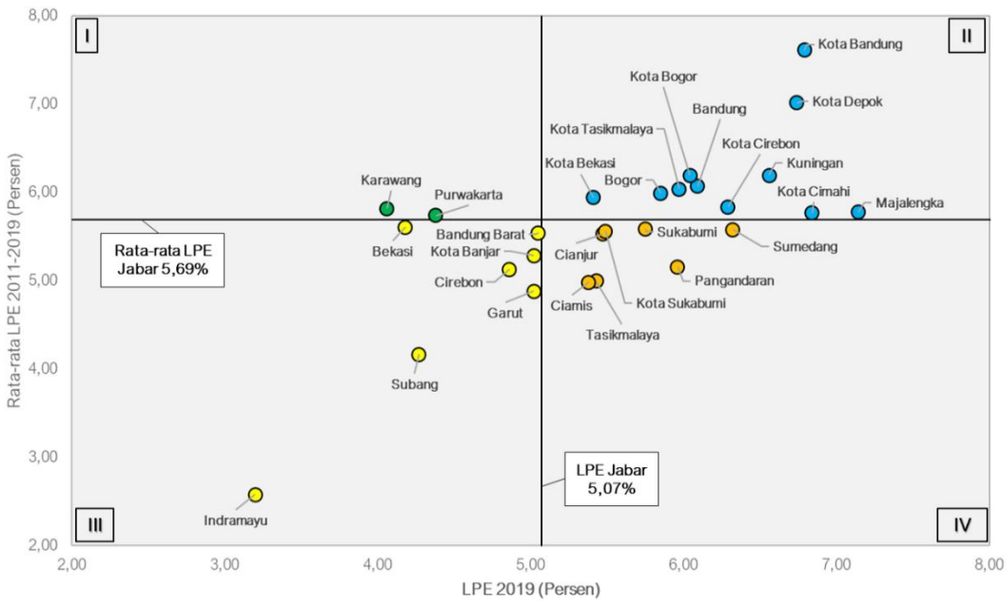

Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. 2021

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2019 tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Jawa Barat. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2019 merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Jawa Barat. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa Barat menggambarkan pula melambatnya kinerja perekonomian wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat, terutama pada daerah yang memiliki peranan besar terhadap perekonomian Jawa Barat. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat terdapat 18 (delapan belas) kabupaten/kota yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2018. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Kabupaten Karawang, dari 6,07 persen menjadi 4,06 persen. Adapun 8 (delapan) kabupaten/kota lainnya, pertumbuhan ekonomi masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Peningkatan tertinggi terjadi di Kabupaten Indramayu dari 1,34 persen menjadi 3,20 persen.

Dalam rangka memacu pemerataan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, wilayah Timur Jawa Barat menjadi prioritas lokasi pembangunan kewilayahan dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, diantaranya melalui pengembangan Kawasan Segitiga Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati).

Tabel 5.4
Penetapan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022

NO	KABUPATEN/KOTA	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (Persen)			
		REALISASI		TARGET	
		2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bogor	5,85	-1,77	4,31	5,14
2	Kabupaten Sukabumi	5,75	-1,08	3,89	4,99
3	Kabupaten Cianjur	5,47	-0,78	3,60	5,27
4	Kabupaten Bandung	6,09	-1,87	5,00	5,34
5	Kabupaten Garut	5,02	-1,26	3,39	4,26
6	Kabupaten Tasikmalaya	5,43	-0,98	3,33	5,06
7	Kabupaten Ciamis	5,38	-0,14	3,41	4,60
8	Kabupaten Kuningan	6,56	-0,09	1,75	5,44
9	Kabupaten Cirebon	4,86	-1,108	4,38	4,39
10	Kabupaten Majalengka	7,14	0,86	3,10	5,17
11	Kabupaten Sumedang	6,32	-1,12	3,80	4,93
12	Kabupaten Indramayu	3,20	-1,58	1,00	1,25
13	Kabupaten Subang	4,27	-1,27	3,02	4,25
14	Kabupaten Purwakarta	4,38	-2,05	3,18	4,47
15	Kabupaten Karawang	4,06	-3,59	3,00	5,14
16	Kabupaten Bekasi	4,18	-3,30	3,08	4,93
17	Kabupaten Bandung Barat	5,05	-2,41	3,25	4,84
18	Kabupaten Pangandaran	5,96	-0,05	3,30	4,53
19	Kota Bogor	6,04	-0,53	3,57	5,31
20	Kota Sukabumi	5,49	-1,48	4,45	4,71
21	Kota Bandung	6,79	-2,28	4,51	6,26
22	Kota Cirebon	6,29	-0,99	3,72	5,22
23	Kota Bekasi	5,41	-2,55	3,17	5,22
24	Kota Depok	6,74	-1,92	3,53	5,78
25	Kota Cimahi	6,84	-2,26	3,69	5,32
26	Kota Tasikmalaya	5,97	-2,01	4,50	5,27
27	Kota Banjar	5,02	1,04	3,33	4,60

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2019 dibandingkan capaian tahun 2018, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.5
Kategori Capaian TPT Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT **LEBIH RENDAH** dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT **DIATAS** capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT **LEBIH TINGGI** dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT **DIATAS** capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT **LEBIH RENDAH** dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT **DIBAWAH** capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT **LEBIH TINGGI** dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT **DIBAWAH** capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. 2020

1. **Kuadran I**. Pada kelompok ini terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT diatas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Sukabumi.
2. **Kuadran II**. Pada kelompok ini terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT diatas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Karawang, Kota Cirebon, Kabupaten Subang, Kota Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kota Cimahi, dan Kota Bandung.
3. **Kuadran III**. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Laju Perubahan TPT dibawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Majalengka, Kota Depok, dan Kabupaten Tasikmalaya.
4. **Kuadran IV**. Pada kelompok ini terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Laju

Perubahan TPT di bawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bandung Barat.

Gambar 5.3
Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Perubahan TPT Kabupaten/Kota

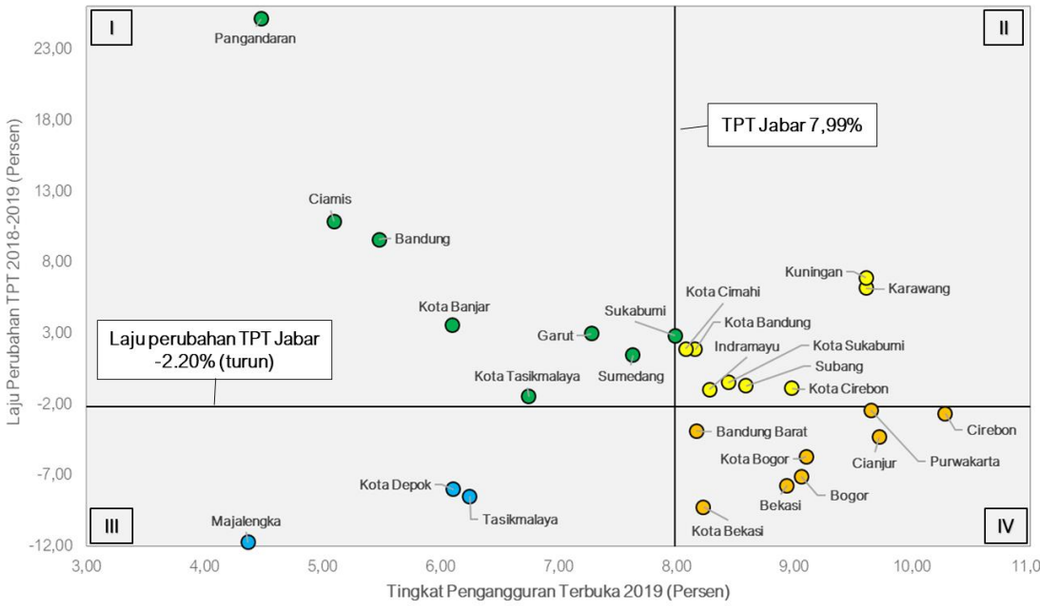

Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. 2020

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat menunjukkan perbedaan di setiap kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di 27 kabupaten/kota yang berada pada kisaran 62-76 persen. Pada umumnya, permasalahan masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten akan menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang berdaya saing tinggi.

Tabel 5.6
Penetapan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (Persen)			
		REASLISASI		TARGET	
		2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bogor	9,11	14,29	12,90	11,59
2	Kabupaten Sukabumi	8,05	9,6	7,60	8,00
3	Kabupaten Cianjur	9,81	11,05	10,45	10,90
4	Kabupaten Bandung	5,51	8,58	7,60	7,60
5	Kabupaten Garut	7,35	8,95	9,46	8,40
6	Kabupaten Tasikmalaya	6,31	7,12	6,25	6,80
7	Kabupaten Ciamis	5,16	5,66	5,24	5,60
8	Kabupaten Kuningan	9,68	11,22	13,80	10,80
9	Kabupaten Cirebon	10,35	11,52	11,10	11,20
10	Kabupaten Majalengka	4,37	5,84	5,50	5,60
11	Kabupaten Sumedang	7,70	9,89	9,05	9,30
12	Kabupaten Indramayu	8,35	9,21	9,00	9,00
13	Kabupaten Subang	8,68	9,48	8,85	9,30
14	Kabupaten Purwakarta	9,73	11,07	10,27	10,70
15	Kabupaten Karawang	9,68	11,52	12,90	10,90
16	Kabupaten Bekasi	9,00	11,54	8,69	11,00
17	Kabupaten Bandung Barat	8,24	12,25	8,85	11,20
18	Kabupaten Pangandaran	4,52	5,08	5,04	4,90
19	Kota Bogor	9,16	12,68	12,61	11,80
20	Kota Sukabumi	8,49	12,17	9,81	11,10
21	Kota Bandung	8,18	11,19	11,16	10,20
22	Kota Cirebon	9,04	10,97	9,43	10,40
23	Kota Bekasi	8,30	10,68	8,60	10,30
24	Kota Depok	6,12	9,87	8,22	9,00
25	Kota Cimahi	8,09	13,30	12,64	11,80
26	Kota Tasikmalaya	6,78	7,99	7,72	7,70
27	Kota Banjar	6,16	6,73	5,85	6,60

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

5.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin menunjukkan kelompok masyakarat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2019 dibandingkan capaian tahun 2018, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.7
Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin **LEBIH RENDAH** dan Laju Penurunan **LEBIH TINGGI** dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan **LEBIH TINGGI** dibanding capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan **LEBIH RENDAH** dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin **LEBIH TINGGI** dan Laju Penurunan **LEBIH RENDAH** dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. 2020

1. **Kuadran I**. Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih rendah dan Laju Penurunan lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Ciamis.
2. **Kuadran II**. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya.
3. **Kuadran III**. Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Depok, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Banjar, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.
4. **Kuadran IV**. Pada kelompok ini terdapat 11 (sebelas) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dan Laju

Penurunan lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu.

Gambar 5.4
Analisis Kuadran Capaian dan Laju Penurunan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

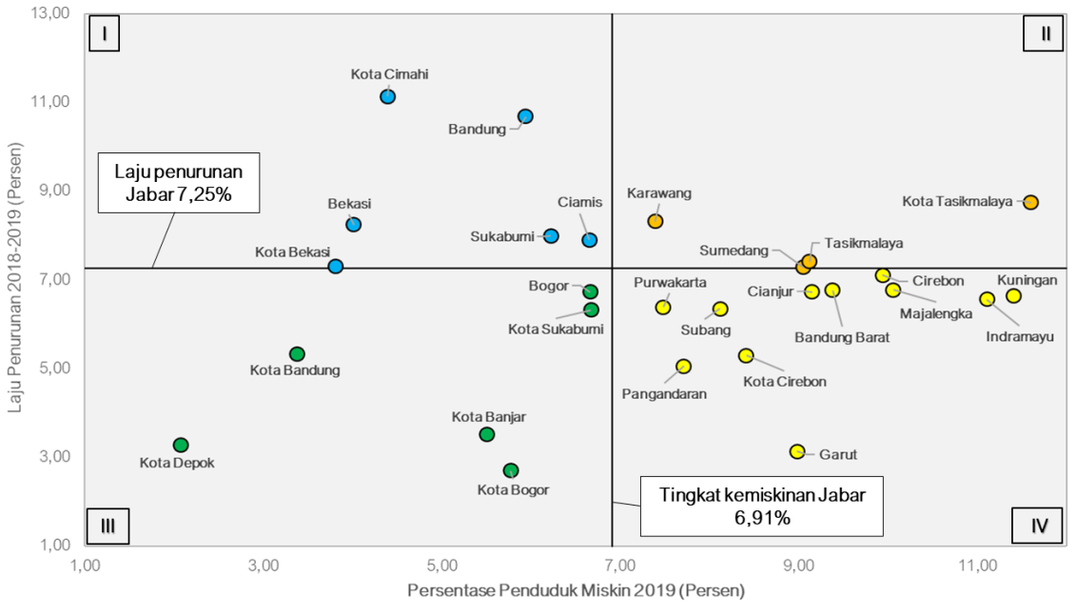

Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. 2020

Persentase penduduk miskin di Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang positif dengan tren konsisten menurun. Namun demikian permasalahan kemiskinan masih dialami oleh sejumlah kabupaten/kota dimana tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dan laju penurunan kemiskinan yang lebih rendah dibanding provinsi. Permasalahan kemiskinan umumnya dialami oleh kabupaten dengan karakteristik wilayah didominasi perdesaan. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatkan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mengoptimalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator makro kabupaten/kota tahun 2019 dengan pendekatan analisis kuadran (*important performance analysis*), diperoleh rangkuman hasil evaluasi yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan (disparitas) kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota baik dari aspek pembangunan ekonomi maupun aspek pembangunan manusia. Guna mengurangi disparitas pembangunan antar kabupaten/kota, maka fokus pembangunan daerah diarahkan pada percepatan dan pemerataan hasil pembangunan melalui sinkronisasi prioritas daerah dan program prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dengan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2021.

Tabel 5.8
Penetapan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022

NO	KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (Persen)			
		REALISASI		TARGET	
		2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bogor	6,66	7,69	7,54	7,43
2	Kabupaten Sukabumi	6,22	7,09	7,13	6,02
3	Kabupaten Cianjur	9,15	10,36	10,33	8,72
4	Kabupaten Bandung	5,94	6,91	6,30	6,32
5	Kabupaten Garut	8,98	9,98	8,98	9,42
6	Kabupaten Tasikmalaya	9,12	10,34	10,23	8,84
7	Kabupaten Ciamis	6,65	7,62	7,53	6,80
8	Kabupaten Kuningan	11,41	12,82	13,38	10,49
9	Kabupaten Cirebon	9,94	11,24	10,73	10,42
10	Kabupaten Majalengka	10,06	11,43	11,20	9,80
11	Kabupaten Sumedang	9,05	10,26	9,71	9,16
12	Kabupaten Indramayu	11,11	12,70	12,20	10,87
13	Kabupaten Subang	8,12	9,31	9,86	8,82
14	Kabupaten Purwakarta	7,48	8,27	7,77	7,11
15	Kabupaten Karawang	7,39	8,26	9,00	7,70
16	Kabupaten Bekasi	4,01	4,82	4,16	4,57
17	Kabupaten Bandung Barat	9,38	10,49	10,60	9,17
18	Kabupaten Pangandaran	7,71	8,99	8,54	7,74
19	Kota Bogor	5,77	6,68	6,24	6,21
20	Kota Sukabumi	6,67	7,70	7,80	6,47
21	Kota Bandung	3,38	3,99	3,49	3,70
22	Kota Cirebon	8,41	9,52	8,80	7,82
23	Kota Bekasi	3,81	4,38	5,70	4,61
24	Kota Depok	2,07	2,45	4,61	2,17
25	Kota Cimahi	4,39	5,11	5,07	5,09

NO	KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (Persen)			
		REALISASI		TARGET	
		2019	2020	2021	2022
26	Kota Tasikmalaya	11,6	12,97	12,64	11,60
27	Kota Banjar	5,50	0,09	6,27	5,24

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

5.1.5 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten dan Kota

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten dan Kota menunjukkan kelompok Kabupaten/Kota dengan pengeluaran per kapita pertahun berada dibawah garis laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase pengeluaran perkapita kabupaten/kota tahun 2020 dibandingkan terhadap provinsi, maka capaian Persentase pengeluaran per kapita kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.9
Kategori Capaian Persentase Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin **LEBIH RENDAH** dan Laju Penurunan **LEBIH TINGGI** dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan **LEBIH TINGGI** dibanding capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan **LEBIH RENDAH** dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin **LEBIH TINGGI** dan Laju Penurunan **LEBIH RENDAH** dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. Tahun 2021

1. **Kuadran I**. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian Persentase laju pertumbuhan penduduk tinggi dan Laju pengeluaran per kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Purwakarta.
2. **Kuadran II**. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian Persentase laju pertumbuhan penduduk tinggi dan Laju pengeluaran per kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bogor, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.
3. **Kuadran III**. Pada kelompok ini terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan capaian Persentase laju pertumbuhan penduduk tinggi dan Laju pengeluaran per kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya.
4. **Kuadran IV**. Pada kelompok ini terdapat 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan capaian Persentase laju pertumbuhan penduduk tinggi dan Laju pengeluaran per kapita lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kota Tasikmalaya dan Bandung.

Gambar 5.5
Analisis Kuadran Pengeluaran Kabupaten/Kota
Terhadap Provinsi Jawa Barat

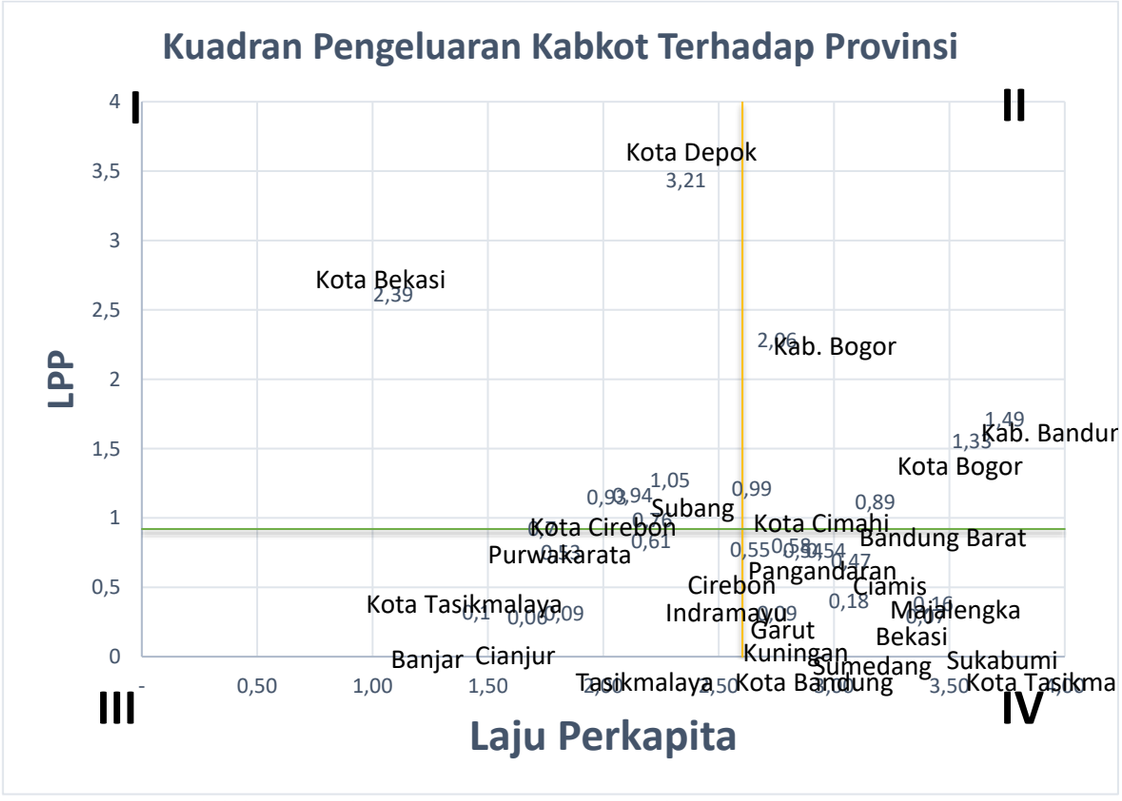

Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat. Tahun 2021

Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kemajuan pembangunan daerah. Gambar diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan perkembangan yang kurang baik tren konsisten menurun.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator makro kabupaten/kota tahun 2020 dengan pendekatan analisis kuadran (*important performance analysis*), diperoleh rangkuman hasil evaluasi yang mengindikasikan masih adanya kesenjangan (disparitas) kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota baik dari aspek pembangunan ekonomi maupun aspek pembangunan manusia. Guna mengurangi disparitas pembangunan antar kabupaten/kota, maka fokus pembangunan daerah diarahkan pada percepatan dan pemerataan hasil pembangunan melalui sinkronisasi prioritas daerah dan program prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dengan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2022.

Tabel 5.10
Tabel Pengeluaran per Kapita

Kode	Kab/Kota	Pengeluaran per Kapita disesuaikan (PPP)			
		2017	2018	2019	2020
3200	JAWA BARAT	10.285	10.790	11.152	10.845
3201	Bogor	9.901	10.323	10.683	10.317
3202	Sukabumi	8.263	8.618	8.973	8.823
3203	Cianjur	7.300	7.874	8.290	7.980
3204	Bandung	9.854	10.203	10.502	10.201
3205	Garut	7.270	7.597	8.099	7.876
3206	Tasikmalaya	7.250	7.761	8.092	7.852
3207	Ciamis	8.658	9.190	9.557	9.288
3208	Kuningan	8.736	9.297	9.673	9.459
3209	Cirebon	9.650	10.212	10.670	10.342
3210	Majalengka	8.833	9.416	9.822	9.521
3211	Sumedang	9.569	10.153	10.406	10.217
3212	Indramayu	9.014	9.633	10.090	9.859
3213	Subang	10.206	10.715	11.012	10.790
3214	Purwakarta	10.941	11.372	11.819	11.614
3215	Karawang	10.703	11.277	11.856	11.315
3216	Bekasi	10.790	11.155	11.610	11.241
3217	Bandung Barat	8.002	8.329	8.684	8.455
3218	Pangandaran	8.588	8.968	9.423	9.084
3271	Kota Bogor	10.940	11.348	11.825	11.564
3272	Kota Sukabumi	10.188	10.609	11.204	10.999
3273	Kota Bandung	16.033	16.630	17.254	16.887
3274	Kota Cirebon	11.100	11.397	11.930	11.800
3275	Kota Bekasi	15.378	15.755	16.157	15.776
3276	Kota Depok	14.727	15.262	15.696	15.281
3277	Kota Cimahi	11.353	11.921	12.448	12.025
3278	Kota Tasikmalaya	9.497	9.855	10.414	10.263
3279	Kota Banjar	9.987	10.329	10.705	10.535

Tabel 5.11
Penetapan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten dan Kota Untuk Mendukung Pencapaian Target Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022

NO	KABUPATEN/KOTA	PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN (Ribu Rupiah)			
		REALISASI		TARGET	
		2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Bogor	10.683	10317.00	10.522	10.731
2	Kabupaten Sukabumi	8.973	8823.00	8.269	8.557
3	Kabupaten Cianjur	8.290	7980.00	7.837	8.110

NO	KABUPATEN/KOTA	PENGELUARAN PER KAPITA DISESUAIKAN (Ribu Rupiah)			
		REALISASI		TARGET	
		2019	2020	2021	2022
4	Kabupaten Bandung	10.502	10201.00	10.550	10.800
5	Kabupaten Garut	8.099	7876.00	8.090	8.540
6	Kabupaten Tasikmalaya	8.092	7852.00	7.710	7.830
7	Kabupaten Ciamis	9.557	9288.00	9.303	9.334
8	Kabupaten Kuningan	9.673	9459.00	9.042	9.116
9	Kabupaten Cirebon	10.670	10342.00	10.346	10.436
10	Kabupaten Majalengka	9.822	9521.00	9.280	9.410
11	Kabupaten Sumedang	10.406	10217.00	10.200	10.450
12	Kabupaten Indramayu	10.090	9859.00	9.400	9.499
13	Kabupaten Subang	11.012	10790.00	10.995	11.205
14	Kabupaten Purwakarta	11.819	11614.00	12.700	13.000
15	Kabupaten Karawang	11.856	11315.00	11.749	12.026
16	Kabupaten Bekasi	11.610	11241.00	10.648	10.998
17	Kabupaten Bandung Barat	8.684	8455.00	8.627	8.850
18	Kabupaten Pangandaran	9.423	9084.00	9.006	9.277
19	Kota Bogor	11.825	11564.00	11.413	11.534
20	Kota Sukabumi	11.204	10999.00	10.806	10.966
21	Kota Bandung	17.254	16887.00	16.987	17.013
22	Kota Cirebon	11.930	11800.00	12.014	12.307
23	Kota Bekasi	16.157	15776.00	14.563	15.000
24	Kota Depok	15.696	15281.00	15.197	15.240
25	Kota Cimahi	12.448	12025.00	12.136	12.340
26	Kota Tasikmalaya	10.414	10263.00	8.570	9.860
27	Kota Banjar	10.705	10535.00	10.636	10.862

Sumber: Hasil proyeksi, diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Arah kebijakan pembangunan daerah provinsi merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi serta rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota. Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota terdiri atas Kebijakan Pembangunan Perwilayahan dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota.

5.2.1 Kebijakan Pembangunan Berbasis Wilayah Pengembangan

Perencanaan kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan wilayah diperlukan sebagai strategi pengembangan ruang yang mengatur

hubungan yang harmonis antara sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia agar kinerja ruang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2022 mengacu pada kebijakan pembangunan kewilayahan melalui pembagian 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP) serta keterkaitan fungsional antar wilayah dan antar pusat pengembangan yang terdiri dari WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakunig, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Cekungan Bandung, dan WP Sukabumi dan sekitarnya.

Tabel 5.12
Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Barat

NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
1	Bodebekpunjur Tema: Mengendalikan perkembangan fisik wilayah	1. Kabupaten Bogor; 2. Kota Bogor; 3. Kabupaten Bekasi; 4. Kota Bekasi; 5. Kota Depok; 6. Kabupaten Cianjur (Puncak)	Sektor unggulan: Agroforestri, pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan agrowisata Fokus pengembangan: a. Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bekasi, diarahkan sebagai kota terdepan, berbatasan dengan ibukota negara yang merupakan bagian dari pengembangan KSN Jabodetabekpunjur untuk mendorong pengembangan PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja; b. Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, diarahkan menjadi kawasan penyangga dalam sistem PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, mendukung upaya pengendalian banjir melalui pembangunan kanal banjir dan pengelolaan kawasan pesisir serta untuk mengembangkan sektor industri ramah lingkungan dan hemat penggunaan air tanah, tidak mengakibatkan alih fungsi lahan di (KP2B), serta kegiatan pertambangan mineral logam dan non logam untuk mendukung pembangunan di Bodebekpunjur; dan mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan kondisi jaringan irigasi (kewenangan provinsi); kawasan pesisir, Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Lindung di KSN Jabodetabekpunjur, dukungan pengembangan pariwisata melalui pembangunan jalan puncak II	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKL PKN: Kawasan Perkotaan Bodebek PKL: - Kab.Bekasi: Cikarang-Cibitung, Tarumajaya, Cibarusah, Setu, - Kab.Bogor: Cibinong, Cileungsi, Parung, Cigudeg, Caringin, Parungpanjang
				2. Mengembangkan infrastruktur strategis
				3. Mengembangkan perdagangan jasa, industri non polutan dan industri kreatif, pariwisata
				4. Investasi padat modal yang efisien lahan, air baku, energi, teknologi tinggi, nonpolutif
				5. Pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan konservasi, pelibatan swasta dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, peningkatan SDM lokal
				6. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani)
				7. Pengembangan kerja sama wilayah perbatasan
				8. Peningkatan kesiapsiagaan bencana

NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
2.	Purwasuka Tema: Mendorong pengembangan kawasan dengan tetap mengendalikan sawah di Pantura	1. Kabupaten Purwakarta; 2. Kabupaten Subang; dan 3. Kabupaten Karawang.	Sektor Unggulan: tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata dan pertambangan. Fokus Pengembangan: a. PKW Cikampek-Cikopo, diarahkan untuk memenuhi fungsinya sebagai PKW dengan melengkapi sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan Wilayah pengaruhnya; b. Kabupaten Purwakarta, diarahkan untuk kegiatan industri nonpolutif dan nonekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, industri kreatif, pariwisata dan agroindustri, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan nonlogam; c. Kabupaten Subang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, agroindustri, kegiatan bisnis kelautan, serta kegiatan pertambangan mineral nonlogam; dan d. Kabupaten Karawang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bisnis kelautan, kegiatan agroindustri, industri nonpolutif dan nonekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, dan tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B. pengelolaan kawasan pesisir	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL PKW: PKW Cikampek-Cikopo PKL: - Kab.Purwakarta: Purwakarta - Kab. Karawang: Karawang, Cilamaya, Rengasdengklok, Teluk Jambe Barat - Kab.Subang: Pamanukan, Subang, Jalan Cagak, Pusakanagara 2. Mengembangkan infrastruktur strategis 3. Mengembangkan pertanian tanaman pangan, agroindustri, industri manufaktur non polutif dan non ekstraktif, industri kreatif dan multimedia, bisnis kelautan yang berdaya saing tinggi dan berorientasi ekspor 4. Peningkatan kesiapsiagaan bencana
3.	Ciayumajakuning Tema: Mendorong pengembangan wilayah gerbang timur Jawa Barat	1. Kabupaten Cirebon; 2. Kota Cirebon; 3. Kabupaten Indramayu; 4. Kabupaten Majalengka; 5. Kabupaten Kuningan; dan 6. sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang	Sektor Unggulan: tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan dan pariwisata Fokus Pengembangan: a. Kota Cirebon, diarahkan sebagai kawasan perkotaan inti dari PKN dengan sarana dan	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW dan PKL PKN: Cirebon PKW: - Indramayu

NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
			prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya, serta menjadi simpul utama pelayanan jasa dan perdagangan, di Daerah bagian timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan religi; b. Kabupaten Cirebon, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor bisnis kelautan, tanaman pangan dan hortikultura, pariwisata dan kegiatan pertambangan mineral; industri kreatif, pengembangan kota kreatif berbasis *folklore* (batik Trusmi), c. Kabupaten Indramayu, diarahkan menjadi PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta diarahkan untuk kegiatan utama tanaman pangan dan hortikultura, bisnis perikanan dan kelautan, industri yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada lahan pangan, pertambangan terutama minyak, gas, agribisnis dan agroindustri; d. Kabupaten Majalengka, diarahkan menjadi lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan *Aerocity* di Kertajati, daerah konservasi utama Taman Nasional Gunung Ciremai, serta untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, dan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi, pertambangan mineral serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi di PKW Kadipaten; e. Kabupaten Kuningan, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana pendukung, serta diarahkan untuk menampung kegiatan sektor tanaman pangan dan hortikultura, wisata alam, agroindustri, dan daerah konservasi utama Taman	- Kadipaten PKL: - Kab.Cirebon: Sumber, Arjawinangun, Lemahabang, Ciledug, Palimanan - Kab.Indramayu: Jatibarang, Losarang, Gantar-Terisi, Tukdana, Karangampel, Haurgeulis - Kab.Majalengka: Majalengka, Kertajati, Talaga, Rajagaluh - Kab.Kuningan: Kuningan, Cilimus, Luragung, Ciawigebang, Mandirancan - Kab.Sumedang: Sumedang, Conggeang-Tomo,Wado
				2. Mengembangkan infrastruktur strategis
				3. Pola ruang PKN dalam bentuk ring (Ring 1: Jasa perdagangan dan transportasi, Ring 2: Industri berbasis lokal, Ring 3: Penyedia bahan baku)
				4. Mengembangkan wisata budaya, religi dan alam
				5. Mendorong agribisnis yang didukung sektor industri, perikanan laut dan darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan di kawasan pinggiran

NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
			Nasional Gunung Ciremai, termasuk perlindungan sumber air; dan f. Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dengan sarana dan prasarana, untuk kegiatan utama tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, pariwisata, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta kegiatan pertambangan mineral,	6. Mendorong pengembangan hutan mangrove, rumput laut dan perikanan tambak 7. Pengendalian perikanan tangkap di kawasan pesisir 8. Pengembangan kerja sama wilayah 9. Peningkatan kesiapsiagaan bencana
4.	Priangan Timur dan Pangandaran Tema: Mendorong perkembangan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangandaran, serta pengembangan secara terbatas kawasan Daerah bagian Selatan	1. Kabupaten Garut; 2. Kabupaten Tasikmalaya; 3. Kota Tasikmalaya; 4. Kabupaten Ciamis; 5. Kota Banjar; dan 6. Kabupaten Pangandaran.	Sektor Unggulan: kehutanan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, industri kerajinan dan pertambangan mineral Fokus Pengembangan: a. Kota Tasikmalaya, diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta pusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa; b. Kabupaten Tasikmalaya, diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, agroindustri, perikanan dan industri pengolahan perikanan, pusat pengembangan industri kerajinan, wisata alam, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan nonlogam; c. Kabupaten Garut, diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura dan agroindustri, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, wisata alam dan minat khusus, serta kegiatan pertambangan mineral logam dan nonlogam serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta kegiatan wisata minat khusus di PKL Rancabuaya; d. Kabupaten Ciamis, diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta kegiatan pertambangan mineral nonlogam;	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL PKW: - Tasikmalaya - Pangandaran PKL: - Kab.Garut: Garut, Cikajang, Pameungpeuk, Rancabuaya (Caringin-Mekarmukti-Bungbulang) - Kab.Tasikmalaya: Singaparna, Cikatomas, Ciawi, Karangnunggal - Kab.Ciamis: Ciamis, Banjarsari, Kawali, Rancah, Panjalu, Cisaga - Kota Banjar: Banjar - Kab.Pangandaran: Parigi 2. Mengembangkan infrastruktur strategis 3. Mengembangkan pariwisata Pangandaran dsk 4. Mengembangkan sektor dan komoditas unggulan dengan

NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
			e. Kota Banjar, diarahkan sebagai PKL dengan sarana dan prasarana perkotaan yang terintegrasi, kegiatan tanaman pangan, perdagangan, jasa, dan sebagai pintu gerbang Daerah berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah; dan f. Kabupaten Pangandaran, diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, kegiatan tanaman pangan dan hortikultura serta sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional.	meningkatkan akses sentra-sentra produksi 5. Pengembangan kerja sama wilayah perbatasan 6. Peningkatan kesiapsiagaan bencana
5.	Cekungan Bandung Tema: Mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah	1. Kota Bandung; 2. Kabupaten Bandung; 3. Kabupaten Bandung Barat; 4. Kota Cimahi; dan 5. sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang.	Sektor Unggulan: tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, agroforestri, industri nonpolutif dan ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, industri kreatif, perdagangan, jasa, pariwisata dan perkebunan, dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang berkarakter lintas kabupaten/kota yang secara kolektif berbagi peran membangun dan mempercepat perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Fokus Pengembangan: a. Kota Bandung, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi, dan pariwisata; b. Kabupaten Bandung, diarahkan sebagai bagian dari PKN, dengan kegiatan utama industri nonpolutif, dan nonekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, agroindustri, wisata alam, tanaman pangan dan hortikultura, dan perkebunan; c. Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri nonpolutif, dan nonekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B, tanaman pangan dan hortikultura, industri kreatif dan teknologi tinggi;	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKN, dan PKL PKN: Kawasan Perkotaan Bandung Raya PKL: - Kab.Bandung: Ciwidey, Pangalengan - Kab.Bandung Barat: Cikalong Wetan, Padalarang 2. Mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan 3. Mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan 4. Mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal 5. Peningkatan kesiapsiagaan bencana

NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
			d. Kota Cimahi, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri nonpolutif; dan e. Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai bagian dari PKN, dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, serta pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, serta industri nonpolutif dan nonekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada KP2B.	
6.	Sukabumi dan sekitarnya Tema: Mendorong perkembangan koridor Sukabumi Cianjur dan PKW Palabuhanratu, serta membatasi perkembangan di bagian selatan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur	1. Kota Sukabumi, 2. Kabupaten Sukabumi, dan 3. Sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur	Sektor unggulan: kehutanan, peternakan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan dan bisnis kelautan, serta pertambangan mineral, serta perikanan budidaya laut Fokus Pengembangan: a. Kota Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan pusat agroindustri, peternakan, agropolitan, wisata agro, industri nonpolutif dan tidak mengganggu resapan air, serta perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Sukabumi; b. Kabupaten Sukabumi, diarahkan untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, agroforestri, agribisnis, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata pantai, wisata agro, wisata minat khusus, industri nonpolutif dan tidak mengganggu resapan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan sawah, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Palabuhanratu dan simpul layanan wilayah sekitarnya, pengembangan wilayah pesisir selatan melalui pengembangan wisata pantai dan minat khusus serta perikanan tangkap, serta pengembangan subzona perikanan budidaya laut khususnya budidaya lobster antara lain di perairan	1. Melengkapi fasilitas pendukung PKW dan PKL PKW: - Palabuhanratu - Kota Sukabumi PKL: - Kab.Sukabumi: Cibadak, Cicurug, Sagaranten, Jampangkulon - Kab.Cianjur: Cianjur, Sindangbarang, Sukanagara
				2. Mengembangkan infrastruktur strategis
				3. Mengembangkan agribisnis, industri nonpolutif dan tidak mengganggu resapan air, wisata pantai dan agro, dan wisata minat khusus.
				4. Mengembangkan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing global

NO	WP/Tema WP	Kab/Kota	Kebijakan WP	Arah Pengembangan
			Sukabumi Selatan, pertambangan mineral logam dan nonlogam serta pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi yang diarahkan untuk kegiatan bisnis kelautan skala nasional dan internasional di PKW Palabuhanratu; dan c. Kabupaten Cianjur, diarahkan untuk pengembangan agroindustri, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, pengembangan kawasan penggembalaan umum ternak ruminansia, wisata agro, wisata alam, industri kreatif, pengembangan wilayah pesisir untuk perikanan tangkap, wisata minat khusus, kawasan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Cidaun, serta pertambangan mineral logam dan nonlogam.	5. Peningkatan kesiapsiagaan bencana 6. Pengembangan kerja sama wilayah perbatasan

Sumber: Hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020

5.2.2 Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Berbasis Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi

Mengacu pada hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah, masih terdapat capaian indikator makro pembangunan yang masih belum sesuai harapan. Capaian kinerja pembangunan daerah merupakan hasil kolaborasi antar pemangku kepentingan dan hasil sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, maka ditetapkan target arah kebijakan pembangunan terhadap kabupaten/kota untuk memenuhi harapan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023 menjadi arah kebijakan pembangunan di kabupaten/kota Tahun 2022 yang terdiri dari 11 (sebelas) prioritas, sebagai berikut: 1) Reformasi sistem kesehatan daerah; 2) Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi; 3) Penguatan system ketahanan pangan berkelanjutan; 4) Reformasi system perlindungan sosial; 5) Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan; 6) Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana; 7) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah; 8) Gerakan membangun desa; 9) Pendidikan agama dan tempat ibadah juara; 10) Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 11) Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

Arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2022 mengacu pada kebijakan pembangunan kewilayahan melalui pembagian 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP) serta keterkaitan fungsional antar wilayah dan antar pusat pengembangan yang terdiri dari WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Cekungan Bandung, dan WP Sukabumi dan sekitarnya, yang disinkronkan dengan sasaran dan program prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Secara umum, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

1. Kabupaten Bogor

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Bogor meliputi :

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses dan sarana prasarana layanan pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
2) Peningkatan fasilitas serta sarana dan prasarana rumah sakit rujukan regional (RS Umum Daerah Cibinong) dan layanan kesehatan lainnya;
3) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
4) Pembangunan pusat pelayanan publik dalam meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat;
5) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;
7) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) perbatasan antar provinsi dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.

B. Aspek Ekonomi

1) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana ekonomi masyarakat;
2) Pengembangan desa wisata;
3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat.

C. Aspek Infrastruktur

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2) Peningkatan infrastruktur penanganan persampahan.

2. Kabupaten Sukabumi

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Sukabumi meliputi :

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses dan sarana prasarana layanan pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
2) Peningkatan fasilitas serta sarana dan prasarana layanan kesehatan;
3) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
4) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) perbatasan antar provinsi dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.

B. Aspek Ekonomi

1) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana ekonomi masyarakat;
2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
3) Pengembangan destinasi dan kawasan pariwisata.

C. Aspek Infrastruktur

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Pembangunan infrastruktur penanganan persampahan.

3. Kabupaten Cianjur

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur meliputi :

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses dan sarana prasarana layanan pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
2) Peningkatan fasilitas serta sarana dan prasarana layanan kesehatan;
3) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
4) Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;

5) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan.

B. Aspek Ekonomi
1) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana ekonomi masyarakat;
2) Pengembangan destinasi dan kawasan pariwisata.

C. Aspek Infrastruktur
1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana pengelolaan sampah.

4. Kabupaten Bandung

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Bandung meliputi :

A. Aspek Sosial
1) Peningkatan akses serta sarana dan prasarana layanan Pendidikan dan kesehatan;
2) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
3) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;
4) Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
5) Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pusat pelayanan publik dalam meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat;
6) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

B. Aspek Infrastruktur

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana pengelolaan sampah;
3) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah;
4) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir.

5. Kabupaten Garut

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Garut meliputi :

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses serta sarana dan prasarana layanan Pendidikan dan kesehatan;
2) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
3) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;
4) Peningkatan sarana dan prasarana olah raga.

B. Aspek Ekonomi

1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
2) Pengembangan destinasi dan kawasan pariwisata.

C. Aspek Infrastruktur

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

6. Kabupaten Tasikmalaya

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Tasikmalaya meliputi :

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses dan sarana prasarana layanan pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
2) Peningkatan fasilitas serta sarana dan prasarana layanan kesehatan;

3) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
4) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;
5) Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pusat pelayanan publik dalam meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat;
6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat perdesaan.

B. Aspek Ekonomi
1) Pengembangan destinasi dan kawasan pariwisata.

C. Aspek Infrastruktur
1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

7. Kabupaten Ciamis

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Ciamis meliputi :

A. Aspek Sosial
3) Peningkatan akses dan sarana prasarana layanan pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
4) Peningkatan fasilitas serta sarana dan prasarana layanan kesehatan;
5) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
6) Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pemerintahan daerah dalam meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat;
7) Pembangunan pusat sistem kendali untuk mengendalikan, memantau, mengawasi dan menerima berbagai data serta sumber informasi berbasis tekhnologi (*command center*);
8) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
9) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;

10) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) perbatasan antar provinsi dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.

B. Aspek Ekonomi
1) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana ekonomi masyarakat;
2) Pengembangan destinasi dan kawasan pariwisata.

C. Aspek Infrastruktur
1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir.

8. Kabupaten Kuningan

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Kuningan meliputi :

A. Aspek Sosial
1) Peningkatan akses dan sarana prasarana layanan pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
2) Peningkatan fasilitas serta sarana dan prasarana layanan kesehatan;
3) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan;
5) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) perbatasan antar provinsi dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.

B. Aspek Ekonomi
1) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana ekonomi masyarakat.

C. Aspek Infrastruktur

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian.

9. Kabupaten Cirebon

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Cirebon meliputi :

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses dan sarana prasarana layanan pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
2) Peningkatan fasilitas serta sarana dan prasarana layanan kesehatan;
3) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
4) Peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
5) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) perbatasan antar provinsi dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.

B. Aspek Ekonomi

1) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana ekonomi masyarakat.

C. Aspek Infrastruktur

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

10. Kabupaten Majalengka

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Majalengka meliputi:

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses dan sarana prasarana layanan pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
2) Peningkatan fasilitas serta sarana dan prasarana layanan kesehatan;

3) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
4) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
5) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
6) Pembangunan pusat sistem kendali untuk mengendalikan, memantau, mengawasi dan menerima berbagai data serta sumber informasi berbasis tekhnologi (*command center*);
7) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan.

B. Aspek Ekonomi
1) Pengembangan destinasi dan kawasan pariwisata.

C. Aspek Infrastruktur
1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

11. Kabupaten Sumedang

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Sumedang meliputi:

A. Aspek Sosial
1) Peningkatan akses dan sarana prasarana layanan pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
2) Peningkatan fasilitas serta sarana dan prasarana layanan kesehatan;
3) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
4) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;
5) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
6) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
7) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan.

B. Aspek Ekonomi

1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat.

C. Aspek Infrastruktur

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana pengelolaan sampah.

12. Kabupaten Indramayu

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Indramayu meliputi:

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses dan sarana prasarana layanan pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
2) Peningkatan fasilitas serta sarana dan prasarana layanan kesehatan;
3) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
4) Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pemerintahan daerah dalam meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

B. Aspek Ekonomi

1) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana ekonomi masyarakat;
2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat.

C. Aspek Infrastruktur

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

13. Kabupaten Subang

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Subang meliputi:

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses dan sarana prasarana layanan pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
2) Peningkatan fasilitas serta sarana dan prasarana layanan kesehatan;
3) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
4) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;
5) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

B. Aspek Ekonomi

1) Pengembangan destinasi dan kawasan pariwisata;
2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat.

C. Aspek Infrastruktur

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana pengelolaan sampah;
3) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir.

14. Kabupaten Purwakarta

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Purwakarta meliputi:

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses dan sarana prasarana layanan pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
2) Peningkatan fasilitas serta sarana dan prasarana layanan kesehatan;
3) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;

4) Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pusat pelayanan publik dalam meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

B. Aspek Ekonomi

1) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana ekonomi masyarakat;
2) Pengembangan destinasi dan kawasan pariwisata.

C. Aspek Infrastruktur

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana pengelolaan sampah.

15. Kabupaten Karawang

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Karawang meliputi:

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses dan sarana prasarana layanan pendidikan serta kesejahteraan guru di daerah terpencil;
2) Peningkatan fasilitas serta sarana dan prasarana rumah sakit rujukan regional (RS Umum Daerah Karawang) dan layanan kesehatan lainnya;
3) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
4) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;
5) Pembangunan pusat sistem kendali untuk mengendalikan, memantau, mengawasi dan menerima berbagai data serta sumber informasi berbasis tekhnologi (*command center*);
6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan.

B. Aspek Ekonomi

1) Pengembangan destinasi dan kawasan pariwisata.

C. Aspek Infrastruktur

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian;
3) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir.

16. Kabupaten Bekasi

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Bekasi meliputi:

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses dan sarana prasarana layanan pendidikan dan kesehatan;
2) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
3) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

B. Aspek Ekonomi

1) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana ekonomi masyarakat;
2) Pengembangan destinasi dan kawasan pariwisata.

C. Aspek Infrastruktur

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
3) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana pengelolaan sampah.

17. Kabupaten Bandung Barat

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat meliputi:

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses serta sarana dan prasarana layanan pendidikan dan kesehatan;

2) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
3) Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pusat pelayanan publik dan pemerintahan daerah dalam meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat;
4) Pembangunan pusat sistem kendali untuk mengendalikan, memantau, mengawasi dan menerima berbagai data serta sumber informasi berbasis tekhnologi (*command center*);
5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan.

B. Aspek Ekonomi
1) Pengembangan destinasi dan kawasan pariwisata;
2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat.

C. Aspek Infrastruktur
1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

18. Kabupaten Pangandaran

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Pangandaran meliputi:

A. Aspek Sosial
1) Peningkatan akses serta sarana dan prasarana layanan pendidikan dan kesehatan;
2) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
3) Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pusat pelayanan publik dan pemerintahan daerah dalam meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

B. Aspek Ekonomi
1) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana ekonomi masyarakat;

2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat.

C. Aspek Infrastruktur

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana pengelolaan sampah.

19. Kota Bogor

Arah pengembangan wilayah Kota Bogor meliputi:

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses serta sarana dan prasarana layanan pendidikan dan kesehatan;
2) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

B. Aspek Ekonomi

1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat;
2) Pengembangan destinasi dan kawasan pariwisata.

C. Aspek Infrastruktur

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana pengelolaan sampah.

20. Kota Sukabumi

Arah pengembangan wilayah Kota Sukabumi meliputi:

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses serta sarana dan prasarana layanan pendidikan dan kesehatan;
2) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;

3) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
4) Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pemerintahan daerah dalam meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat;
5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan.

B. Aspek Ekonomi
1) Pengembangan destinasi dan kawasan pariwisata;
2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat.

C. Aspek Infrastruktur
1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir.

21. Kota Bandung

Arah pengembangan wilayah Kota Bandung meliputi:

A. Aspek Sosial
1) Peningkatan akses serta sarana dan prasarana layanan pendidikan dan kesehatan;
2) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
3) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;
4) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

B. Aspek Ekonomi
1) Pengembangan destinasi dan kawasan pariwisata.

C. Aspek Infrastruktur

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan;
3) Pemulihan Daerah Aliran Sungai Ciarum melalui Citarum Harum.

22. Kota Cirebon

Arah pengembangan wilayah Kota Cirebon meliputi:

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses serta sarana dan prasarana layanan pendidikan dan kesehatan;
2) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
3) Pembangunan pusat sistem kendali untuk mengendalikan, memantau, mengawasi dan menerima berbagai data serta sumber informasi berbasis tekhnologi (*command center*);
4) Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pemerintahan daerah dalam meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

B. Aspek Ekonomi

1) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana ekonomi masyarakat;
2) Pengembangan destinasi dan kawasan pariwisata;
3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni budaya di Jawa Barat.

C. Aspek Infrastruktur

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana pengelolaan sampah.

23. Kota Bekasi

Arah pengembangan wilayah Kota Bekasi meliputi:

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses serta sarana dan prasarana layanan pendidikan dan kesehatan;
2) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
3) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
4) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
5) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;
6) Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pemerintahan daerah dalam meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

B. Aspek Infrastruktur

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Peningkatan infrastruktur drainase dalam pengendalian air permukaan.

24. Kota Depok

Arah pengembangan wilayah Kota Depok meliputi:

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses serta sarana dan prasarana layanan pendidikan;
2) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
3) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
4) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) perbatasan antar provinsi dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.

B. Aspek Ekonomi

1) Pengembangan destinasi dan kawasan pariwisata.

C. Aspek Infrastruktur

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana pengelolaan sampah;
3) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir.

25. Kota Cimahi

Arah pengembangan wilayah Kota Cimahi meliputi:

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses serta sarana dan prasarana layanan pendidikan dan kesehatan;
2) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
3) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;
4) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

B. Aspek Ekonomi

1) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana ekonomi masyarakat;
2) Pengembangan destinasi dan kawasan pariwisata.

C. Aspek Infrastruktur

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Pembangunan embung/situ untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir.

26. Kota Tasikmalaya

Arah pengembangan wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses serta sarana dan prasarana layanan pendidikan dan kesehatan;
2) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
3) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
4) Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pemerintahan daerah dalam meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

B. Aspek Ekonomi

1) Pengembangan destinasi dan kawasan pariwisata.

C. Aspek Infrastruktur

1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2) Peningkatan fasilitas dan sarana prarasana pengelolaan sampah.

27. Kota Banjar

Arah pengembangan wilayah Kota Banjar meliputi:

A. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses serta sarana dan prasarana layanan pendidikan dan kesehatan;
2) Peningkatan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
3) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
4) Pembangunan pusat sistem kendali untuk mengendalikan, memantau, mengawasi dan menerima berbagai data serta sumber informasi berbasis tekhnologi (*command center*);
5) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) perbatasan antar provinsi dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.

5.3 Sinergitas Pembangunan Daerah

Dalam konteks pembangunan Jawa Barat, harus diupayakan adanya sinergitas pembangunan daerah antar wilayah antar subsektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan. Pendekatan sinergis yang dimaksud yaitu adanya keterpaduan antara satu dengan yang lain dari sisi sasaran, program maupun kelembagaan dalam memperdayakan kelompok masyarakat Jawa Barat. Artinya, upaya pembangunan ini diorientasikan untuk memperdayakan kualitas kehidupan berkelompok masyarakat yang memiliki kerentanan dalam angka partisipasi sekolah, daya beli dan kesehatan.

Sinergitas sasaran, yaitu adanya upaya terpadu dalam mengentaskan kelompok masyarakat miskin disuatu wilayah yang memiliki resiko pembangunan paling tinggi yaitu resiko pendidikan, daya beli dan kesehatan. Sinergitas program, yaitu bentuk program atau jenis kegiatan yang mengandung nilai kepaduan dalam mengentaskan kelompok sasaran yang memiliki resiko pembangunan paling tinggi. Sinergitas kelembagaan, yaitu adanya upaya terpadu baik dalam bentuk personal maupun keuangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya yang memiliki orientasi pembangunan terhadap kelompok sasaran yang memiliki resiko pembangunan paling tinggi.

Upaya untuk membangun sinergitas ini, berdasarkan kepada dua pendekatan yaitu sinergitas horizontal dan sinergitas vertikal. Sinergitas horizontal yaitu adanya kepaduan antara upaya peningkatan daya beli, partisipasi sekolah, dan kesehatan. Sedangkan, sinergitas vertikal yaitu adanya keterpaduan strategis antara kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD Tahun 2022 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah.

Berikut tabel Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan urusan pemerintahan:

1. Pendidikan

Tabel 5.13
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pendidikan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar SPM bidang Pendidikan	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri Terakreditasi		94.92 %	
		Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi		64.95%	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usian 16-18 Tahun dalam Pendidikan Menengah	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan usia dini	100%	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	Tingkat pertisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan Dasar	100%	
2	Tercapainya penerapan kebijakan Merdeka Belajar di daerah	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	59.00%	
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	28.00%	
3	Terwujudnya lulusan SMK yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah SMK yang terevitalisasi		50 Unit	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

2. Kesehatan

Tabel 5.14
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kesehatan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1 : 1.000	
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang Terakreditasi		
2	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100%	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	21.2%	
		Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	59%	

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	127 per 100.000 penduduk	
		Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Usia 12-23 Bulan	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Usia 12-23 Bulan	94.1%	
		Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria		27 Kabupaten/Kota	
		Persentase Merokok Penduduk Usia 10-18 Tahun	Persentase Merokok Penduduk Usia 10-18 Tahun	8.9 %	
		Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	83 per 100.000 penduduk	
4	Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	88 %	
		Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	88%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 5.15
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tersedianya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	96,75 %	
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	Persentase angka BABS di tempat terbuka	7.41 %	
		Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT	Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT		
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	77 %	
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill	298674 Rumah Tangga	
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST	699 Rumah Tangga	
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	18,74 %	
2.	Terwujudnya konektivitas jalan	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	82.78 %	
		Panjang jalan daerah yang dibangun	Panjang jalan daerah yang dibangun	5 Km	
3.	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Persentase luas sawah beririgasi	Persentase luas sawah beririgasi	8.75 %	
		Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	27902 Ha	
		Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	24850 Ha	

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	4 Materi Teknis	
		Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	4 Materi Teknis	
		Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	4 Persetujuan Substansi	
		Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	2 Materi Teknis	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 5.16
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	
2	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani	Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani	96 Ha	

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Secara Terpadu	Secara Terpadu		
		Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota	Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota	8 Kawasan	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 5.17
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	
		Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	100%	
2.	Meningkatnya manajemen kebencanaan yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	
		Persentase penanganan pra bencana	Persentase penanganan pra bencana	100%	
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	100%	

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	100%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

6. Sosial

Tabel 5.18
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Sosial

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tersedianya Data Fakir Miskin	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	55%	
		Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	120 Orang	
		Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	627 Orang	
		Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	100%	
2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	5 Badan Usaha	
		Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	5000 KPM	
		Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	6000 KPM	
		Peningkatan kapasitas pendamping PKH	Peningkatan kapasitas pendamping PKH	120 Orang	
		Peningkatan kapasitas	Peningkatan kapasitas	120 Orang	

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pendamping PKH	pendamping PKH		
		Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	3300 Lembaga	
		Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	11.000 Orang	
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	5.000 Jiwa	
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	5.000 Jiwa	
		Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	37 Kelompok Masyarakat	
		Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	100 Orang	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1.5%	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0.2%	
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi	2%	

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kebutuhan dasarnya di dalam panti	kebutuhan dasarnya di dalam panti		

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

7. Tenaga Kerja

Tabel 5.19
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Tenaga Kerja

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	2040 Orang	
		Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	1320 Orang	
2.	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	86151 Orang	
3.	Meningkatnya kualitas pelindungan tenaga kerja dan pengusaha yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja	Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP Online		20%	

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	34.01%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 5.20
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	2.85%	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70.40 - 70.74	
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

9. Pangan

Tabel 5.21
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pangan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	50%	
		Persentase cadangan pangan masyarakat	Persentase cadangan pangan masyarakat		
		Persentase daerah rentan rawan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	10%	
2	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	11.35%	
		Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan	10%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

10. Pertanahan

Tabel 5.22
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pertanahan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	5000 Bidang Tanah	

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	1338 Kepala Keluarga	
2	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	1549.05 Ha	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

11. Lingkungan Hidup

Tabel 5.23
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Lingkungan Hidup

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61.19 poin	
2	Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	35%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 5.24
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Adminduk	Penyajiian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	Penyajiian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100 %	
		Presentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Anak Usia 0-17 Tahun	Presentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Anak Usia 0-17 Tahun	95%	
		Presentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan	Presentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan	100%	
		Presentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua Pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Presentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua Pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%	
		Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada Semua Individu yang Perceraiannya Dilaporkan	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada Semua Individu yang Perceraiannya Dilaporkan	100%	
6	Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemanfaatan Data Kependudukan	87.50%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 5.25
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efesien	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	90%	
		Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	85%	
		Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar	Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar	95%	
2.	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	622%	
		Jumlah Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang	2000 Desa	
3.	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	4765 Desa	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 5.26
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57.00	

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	25.00 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2.10 Rata-rata Anak per Wanita	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	63.67%	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7.22%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

15. Komunikasi dan Informatika

Tabel 5.27
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100%	
		Jumlah kegiatan fasilitasi penyediaan dan pengembangan ekosistem dalam rangka pemanfaatan infrastruktur pita lebar di daerah dalam mendukung	Jumlah kegiatan fasilitasi penyediaan dan pengembangan ekosistem dalam rangka pemanfaatan infrastruktur pita lebar di daerah dalam mendukung	1 Kegiatan	

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		penyelenggaraan e-government	penyelenggaraan e-government		
2	Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur pusat data pemerintah daerah (NOC, ruang server) dan/atau pusat data pemerintah pusat (pusat data nasional sementara)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan infrastruktur pusat data pemerintah daerah (NOC, ruang server) dan/atau pusat data pemerintah pusat (pusat data nasional sementara)	100%	
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online	58%	
		Persentase layanan publik yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Persentase layanan publik yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	100%	
		Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara online	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara online	100%	
		Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	6%	
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi	Jumlah kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi digital	Jumlah kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi digital	5 Kegiatan	
4	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital	Persentase ASN pengelola infrastruktur TIK Pemerintah daerah yang mengikuti	Persentase ASN pengelola infrastruktur TIK Pemerintah daerah yang mengikuti	100%	

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pelatihan dan pembinaan	pelatihan dan pembinaan		
		Jumlah masyarakat yang mengikuti program pelatihan bidang digital	Jumlah masyarakat yang mengikuti program pelatihan bidang digital	885 Orang	
		Jumlah kegiatan fasilitasi literasi digital	Jumlah kegiatan fasilitasi literasi digital	177 Kegiatan	
5	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase Kab/kota yang sudah melaksanakan urusan PIKP sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase Kab/kota yang sudah melaksanakan urusan PIKP sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	
		Persentase konten infomasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	Persentase konten infomasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	85%	
		Persentase narasi negatif, hoax, dan informasi misleading yang beredar di wilayah pemerintah daerah yang di counter oleh pemerintah daerah	Persentase narasi negatif, hoax, dan informasi misleading yang beredar di wilayah pemerintah daerah yang di counter oleh pemerintah daerah	100%	
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah	80%	
		Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan	100%	

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		
		Persentase mitra strategis Pemda yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional	Persentase mitra strategis Pemda yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional	75%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

16. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Tabel 5.28
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Koperasi yang Modern	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	35%	
		Persentase cadangan pangan masyarakat	Persentase cadangan pangan masyarakat		
		Persentase daerah rentan rawan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	10%	
2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	100%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

17. Penanaman Modal

Tabel 5.29
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Penanaman Modal

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	105.00-113.51 Rp	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

18. Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 5.30
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatknya Pemuda yang Berwirausaha	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	7.5%	
2	Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	17.8%	
3	Meningkatnya prestasi olahraga nasional dan internasional	Peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	12 Medali	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

19. Kebudayaan

Tabel 5.31
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kebudayaan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	28%	
		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	60 Unit	
		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	20 Unit	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	6 Unit	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	7 Orang	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi	Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi	7 Orang	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	24,89%	
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	8%	
		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap	0,21%	

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		penduduk usia 15 tahun ke atas)	penduduk usia 15 tahun ke atas)		
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	0,81%	
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	20,75%	
2.	Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	20 Unit	
		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dilindungi	60 Unit	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

20. Statistik

Tabel 5.32
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Statistik

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

21. Persandian

Tabel 5.33
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Persandian

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Ketahanan dan Keamanan Siber	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	4 Orang	
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	5 Daerah	
		Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	15 Orang	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

22. Perpustakaan

Tabel 5.34
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Perpustakaan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tingkat kegemaran membaca masyarakat bertambah	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	67.63	
2.	Literasi masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13 Index	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

23. Kearsipan

Tabel 5.35
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Kearsipan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	47317 Orang	
		Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	17.8%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

24. Kelautan dan Perikanan

Tabel 5.36
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif)		25497.14 Ha	
		Jumlah dokumen monev/kajian PK/peraturan turunan Perda RZWP-3-K		1.00 Dokumen	
2	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi garam		271190.75 Ton	

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	184345.92 Ton	
		Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	857207.20 Ton	
		Konsumsi ikan		30,60 Kg/KAP/TH	
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	Penanganan kasus Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan		100%	
		Operasi kapal pengawas		344 Hari	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

25. Pariwisata

Tabel 5.37
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Pariwisata

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	9313391428 Rp	
		Kontribusi PDB Pariwisata	Kontribusi PDB Pariwisata	1,91 - 2,05 %	
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	36000000 Orang	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

26. Pertanian

Tabel 5.38
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pertanian

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya produktivitas pertanian	persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan	1.00 %	
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	1.00%	
		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	5%	
		Persentase peningkatan produktivitas peternakan	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	100%	
2	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	59.00%	
		Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	15%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

27. Kehutanan

Tabel 5.39
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Kehutanan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial		33352,56 Ha	
2	Meningkatnya luas hutan dan	Persentase Luas lahan		37090 Ha	

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air	kritis yang direhabilitasi			
3		Dokumen penataan hutan wilayah KPH		1549.05 Ha	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

28. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Tabel 5.40
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	Rasio elektrifikasi		100%	
2	Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional		18.3%	
3	Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik	Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)		100%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

29. Perdagangan

Tabel 5.41
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Perdagangan

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Ekspor Bernilai Tambah Tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	2.88%	
2	Meningkatnya Keberdayaan dan	Persentase penanganan	Persentase penanganan	80%	

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kepercayaan Konsumen	pengaduan konsumen	pengaduan konsumen		
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	80%	
4	Meningkatnya Jaminan Mutu Komoditas Potensial Daerah	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	80%	
5	Terwujudnya Iklim Usaha yang Kondusif	Tertib Usaha	Tertib Usaha	100%	
6	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu, dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk	100%	
7	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5%	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

30. Perindustrian

Tabel 5.42
Sinergi Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Bidang Perindustrian

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tercapainya Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	100%	
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	863.19 T%	

No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nonmigas Terhadap PDB	Nonmigas Terhadap PDB	Nonmigas Terhadap PDB		
3	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	324.9 Nilai	
4	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	216676 Orang	

Sumber: Hasil Rakortekrenbang. 2021

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022

Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2022 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2021 untuk RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Musrenbang menjadi salah satu media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Jawa Barat.

Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2022 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di kabupaten/kota.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, dana umat, serta hibah.

6.1 Rencana Alternatif Pendanaan Pembangunan Tahun 2022

6.1.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2022

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah, telah menyusun rencana kegiatan yang didanai dari APBN yang terdiri dari rencana program dan kegiatan yang diusulkan menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun yang diusulkan untuk didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut ini akan disajikan usulan rencana program dan kegiatan Tahun 2022 yang akan menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Provinsi yang Didanai oleh APBN untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022

No	Usulan	Volume	Satuan	*Major Project*	Kementerian	Lokasi
1	Penanganan Lahan Kritis DAS Citarum	1	Paket	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Provinsi Jawa Barat
2	Pembangunan Rumah Khusus Bencana (Relokasi Longsor di Kecamatan Sukajaya)	1	Paket	Bukan *Major Project*	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kabupaten Bogor
3	Penanganan Sampah Tuntas Kawasan (TPS 3R Plus)	1	Paket	Bukan *Major Project*	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Provinsi Jawa Barat
4	Pembangunan Kolam Retensi untuk Pengendalian Banjir DAS Citarum	1	Paket	Bukan *Major Project*	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Provinsi Jawa Barat
5	Pembangunan Embung Ciawisurat	1	Paket	Bukan *Major Project*	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kabupaten Cianjur
6	Pembangunan Waduk Cibeet	1	Paket	Bukan *Major Project*	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kabupaten Karawang
7	Penanganan Banjir Pantura Subang	1	Paket	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Provinsi Jawa Barat
8	Pembangunan Daerah Irigasi Cikalong	1	Paket	Bukan *Major Project*	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kabupaten Tasikmalaya
9	Citarum Harum - Operasional KODAM III Siliwangi	1	Paket	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Provinsi Jawa Barat
10	Pengelolaan Sampah DAS Citarum	1	Paket	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Provinsi Jawa Barat
11	Pembangunan Pelabuhan Regional di	1	Paket	Bukan *Major Project*	Kementerian Perhubungan	Kabupaten. Sukabumi

No	Usulan	Volume	Satuan	*Major Project*	Kementerian	Lokasi
	Pelabuhan Ratu (Lanjutan)					
12	Pelabuhan Bojong Salawe	1	Lokasi	-	Kementerian Perhubungan	Kab. Pangandaran
13	Pelabuhan Lokal Palangpang	1	Lokasi	-	Kementerian Perhubungan	Kab. Sukabumi
14	Proyek Pengembangan Jabar Selatan: Pengembangan Bandar Udara Cikembar, Kab. Sukabumi,	1	Unit	-	Kementerian Perhubungan	Kab. Sukabumi
15	Pembangunan Jaringan Distribusi Utama Spam Regional Cirebon Raya	91.67	Km	-	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Kab. Sumedang, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kota Cirebon
16	Proyek Pembangunan Transportasi Dan Konektivitas Wilayah: Interchange Jalan Tol Menuju Bandara Kertajati	5.08	Km	-	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Kab. Majalengka
17	Proyek Pembangunan Transportasi Dan Konektivitas Wilayah: Pengembangan Bandar Udara Nusawiru	1	Unit	-	Kementerian Perhubungan	Kab. Pangandaran
18	Proyek Penanganan Banjir: Normalisasi Kali Bekasi	50	Km	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Kab. Bekasi, Kota Bekasi
19	Proyek Pembangunan Transportasi Dan Konektivitas Wilayah: Pembangunan Jalan Tol	95.2	Km	-	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya

No	Usulan	Volume	Satuan	*Major Project*	Kementerian	Lokasi
	Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap					
20	Jalan Desa Mulus Dan Wisata Jabar Selatan	922	Desa	-	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kab. Pangandaran
21	Pembangunan TPA Nangkaleah	1	Unit	-	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Kab. Tasikmalaya
22	Intervensi Kontak TBC	9060	Orang	-	Kementerian Kesehatan	Kota Bandung
23	Peningkatan Kompetensi SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kab. Kuningan	200	Orang	-	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Kab. Kuningan
24	Rintisan Pengembangan Kawasan Sistem Pertanian Terpadu (*Integrated Farming System*) Berbasis Korporasi Petani di Kabupaten Purwakarta	5	Ha	-	Kementerian Pertanian	Kab. Purwakarta
25	Peningkatan Jalan Batas Kota Banjar - Kalipucang	5	Km	-	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Kab. Pangandaran
26	Peningkatan Jalan Lingkar Luar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat	25	Km	-	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Kab. Majalengka
27	Pembangunan Jalan	39	Km	-	Kementerian Pekerjaan Umum	Kab. Bogor

No	Usulan	Volume	Satuan	*Major Project*	Kementerian	Lokasi
	Poros Tengah-Timur				Dan Perumahan Rakyat	
28	Pembangunan Jalan Arca - SP. Loji - Ciseureuh (Jalur Puncak II)	10	Km	-	Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Kab. Cianjur

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021

Selanjutnya disajikan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, yang sudah diinput dalam aplikasi Krisna Selaras, sebagai berikut:

Tabel 6.2
Pagu Anggaran Indikatif
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Tahun 2022
untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif DAK Tahun 2022	
		Fisik (Rp.)	Non Fisik (Rp.)
1	Dinas Bina Marga	492.474.708.000	
2	Dinas Kesehatan	52.630.544.587	23.940.893.504
3	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	48.436.990.000	
4	Dinas Sumber Daya Air	120.122.361.000	
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana		563.103.000
5	Dinas Lingkungan Hidup	2.734.000.000	
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil		2.352.080.000
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		523.322.000
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	200.000.000	
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	41.257.500.000	
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		5.712.528.000
11	Dinas Kehutanan	44.633.382.657	
	TOTAL	802.489.486.244	33.093.976.504

Sumber : Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2021 dan Usulan Tahun 2022

Selanjutnya untuk daftar usulan program dan kegiatan Tahun 2022 yang diusulkan didanai melalui DAK Bidang Fisik Tahun 2022 yang telah terinput dalam aplikasi Krisna Selaras dan telah diusulkan secara resmi melalui Surat Gubernur, akan disampaikan dalam lampiran dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

6.2 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022 serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2022

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, sehingga keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2022 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022; Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD Tahun 2022 dengan sasaran PN RKP Tahun 2022; Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2022 dengan PN RKP Tahun 2022; serta Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP Tahun 2022. Dukungan Program Prioritas dan Pendanaan Daerah terhadap Program prioritas nasional dalam RPJMN disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.3
Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Kegiatan Prioritas Nasional dalam RPJMN serta Dukungan Pendanaan pada RKPD 2022

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
1.	KP 1: Pengembangan Kawasan Strategis				
	Pembangunan DPP Baru Bandung-Halimun-Cileteuh				
	Penyediaan air baku di kawasan strategis (KI, KEK, DPP) DPP Baru Bandung-Halimun-Cileteuh	Kab. Bandung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	177.663.265.031
				Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	300.000.000
	Peningkatan Jalur KA di Jawa Barat (Bandung - Banjar)	Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.900.000.000
	Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.900.000.000
	Koordinasi raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus)	Jawa Barat	Program Bina Pembangunan Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	13.000.000.000
2.	KP 2: Pengembangan Sektor Unggulan				
	Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh				
	Kawasan Lada, Pala, dan Cengkeh	Provinsi Jawa Barat, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Purwakarta, Kab. Kuningan, Kab. Pangandaran	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	32.967.169.281
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.593.770.000

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
	Pengembangan komoditas unggulan Kopi				
	Kawasan Kopi	Provinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Bandung, Kab. Garut, Kab. Ciamis	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	32.967.169.281
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.593.770.000
	Pengembangan komoditas unggulan Kelapa				
	Kawasan Kelapa	Provinsi Jawa Barat, Kab. Sumedang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	32.967.169.281
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.593.770.000
	Pengembangan komoditas unggulan Tebu				
	Kawasan Tanaman Substitusi Impor (Tebu)	Provinsi Jawa Barat, Kab. Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Subang	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	32.967.169.281
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.593.770.000
	Optimalisasi komoditas unggulan emas				
	Optimalisasi produksi emas		Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	2.085.481.800
	Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap				
	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8.681.500.000
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	2.300.000.000

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
				Perikanan	
	Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya				
	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	Provinsi Jawa Barat, a.l: Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Garut	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.617.393.690
	Pengembangan komoditas unggulan Garam				
	Peningkatan produksi garam	Jawa Barat	Program Pengelolaan Ruang Laut	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-
3.	KP 3: Pengembangan Kawasan Perkotaan				
	ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabekpunjur)	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur			
	Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga melalui KPBU	Provinsi Jawa Barat		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	2.612.578.000
	Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	2.612.568.000
	Pusat Pengembangan Keahlian/Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.515.848.197
	Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan *Transit Oriented Development* (TOD) di Jabodetabek (Dukungan KPBU)	Jawa Barat dan (DKI, Banten)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	127.858.754.713
	Pengembangan Kawasan dengan Pendekatan *Transit Oriented Development* (TOD) di Jabodetabek (Dukungan APBN)	Jawa Barat dan (DKI, Banten)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Jabodetabek	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	127.858.754.713
	Pengembangan integrasi simpul transportasi Jabodetabek	Jawa Barat dan (DKI, Banten)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	127.858.754.713

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
			Transportasi Jabodetabek	Jalan (LLAJ)	
	Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Kota Bogor, Kab. Bogor (Provinsi Jawa Barat)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.900.000.000
	Pembangunan *Underpass* Bulak Kapal	Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	563.515.725.412
	Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.500.000.000
	Pembangunan dan Peningkatan SPAM	WM Jakarta di Provinsi Jawa Barat	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.500.000.000
	Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM – Zona Air Minum Prima	Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bogor, Kab. Bekasi (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.500.000.000
	Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM – Smart Grid Water Management	Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bogor, Kab. Bekasi (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.500.000.000
	SPALD-T Skala Kota/Regional	Kota Bekasi, Kota Depok (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.800.000.000
	SPALD-T Skala Permukiman	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.800.000.000
	SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.800.000.000

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan	30.221.254.254
	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan	30.221.254.254
	Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Cianjur (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan	30.221.254.254
	Pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai	WM Jakarta di Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	177.663.265.031
	Pemasangan alat pemantauan penurunan tanah di Kawasan Pesisir Utara Pulau Jawa	WM Jakarta di Provinsi Jawa Barat		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	13.000.000.000
	ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Bandung (Cekungan Bandung)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang			
	Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Wilayah Metropolitan	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	14.811.754.746
	Pembangunan instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat		Program Pengelolaan Energi Terbarukan Dan Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah Regional	2.612.568.000

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 kota metropolitan:				
	a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Rel (APBN)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.900.000.000
	a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Rel (KPBU)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.900.000.000
	a. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Rel (APBD)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.900.000.000
	b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Jalan (APBN)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	127.858.754.713
	b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Jalan (KPBU)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	127.858.754.713
	b. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Jalan (APBD)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	127.858.754.713
	c. Pembangunan Jalur Ganda dan elektrifikasi KA Kiara Condong - Cicalengka	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.900.000.000
	Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat (Provinsi Jawa Barat)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.900.000.000
	Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Cianjur-Padalarang; Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang;	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang (Provinsi	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.900.000.000

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
	Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan APBN)	Jawa Barat)			
	Reaktivasi Jalur KA Jawa Barat (Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari; Cibatu-Garut-Cikajang; Banjar-Cijulang; Cikudapateh-Ciwidey) (Dukungan KPBU)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.900.000.000
	Peningkatan Jalur KA di Jawa Barat (Bandung - Banjar)	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.900.000.000
	Jalan Akses Stasiun Gede Bage	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	563.515.725.412
	Pembangunan KA Ekspres Jakarta-Semarang	Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.900.000.000
	Lanjutan Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) (KPBU)	Jakarta, Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.900.000.000
	Pusat Pengembangan Keahlian/ Skill Development Center (Fungsi Pendidikan)	Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat (Provinsi Jawa Barat)	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.515.848.197
	Jalan Tol Non Trans Jawa	Kota Bandung, Kab. Bandung (Provinsi Jawa Barat)	-	Program Penyelenggaraan Jalan	563.515.725.412
	Jalan Tol Non Trans Jawa	Kab. Bandung, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	563.515.725.412
	Jalan Tol Non Trans Jawa	Kab. Bandung, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	563.515.725.412
	Pembangunan Fly Over Kopo	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	563.515.725.412

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
	Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Provinsi Jawa Barat	Program Pengembangan Perumahan	Program Peningkaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	-
	Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana melalui KPBU	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	-	Program Peningkaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	-
	Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR oleh BUMN	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	-	Program Peningkaan Prasarana, saranan dan Utilitas Umum (PSU)	-
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Penataan Bangunan Gedung dan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	-
	Pembangunan dan Peningkatan SPAM	WM Bandung (lingkup pelayanan), Provinsi Jawa Barat	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.500.000.000
	Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.500.000.000
	Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.500.000.000
	SPALD-T Skala Kota/Regional	Kota Bandung, Kab. Bandung (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.800.000.000
	SPALD-T Skala Permukiman	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.800.000.000

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
	SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Sumedang (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.800.000.000
	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan	30.221.254.254
	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan	30.221.254.254
	Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Kota Bandung, Kab. Bandung Barat (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan	30.221.254.254
	Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	177.663.265.031
	Penyediaan air baku di 5 Wilayah Metropolitan dengan skema KPBU	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	-	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	177.663.265.031
	Publikasi/Laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	WM Bandung, Provinsi Jawa Barat	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	12.700.000.000
	ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil (Jawa Barat)	Kota Sukabumi, Kota Cirebon			
	Jalan Tol Non Trans Jawa	Kota Bogor, Kab. Bogor (Provinsi Jawa Barat)	-	Program Penyelenggaraan Jalan	563.515.725.412
	Pembangunan Jalur Ganda Jawa Barat (Bogor-Sukabumi; Cikampek-Padalarang; Bandung - Banjar)	Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.900.000.000
	Pembangunan Bandara Sukabumi	Provinsi Jawa Barat	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	-	-

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
	SPALD-T Skala Permukiman	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.800.000.000
	SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.800.000.000
	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (TPA)	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan	30.221.254.254
	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan (TPST)	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan	30.221.254.254
	Sistem Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (TPS3R)	Kota Sukabumi, Kota Cirebon (Provinsi Jawa Barat)	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengelolaan Persampahan	30.221.254.254
	Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	177.663.265.031
4.	KP 4: Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi				
	Pembangunan Desa Terpadu	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, DPP Baru Bandung-Halimun-Ciletuh	1. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
			2. Bina Pemerintahan Desa		

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
	Desa Wisata (DEWI)	DPP Baru Bandung-Halimun-Ciletuh	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	20.000.000.000
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	56.350.000.150
	Desa Digital (P3PD)	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	56.350.000.150
	Penetapan Batas Desa	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Bina Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.638.810.904
	Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur,	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.500.000.000

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
		Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya			
	BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.638.810.904
	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Bina Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.638.810.904
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	56.350.000.150

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
	Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Bina Pemerintahan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	56.350.000.150
	Pendampingan pada 74.957 Desa	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.638.810.904
	Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang,	Bina Pemerintahan Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.638.810.904

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
		Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya			
	Pengendalian Penggunaan Dana Desa	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.638.810.904
	Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes	Bandung, Bandung Barat, Banjar, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	56.350.000.150
	Konvergensi Pencegahan *Stunting* di Desa	Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Subang,	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	56.350.000.150

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
		Karawang, Bandung Barat, Majalengka			
	Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	Kab. Sukabumi	1. Program Pengembangan Pariwisata		
			2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan		
			3. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan		
			4. Program Ketenagalistrikan		
	Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Kab. Sukabumi	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	56.350.000.150
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.607.285.879
	Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Kab. Sukabumi	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	56.350.000.150
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.607.285.879
	Penerapan *Sustainable Tourism Practices* Di Destinasi Utama dan Prioritas	Kab. Sukabumi	Program Pengembangan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	20.000.000.000
	BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Kab. Sukabumi	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.638.810.904
	Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Sukabumi	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.638.810.904
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	56.350.000.150

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
				Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
	Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri	Kab. Sukabumi	Program Ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	4.013.440.000
	Sertifikat Hak Atas Tanah	Jawa Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.638.810.904
				Program Pengelolaan Izin Lokasi	200.000.000
5.	KP 5: Kelembagaan dan Keuangan Daerah				
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat				
	Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.449.992.300
		Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1.100.020.680
	Koordinasi review Perda dan Ranperda (administrasi nomor registrasi), terutama terkait investasi daerah, PDRD, pelayanan dasar, pengelolaan SDA, dan RDTR	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	9.767.137.270
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	13.000.000.000
	Deregulasi/harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	9.767.137.270
	Diklat penyusunan Perda dan Perkada	Pusat dan regional (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.944.951.572
	Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk mall pelayanan publik.	Pusat (alokasi Kementerian)		Program Penataan Organisasi	5.148.500.000

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
	Program optimalisasi SIPD: *e-database, e-planning, e-budgeting, e-monev, e-reporting, e-controlling, e-ippd, e-register*	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	11.000.000.000
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	17.424.108.768
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat				
	Penyusunan kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing sesuai potensi daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	14.811.754.746
	Peningkatan kerja sama daerah (antar daerah dan dengan pihak ketiga)	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	14.811.754.746
	Percepatan kerja sama antar daerah dalam penyelesaian permasalahan publik bersama (terutama permasalahan transportasi, air minum, banjir, sampah dan limbah)	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	14.811.754.746
	Pembentukan sekretariat bersama kerja sama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	14.811.754.746
	Penyusunan perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	14.811.754.746
	Monitoring perjanjian kerja sama	-	-	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	14.811.754.746
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat				
	Integrasi dan penerapan SPM	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	11.000.000.000

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
				Pembangunan Daerah	
	Penerapan SPM Sub bidang Trantibum	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Pembangunan Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.762.735.997
	Penerapan SPM Sub bidang Bencana	-	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Program Penanggulangan Bencana	5.939.980.160
	Penerapan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	64.000.000
	Belanja APBD berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	17.424.108.768
	Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.944.951.572
	Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Administrasi Kewilayahan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.638.810.904
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat				
	Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN, Bappenas, Kemenkeu)	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.874.130.000
	Penilaian inovasi terpadu oleh lintas K/L (Kemendagri, KemenPAN, KemenRistek-Dikti, LAN) berbasis indeks inovasi daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.874.130.000
	Penerapan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.874.130.000

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
	iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T)				
	Penerapan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan *Platform* Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	96.221.867.166
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat				
	Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya di provinsi	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	65.644.816.764
	Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota minimal 8% dari tahun anggaran sebelumnya	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	65.644.816.764
	Peningkatan daerah yang memiliki BUMD kontributif terhadap penerimaan daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	65.644.816.764
	Mendorong pemanfaatan mekanisme sumber pendanaan lainnya sebagai instrumen penerimaan daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	65.644.816.764
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat				
	Penerapan belanja APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	17.424.108.768
	Pemenuhan *Mandatory Spending* Daerah	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	17.424.108.768

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
	Pemenuhan realisasi belanja minimal 90%	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	17.424.108.768
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat				
	Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	17.424.108.768
	Pengesahan APBD tepat waktu	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	17.424.108.768
	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah di provinsi Jawa Barat				
	Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	-	
		Provinsi	Program Bina Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	14.811.754.746
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	11.000.000.000
	Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	14.811.754.746
	Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Bina Otonomi Daerah	-	
	Diklat Camat	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-	

No.	RPJMN			RKPD 2022	Pendanaan di RKPD 2022
	KP/Proyek Prioritas Nasional	Lokasi	Program	Program	
	Diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2 UPD)	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.944.951.572
	Orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH	Pusat (alokasi Kementerian)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-	-
	Peningkatan Pelayanan Pertanahan				
	Sertifikat Hak Atas Tanah	Jawa Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Program Pengelolaan Izin Lokasi	200.000.000
	Peta Dasar Pertanahan	Jawa Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	13.000.000.000
	Layanan Pertanahan	Jawa Barat	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Program Pengelolaan Izin Lokasi	200.000.000
	Penyelenggaraan Penataan Ruang				
	Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang Prov/Kab/Kota	Jawa Barat	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	13.000.000.000
	Penyusunan Rencana Tata Ruang di Tingkat Nasional	Jawa Barat (KSN Kawasan Teropong Bintang Boscha)	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	13.000.000.000

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021

6.2.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya, dengan dukungan pendanaan bersifat indikatif.

Tabel 6.4
Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN SASARAN	PAGU ANGGARAN
1.	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	**2.152.751.576.586**
	1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	2.152.751.576.586
2.	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	**87.395.653.534**
	1. Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	45.731.529.660
	2. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	32.335.073.777
	3. Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	9.329.050.097
3.	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	**477.988.256.928**
	1. Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan	237.769.017.853
	2. Meningkatkan Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Pertanian	240.219.239.075
4.	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	**5.663.866.496**
	1. Meningkat-nya kualitas dan taraf hidup masyarakat	5.663.866.496
5.	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	**13.299.488.633.815**
	1. Meningkatnya Aksesibiltas dan Mutu Pendidikan	13.222.861.359.831
	2. Meninfgkatnya Pangarusutamaan gender dan Perlindungan Anak	1.555.342.000
	3. Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Investasi Olah Raga Jawa Barat di Tingkat Nasional	75.071.931.984
6.	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	**5.939.980.160**
	1. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	5.939.980.160
7.	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	**375.246.362.866**
	1. Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel	340.671.872.123
	2. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	19.762.735.997
	3. Terbentuknya Daerah Otonomi Baru Untuk Pemerataan Pembangunan	
	4. Terwujudnya Kolaborasi Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pihak Lainnya Dalam Pembangunan yang SInergis dan Integratif	14.811.754.746

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN SASARAN	PAGU ANGGARAN
8.	Gerakan Membangun Desa	**756.573.811.054**
	1. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	756.573.811.054
9.	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	**574.314.613.081**
	1. Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	574.314.613.081
10.	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	**1.688.431.542.817**
	1. Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	3.938.988.390
	2. Meningkat-nya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	995.431.556.909
	3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahtera-an masya-rakat	689.060.997.518
11.	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	**61.220.709.615**
	1. Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	47.156.277.548
	2. Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	14.064.432.067
TOTAL		**Rp 18.795.055.006.952**

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021

Sedangkan rincian pagu pendanaan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, serta pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.5
Rekapitulasi Alokasi Anggaran Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

KODE	PERANGKAT DAERAH	RANCANGAN ALOKASI 2022 (TANPA HIBAH/BANSOS/ SUBSIDI)	HIBAH*	BANTUAN SOSIAL*	DAK	SUBSIDI*	RANCANGAN ALOKASI ANGGARAN 2022 DENGAN HIBAH/BANSOS/ SUBSIDI
1.01.01	Dinas Pendidikan	7.076.375.873.291	9.463.791.507.277	-	492.474.708.000	-	17.032.642.088.568
1.02.01	Dinas Kesehatan	1.722.325.555.673	-	-	76.571.438.091	-	1.798.896.993.764
1.03.01	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	1.334.924.250.195	-	-	48.436.990.000	-	1.383.361.240.195
1.03.02	Dinas Sumber Daya Air	303.293.307.221	-	-	120.122.361.000	-	423.415.668.221
1.04.01	Dinas Perumahan dan Permukiman	356.210.442.622	-	376.250.000.000	-	-	732.460.442.622
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	50.001.404.888	-	-	-	-	50.001.404.888
1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.230.055.266	-	-	-	-	28.230.055.266
1.05.03	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.047.845.421	144.338.598.733	-	-	-	179.386.444.154
1.06.01	Dinas Sosial	178.402.998.919	4.267.675.000	8.479.750.000	-	-	191.150.423.919
1.07.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	141.485.581.937	-	-	-	-	141.485.581.937
1.08.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	60.730.328.449	-	-	565.103.000	-	61.295.431.449
1.09.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	143.641.220.192	-	-	-	-	143.641.220.192
1.11.01	Dinas Lingkungan Hidup	113.116.710.320	-	-	2.734.000.000	-	115.850.710.320
1.12.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.486.019.052	-	-	-	-	16.486.019.052
1.13.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	107.925.479.694	-	-	-	-	107.925.479.694
1.15.01	Dinas Perhubungan	238.243.696.775	-	-	-	-	238.243.696.775
1.16.01	Dinas Komunikasi dan	206.355.717.540	5.190.242.760	-	-	-	211.545.960.300

KODE	PERANGKAT DAERAH	RANCANGAN ALOKASI 2022 (TANPA HIBAH/BANSOS/ SUBSIDI)	HIBAH*	BANTUAN SOSIAL*	DAK	SUBSIDI*	RANCANGAN ALOKASI ANGGARAN 2022 DENGAN HIBAH/BANSOS/ SUBSIDI
	Informatika						
1.17.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	59.163.603.344	837.005.001	-	2.352.080.000	-	62.352.688.345
1.18.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	55.294.858.398	-	-	523.322.000	-	55.818.180.398
1.19.01	Dinas Pemuda dan Olahraga	52.539.405.296	70.986.467.500	-	-	-	123.525.872.796
1.23.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	58.700.229.159	-	-	200.000.000	-	58.900.229.159
2.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	128.227.269.507	-	-	41.257.500.000	-	169.484.769.507
2.02.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	122.420.697.322	3.111.331.800	-	5.712.578.000	-	131.244.607.122
2.03.01	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	322.306.285.374	-	-	-	-	322.306.285.374
2.03.02	Dinas Perkebunan	89.172.749.913	-	-	-	-	89.172.749.913
2.04.01	Dinas Kehutanan	240.487.356.329	-	-	44.633.382.657	-	285.120.738.986
2.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	90.221.977.928		-	-	-	90.221.977.928
2.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	139.321.680.118	6.750.808.500	-	-	15.000.000.000	161.072.488.618
3.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	84.632.573.722	-	-	-	-	84.632.573.722
3.02.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.817.651.334.513	-	-	-	-	13.817.651.334.513
3.02.02	Badan Pendapatan Daerah	555.306.175.464	-	-	-	-	555.306.175.464
3.03.01	Badan Kepegawaian Daerah	62.633.899.775	-	-	-	-	62.633.899.775
3.03.02	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	77.541.013.811	-	-	-	-	77.541.013.811
3.04.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	19.768.591.728	-	-	-	-	19.768.591.728

KODE	PERANGKAT DAERAH	RANCANGAN ALOKASI 2022 (TANPA HIBAH/BANSOS/ SUBSIDI)	HIBAH*	BANTUAN SOSIAL*	DAK	SUBSIDI*	RANCANGAN ALOKASI ANGGARAN 2022 DENGAN HIBAH/BANSOS/ SUBSIDI
3.05.03	Sekretariat Daerah	667.822.003.328	49.325.335.167	-	-	-	717.147.338.495
3.05.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	424.796.811.449	-	-	-	-	424.796.811.449
3.05.05	Inspektorat	97.408.179.095	3.250.500.000	-	-	-	100.658.679.095
3.05.10	Badan Penghubung	15.564.762.257	-	-	-	-	15.564.762.257
JUMLAH		**29.293.777.945.285**	**9.751.849.471.738**	**384.729.750.000**	**835.583.462.748**	**15.000.000.000**	**40.280.940.629.771**

Sumber: Hasil olahan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021
Keterangan : *) Masih dalam proses,
Angka sangat sementara, berdasarkan usulan Tahun 2022 dan Pagu Tahun 2021

6.2.2 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan.

Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumber daya publik yang tepat dapat menjadi kontribusi yang lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil, dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”.

Salah satu persoalan yang dihadapi Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain seperti Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Sosial dan Agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini, skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bekerja sama untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

Sampai dengan tahun 2020, dari seluruh Proyek Strategis yang direncanakan dibiayai melalui skema KPBU telah ada 1 (satu) proyek strategis yang sedang dalam proses pelaksanaan, yaitu TPPAS Regional Lulut Nambo.

TPPAS Regional Lulut Nambo merupakan salah satu sarana strategis milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan skema pembiayan KPBU. TPPAS Lulut Nambo melayani pembuangan sampah bagi beberapa kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan. PT Jabar Bersih Lestari (JBL) yang merupakan badan usaha dalam pengelolaan TPPAS Lulut Nambo untuk persampahan menggunakan teknologi MBT untuk mengubah sampah menjadi *Refused Derived Fuel* (RDF) dan kompos. Di areal seluas 55 hektar, produksi RDF diperkirakan 35 persen dari potensi limbah yang masuk ke pabrik, produknya langsung dimanfaatkan oleh PT. Indocement sebagai *offtaker.*

Perkembangan Skema Pembiayaan untuk TPPAS Lulut nambo saat ini berada pada tahap pelaksanaan Proses pemilihan mitra investor oleh PT. Jabar Bersih Lestari dan telah dijadwalkan untuk Penyiapan *Financial Close* oleh PT JBL (versi baru) di tahun 2021. Untuk tahun 2022, agenda dari Pelaksanaan TPPAS Regional Lulut Nambo Adalah Melanjutkan Konstruksi hingga *Commercial Operation Date* (COD).

Perkembangan proyek lainnya yang terdapat dalam skema pembiayaan KPBU adalah 1 (satu) proyek yang dalam proses transaksi, yaitu TPPAS Regional Legok Nangka, dan 3 (tiga) proyek dalam proses penyiapan, yaitu SPAM Jatigede, Sinumbra, serta LRT Bandung Raya dan 13 (tiga belas) proyek dalam proses perencanaan. Pada tahun-tahun berikutnya diharapkan proses pembangunan proyek strategis melalui skema KPBU dapat dilanjutkan.

Tabel 6.6
Proyek Strategis dengan Skema KPBU Tahun 2022

No.	Proyek Strategis	Perkembangan Tahun 2020	Jadwal KPBU Tahun 2022
1	Pembangunan RS Pendidikan Unpad	Tahap Perencanaan (Studi Investasi dikerjakan oleh UNPAD)	Penyiapan (*Market Sounding*, dan Perjanjian Tarif)
2	Pengembangan Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat	-	Penyiapan (Penyusunan FS)
3	TPPAS Lulut Nambo	Tahap Pelaksanaan (Proses pemilihan mitra investor oleh PT. Jabar Bersih Lestari)	Konstruksi Dilanjutkan hingga COD (*Commercial Operation Date*)
4	TPPAS Legok Nangka	Tahap Transaksi (Sudah ada persetujuan prinsip	Transaksi (Perjanjian KPBU dan *Financial Close*)

No.	Proyek Strategis	Perkembangan Tahun 2020	Jadwal KPBU Tahun 2022
		besaran VGF)	
5	TPPAS Bekarpur	-	Penyiapan (*Market Sounding* dan Perjanjian Tarif)
6	TPPAS Ciayumajakuning	Tahap Perencanaan (Rencana penugasan BUMD dibatalkan oleh DPRD)	Penyiapan (*Market Sounding* danPerjanjian Tarif)
7	SPAM Kertasari	Tahap perencanaan (Studi Pendahuluan oleh Diskimrum)	Penyiapan (*Market Sounding*, dan Perjanjian Tarif)
8	SPAM Jatigede	Tahap Penyiapan (Penyusunan FBC bersama PT. SMI)	Transaksi (proses lelang)
9	SPAM Metro Bandung (Sinumbra)	Tahap Penyiapan (Studi Pendahuluan)	Penyiapan (*Market Sounding*, dan Perjanjian Tarif)
10	SPAM Cikalong	Tahap Perencanaan (FS sudah ada di Dinas Permukiman dan Perumahan)	Penyiapan (Penyusunan FBC)
11	SPAM Cikeruh/ Cigondong (SPAM Regional Timur 2)	Tahap Perencanaan (FS sudah ada di Dinas Permukiman dan Perumahan)	Penyiapan (Penyusunan FBC)
12	SPALD Cirebon Raya	Tahap Perencanaan (FS sudah ada di Dinas Permukiman dan Perumahan)	Penyiapan (Penyusunan FBC)
13	SPALD Bandung Raya	Tahap Perencanaan (FS sudah ada di Dinas Permukiman dan Perumahan)	Penyiapan (*Market Sounding* danPerjanjian Tarif)
14	Pengembangan Kawasan Wisata dan MICE	Tahap Perencanaan (FS tahun 2018)	Penyiapan (Penyusunan OBC)
15	Patimban *Seaport Access*, Subang *Railway Construction*	Tahap Perencanaan (KPBU dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan)	Penyiapan (Penyusunan OBC)
16	Kertajati *Aerocity Railway Access Construction*	Tahap Perencanaan KPBU dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan	Penyiapan (Penyusunan OBC)
17	Nusawiru *Airport Development* (Pangandaran)	Tahap Perencanaan (FS disusun oleh Dishub Jabar)	Penyiapan (Penyusunan OBC)
18	LRT Bandung Raya	Tahap Penyiapan (Penyusunan Urban Mobility Plan - UMP)	Penyusunan FBC dan tahap transaksi
19	Pengembangan Penerangan Jalan Umum di Jalan Provinsi	Tahap Perencanaan (Studi Pendahuluan dibantu oleh KEITI)	Penyiapan (*Market Sounding*, dan Perjanjian Tarif)
20	Pembangunan PLT Surya Atap di Gedung-gedung Pemerintah Provinsi	Tahap Perencanaan (Sudah ada FS yang dibuat *British Embassy*)	Penyiapan (*Market Sounding*, dan Perjanjian Tarif)

Sumber: Simpul KPBU Provinsi Jawa Barat, 2021

Tabel 6.7
Prospek Proyek KPBU

No.	Nama Proyek	Dinas yang Bertanggung Jawab	Nilai Investasi (dalam Rp)
1	TPPAS Legok Nangka	Dinas Lingkungan Hidup	3,45 T
2	TPPAS Ciayumajakuning	Dinas Lingkungan Hidup dan PT. MUJ	400 M
3	SPAM Jatigede	Dinas Perumahan dan Permukiman dan PT. Tirta Jabar	2,1 - 2,3 T
4	SPAM Metro Bandung Raya (Sinumbra)	Dinas Permukiman dan Perumahan	2,9 T
5	SPAM Kertasari	Dinas Permukiman dan Perumahan	367 M
6	SPAM Cikalong	Dinas Permukiman dan Perumahan	400 M
7	SPALD Bandung Raya	Dinas Perumahan dan Permukiman	115,3 M
8	SPALD Cirebon Raya	Dinas Permukiman dan Perumahan	116,5 M
9	Pengembangan Pelabuhan Cirebon	Dinas Perhubungan	975 M
10	Pelabuhan Bojongsalawe	Dinas Perhubungan	1,3 T
11	Bendungan Sawarna	Dinas Sumber Daya Air	1,3 T
12	Hutan Bakau Sinar Laut	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	36,5 M
13	Pengembangan Jalur Puncak II	Dinas Bina Marga	1,2 T
14	Pengembangan Jalur Lingkar Cirebon	Dinas Bina Marga	-
15	Pengembangan Pariwisata *Geopark* Ciletuh	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	200 M Untuk Aksesibilitas
16	Bandara Nusawiru	Dinas Perhubungan	238 M
17	Bandara Sukabumi	Dinas Perhubungan	395 M
18	Pengembangan Pantai Gebang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	226 M
19	*Shortcut* Cibungur - Tanjung Rasa	Dinas Perhubungan	1,9 T
20	Pengembangan Hotel di Batu Karas	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	185 M
21	Jatinangor *Science Park*	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	940 M

Sumber: Simpul KPBU Provinsi Jawa Barat, Tahun 2021

6.3 Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang merupakan turunan dari ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Secara definisi, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, disebut dengan SPM.

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan pada saat perumusan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, terdapat beberapa *mandatory spending* bagi pemerintah daerah provinsi yaitu: 1) alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1); 2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji (UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). *Mandatory spending* tersebut dapat dijadikan salah satu poin perhitungan alokasi anggaran untuk pemenuhan anggaran SPM di Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi : SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Jenis pelayanan dan alokasi anggaran setiap bidang disajikan pada table dibawah ini.

Tabel 6.8
Alokasi Anggaran Rencana Pendanaan Pelaksaan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022

No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	SPM Pendidikan	Pendidikan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3.885.873.114.747	APBD, APBN
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.975.739.294.601	APBD, APBN
		Pendidikan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan Khusus	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Khusus	7.168.450.343.612	APBD, APBN
2	SPM Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	571.035.299.318	APBD, APBN
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	696.726.331.921	APBD, APBN
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	2.432.993.815	APBD
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	4.877.795.170	APBD
3	SPM Pekerjaan Umum	Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.500.000.000	APBD

No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
		Kabupaten/Kota	Minum	(SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
		Penyediaan Pelayanan Pengelolahan Air Limbah Domestic Regional Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	5.800.000.000	APBD
4	SPM Perumahan	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi 2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	412.350.000.000	APBD
5	SPM Trantibumlinas	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Provinsi	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10.536.424.727	APBD, APBN
6	SPM Sosial	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	3.981.176.264	APBD
		Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	19.432.586.704	APBD
		Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Dalam	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	9.905.224.539	APBD

No.	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
		Panti				
		Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	4.332.419.000	APBD
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	10.717.774.363	APBD

Sumber: diolah Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2021

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terkait pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, yaitu:

1. Membebaskan biaya SPP bagi masyarakat Jawa Barat yang bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri. Jumlah siswa yang mendapatkan fasilitas tersebut berjumlah 759.372 siswa, yang terdiri dari 456.319 siswa SMA, 298.212 siswa SMK dan 4.841 siswa SLB. Selain itu, diberikan pula bantuan untuk siswa yang bersekolah di SMA, SMK dan SLB swasta melalui program yang disebut dengan Program PMU atau Pendidikan Menengah Universal kepada 1.247.528 siswa, yang terdiri dari siswa SMA swasta 235.013 orang, 769.054 siswa SMK, 17.392 siswa SLB swasta serta siswa Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 226.069 orang;
2. Adapun untuk Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan berupa anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI). Penerima PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Jumlah masyarakat yang dibantu adalah sejumlah 16.966.876 orang;
3. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin, dilaksanakan dengan melaksanakan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28H Amandemen UUD 1945, rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya

kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan *(backlog)* yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya. Pembangunan perumahan dan permukiman masih dihadapkan pada 3 (tiga) permasalahan pokok yaitu: a) Keterbatasan penyediaan rumah; b) Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai; dan c) Permukiman kumuh yang semakin meluas. Target sasaran perbaikan Rutilahu pada Tahun 2021 adalah sebanyak 31 ribu unit rumah yang tersebar di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat dan target Tahun 2022 adalah sebesar 21.500 unit rumah yang tersebar di 27 kabupaten/kota;

4. Selain itu, guna mencapai pemerataan pembangunan di seluruh pedesaan di Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan intervensi dengan memberikan dana bantuan untuk 5.312 desa, yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, dukungan pelayanan posyandu, serta untuk dukungan operasional komunikasi melalui aplikasi sapawarga; dan
5. Penguatan kebencanaan juga menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022. Hal tersebut diimplementasikan melalui penguatan layanan logistik, mitigasi dan kelembagaan; penyiapan rumah korban bencana, *Buffer Stock* (Perlindungan Sosial Korban Bencana), rehabilitasi daerah irigasi kritis, serta pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

Dalam rangka penanganan rehabilitasi pelayanan sosial dasar, diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, anak terlantar di dalam panti, lanjut usia terlantar di dalam panti, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti. Aktivitas ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam bentuk pelayanan oleh kantor Unit Pelayanan Teknis Dinas yang berjumlah 7 (tujuh) UPTD.

BAB VII
KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan untuk kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita (Visi dan Misi) dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator kinerja pembangunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa kinerja diukur dengan indikator yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Indeks Gini dan Pendapatan Per Kapita. Target Indikator Kinerja Makro tahun 2022 tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1
Proyeksi Indikator Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

No.	Indikator Makro dan Indikator Pembangunan Daerah	Proyeksi	
		2021	2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	72,19	72,57**
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	3,15	5,00*
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	10,45	9,70*
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,77	7,30 – 7,90*
5	Indeks Gini (Poin)	0,402	0,400**
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,21	1,16**
7	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)*	44,02	46,48**

Sumber: *Permendagri 17 Tahun 2021
**RPJMD 2018-2023

Tabel 7.2
Proyeksi Indikator Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

No.	Indikator Pembangunan Daerah	Proyeksi	
		2021	2022
1	Inflasi (%)	3,00	3,00
2	Indeks Williamson (poin)	0,659	0,655
3	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	3.892	3.882*
4	PDRB Per Kapita (ADHK) (Juta Rupiah)	29,70	30,59*
5	PDRB Per Kapita (ADHB) (Juta Rupiah)	44,12	46,70*
6	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun)	10.891	10.937
7	Angkatan Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	73,06	73,09
8	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	8,58	8,60
9	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	12,52	12,54

Sumber: diolah, Bappeda 2021
Keterangan: *Hasil Penyesuaian Permendagri 17 Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, hampir semua indikator tersebut mengalami perbaikan seiring dengan optimisme peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat dan pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagai salah satu penciri tahap pemulihan ekonomi disaat pandemi COVID-19. Pemberlakuan AKB turut menggerakan aktivitas sektor-sektor lapangan usaha yang memberikan dampak kepada perbaikan indikator-indikator makro seperti Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendapatan per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia.

7.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus dipantau dalam rangka memenuhi penilaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023. IKU tersebut dicapai dengan upaya dari seluruh perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat baik yang dapat dihitung secara langsung maupun tidak langsung. Upaya seluruh perangkat daerah memiliki peran yang berbeda-beda terhadap pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat.

Target capaian indikator pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2021 dan 2022 merupakan target RPJMD Tahun 2018-2023. Peningkatan upaya penanganan pandemi COVID-19 yang memasuki fase pemulihan pada tahun 2021 dan tahun 2022, mempengaruhi kinerja pembangunan Provinsi Jawa Barat, sehingga Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Barat tahun 2021 dan 2022 mengalami penyesuaian dengan merujuk pada RPJMD Tahun 2018-2023, yang dirangkum pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.3
Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

NO.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Target	
		2020	2021	2022
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	68,50**	68,60	69,10
2	Indeks Demokrasi (poin)	69,09**	70,79	71,79
3	Persentase Penduduk Miskin (persen)	8,43	7,77	7,30 – 7,90
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	10,46	10,45	9,70
5	Angka Harapan Hidup (tahun)	73,04	73,06	73,09
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	69,48**	69,6	69,8
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	89,26**	89,3	89,42
8	Rata–Rata Lama Sekolah (tahun)	8,55	8,58	8,60
9	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,5	12,52	12,54
10	Indeks Pembangunan Pemuda (poin)	50,00**	50,00	52,00
11	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (persen)	37,69	19,56	24,89
12	Indeks Ketentraman dan Ketertiban (poin)	88,4	72,00	74,00
13	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	1.146,60	1.050	1.100
14	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	39,06	41,00	44,00

NO.	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal	Target	
		2020	2021	2022
15	Indeks Desa Membangun (poin)	0,69	0,70	0,71
16	Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (usulan)	3	0	1
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	61,59	60,78	61,19
18	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	3,87	4,29	4,75
19	Indeks Penggunaan Air (poin)	1,1927	1,1922	1,1912
20	Indeks Risiko Bencana (IRB) (poin)	145,82	149,00	147,00
21	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (poin)	84,80	84,00	84,80
22	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak*	52,28	51,70	52,80
23	Nilai Tukar Petani (NTP) (poin)	101,41	102,25	103,39
24	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (persen)	2,85	2,91	2,99
25	Laju pertumbuhan Sektor Industri (persen)	-4,22	2,78	3,40
26	Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (persen)	-7,94	3,23	4,01
27	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (triliun rupiah)	493,96	501,52	515,31
28	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (persen)	19,41	19,90	20,50
29	Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)	BB**	BB (78,01)	A (80,01)
30	Tingkat efektivitas kerjasama Daerah (persen)	73,43	56,00	58,00

Sumber: Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Keterangan:

**) Data realisasi tahun 2019, menunggu rilis resmi lembaga penyedia data

7.2 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome*) beberapa program. IKK Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 merupakan bagian dari capaian pembangunan jangka menengah periode Tahun 2018-2023.

7.2.1 Indikator Kinerja Kunci Tingkat Daerah (*Impact*)

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak *(impact*) memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah maupun IKU Perangkat Daerah. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak (*impact*) yang digunakan untuk menggambarkan aspek/indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Peningkatan upaya penanganan pandemi COVID-19 yang memasuki fase pemulihan pada tahun 2021 dan tahun 2022, mempengaruhi kinerja pembangunan Provinsi Jawa Barat, sehingga Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Barat tahun 2021 dan 2022 mengalami penyesuaian dengan merujuk kepada RPJMD Tahun 2018-2023, yang dirangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.4
Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tingkat Dampak/*Impact*
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2020	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,82	72,09	72,19	72,57	Indikator Makro
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	-2,63	-2,44	3,15	5,00	Indikator Makro
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	10,58	10,46	10,45	9,70	Indikator Makro
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,48	8,43	7,77	7,30 – 7,90	Indikator Makro
5	Indeks Gini	Poin	0,404	0,403	0,402	0,400	Indikator Makro
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,26	1,26	1,21	1,16	Indikator Makro
7	Pendapatan Per Kapita*	Juta Rupiah	41,50	41,80	44,02	46,48	Indikator Makro
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,82	73,04	73,06	73,09	IKU Pemerintah Daerah/IKU Dinas Kesehatan
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	69,48	69,48**	69,60	69,80	IKU Pemerintah Daerah
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89,26	89,26**	89,30	89,42	IKU Pemerintah Daerah
11	Rata–Rata Lama Sekolah	Tahun	8,35	8,55	8,58	8,60	IKU Pemerintah Daerah
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,20	12,50	12,52	12,54	IKU Pemerintah Daerah
13	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak*	Triliun Rupiah	50,60	52,28	51,70	52,80	IKU Pemerintah Daerah
14	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	83,20	84,80	83,20	83,80	IKU Pemerintah Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2020	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Persen	2,65	2,85	2,91	2,99	IKU Pemerintah Daerah
16	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	-4,49	-4,22	2,78	3,40	IKU Pemerintah Daerah
17	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	-7,96	-7,94	3,23	4,01	IKU Pemerintah Daerah
18	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	490,16	493,96	501,52	515,31	IKU Pemerintah Daerah
19	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Persen	19	19,41	19,90	20,50	IKU Pemerintah Daerah
20	Indeks Kepuasan Pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	indeks	3,51-4 (Baik)	3,22	3,51	3,70	IKU Dinas Pendidikan
21	APM SMA, SMK dan SLB	persen	69,60	68,44	72,56	75,51	IKU Dinas Pendidikan
22 23	Nilai Mutu Pendidikan*						IKU Dinas Pendidikan
	SMA	Nilai (SMA)	N/A	N/A	6,59	6,61	
	SMK	Nilai (SMK)	N/A	N/A	6,51	6,53	
	SLB	Nilai (SLB)	N/A	N/A	4,63	4,83	
24	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada UPT*	Poin	N/A	N/A	N/A	81,26-81,75	IKU Dinas Kesehatan
24	Jumlah RS Provinsi yang terakreditasi paripurna*	RS Terakreditasi	N/A	N/A	2	2	IKU Dinas Kesehatan
25	Prevalensi Stunting	Persen	25,20	26,21	23,20	21,20	IKU Dinas Kesehatan
26	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Kesehatan*	Nilai	N/A	N/A	86,50	87,00	IKU Dinas Kesehatan
27	Tingkat Kemantapan Jalan	persen	79,87	81,54	81,11	82,78	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2020	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Persentase aksesibilitas menuju kawasan potensial dan pusat-pusat kegiatan yang dibangun/ditingkatkan	persen	7,24	7,44	13,23	19,07	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
29	Persentase Ketersediaan Regulasi Penataan Ruang (RTR dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)*	persen	N/A	N/A	56,21	75,57	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
30	Persentase Luasan Pengendalian Pemanfaat Ruang*	persen	N/A	N/A	34,45	45,43	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
31	Persentase Sumber Daya Kontruksi yang terlatih*	persen	N/A	N/A	47,29	78,04	IKU Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
32	Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	persen	0,02	0,02	0,20	0,25	IKU Dinas Sumber Daya Air
33	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	persen	52,20	53,38	54,50	55,50	IKU Dinas Sumber Daya Air
34	Persentase Luas genangan yang tertangani*	persen	N/A	N/A	36,90	57,00	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
35	Tingkat kualitas kawasan permukiman	persen	12,79	12,79	64,50	66,00	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
36	Pemenuhan Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib	persen	63,50	63,50	77,00	83,50	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
37	Tingkat ketersediaan rumah layak	persen	91,86	91,90	92,09	92,41	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
38	Tingkat tertib tata kelola pertanahan*	persen	N/A	N/A	52,24	69,77	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
39	Akses Sanitasi Layak*	persen	N/A	N/A	80,37	83,58	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
40	Akses Air Minum Layak*	persen	N/A	N/A	95,12	96,75	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2020	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Akses Penanganan Sampah di Perkotaan*	persen	N/A	N/A	72,30	77,00	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
42	Rasio Permukiman Layak	Rasio	0,9955	0,9952	0,9958	0,9962	IKU Dinas Perumahan dan Permukiman
43	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat*	Poin	N/A	N/A	80	85	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
44	Laju Penegakan Perda dan Perkada	persen	4,50	4,05	6,00	6,00	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
45	Indeks Kesejahteraan Sosial*	persen	N/A	N/A	39,01	39,67	IKU Dinas Sosial
46	Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi*	Persen	N/A	N/A	70,00	75,00	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
47	Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja*	Persen	62,78	33,14	63,66	64,55	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
48	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan*	Persen	N/A	N/A	63,39	69,73	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
49	Persentase jumlah perusahaan yang diawasi	Persen	20,00	20,25	20,00	20,00	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
50	Persentase transmigran yang ditempatkan*	Persen	N/A	N/A	80,00	85,00	IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
51	Persentase kabupaten/ kota yang melaksanakan 7 prasyarat Pengarusutamaan Gender*	persen	N/A	N/A	88,88	92,59	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
52	Persentase Perempuan di Parlemen provinsi*	persen	N/A	N/A	20,00	20,00	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2020	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Tingkat Keberhasilan penangananan kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (KED) terhadap perempuan	persen	100	100	100	100	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
54	Tingkat keberhasilan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (KED) terhadap perempuan*	persen	N/A	N/A	74,07	85,19	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
55	Tingkat penanganan kasus KED terhadap anak*	persen	N/A	N/A	100	100	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
56	Persentase Kab/ Kota yang memperoleh predikat menuju kab/ Kota layak anak (KLA)	persen	85,18	85,18	88,88	96,22	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
57	Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate*)	anak	2,15	2,55	2,12	2,10	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
58	Indeks Perlindungan Anak*	Nilai	N/A	67,33	67,83	68,53	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan,

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2020	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
59	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	42,8	42,84	42,87	43,07	IKU Dinas Lingkungan Hidup
60	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) *	Poin	N/A	N/A	70,50	73,00	IKU Dinas Lingkungan Hidup
61	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	79,51	79,58	79,71	79,91	IKU Dinas Lingkungan Hidup
62	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Limbah Domestik	persen	0,79	0,80	0,81	0,83	IKU Dinas Lingkungan Hidup
63	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kab/Kota di Jawa Barat	persen	81,83	82,22	82,63	83,47	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
64	Persentase Perkembangan Strata Desa Mandiri*	persen	N/A	N/A	6,34	8,22	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
65	Persentase Perkembangan Strata Desa Tertinggaal*	persen	N/A	N/A	1,10	0	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
66	Presentase Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi*	persen	N/A	N/A	37,00	38,00	IKU Dinas Perhubungan
67	Presentase Terminal Tipe B yang dibangun*	persen	N/A	N/A	3,48	28,57	IKU Dinas Perhubungan
68	Tingkat ketersediaan prasarana dan dukungan fasilitas keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP	persen	38,35	38,35	58,97	86,82	IKU Dinas Perhubungan
69	Tingkat ketersediaan Jaringan Transportasi Massal berbasis Rel	persen	23,80	30,51	34,24	41,14	IKU Dinas Perhubungan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2020	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	persen	90,40	98,15	90,45	90,50	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,1	3,58	3,3	3,5	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
72	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah*	persen	N/A	N/A	80,00	90,00	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
73	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	level	550	610	575	600	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
74	Persentase Koperasi yang mengakses kredit*	persen	N/A	N/A	23,00	26,00	IKU Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
75	Persentase UMKM yang Naik Kelas	persen	4,00	5,03	5,00	6,00	IKU Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
76	Nilai realisasi investasi	Triliun Rupiah	99	120,4	101,97	105	IKU Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
77	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan	poin	83	85,36	85	87	IKU Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
78	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	poin	46,67	46,7**	46,67	46,67	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
79	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	persen	52,00	47,30	54,00	56,00	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
80	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Berkebutuhan Khusus Nasional (PEPARPENAS)	Peringkat	0	0	3	N/A	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
81 82	Peringkat Jawa Barat pada Multievent Nasional:						IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
	a. POPNAS	Peringkat	N/A	N/A	1	N/A	
	b. POPWILNAS	Peringkat	N/A	N/A	N/A	1	

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2020	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
83 83	Peringkat Jawa Barat pada *Multievent* Nasional:						IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
	a. PON	Peringkat	0	0	1	N/A	
	b. PEPARNAS	Peringkat	0	0	1	N/A	
84	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Poin	63,54	63,54	69,00	71,00	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
84	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	persen	14,00	11,00	30,00	45,00	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
85	Persentase Penyelamatan dan Pelestarian arsip Statis	persen	48,00	66,00	48,00	68,00	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
86	Indeks membaca masyarakat	Poin	61,49	61,49	62,00	63,00	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
87	Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal*	Kategori	N/A	N/A	B	BB	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
88	Persentase Akuisisi dan Pelestarian Arsip Statis*	Persen	N/A	N/A	35,00	50,00	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
89	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	988.000	1.389.455	1.014.400	1.041.553,12	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
90	Persentase peningkatan angka konsumsi ikan Jawa Barat	persen	1,10	1,10	1,10	1,10	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
91	Persentase Kawasan konservasi perairan yang dikelola	persen	14,03	19,04	22,27	24,38	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan
92	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan	persen	51,00	51,85	55,00	60,00	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2020	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan						
93	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat yang dilindungi, dikembangkan, dibina dan dimanfaatkan*	persen	N/A	N/A	19,56	24,89	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
94	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	30.000	31.610	30.000	33.000	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
95	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	15.000.000	35.513.885	30.000.000	36.000.000	IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
96	Skor PPH Tingkat Ketersediaan	poin	90,7	92,88	91,6	92,5	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
97	Persentase peningkatan keamanan pangan segar asal tumbuhan sesuai standar mutu dan keamanan pangan*	persen	N/A	N/A	10,27	11,35	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
98 99	Tingkat Konsumsi Pangan:						IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	- energi	kkal/kap/hr	2.150	2.150	2.150	2.150	
	- protein	gr/kap/hr	57	64,9	57	57	
100	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)	Poin	100,1	94,44	101	102,5	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
100 101	Produksi komoditas peternakan (ton):						IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	- Daging	ton	1.021.699	1.021.699*	1.084.574	1.147.449	
	- Telur	ton	609.741	609.741*	630.222	650.702	
	- Susu	ton	335.773	293.490**	372.403	409.032	
102	Persentase Peningkatan mutu produk hewan*	persen	N/A	N/A	10	10	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2020	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
102	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran*	persen	N/A	N/A	80	85	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
103	Produksi tanaman pangan dan hortikultura	ton	12.570.313	13.759.620	12.686.496	12.802.956	IKU Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
104	Laju peningkatan produktivitas komoditas unggulan utama perkebunan	persen	1	2,19	5	5	IKU Dinas Perkebunan
105	NTUP -R	Poin	100	93,59	101,25	102,39	IKU Dinas Perkebunan
106	Indeks Kualitas Tutupan Lahan*	Poin	N/A	N/A	38,8	38,85	IKU Dinas Kehutanan
107	Presentase Tutupan Hutan	persen	40,52	45,43	40,77	41,02	IKU Dinas Kehutanan
108	Nilai Produksi Hasil Hutan*	Rp. Milyar	N/A	N/A	1.892,31	1.911,24	IKU Dinas Kehutanan
109	Jumlah konsumsi listrik di Jawa Barat	GWh	49.315	57.257	51.169	54.169	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
110	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (thdp BAU 2030)	persen	1,84	1,84	1,84	2,45	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
111	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi dan teknis	persen	45	46,65	46	47	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
112	Persentase Sumur Bor yang meningkat muka air tanahnya	persen	2	2,37	2	2	IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
113	PDRB Industri Non Migas	(Rp Triliun)	800	860,07	823,6	856,79	IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
114	Laju Pertumbuhan Ekspor Non Migas	persen	-15,73	-11,18	1,44	2,88	IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2020	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
115	PDRB Sektor Perdagangan	Rp. Triliun	280	303,86	310,23	324,9	IKU Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
116	Persentase Bahan Kebijakan umum pembinaan, Pemahaman, Pengalaman keagamaan	persen	75	75	80	85	IKU Sekretariat Daerah
117	Skoring LPPD Provinsi di Tingkat Nasional	Skor/ nilai	3,31	3,3	3,329	3,344	IKU Sekretariat Daerah
118	Persentase Fasilitas Administrasi Pemerintahan Umum*	persen	N/A	N/A	90	90	IKU Sekretariat Daerah
119	Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti*	persen	N/A	N/A	80	85	IKU Sekretariat Daerah
120	Persentase penataan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan HAM*	persen	N/A	N/A	80	100	IKU Sekretariat Daerah
121	Persentase penyelenggaraan kebijakan perekonomian dan pembangunan*	persen	N/A	N/A	100	100	IKU Sekretariat Daerah
122	Indeks tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah*	indeks	N/A	N/A	70	80	IKU Sekretariat Daerah
123	Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi *	nilai	N/A	N/A	3,94	4,06	IKU Sekretariat Daerah
124	Nilai Manajemen Perubahan	nilai	3,88	3,88	3,45	3,55	IKU Sekretariat Daerah
125	Kategori akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat	predikat	A	A	A	A	IKU Sekretariat Daerah
126	Nilai Penataan Tatalaksana	nilai	3,82	3,82	3,2	3,3	IKU Sekretariat Daerah
127	Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	nilai	4,39	4,39	4,06	4,18	IKU Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2020	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
128	Persentase Dokumen Persyaratan dan Kelayakan Pemekaran Daerah yang Dianalisis	Persen	100	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah
129	Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	Persen	80	84,12	80	80	IKU Sekretariat Daerah
130	Persentase perumusan kebijakan umum serta koordinasi,supervisi, pembinaan, pengendalian dalam aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan perumusan kebijakan umum serta koordinasi, fasilitasi, pengendalian dalam aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti*	Persen	N/A	N/A	90	90	IKU Sekretariat Daerah
131	Kualifiasi Kepuasan Layanan Pimpinan*	Kualifikasi	N/A	N/A	Baik	Baik	IKU Sekretariat Daerah
132	Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	Kualifikasi	Baik	Baik	Baik	Baik	IKU Sekretariat Daerah
133	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal Setda*	Nilai	N/A	N/A	B	B	IKU Sekretariat Daerah
134	Persentase penyelenggaraan fungsi Biro Organisasi secara efektif*	persen	N/A	N/A	93	94	IKU Sekretariat Daerah
135	Indek Kepuasan Layanan Intenal Setda*	kualifikasi	N/A	N/A	Baik	Baik	IKU Sekretariat Daerah
136	Persentase Usulan Daerah Persiapan Otonom yang disetujui DPRD Provinsi*	Jumlah	2	3	2	1	IKU Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2020	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
137	Tingkat dukungan dan fasilitasi	persen	100	100	100	100	IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
138	Indeks kepuasan masyarakat	Skor	3,5	3,18	4	4	IKU Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
139	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Badan Penghubung*	Nilai	N/A	N/A	78	82	IKU Badan Penghubung
140	Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi*	persen	N/A	N/A	28	28	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
141	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
142	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	persen	56,80	54,04	60,49	60,56	IKU Badan Pendapatan Daerah
143	Indeks Sistem Merit	poin	325	375,5	375,5	380,5	IKU Badan Kepegawaian Daerah
144	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi dan STTPL*	persen	N/A	N/A	80	85	IKU Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
145	Persentase Akreditasi Penyelenggaraan Diklat*	persen	N/A	N/A	100	100	IKU Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
146	Persentase hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan Biro Pemprov. Jabar/Pemerintah Kab.Kota di Jabar/Masyarakat/Dunia Usaha/Pihak Lainnya*	persen	N/A	N/A	100	100	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2020	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
147	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat	point	3,309	N/A	4,309	4,344	IKU Inspektorat
148	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Nilai	A	A	A	A	IKU Inspektorat
149	Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Inspektorat
150	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern	persen	3	3	3	3	IKU Inspektorat
151	Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	persen	94	91,80	96	98	IKU Inspektorat
152	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,4	0,4**	0,5	0,55	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
153	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa	persen	0,0198	0,0111	100	100	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
154	Tingkat Bina Demokratisasi*	persen	N/A	N/A	100	100	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
155	Tingkat Bina Politik dan Demokratisasi	Poin	0,0009	0,00099	100	100	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
II. ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	68,10	68,50**	68,60	69,10	IKU Pemerintah Daerah
2	Indeks Demokrasi	Poin	70,7	69,09**	71,79	72,7	IKU Pemerintah Daerah
3	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat	Persen	6,54	37,69	19,56	24,89	IKU Pemerintah Daerah
4	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	70	88,4	72	74	IKU Pemerintah Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target		Keterangan
			2020	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	49	50,00**	50	52	IKU Pemerintah Daerah
6	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Persen	38	39,06	41	44	IKU Pemerintah Daerah
7	Konsumsi listrik per kapita	kWh/ Kapita	1000	1.146,60	1.050	1.100	IKU Pemerintah Daerah
8	Indeks Desa Membangun	Poin	0,68	0,69	0,7	0,71	IKU Pemerintah Daerah
9	Usulan Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru	Usulan	1	3	0	1	IKU Pemerintah Daerah
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	60,57	61,59	60,78	61,19	IKU Pemerintah Daerah
11	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	3,82	3,87	4,29	4,75	IKU Pemerintah Daerah
12	Indeks Penggunaan Air	Persen	1,1927	1,1927	1,1922	1,1912	IKU Pemerintah Daerah
13	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	149,45	145,82	149	147	IKU Pemerintah Daerah
14	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	101,12	101,41	102,25	103,39	IKU Pemerintah Daerah
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	BB**	BB	A	IKU Pemerintah Daerah
16	Tingkat Efektivitas Kerjasama Daerah	Persen	54	73,43	56	58	IKU Pemerintah Daerah

Sumber : Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
Keterangan :

*) Indikator baru digunakan pada periode RPJMD 2018-2023 dan belum pernah digunakan sebelumnya sehingga tidak tersedia data pada tahun tersebut.
**) Data Sementara menggunakan realisasi tahun sebelumnya (2019)

7.2.2 Indikator Kinerja Kunci Tingkat Hasil (*Outcome)*

Indikator Kinerja Kunci Tingkat Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil (*outcome*) merupakan indikator kinerja program yang terdiri dari Program Perangkat Daerah dan Program Prioritas atau Program Pembangunan Daerah. Pandemi COVID-19 mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat, sehingga indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak/*impact* Tahun 2020-2021 mengalami penyesuaian berdasarkan hasil *desk* penyesuaian indikator kinerja daerah bersama seluruh perangkat daerah terkait yang dirangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.5
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/*Outcome*
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
1	**Pendidikan**							
	1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah*	persen	N/A	N/A	72,56	75,51	Dinas Pendidikan
	2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus*	persen	N/A	N/A	45,27	46,43	Dinas Pendidikan
	3	Tingkat pengembangan kurikulum muatan lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus*	persen	N/A	N/A	80	80	Dinas Pendidikan
	4	Persentase Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sesuai Standar*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Pendidikan
	5	Persentase izin Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan masyarakat yang diterbitkan*	persen	N/A	N/A	80	80	Dinas Pendidikan
	6	Persentase dokumen pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah di Provinsi Jawa Barat*	persen	N/A	N/A	80	84	Dinas Pendidikan
2	**Kesehatan**							
	1	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	Persen	N/A	N/A	89	91	Dinas Kesehatan
	2	Presentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas*	Persen	N/A	N/A	85	90	Dinas Kesehatan
	3	Presentase Kabupaten/Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)*	Persen	N/A	N/A	80	85	Dinas Kesehatan
	4	Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi*	Persen	N/A	N/A	73,27	80,19	Dinas Kesehatan
	5	Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular*	Persen	N/A	N/A	63	83	Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2020	2021	2022	
1	2		3	4	5	6	7	8
	6	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan*	Persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Kesehatan
	7	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi*	Persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Kesehatan
	8	Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar*	Persen	N/A	N/A	91	96	Dinas Kesehatan
	9	Persentase Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional*	Persen	N/A	N/A	80	88	Dinas Kesehatan
	10	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi*	Persen	N/A	N/A	80	90	Dinas Kesehatan
	11	Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat*	Persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Kesehatan
	12	Persentasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi*	Persen	N/A	N/A	45	60	Dinas Kesehatan
	13	Persentasi Kab/ Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi*	Persen	N/A	N/A	80	90	Dinas Kesehatan
	14	Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas*	Persen	N/A	N/A	90	92	Dinas Kesehatan
	15	Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)*	Persen	N/A	N/A	90	95	Dinas Kesehatan
	16	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Program Kesehatan di Jawa Barat*	Persen	N/A	N/A	91,67	100	Dinas Kesehatan
	17	Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan Dana BOK dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif*	Persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Kesehatan
	18	Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS)*	hari	N/A	N/A	N/A	9	RSUD Al Ihsan, RSUD Pameungpeuk, RS Paru, RS Kesehatan kerja, RS Jampangkulon
	19	Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) *	hari	N/A	N/A	N/A	21	RS Jiwa
	20	Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan*	persen	N/A	N/A	N/A	90	Labkes

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
	21	Persentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Upaya Peningkatan Kualitas Pelatihan Bidang Kesehatan yang sudah dapat difungsikan*	persen	N/A	N/A	N/A	75	Upelkes
	22	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan*	Persen	N/A	N/A	N/A	59	Dinas Kesehatan
	23	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis*	Persen	N/A	N/A	N/A	60	UPTD RS Jiwa
	24	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan*	Persen	N/A	N/A	N/A	80	UPTD RS Paru
	25	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis*	Persen	N/A	N/A	75	75	UPTD RSUD Jampang Kulon
	26	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis*	Persen	N/A	N/A	75	85,71	UPTD RSUD Pameungpeuk
	27	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis*	Persen	N/A	N/A	30	30	UPTD RS Kesehatan Kerja
	28	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis*	Persen	N/A	N/A	8,31	4,57	UPTD Upelkes
	29	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis*	Persen	N/A	N/A	N/A	75	UPTD Labkes
	30	Persentase Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) *	Persen	N/A	N/A	N/A	88	Dinas Kesehatan
	31	Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas*	Persen	N/A	N/A	N/A	92,60	Dinas Kesehatan
	32	Persentase Kab/Kota yang membangun kemitraan dan kerjasama dengan RS Paru untuk jejaring ekternal TB melalui kegiatan Layad Paru*	Persen	N/A	N/A	N/A	80	UPTD RS Paru
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
	1	Tingkat Pembangunan Sarana Ibadah*	persen	N/A	N/A	75,77	100	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
	2	Persentase Dokumen Perencanaan Teknis yang Siap Bangun*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	3	Persentase Panjang Jalan yang Dilakukan Pengawasan Teknis Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Jalan*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	4	Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik dan Sedang*	km	N/A	N/A	1.914,76	1.953,98	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	5	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Menuju Sentra-Sentra Ekonomi dan Kawasan Potensial*	persen	N/A	N/A	13,23	19,07	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	6	Persentase Sumber Daya Konstruksi yang Terlatih	persen	21,95	28,14	47,29	78,04	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	7	Tingkat Ketersediaan Rencana Tata Ruang*	persen	N/A	N/A	42,86	71,43	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	8	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan*	persen	N/A	N/A	0	100	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	9	Persentase Berita Acara yang diterbitkan dalam rangka persetujuan substansi Ranperda RTR Kabupaten/Kota*	persen	N/A	N/A	69,57	79,71	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	10	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ruang	persen	81,06	81,06	68,90	84,39	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
	11	Persentase SITU yang Terpelihara*	persen	N/A	N/A	10,71	10,83	Dinas Sumber Daya Air
	12	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Sumber Daya Air
	13	Kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Provinsi*	Persen	N/A	N/A	69,65	69,71	Dinas Sumber Daya Air
	14	Persentase Drainase Utama yang dikelola dan dikembangkan*	Persen	N/A	N/A	36,90	57	Dinas Sumber Daya Air
	15	Persentase Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota*	persen	N/A	N/A	50	50	Dinas Perumahan dan Permukiman
	16	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani*	persen	N/A	N/A	70,60	72,60	Dinas Perumahan dan Permukiman

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
	17	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik Oleh SPAL Regional*	persen	N/A	N/A	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
	18	Persentase Luas genangan yang tertangani*	persen	N/A	N/A	36,90	57,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	19	Rasio Pemenuhan Unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung*	Persen	N/A	N/A	77,00	83,50	Dinas Perumahan dan Permukiman
	20	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (% PBL)*	persen	N/A	N/A	64,50	66,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**							
	1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
	2	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani*	persen	N/A	N/A	74	75	Dinas Perumahan dan Permukiman
	3	Persentase Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU*	persen	N/A	N/A	42,40	46,02	Dinas Perumahan dan Permukiman
5	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**							
	1	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan*	persen	N/A	N/A	65	68	Satuan Polisi dan Pamong Praja
	2	Persentase Anggota Linmas Desa di Jawa Barat*	persen	N/A	N/A	70	73	Satuan Polisi dan Pamong Praja
	3	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan*	persen	N/A	N/A	75	95	Satuan Polisi dan Pamong Praja
	4	Persentase Anggota Satpol PP dan PPNS yang kompeten	persen	68,25	68,25	40	45	Satuan Polisi dan Pamong Praja
	5	Persentase Kabupaten Kota yang indeks ketahanan daerahnya meningkat*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	6	Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
	7	Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pasca bencana*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	8	Persentase Pendampingan Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	9	Persentase Pendampingan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	**Sosial**							
`	1	Persentase Pelaku Kesejahteraan Sosial yang Didayagunakan Dalam Penyelenggaraan Kesos*	Persen	N/A	N/A	55	60	Dinas Sosial
	2	Persentase Pelaku Kesejahteraan Sosial yang Didayagunakan Dalam Penyelenggaraan Kesos UPTD PPKS*	persen	N/A	N/A	55	60	Dinas Sosial, UPTD PPKS
	3	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Terakreditasi*	persen	N/A	N/A	28	30	Dinas Sosial
	4	Persentase Daerah yang Difasilitasi Untuk Membentuk Puskesos*	persen	N/A	N/A	95	98	Dinas Sosial
	5	Persentase pekerja migran korban tindak kekerasan yang tertangani*	persen	N/A	N/A	0,75	1,20	Dinas Sosial
	6	Persentase PPKS yang tertangani dan berfungsi sosial di dalam panti*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Sosial, UPTD PRSAMPK, PPSBR, PRSABH, PRSPD, PRSBK, PRSTS, PRSLU
	7	Persentase Fakir Miskin yang tertangani*	persen	N/A	N/A	37,50	38,10	Dinas Sosial
	8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Sosial
	9	Tingkat pengelolaan makam pahlawan*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Sosial
	10	Indeks Partisipasi Sosial*	poin	N/A	N/A	40.00	45.00	Dinas Sosial

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							
1	**Tenaga Kerja**							
	1	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	Persentase Pencari Kerja yang Diuji Kompetensi*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan*	orang	N/A	N/A	84,05	86,15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan*	persen	N/A	N/A	80	85	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	5	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Bidang Ketenagakerjaan*	persen	N/A	N/A	20	20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung Anak**							
	1	Persentase Kab/Kota yang Mendapatkan Advokasi Pengarusutamaan Gender*	persen	N/A	N/A	22,22	37,40	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	2	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)*	persen	N/A	N/A	1,92	1,90	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi (KED) yang Mendapat Layanan Pengaduan Oleh UPTD PPA*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana , UPTD PPA
	4	Jumlah Kab Kota yang Sudah Membentuk Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Di Jawa Barat*	kab/kota	N/A	N/A	16	21	Dinas Pemberdayaan Perempuan,

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
								Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	5	Cakupan Ketersediaan Data Terpilah yang *Up To Date* Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Barat*	persen	N/A	N/A	66	74	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	6	Peningkatan Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Provinsi*	persen	N/A	N/A	25	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	7	Peningkatan Cakupan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Tingkat Provinsi*	persen	N/A	N/A	25	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	8	Ratio Kekerasan Terhadap Anak (Per 10.000 Anak)*	rasio	N/A	N/A	0,27	0,24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	9	Cakupan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Oleh UPTD PPA*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (UPTD PPA)
3	**Pangan**							
	1	Persentase Cadangan Pangan*	persen	N/A	N/A	50	50	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
	2	Persentase Desa Rawan Pangan yang Diintervensi*	persen	N/A	N/A	10	10	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3	Persentase Peningkatan Sertifikasi PSAT*	persen	N/A	N/A	10,27	11,35	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
4	**Pertanahan**							
	1	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Lokasi Lintas Kabupaten/Kota yang Diterbitkan*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
	2	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang Selesai Tepat Waktu*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Perumahan dan Permukiman
	3	Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Pembangunan Strategis Di Jawa Barat*	persen	N/A	N/A	33.33	50	Dinas Perumahan dan Permukiman
	4	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota*	persen	N/A	N/A	20	60	Dinas Perumahan dan Permukiman
5	**Lingkungan Hidup**							
	1	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*	persen	N/A	N/A	50	75	Dinas Lingkungan Hidup
	2	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter COD (Mg/L)	persen	92	136,32	94	97	Dinas Lingkungan Hidup
	3	Persentase Penurunan Konsentrasi Parameter SOX	persen	89	110,74	93	96	Dinas Lingkungan Hidup
	4	Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi dan Mitigasi GRK Kabupaten/Kota	persen	40	60	60	80	Dinas Lingkungan Hidup
	5	Persentase Peningkatan Kampung Iklim	persen	78,57	81	85,71	92,86	Dinas Lingkungan Hidup
	6	Persentase Jumlah Parameter yang Terakreditasi di Setiap Bahan/Produk yang Diuji*	persen	N/A	N/A	81,25	90,62	Dinas Lingkungan Hidup
	7	Persentase Jumlah Sertifikat Kompetensi Teknis yang Diperoleh*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
	8	Persentase Peningkatan Luasan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	persen	96	110,74	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	9	Persentase Pelaporan Pengendalian B3 dan LB3*	persen	N/A	N/A	45,23	71,42	Dinas Lingkungan Hidup
	10	Persentase Peningkatan Dokumen Lingkungan yang Dinilai dan Diawasi Implementasinya	persen	55	89,16	70	85	Dinas Lingkungan Hidup
	11	Persentase Status Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten/Kota*	persen	N/A	N/A	20	60	Dinas Lingkungan Hidup
	12	Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Desa Berbudaya Lingkungan*	persen	N/A	N/A	88,89	100	Dinas Lingkungan Hidup
	13	Persentase Peningkatan Kemitraan Lingkungan	persen	40	40	60	80	Dinas Lingkungan Hidup
	14	Persentase Peningkatan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Pelaku Usaha dan/Kegiatan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	persen	75,13	76,33	80,91	91,71	Dinas Lingkungan Hidup
	15	Persentase Peningkatan Sampah yang Terolah Di TPA/TPST Regional	persen	50	53,78	50	50	Dinas Lingkungan Hidup
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
	1	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	persen	81,83	82,22	81,60	82,42	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	persen	80,80	88,55	81,60	82,42	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	3	Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi	persen	81,23	81,37*	82,35	83,57	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	4	Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan Permendagri*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
	1	Persentase fasilitas penataan desa yang sesuai dengan peraturan perundang undangan*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
	2	Persentase fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan Provinsi*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	3	Persentasi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	4	Persentase fasilitasi Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di desa*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
	1	Persentase Peserta KB Aktif/mCPR*	persen	N/A	N/A	63,27	63,67	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	2	Persentase Pembinaan Keluarga Berencana (KB) yang Telah Dilakukan DINAS P3AKB Provinsi Jawa Barat di Kabupaten/Kota*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
	3	Persentase Pembinaan Ketahanan Keluarga yang Telah Dilakukan DINAS P3AKB Jawa Barat Di Kabupaten Kota*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
9	**Perhubungan**							
	1	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan Lingkup Provinsi*	persen	N/A	N/A	87,69	87,69	Dinas Perhubungan
	2	Nilai V/C Ratio di Jalan Provinsi*	persen	N/A	N/A	0,82	0,82	Dinas Perhubungan
	3	Rasio Konektivitas Provinsi Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah I)*	persen	N/A	N/A	87,69	87,69	Dinas Perhubungan
	4	Rasio Konektivitas Provinsi Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah II)*	persen	N/A	N/A	87,69	87,69	Dinas Perhubungan
	5	Rasio Konektivitas Provinsi Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah III)*	persen	N/A	N/A	87,69	87,69	Dinas Perhubungan

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
	6	Rasio Konektivitas Provinsi Angkutan Jalan (UPTD PPP LLAJ Wilayah IV*	persen	N/A	N/A	87,69	87,69	Dinas Perhubungan
	7	Persentase Lintas Penyeberangan yang Beroperasi*	persen	N/A	N/A	92,59	96,30	Dinas Perhubungan
	8	Jumlah Dokumen Pendukung Pelabuhan Pengumpan Regional yang Disiapkan (UPTD PPP Pelabuhan Laut)*	dokumen	N/A	N/A	10	14	Dinas Perhubungan
	9	Persentase Dermaga yang Terpenuhi Standar (UPTD PPP LL ASDP)*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Perhubungan
	10	Persentase Kebijakan Penetapaan Jaringan Perkeretaapian yang Kewenangan Provinsi*	persen	N/A	N/A	30	60	Dinas Perhubungan
	11	Jumlah Kebijakan Pengembangan Perhubungan yang Dihasilkan*	Dokumen	N/A	N/A	4	3	Dinas Perhubungan
10	**Komunikasi dan Informatika**							
	1	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi*	persen	N/A	N/A	80	80,50	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo*	persen	N/A	N/A	95	98	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi*	persen	N/A	N/A	40	58	Dinas Komunikasi dan Informatika
	4	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan*	persen	N/A	N/A	40	50	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**							
	1	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional*	persen	N/A	N/A	0	7	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	2	Tingkat Kepatuhan Koperasi*	persen	N/A	N/A	3,10	3,70	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	3	Persentase Sertifikat Kesehatan KSP/USP Koperasi*	persen	N/A	N/A	0	50	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
	4	Persentase Wirausaha Menjadi Usaha Mikro*	persen	N/A	N/A	48,40	74,10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	5	Persentase Pertumbuhan SDM Koperasi*	persen	N/A	N/A	33,30	66,60	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	6	Tingkat Koperasi yang Berkualitas*	persen	N/A	N/A	33	35	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	7	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	persen	6,1	-6.24	6,30	6,60	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	8	Persentase Kelembagaan Usaha UMKM*	persen	N/A	N/A	30	32	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
	9	Laju Pertumbuhan Omzet UMKM Binaan	persen	5	0,35	5,50	6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
12	**Penanaman Modal**							
	1	Indikator Daya Saing (Peringkat *Ease Of Doing Business*)*	Peringkat	N/A	N/A	2	2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Informasi Potensi dan Peluang Investasi*	persen	N/A	N/A	10	10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	3	Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu*	persen	N/A	N/A	60	65	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	4	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Investasinya*	persen	N/A	N/A	15	15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	5	Tingkat pemanfaatan data dan informasi penanaman modal*	persen	N/A	N/A	80	84	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	**Kepemudaan dan Olahhraga**							
	1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan*	persen	N/A	N/A	17,30	17,80	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
	2	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan Dalam Kondisi Baik*	persen	N/A	N/A	68	70	Dinas Pemuda dan Olahraga
	3	Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional*	persen	N/A	N/A	2,60	3	Dinas Pemuda dan Olahraga
	4	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri*	persen	N/A	N/A	10,50	11,50	Dinas Pemuda dan Olahraga
	5	Persentase Medali Emas yang Diperoleh Dalam Event Nasional POPNAS*	persen	N/A	N/A	20	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
	6	Persentase Medali Emas yang Diperoleh Dalam Event Nasional POPWILNAS	persen	0	0	0	20	Dinas Pemuda dan Olahraga
	7	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Dalam Kondisi Baik	persen	0	0	80	85	Dinas Pemuda dan Olahraga
	8	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga*	persen	N/A	N/A	10	10	Dinas Pemuda dan Olahraga
	9	Persentase Medali Emas yang Diperoleh Dalam Event Nasional Peparpenas*	persen	N/A	N/A	9	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
	10	Tingkat Partisipasi Masyarakat Jawa barat dalam Kepramukaan*	persen	N/A	N/A	17	17	Dinas Pemuda dan Olahraga
14	**Statistik**							
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	**Persandian**							
	1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah*	persen	N/A	N/A	89,15	93,02	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
16	**Kebudayaan**							
	1	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan (Usulan WBTB Jabar yang ditetapkan sebagai wbtb nasional, Bahasa, Sastra, dan Aksara daerah yang dilestarikan, dan seni budaya yang dilindungi)*	persen	N/A	N/A	18,47	34,48	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola*	persen	N/A	N/A	17,39	26,09	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3	Persentase Benda Koleksi Museum Negeri Sri Baduga yang Dilindungi*	persen	N/A	N/A	19,87	23,51	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17	**Perpustakaan**							
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Membaca*	Poin	N/A	N/A	53	54	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	Tingkat Pemanfaatan Bahan Bacaan*	Poin	N/A	N/A	69	70	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	3	Tingkat Kebiasaan Membaca*	Poin	N/A	N/A	64	65	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	4	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan*	persen	N/A	N/A	19	21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	**Kearsipan**							
	1	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan*	persen	N/A	N/A	15	30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	Tingkat Keberadaan dan Kebutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat*	persen	N/A	N/A	58	65	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	3	Persentase Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
1	**Kelautan dan Perikanan**							
	1	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang Dikelola Sesuai Dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku*	persen	N/A	N/A	79,51	81,51	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2	Jumlah Produksi Garam	ton	245978	41342,98	258.276,90	271.190,75	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap*	ton	N/A	N/A	182.160,00	184.345,92	Dinas Kelautan dan Perikanan
	4	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya*	ton	N/A	N/A	832.240,00	857.207,20	Dinas Kelautan dan Perikanan
	5	Persentase Tingkat Penanganan Kasus Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan*	persen	N/A	N/A	85	85	Dinas Kelautan dan Perikanan
	6	Angka Konsumsi Ikan Jawa Barat	Kg/Kap/Th	29,95	28,04	30,28	30,60	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	**Pariwisata**							
	1	Persentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	persen	2,44	1,47	19,51	24,39	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	2	Persentase seni budaya dan destinasi wisata yang dipromosikan	persen	9,52	52,38	14,29	23,81	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	3	Persentase Sumber Daya Industri Kreatif yang Dikembangkan	persen	11,11	7,40	22,22	25,93	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	**Pertanian**							
	1	Rata-Rata Performa Ternak yang Sesuai Standar*	persen	N/A	N/A	42	43	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	2	Tingkat Pemenuhan Prasarana Peternakan*	persen	N/A	N/A	32	78,60	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	3	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular*	persen	N/A	N/A	4	5	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
	4	Persentase Petugas dan Pelaku Usaha Peternakan yang Meningkat Kinerjanya*	persen	N/A	N/A	25	25	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
	5	Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)*	Ku/Ha	N/A	N/A	57,76	58,26	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	6	Produktivitas Tanaman Hortikultura (Ku/Ha)*	Ku/Ha	N/A	N/A	90,19	90,26	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	7	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pengawasan Sertifikasi Benih*	persen	N/A	N/A	80,59	81,59	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	8	Luas Panen Tanaman Pangan*	Ha	N/A	N/A	1.892.521	1.892.521	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	9	Luas Panen Tanaman Hortikultura*	Ha	N/A	N/A	194.718	196.981	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	10	Indeks Pertamanan (IP)*	persen	N/A	N/A	1,90	1,95	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	11	Persentase Luas Lahan yang Terkena Serangan OPT/DPI*	persen	N/A	N/A	4,50	4,50	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	12	Persentase Penyuluh yang Berprestasi*	persen	N/A	N/A	2,13	2,13	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	13	Persentase Kelompok Tani yang di Bina oleh Penyuluh*	persen	N/A	N/A	56,15	72,20	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	14	Persentase Sumber Daya Manusia Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilatih*	persen	N/A	N/A	20,41	20,41	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
	15	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Balai Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura*	persen	N/A	N/A	88,86	88,86	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	16	Persentase Rekomendasi Teknis Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diterbitkan*	persen	N/A	N/A	-	100	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	17	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Sarana Perkebunan*	persen	N/A	N/A	25	25	Dinas Perkebunan
	18	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Prasarana Perkebunan*	persen	N/A	N/A	25	25	Dinas Perkebunan
	19	Laju Peningkatan Poktan yang terfasilitasi Penanganan Bencana Perkebunan*	persen	N/A	N/A	25	25	Dinas Perkebunan
	20	Laju Peningkatan Perkebunan Besar yang Mendapatkan Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan*	persen	N/A	N/A	50	50	Dinas Perkebunan
	21	Persentase Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Perkebunan yang dibina*	persen	N/A	N/A	75	75	Dinas Perkebunan
4	**Kehutanan**							
	1	Tingkat Ketersediaan Dokumen Arahan Pengelolaan Hutan*	persen	N/A	N/A	71	100	Dinas Kehutanan
	2	Persentase Penanganan Lahan Kritis*	persen	N/A	N/A	3	4	Dinas Kehutanan
	3	Tingkat Kerusakan Hutan*	persen	N/A	N/A	0,70	0,60	Dinas Kehutanan
	4	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan*	persen	N/A	N/A	30	30	Dinas Kehutanan
	5	Persentase Peningkatan Penerimaan Dari Jasa Lingkungan*	persen	N/A	N/A	10	10	Dinas Kehutanan
	6	Persentase Peningkatan Habitat dan Populasi Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Ditangkarkan*	persen	N/A	N/A	5	5	Dinas Kehutanan
	7	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Mengikuti Bimtek/Diklat*	orang	N/A	N/A	75	100	Dinas Kehutanan
	8	Penurunan Nilai Total Suspended Solid (TSS) di Daerah Aliran Sungai*	persen	N/A	N/A	41,55	39,05	Dinas Kehutanan
5	**Energi dan Sumber Daya Mineral**							

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
	1	Rasio Sumur Imbuhan Terhadap Sumur Produksi*	persen	N/A	N/A	15,98	18,31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	2	Persentase Pengambil Air Tanah yang Taat Peraturan*	persen	N/A	N/A	56	58	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur*	persen	N/A	N/A	56	58	Cabang Dinas Wilayah I Cianjur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	4	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor*	persen	N/A	N/A	56	58	Cabang Dinas Wilayah II Bogor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	5	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta*	persen	N/A	N/A	56	58	Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	6	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung*	persen	N/A	N/A	56	58	Cabang Dinas Wilayah IV Bandung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	7	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang*	persen	N/A	N/A	56	58	Cabang Dinas Wilayah V Sumedang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	8	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya*	persen	N/A	N/A	56	58	Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya Dinas

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
								Energi dan Sumber Daya Mineral
	9	Persentase Pengambil Air Tanah yang taat peraturan di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon*	persen	N/A	N/A	56	58	Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	10	Persentase Sample Air Tanah yang Diuji Kualitasnya	persen	0,70	0,70	1,50	2	Cabang Dinas UPTD Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	11	Persentase Usaha Pertambangan yang Tertib Administrasi	persen	67	68,24	58	59	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	12	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	persen	67	44,44	58	59	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah I Cianjur
	13	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	persen	67	78,57	58	59	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah II Bogor
	14	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	persen	67	77,31	58	59	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta
	15	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	persen	67	68,40	58	59	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah IV Bandung

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
	16	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	persen	67	67	58	59	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah V Sumedang
	17	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	persen	67	75	58	59	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya
	18	Persentase Usaha Pertambangan yang tertib administrasi Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	persen	67	67	58	59	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon
	19	Persentase Pengujian Kualitas Bahan Tambang Di Jawa Barat*	persen	N/A	N/A	40	50	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas UPTD Laboratorium
	20	Persentase Usaha Pertambangan yang Tertib Teknis	persen	45	46,65	46	47	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	21	Jumlah Reduksi CO2 Dari Bidang Energi (Tidak Termasuk Sektor Transportasi)	Ton Co2eq	107,17	107,17	932,70	1553,95	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	22	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	SBM (Setara Barel Minyak)	0	0	0	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah I Cianjur
	23	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	SBM (Setara	0	0	0	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
			Barel Minyak)					Dinas Wilayah II Bogor
	24	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	SBM (Setara Barel Minyak)	0	0	0	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta
	25	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	SBM (Setara Barel Minyak)	0	0	0	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah IV Bandung
	26	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	SBM (Setara Barel Minyak)	0	0	0	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah V Sumedang
	27	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	SBM (Setara Barel Minyak)	0	0	0	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya
	28	Jumlah Pemanfaatan EBT di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	SBM (Setara Barel Minyak)	0	0	0	23,81	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon
	29	Persentase Komoditas EBT yang Diuji Unjuk Kinerja Sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan Bidang Energi*	persen	N/A	N/A	50	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	30	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan	persen	59,71	72,86	79,08	90,08	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2020	2021	2022	
1	2		3	4	5	6	7	8
	31	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah I Cianjur*	persen	N/A	N/A	60	80	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah I Cianjur
	32	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Cabang Dinas Wilayah II Bogor*	persen	N/A	N/A	60	80	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah II Bogor
	33	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta*	persen	N/A	N/A	60	80	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta
	34	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah IV Bandung*	persen	N/A	N/A	60	80	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah IV Bandung
	35	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah V Sumedang*	persen	N/A	N/A	60	80	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah V Sumedang
	36	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya*	persen	N/A	N/A	60	80	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VI Tasikmalaya
	37	Tingkat Ketaatan Usaha Bidang Ketenagalistrikan yang Patuh Terhadap Aturan Pada Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon*	persen	N/A	N/A	60	80	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
								Dinas Wilayah VII Cirebon
	38	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran	persen	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,
	39	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas I Cianjur	persen	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah I Cianjur
	40	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas II Bogor	persen	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah II Bogor
	41	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas III Purwakarta	persen	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah III Purwakarta
	42	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas IV Bandung	persen	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah IV Bandung
	43	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas V Sumedang	persen	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah V Sumedang
	44	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas VI Tasikmalaya	persen	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
								Dinas Wilayah VI Tasikmalaya
	45	Persentase Kab/Kota Terfasilitasi Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Wilayah Kerja Cabang Dinas VII Cirebon	persen	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Cabang Dinas Wilayah VII Cirebon
6	**Perdagangan**							
	1	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Urusan Perdagangan*	persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	2	Laju Sarana Distribusi Perdagangan*	persen	N/A	N/A	3	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok*	persen	N/A	N/A	5	5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	4	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas*	milyar USD	N/A	N/A	10,14	10,39	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	5	Persentase Konsumen yang dilayani dan Ditangani*	persen	N/A	N/A	73	80	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	6	Laju Pemasaran Produk Dalam Negeri*	persen	N/A	N/A	6,74	7,89	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	**Perindustrian**							
	1	Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi*	Unit Usaha	N/A	N/A	200	200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	2	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Dipantau dan Dianalisis Dalam Laporan Hasil Pemantauan yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait*	persen	N/A	N/A	1,60	1,60	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3	Persentase Perusahaan Industri Besar dan Perusahaan Kawasan Industri Lintas Kabupaten/Kota Yang Masuk Dalam SII Nas*	persen	N/A	N/A	50	50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	**Transmigrasi**							

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
	1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Penetapannya*	lokasi	N/A	N/A	0	3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	Persentase Perjanjian Kerjasama Bidang Ketransmigrasian yang Direalisasikan	persen	85	0	85	90	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
IV	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							
1	**Sekretariat Daerah**							
	1	Persentase Perangkat Daerah dengan kinerja yang efektif dan efisien*	persen	N/A	N/A	93	94	Sekretariat Daerah/ Biro Organisasi
	2	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup pemerintahan dan otonom daerah yang ditindaklanjuti*	Jumlah	N/A	N/A	2	1	Sekretariat Daerah/ Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	3	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti*	persen	N/A	N/A	85	90	Sekretariat Daerah/ Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti*	persen	N/A	N/A	80	85	Sekretariat Daerah/ Biro Kesra
	5	Peresentase Penyelenggaraan Kebijakan Daerah Dalam Pembentukan Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum*	persen	N/A	N/A	80	100	Sekretariat Daerah/ Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	6	Persentase keselarasan penyusunan kebijakan dan implementasi kebijakan lingkup perekonomian dan pembangunan*	persen	N/A	N/A	62	66	Sekretariat Daerah/ Biro Perekonomian
	7	Level Maturitas UKPBJ*	Level	N/A	N/A	3	3	Sekretariat Daerah/ Biro Pengadaan Barang/Jasa
	8	Kualifikasi dan kompetensi SDM UKPBJ*	persen	N/A	N/A	70	80	Sekretariat Daerah/ Biro

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
								Pengadaan Barang/Jasa
2	**Sekretariat DPRD**							
	1	Tingkat Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD*	persen	N/A	N/A	100	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	2	Tingkat Fasilitasi Kapasitas, Hubungan Kelembagaan DPRD serta Penjaringan Aspirasi*	persen	N/A	N/A	100	100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
V	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							
1	**Perencanaan**							
	1	Rata-Rata Tingkat Kesesuaian Perencanaan Antar Waktu dan Level Pemerintahan*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2	Persentase Sasaran dan Program RKPD yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	3	Persentase Sasaran dan Program RKPD yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	4	Persentase Sasaran dan Program RKPD yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	**Keuangan**							
	1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD Perubahan Provinsi Jawa Barat*	Waktu	N/A	N/A	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	2	Persentase Usulan Pencairan dari Perangkat Daerah dengan Penerbitan SP2D*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
	3	Persentase penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi yang tepat waktu*	Waktu	N/A	N/A	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	4	Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD dan APBD Perubahan yang dievaluasi tepat waktu*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	Persentase Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota yang dievaluasi tepat waktu*	persen	N/A	N/A	80	80	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	6	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan*	persen	N/A	N/A	6	6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	7	Tingkat Kepatuhan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah*	persen	N/A	N/A	80	90	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	8	Persentase pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah*	persen	N/A	N/A	0,26	0,32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	9	Persentase Akurasi Pelaporan Barang Milik Daerah*	persen	N/A	N/A	70	75	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	10	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah*	persen	N/A	N/A	90	92,70	Badan Pendapatan Daerah
3	**Kepegawaian**							
	1	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan ; Pengadaan; Perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi kepegawaian*	poin	N/A	N/A	113	117	Badan Kepegawaian Daerah
	2	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi *	poin	N/A	N/A	40	40	Badan Kepegawaian Daerah
	3	Nilai Kriteria Pengembangan Karir*	poin	N/A	N/A	102,50	103,50	Badan Kepegawaian Daerah
	4	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja, dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin*	poin	N/A	N/A	120	120	Badan Kepegawaian Daerah

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
4	**Pendidikan dan Pelatihan**							
	1	Persentase Jabatan Struktural Bersertifikat Kompetensi dan Ber-STTPL*	persen	N/A	N/A	75	80	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	2	Persentase Pelaksana Bersertifikat Kompetensi dan Ber-STTPL*	persen	N/A	N/A	95	85	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	3	Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan atau STTPL Teknis Umum, Inti, Dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Dan Urusan Pemerintahan Umum*	persen	N/A	N/A	75	80	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	4	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis Dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan Dan Prajabatan,Serta jabatan Fungsional*	persen	N/A	N/A	6	6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Dan Sumber Belajar*	persen	N/A	N/A	3	3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	6	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan program dan kegiatan*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	7	Persentase Ketersediaan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
	8	Persentase Ketersediaan dokumen Akuntansi dan Pelaporan keuangan*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	9	Persentase Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan PNS*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	10	Persentase Ketersediaan dokumen untuk diverifikasi*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	11	Persentase Ketersediaan dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	12	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	13	Persentasi Pemeliharaan Kendaraan*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	14	Persentase Tersedianya Akomodasi Rapat Internal Dan Luar Kantor*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	15	Persentase Pemeliharaan Fasilitas Dan Gedung Kantor*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	16	Persentase Ketersediaan Barang Habis Pakai Kantor*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Pengembangan

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
								Sumber Daya Manusia
	17	Persentase Terpenuhinya Jasa Keamanan Dan Kebersihan Beserta Peralatannya*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	18	Persentase Terpenuhinya Langganan Kantor*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	19	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sewa, Publikasi Dan Dokumentasi Kantor*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	20	Persentase Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	21	Persentase Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	22	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Diklat, Kursus Singkat Dan Bimtek Aparatur*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	23	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana Kerohanian, Sarana Dan Prasarana Olah Raga Serta Pakaian Aparatur, Sarana Dan Prasarana Olah Raga*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**Penelitian dan Pengembangan**							

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
	1	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang Dihasilkan*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Sosial dan Kependudukan yang Dihasilkan*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	3	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan yang Dihasilkan*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	4	Persentase Hasil Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan yang Dihasilkan*	Persen	N/A	N/A	100	100	Dinas Perhubungan
	5	Persentase kegiatan Fasilitasi Pengembangan Inovasi, Tehnologi dan Hasil Kelitbangan*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	**Penghubung**							
	1	Tingkat layanan Hubungan Antar Lembaga, Protokol dan Promosi Informasi yang Difasilitasi*	persen	N/A	N/A	100	100	Badan Penghubung
VI	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							
1	**Inspektorat Daerah**							
	1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Terhadap Perangkat Daerah Provinsi yang Diselesaikan	persen	85	5	90	95	Inspektorat
	2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI yang Diselesaikan*	persen	N/A	N/A	80	80	Inspektorat
	3	Persentase Hasil Reviu Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Ditindaklanjuti*	persen	N/A	N/A	90	95	Inspektorat
	4	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*	persen	N/A	N/A	75	90	Inspektorat
	5	Persentase kegiatan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD- PPK) yang Mencapai Target*	persen	N/A	N/A	96	98	Inspektorat

No.	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)		Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6	7	8
	6	Persentase Pemenuhan Infrasturuktur Kebijakan Peningkatan Kapabilitas APIP	persen	100	100	100	100	Inspektorat
	7	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan*	persen	N/A	N/A	80	80	Inspektorat
VII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							
1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**							
	1	Tingkat Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan*	persen	N/A	N/A	0,0079	0,0094	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2	Tingkat Pembinaan Politik Dalam Negeri*	persen	N/A	N/A	0,0054	0,0064	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	3	Tingkat Pembinaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	persen	N/A	N/A	0,0032	0,0038	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	4	Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya*	persen	N/A	N/A	0,0047	0,0056	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	5	Tingkat Kewaspadaan Daerah dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial*	persen	N/A	N/A	0,004	0,0048	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
Keterangan :
*) Indikator baru digunakan pada periode RPJMD 2018-2023 dan belum pernah digunakan sebelumnya sehingga tidak tersedia data pada tahun tersebut.
**) Data Sementara menggunakan realisasi tahun sebelumnya (2019)

BAB VIII
P E N U T U P

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dengan tema "**Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian**".

Perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 diimplementasikan dengan:

1. Tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah dengan 7 (tujuh) tujuan dan 21 sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program)*, serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2022;
3. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, dana umat, dan hibah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Jawa Barat;
4. Melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemulihan ekonomi dan mencapai target sasaran pembangunan guna mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Perwujudan prioritas pembangunan tersebut melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan tahun 2022 selain diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2022, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Sinergi multipihak dan koordinasi yang efektif, antar pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, dan media dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan berbagai sektor;
2. Penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022 mempedomani Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
3. RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, serta Rancangan APBD Tahun 2022;
4. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai manfaat tinggi bagi masyarakat Jawa Barat; dan
5. Pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat.

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pemantapan daya saing daerah menuju kemandirian.

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL